

**PENERAPAN TATA KELOLA DI KEBUN KARET GUNUNG
GAMBIR PTPN NUSANTARA 1 REGIONAL 5 DESA
AENGSONO KECAMATAN SUMBERBARU
KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

TESIS



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

SITI NUR FADILAH
NIM. 233206060010

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
2025**

**PENERAPAN TATA KELOLA DI KEBUN KARET GUNUNG
GAMBIR PTPN NUSANTARA 1 REGIONAL 5 DESA
AENSONO KECAMATAN SUMBERBARU
KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi Syari'ah (M.E)



Oleh:

SITI NUR FADILAH
NIM. 233206060010

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
2025**



PERSETUJUAN

Tesis berjudul : "PENERAPAN TATA KELOLA DI KEBUN KARET GUNUNG GAMBIR PTPN NUSANTARA 1 REGIONAL 5 DESA AENGSONO KECAMATAN SUMBERBARU KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM" yang disusun oleh, Siti Nur Fadilah NIM. 233206060010 ini telah disetujui untuk diajukan ke Pascasarjana UIN KHAS Jember dan diajukan di hadapan Dewan Penguji Tesis.

Jember, ²⁸⁻⁵⁻ 2025
Pembimbing I


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Dr. Hi. Mahmudah, S.Ag., M.E.I
NIP.197507021998032002
ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pembimbing II


Dr. Siti Masrohatin, S.E., M.M
NIP. 197806122009122001

PENGESAHAN

Tesis dengan judul "Penerapan Tata Kelola Di Kebun Karet Gunung Gambir Ptpn Nusantara 1 Regional 5 Desa Kaliglagah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Perspektif Ekonomi Islam". Yang ditulis oleh Siti Nur Fadilah NIM 233206060010 ini telah dipertahankan didepan dewan penguji tesis Pascasarjana Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Pada hari Jum'at Tanggal 21 Maret 2025 dan diterima sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E.)

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Nikmatul Masruroh, M.E.I
NIP. 198209222009012005

Anggota:

- a. Penguji Utama : Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP. 196812261996031001
- b. Pembimbing I : Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I
NIP. 197507021998032002
- c. Pembimbing II : Dr. Siti Masrohatin, S.E., M.M
NIP. 197806122009122001

Jember, 19 Juni 2025

Mengesahkan

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Prof. Dr. H. Mashudi, M.Pd.
NIP. 196901312001121003



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Nur Fadilah
NIM : 233206060010
Prodi : Ekonomi Syariah
Universitas : Pascasarjana UIN Kiai
Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul **“Penerapan Tata Kelola Kebun Karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Aengsono Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Perspektif Ekonomi Islam”** merupakan hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan keaslian tulisan tesis ini, dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jember, 20 Mei 2024
Saya yang menyatakan



Siti Nur Fadilah
NIM.233206060010



ABSTRAK

Siti Nur Fadilah, 2025. Penerapan tata kelola di kebun karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Kaliglagah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Perspektif Ekonomi Islam. Tesis Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Khas Jember. Pembimbing 1: Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I. Pembimbing II : Dr. Siti Masrohatin, S.E.,M.M.

Kata Kunci: Tata Kelola, Perspektif Ekonomi Islam, Kebun Karet.

Perkebunan karet merupakan salah satu komoditas pertanian yang strategis bagi perekonomian Indonesia, khususnya di Jawa Timur. PTPN Nusantara XII (Persero) Jember salah satu badan usaha milik Negara (BUMN). Kebun Karet Gunung Gambir di Desa Kaliglagah, memiliki potensi besar namun menghadapi tantangan tata kelola. Penelitian ini penting untuk meningkatkan produksi penerapan tata kelola kebun karet Gunung Gambir harus dilakukan secara sistematis dan terus-menerus untuk meningkatkan kinerja perusahaan perkebunan milik negara. Berdampak pada pendapatan petani.

Penelitian ini difokuskan pada: 1) Bagaimana penerapan tata kelola secara keterbukaan (*transparency*)?. 2) Bagaimana penerapan tata kelola secara akuntabilitas (*accountability*)?. 3) Bagaimana penerapan tata kelola secara tanggung jawab (*responsibility*)?. 4) Bagaimana penerapan tata kelola secara kemandirian (*independenc*)?. 5) Bagaimana penerapan tata kelola secara kewajaran (*Fairness*)?. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif jenis pendekatan dalam penelitian kualitatif menggunakan jenis studi kasus (*case study*). Lapangan di kebun karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Aengsono Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember peneliti melakukan pengamatan pada suatu fenomena. Observasi yang dilakukan biasanya partisipan pasif. Analisis yang dilakukan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif dilakukan secara naratif yang mana peneliti mengumpulkan data berupa cerita, narasi. misalnya dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi menurut Miles dan Huberman. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi metode data yang berarti membandingkan, mengecek ulang darurat kepercayaan suatu informan yang diperoleh melalui sumber yang berbeda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, tata kelola secara keterbukaan (*transparency*) memiliki keterkaitan yang erat dengan nilai siddiq dengan menunjukkan sikap jujur dalam setiap kegiatan oprasionalnya. *Kedua*, tata kelola secara akuntabilitas (*accountability*) selaras dengan nilai amanah yang merupakan tanggung jawab utama yang diemban oleh setiap pimpinan dan karyawan. *Ketiga*, tata kelola secara tanggung jawab (*responsibility*) dikaitkan dengan nilai fathonah atau kecerdasan yang mencerminkan kemampuan organisasi dalam memahami dan mematuhi peraturan yang ada. *Keempat*,tata kelola secara kemandirian (*independency*) mencerminkan perpaduan nilai amanah dan fathonah dimana pengelolaan organisasi dilakukan secara mandiri dan bijaksana tanpa terpengaruh oleh pengaruh eksternal sedangkan memadukan amanah yaitu kepercayaan dalam menjalankan tugas. *Kelima*, penerapan tata kelola secara kewajaran (*fairness*) memiliki hubungan erat dengan sifat tabligh yaitu menyampaikan kebenaran dan bertindak adil dalam setiap intraksi.



ABSTRACT

Siti Nur Fadilah, 2025. The Application of Governance in the Gunung Gambir Rubber Plantation at PTPN Nusantara 1 Regional 5, Kaliglagah Village, Sumberbaru Subdistrict, Jember Regency: An Islamic Economic Perspective. Thesis for the Sharia Economics Program, Postgraduate Program, UIN Khas Jember. Supervisor 1: Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I. Supervisor II: Dr. Siti Masrohatin, S.E., M.M.

Keywords: Governance, Islamic Economic Perspective, Kebun Karet.

Rubber plantation are one of the strategic agricultural commodities for Indonesia's economy, particularly in East Java. PTPN Nusantara XII (Persero) Jember is one of the state-owned enterprises (SOEs). The Gunung Gambir Rubber Plantation in Kaliglagah Village has great potential but faces governance challenges. This research is important to improve production. The implementation of governance at the Gunung Gambir Rubber Plantation must be carried out systematically and continuously to enhance the performance of state-owned plantation companies, thereby impacting farmers' income.

This study focuses on: 1) How is transparency applied in governance?. 2) How is accountability applied in governance?. 3) How is responsibility applied in governance?. 4) How is independence applied in governance?. 5) How is fairness applied in governance?. This study uses qualitative research with a descriptive approach, specifically a case study approach within qualitative research. The fieldwork was conducted at the Gunung Gambir rubber plantation in PTPN Nusantara 1 Regional 5, Aengsono Village, Sumberbaru Subdistrict, Jember District, where the researcher observed a phenomenon. The observations conducted typically involved passive participants. The analysis used qualitative descriptive data analysis conducted narratively, where the researcher collected data in the form of stories and narratives, such as from interviews, observations, and documentation, according to Miles and Huberman. Data validity uses triangulation of data sources and triangulation of data methods, which means comparing and rechecking the credibility of an informant obtained through different sources.

The results of this study indicate that first, governance in terms of transparency is closely related to the value of *siddiq*, demonstrating honesty in all operational activities. Second, governance in terms of accountability aligns with the value of *amanah*, which is the primary responsibility borne by every leader and employee. Third, governance in terms of responsibility is associated with the value of *fathonah* or intelligence, which reflects the organization's ability to understand and comply with existing regulations. Fourth, governance in terms of independence (Independency) reflects a combination of the values of *amanah* and *fathonah*, where organizational management is carried out independently and wisely without being influenced by external factors, while combining *amanah*, which is trust in carrying out duties. Fifth, the application of governance based on fairness (fairness) is closely related to the nature of *tabligh*, which involves conveying truth and acting fairly in every interaction.



الملخص البحث

سي تي نور فضيلة، الف وخمسة وعشرون . تنفيذ الحوكمة في مزرعة غونونغ غامبير للمطاط في قرية كاليغلاغاه الإقليمية 5 في قرية كاليغلاغاه الإقليمية ، مقاطعة سومبربارو الفرعية، محافظة جمبير في منظور الاقتصاد الإسلامي. الأطروحة. برنامج الدراسات العليا لدراسة الاقتصاد الشرعي في جامعة إندونيسيا خاس جمبر. المشرف : د. حاج محمود، س. أ. م. المشرف الثاني: د. سي تي مسروهتين، س. أ. م.

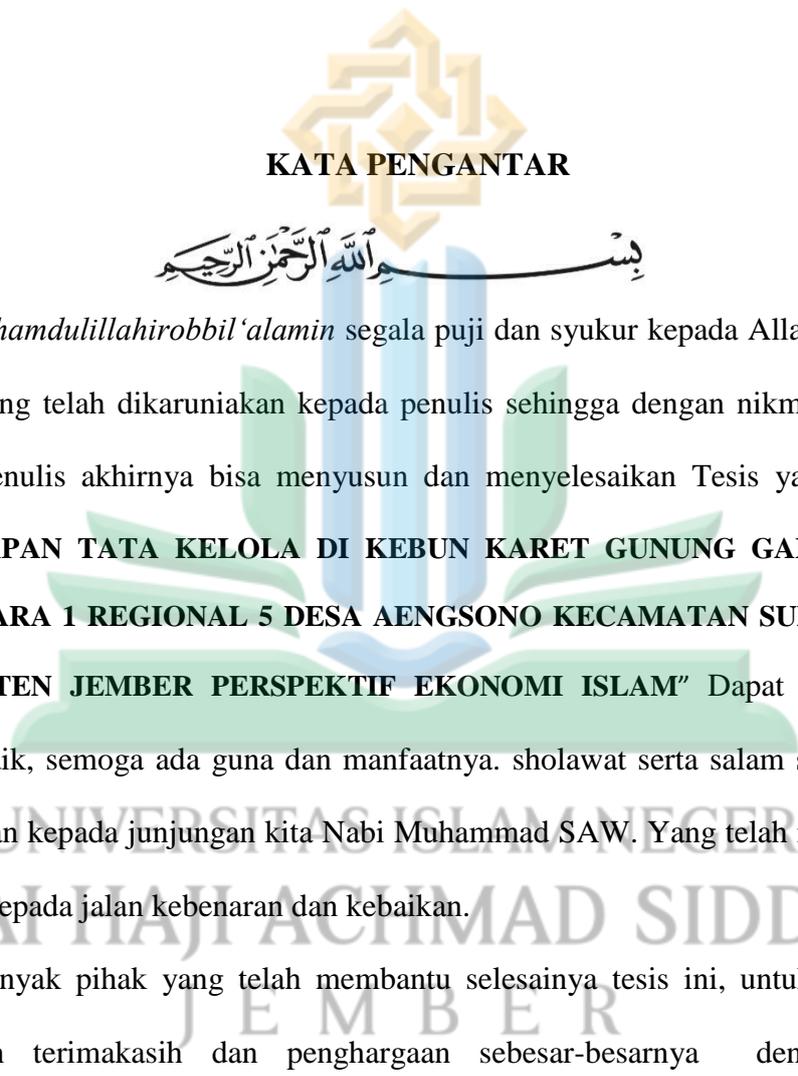
الكلمات المفتاحية الحوكمة، المنظور الاقتصادي الإسلامي

تعد مزارع المطاط إحدى السلع الزراعية الاستراتيجية للاقتصاد الإندونيسي، خاصة في جاوة الشرقية. شركة هي إحدى الشركات المملوكة للدولة وتتمتع مزرعة غونونغ غامبير للمطاط في قرية كاليغلاغاه بإمكانيات كبيرة ولكنها تواجه تحديات في مجال الحوكمة. هذا البحث مهم بالنظر إلى أن انخفاض أسعار المطاط له تأثير على دخل المزارعين

والغرض من هذا البحث هو وصف تطبيق الحوكمة في الشفافية. تطبيق الحوكمة في المساءلة. تطبيق الحوكمة بالمسؤولية (المسؤولية). تطبيق

الحوكمة في الاستقلالية (الاستقلالية). تطبيق الحوكمة بالعدالة (الإنصاف) الحوكمة وفق المنظور الإسلامي. إن منهج البحث المستخدم هو المنهج الوصفي الكيفي ونوع البحث الميداني، أما أسلوب جمع البيانات فهو عن طريق الملاحظة والمقابلات والتوثيق. في هذه الدراسة، استخدم الباحثون في هذه الدراسة أسلوب تثلث المصادر، وتقنية التثليث. والنظرية المستخدمة هي نظرية تطبيق الحوكمة الرشيدة للشركات في إندونيسيا (روسديانتو) و (إيكو سودارمانتو)، محمد صلى الله عليه وسلم: الأعمال عملاء النبي (مصطفى كمال روكان).

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن الطبيعة المثالية للرسول تتكون من الصديق والأمانة والتبليغ والفتونة كونها أساسًا مهمًا في حوكمة مزارع المطاط، فتطبيق الحوكمة في الانفتاح (الشفافية) له علاقة وثيقة بقيمة الصديق من خلال إظهار موقف صادق في كل نشاط تشغيلي. إن تطبيق الحوكمة بالمساءلة يتماشى مع قيمة الصدق التي تعتبر المسؤولية الرئيسية التي يقوم بها كل قائد وموظف. ويرتبط تطبيق الحوكمة بالمسؤولية بقيمة الفطنة أو الذكاء التي تعكس قدرة المنظمة على فهم الأنظمة القائمة والامتثال لها. ويعكس تطبيق الحوكمة بالاستقلالية (الاستقلالية) مزيجًا من قيمتي الثقة والفتونة حيث تتم إدارة المنظمة باستقلالية وحكمة دون التأثير بالمؤثرات الخارجية والذكاء في الاستجابة للمواقف، مع الجمع بين الثقة، أي الثقة في تنفيذ المهام. إن تطبيق الحوكمة في الإنصاف (الإنصاف) له علاقة وثيقة بطبيعة التبليغ، أي نقل الحقيقة والتصرف بعدل في كل معاملة. يمكن لحوكمة الشركات أن تأخذ العبرة والقدوة من طبيعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؛ وبالنسبة لأصحاب المصالح، يمكن أن تكون مرجعًا لتحسين أداء الشركات في المستقبل؛ وبالنسبة للمجتمع، يمكن أن يتعلموا ويقتدوا برسول الله في الحياة اليومية .



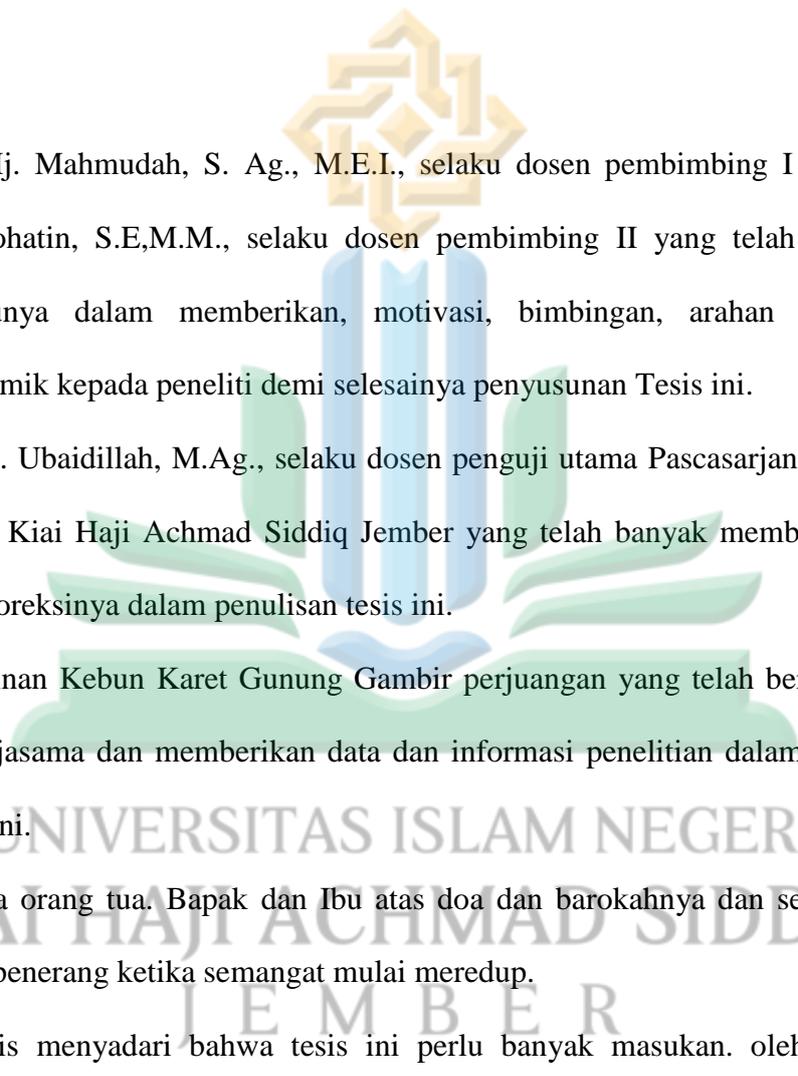
KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada penulis sehingga dengan nikmat Sehat dan sempat penulis akhirnya bisa menyusun dan menyelesaikan Tesis yang berjudul: **“PENERAPAN TATA KELOLA DI KEBUN KARET GUNUNG GAMBIR PTPN NUSANTARA 1 REGIONAL 5 DESA AENGSONO KECAMATAN SUMBERBARU KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”** Dapat terselesaikan dengan baik, semoga ada guna dan manfaatnya. sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang telah membimbing manusia kepada jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang telah membantu selesainya tesis ini, untuk itu penulis sampaikan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya dengan ucapan *jazakumuallah Khoiran Jaza'*, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M., CPEM. selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah memberikan ijin dan bimbingan yang bermanfaat.
2. Prof. Dr. H. Mashudi, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana UIN KHAS Jember yang telah memberikan memberikan ijin dan bimbingan yang bermanfaat.
3. Dr. Nikmatul Masruroh M.E.I. selaku Ketua Program Studi (Kaprodi) Ekonomi Syariah (ES) dan sekaligus sebagai ketua penguji Pascasarjana Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah banyak memberikan saran, dan koreksinya dalam penulisan tesis ini.

- 
4. Dr. Hj. Mahmudah, S. Ag., M.E.I., selaku dosen pembimbing I dan Dr. Siti Masrohatin, S.E,M.M., selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan, motivasi, bimbingan, arahan dan nasehat akademik kepada peneliti demi selesainya penyusunan Tesis ini.
 5. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag., selaku dosen penguji utama Pascasarjana Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah banyak memberikan saran, dan koreksinya dalam penulisan tesis ini.
 6. Pimpinan Kebun Karet Gunung Gambir perjuangan yang telah berkenan untuk bekerjasama dan memberikan data dan informasi penelitian dalam penyusunan tesis ini.
 7. Kedua orang tua. Bapak dan Ibu atas doa dan barokahnya dan selalu menjadi obor penerang ketika semangat mulai meredup.
Penulis menyadari bahwa tesis ini perlu banyak masukan. oleh karena itu, penulis berharap sumbangsih pemikiran, kritik, dan saran yang kostruktif demi kesempurnaan tesis ini. Semoga semua amal kita diterima oleh Allah amin.

Jember, 25 Mei 2025

SITI NUR FADILAH
NIM. 233206060010



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	16
E. Ruang Lingkup Dan Keterbatasan Penelitian	17
F. Definisi Istilah.....	18
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	22
A. Penelitian Terdahulu	22
B. Kajian Teori	34
1. Konsep Tata Kelola (<i>Good Corporate Governance</i>).....	34
2. Ruang Lingkup Tata Kelola (<i>Good Corporate Governance</i>)....	36

3. Prinsip- prinsip Tata Kelola (<i>Good Corporate Governance</i>)...37	
4. Tujuan Prinsip-prinsip Tata Kelola (<i>Good Corporate Governance</i>).....	41
5. Manfaat Prinsip-prinsip Tata Kelola (<i>Good Corporate Governance</i>)	42
6. Tata Kelola (<i>Good Corporate Governance</i>) dalam perspektif Islam	43
C. Kerangka Konseptual.....	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	50
B. Lokasi Penelitian.....	51
C. Kehadiran Peneliti.....	52
D. Subjek Penelitian	53
E. Teknik Pengumpulan Data.....	55
F. Analisis Data.....	58
G. Teknik Keabsahan Data	62
H. Tahapan-tahapan Penelitian	64
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	68
A. Penyajian Data dan Analisis Data.....	68
B. Pemaparan Data	73
BAB V PEMBAHASAN.....	105
A. Penerapan Tata Kelola Secara Keterbukaan (<i>Transparency</i>) di kebun karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1	

Regional 5 Desa Aengsono Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Perspektif Ekonomi Islam	105
B. Penerapan Tata Kelola Secara Akuntabilitas (<i>Accountability</i>) Di Kebun Karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Kaliglagah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Perspektif Ekonomi Islam	109
C. Penerapan Tata Kelola Secara Tanggung Jawab (<i>Responsibility</i>) Di Kebun Karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Kaliglagah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Perspektif Ekonomi Islam	114
D. Penerapan Tata Kelola Secara Kewajaran (<i>Fairness</i>) Di Kebun Karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Kaliglagah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Perspektif Ekonomi Islam	117
E. Penerapan Tata Kelola Secara Kemandirian (<i>Independency</i>) Di Kebun Karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Kaliglagah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Perspektif Ekonomi Islam	120
BAB VI PENUTUP	133
A. Kesimpulan	133
B. Saran	138
DAFTAR PUSTAKA	140
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Perkembangan Produksi Kebun Karet Tahun 2024-2025..	7
Tabel 5.1 Hubungan Keterbukaan- <i>Shiddiq</i>	125
Tabel 5.2 Hubungan Akuntabilitas- <i>Amanah</i>	126
Tabel 5.3 Hubungan <i>Responsibility</i> – <i>Fathanah</i>	128
Tabel 5.4 Hubungan Kemandirian – <i>Amanah</i> Dan <i>Fathanah</i>	129
Tabel 5.5 Hubungan – Kewajaran Dan <i>Tabligh</i>	131

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Skema Tahapan-tahapan Peneliti	67
Gambar 4.1 Struktur PT. Kebun Karet Gunung Gambir	73
Gambar 4.2 Penerapan Tata Kelola Secara Keterbukaan (<i>transparency</i>) ..	81
Gambar 4.3 Penerapan Tata Kelola Secara Akuntabilitas (<i>accountability</i>)	87
Gambar 4.4 Penerapan Tata Kelola Secara Tanggung Jawab (<i>responsibility</i>)	99
Gambar 4.5 Penerapan Tata Kelola Secara kewajaran (<i>fairness</i>).....	81
Gambar 4.6 Penerapan Tata Kelola Secara kemandirian (<i>independency</i>)...	104

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

No	Arab	Indonesia	Keterangan	Arab	Indonesia	Keterangan
1	ا	‘	Koma di atas	ط	t}	te dg titik dibawah
2	ب	B	Be	ظ	Z	Zed
3	ت	T	Te	ع	‘	Koma diatas terbalik
4	ث	Th	te ha	غ	Gh	ge ha
5	ج	J	Je	ف	F	Ef
6	ح	h	ha dengan titik dibawah	ق	Q	Qi
7	خ	Kh	ka ha	ك	K	Ka
8	د	D	De	ل	L	El
9	ذ	Dh	de ha	م	M	Em
10	ر	R	Er	ن	N	En
11	ز	Z	Zed	و	W	We
12	س	S	Es	ه	H	Ha
13	ش	Sh	es ha	ع	‘	Koma Diatas
14	س	sh	es dg titik dibawah	ي	Y	es dg titik dibawah
15	ط	d	de dg titik dibawah	-	-	de dg titik di bawah



BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkebunan karet merupakan salah satu komoditas pertanian yang strategis di Indonesia, terutama di Jawa Timur. PTPN Nusantara XII (Persero) Jember merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang pertanian, termasuk perkebunan karet.¹ Kebun karet Gunung Gambir, yang telah ditanam sejak tahun 1918, 1823, dan 1927, merupakan salah satu kebun milik PTPN Nusantara XII yang berlokasi di Jember. Tanaman karet merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. Lateks yang dihasilkan dari karet dapat dijadikan bahan baku untuk berbagai produk seperti gelang, kabel, sepatu serta berbagai produk lainnya.² Sektor pertanian, perhutanan, mempunyai peranan sangat penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari kontribusinya terhadap produk domestik Bruto (PDB) yang cukup besar yaitu 12,4 persen pada tahun 2022-2023 atau merupakan urutan kedua setelah sektor industri pengolahan.³

Kondisi kebun karet di Jawa Timur, seperti di Kabupaten Jember, memiliki potensi yang besar dalam penerapan tata kelola yang efektif masih menjadi tantangan. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa harga

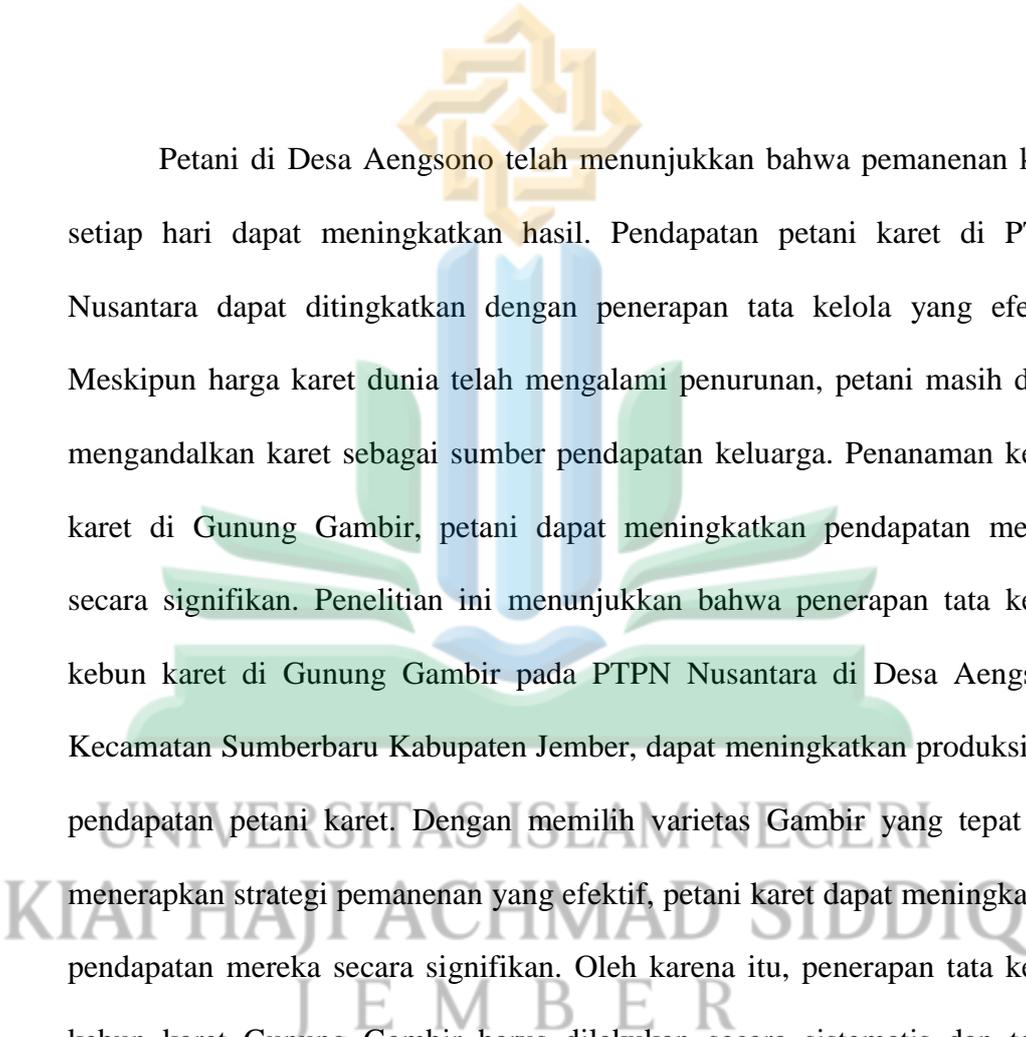
¹ Dedi Arman, "Perkebunan Karet Dan Kebangkitan Ekonomi Di Afdeling Indragiri Tahun 1920", *Jurnal Ilmu Dan Budaya*, 1 (Juni, 2023), 33-34.

² Raditya Pratama Giralda and Rizky Rahmadi, "Efektivitas Herbisida Parakuat Diklorida Dalam Mengendalikan Gulma Perkebunan Karet", *Jurnal Tanaman Pangan Holtikultura*, 1 (Oktober, 2023), 3-4.

³ Agus Satosa, "Permasalahan Pengembangan Karet Di Indonesia", *Ilmu Dan Budaya*, 5 (Mei, 2018), 5-6

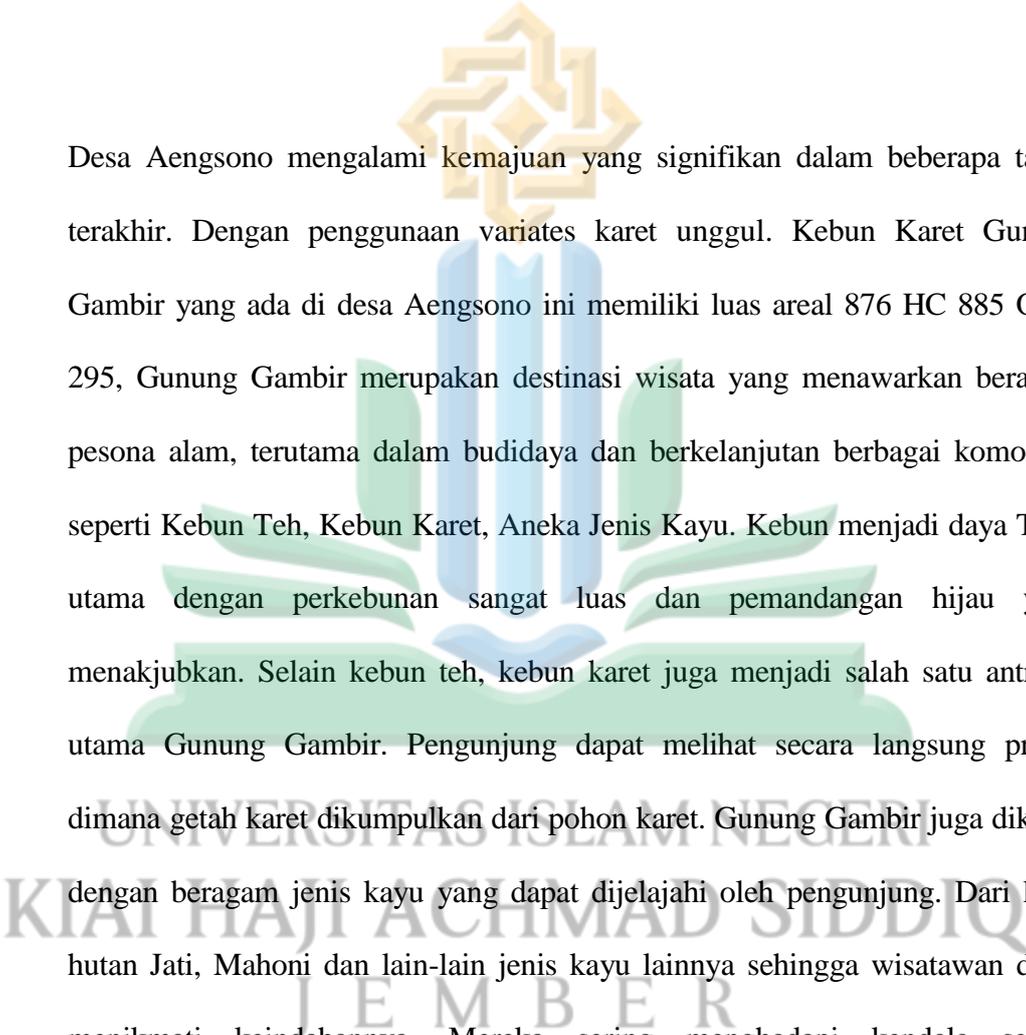
karet mengalami penurunan drastis sejak tahun 2013 telah berdampak pada pendapatan petani karet di Jawa Timur. Tanaman karet biasanya dipanen setelah 5 tahun. Petani di Desa Aengsono Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, telah menunjukkan bahwa tanaman kebun karet Gunung Gambir dapat memberikan pendapatan yang lebih tinggi. Penerapan PTPN Nusantara di Desa Aengsono, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, memiliki potensi besar dalam penerapan tata kelola kebun karet Gunung Gambir. Perusahaan ini harus menerapkan strategi yang efektif untuk meningkatkan produksi dan pendapatan. Kriteria Varietas Gambir yang digunakan harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu berdaya kecambah tinggi > 80%, memiliki vigor yang baik, murni tidak tercampur oleh variates lain, dan sehat bebas organisme pengganggu tanaman. Selain itu, varietas Gambir harus beradaptasi dengan baik di dataran rendah < 200 meter dari permukaan laut (MDPL) sesuai dengan agroekologi tanaman karet. Penerapan tata kelola kebun karet Gunung Gambir di PTPN Nusantara harus dilakukan secara sistematis. Hal ini termasuk dalam pengelolaan lahan yang efektif, pengawasan hama dan penyakit, serta pemanenan yang teratur. Perkembangan kebun karet di Jember dari tahun 2023-2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam produktivitas dan kualitas karet. Mencangkup penggunaan Variates tanaman karet yang sangat unggul dengan luas 13.185-15.139 yang menghasilkan hasil memuaskan. Selain itu, praktik manajemen kebun yang efektif dan tata kelola yang baik telah berkontribusi pada pertumbuhan yang berkelanjutan dan meningkatkan pendapatan bagi petani karet di daerah Jember.⁴

⁴ Laporan Tahunan BPS Tahun 2023-2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table?subject=557>



Petani di Desa Aengsono telah menunjukkan bahwa pemanenan karet setiap hari dapat meningkatkan hasil. Pendapatan petani karet di PTPN Nusantara dapat ditingkatkan dengan penerapan tata kelola yang efektif. Meskipun harga karet dunia telah mengalami penurunan, petani masih dapat mengandalkan karet sebagai sumber pendapatan keluarga. Penanaman kebun karet di Gunung Gambir, petani dapat meningkatkan pendapatan mereka secara signifikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan tata kelola kebun karet di Gunung Gambir pada PTPN Nusantara di Desa Aengsono Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, dapat meningkatkan produksi dan pendapatan petani karet. Dengan memilih varietas Gambir yang tepat dan menerapkan strategi pemanenan yang efektif, petani karet dapat meningkatkan pendapatan mereka secara signifikan. Oleh karena itu, penerapan tata kelola kebun karet Gunung Gambir harus dilakukan secara sistematis dan terus-menerus untuk meningkatkan kinerja perusahaan perkebunan milik negara. Sektor pertanian merupakan sektor yang cukup kuat menghadapi guncangan ekonomi ternyata dapat diandalkan dalam pemulihan perekonomian nasional. Salah satu sub sektor yang cukup besar potensinya adalah sub sektor perkebunan. Kontribusi sub sektor perkebunan dalam PDB yaitu sekitar 3,76 persen pertahun atau merupakan urutan pertama disektor pertanian. Sub sektor ini merupakan penyedia bahan baku untuk sektor industri, penyerap tenaga kerja, dan penghasil devisa.⁵ Secara Geografis Desa Aengsono Kecamatan Sumberbaru wawancara dengan bapak Sugianto perkembangan kebun karet di

⁵ Amalia Asininggar, *Statistik Karet Indonesia* (Jakarta: BPS-Statistik Indonesia, 2023), 3-4



Desa Aengsono mengalami kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan penggunaan varietas karet unggul. Kebun Karet Gunung Gambir yang ada di desa Aengsono ini memiliki luas areal 876 HC 885 OHK 295, Gunung Gambir merupakan destinasi wisata yang menawarkan beragam pesona alam, terutama dalam budidaya dan berkelanjutan berbagai komoditas seperti Kebun Teh, Kebun Karet, Aneka Jenis Kayu. Kebun menjadi daya Tarik utama dengan perkebunan sangat luas dan pemandangan hijau yang menakjubkan. Selain kebun teh, kebun karet juga menjadi salah satu antraksi utama Gunung Gambir. Pengunjung dapat melihat secara langsung proses dimana getah karet dikumpulkan dari pohon karet. Gunung Gambir juga dikenal dengan beragam jenis kayu yang dapat dijelajahi oleh pengunjung. Dari kayu hutan Jati, Mahoni dan lain-lain jenis kayu lainnya sehingga wisatawan dapat menikmati keindahannya. Mereka sering menghadapi kendala seperti keterbatasan keterampilan manajemen, dan keterbatasan pendidikan, keterbatasan akses modal.⁶

Menurut bapak Sugianto salah satu mandur diperoleh informasi, bahwa beliau menjelaskan ada 3 pembagian kebun karet salah satunya Aengsono, Jamintoro, Karanganyu. Yang mana Aengsono luas lahan 345.46, HC 351, OHK 117. Sedangkan Jamintoro L 166.91, HC 351, OHK 67, Karanganyu L 159.69 , HC 333 OHK 111. Kewajiban pemilik kebun adalah menyediakan kebun karet yang telah bisa disadap dan memberikan 40% hasil penjualannya kepada penggarap kebun. Dalam konteks ekonomi Islam, pengelolaan sumber

⁶ Sugianto, *wawancara*, Jember, 21 Juni 2024.

daya alam harus dilakukan dengan adil, transparan, dan berkelanjutan. Desa Aengsono Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, merupakan salah satu desa yang memiliki kebun karet yang dikelola oleh PTPN Nusantara XII. Pengelolaan kebun karet di desa ini seringkali dihadapkan pada tantangan seperti ketidakcocokan karakter antara pemilik dan penggarap, serta kebutuhan modal yang besar.⁷ *Research* atau fenomena penerapan tata kelola kebun karet Gunung Gambir pada PTPN Nusantara di desa Aengsono Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember antara pemilik dan penggarap yang secara pelaksanaannya perusahaan kebun karet Gunung Gambir di Desa Aengsono telah mencatat sejumlah prestasi yang membanggakan dalam industri perkebunan karet. Selama bertahun-tahun, perusahaan ini telah berhasil meningkatkan produktivitas karet secara signifikan melalui penggunaan teknologi modern dalam proses budidaya dan pengolahan karet. Selain itu, mereka juga terkenal karena komitmen mereka terhadap praktik keberlanjutan, yang mencakup pengelolaan lahan yang bertanggung jawab dan program-program konservasi lingkungan. Keberhasilan perusahaan ini tidak hanya terlihat dari peningkatan produksi dan kualitas karet yang konsisten, tetapi juga dari kontribusi mereka dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui program-program CSR yang berkelanjutan. Dengan demikian, Gunung Gambir telah menjadi contoh yang menginspirasi dalam industri perkebunan karet di Kaliglagah dan sekitarnya. Penting untuk terus memantau dan mengevaluasi dampak dari kerjasama ini secara holistik, serta

⁷ Supriyanto, *wawancara*, Jember, 25 Juni 2024.

mengadopsi praktik pengelolaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab untuk mengurangi dampak negatifnya.⁸

Tiga lokasi berbeda yang menaungi kebun karet PTPN yaitu kebun karet Aengsono, Jamintoro, Karang Anom, bahwa kebun karet Gunung Gambir yang ada di desa Aengsono lebih menonjol dengan produktivitas yang lebih tinggi, mempertahankan standar kualitas yang lebih dari pada kebun karet Karang Anom, Jamintoro. Perbandingan ini dapat memberikan gambaran tentang keunggulan dan perbedaan antara kebun karet PTPN Nusantara yang ada di Desa Aengsono dengan Jamintoro dan Karang Anom dalam konteks Produktivitas, efisiensi, kualitas, integritas pasokan dan inovasi. PTPN di Gunung Gambir menonjol dengan ketinggian lokasi yang memberikan kondisi mikro untuk pertumbuhan tanaman. Perbandingan ini mencerminkan perbedaan dalam karakteristik geografis, kondisi iklim, strategi pengelolaan, dan orientasi produksi antara PTPN di Gunung Gambir Desa Aengsono dan di kebun karet Desa Jamintor, Desa Karang Anom.⁹ Peneliti memberikan perbandingan kebun karet Gunung Gambir pada PTPN Nusantara Desa Aengsono, Jamintoro, Karang Anom hal ini bisa dibuktikan dari tabel di bawah ini:

⁸ Imam, *wawancara*, Jember, 21 Juni 2024.

⁹ Sugianto, *wawancara*, Jember, 28 Juni 2024.



Tabel 1.1
Data Perkembangan Produksi Kebun Karet
Tahun 2024-2025

No	Afdeling	Estimasi Produksi	Realisasi Produksi
1	Aengsono	6 kg- 50 kg	51(Hi)- 507 (Hi)
2	Jamintoro	7 kg-20 kg	46 (Hi)- 390 (Hi)
3	Karang Anom	6 kg-20 kg	35 (Hi)-203 (Hi)

Sumber: Diolah Wawancara Bapak Sugianto (Mandor Danton Kebun Karet Gunung Gambir PTPN Nusantara Aengsono Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember)

Berdasarkan data tabel perbandingan di atas objek penelitian terkait penerapan Tata Kelola Kebun Karet di Gunung Gambir PTPN Nusantara 1 Regional 5 ini ditemukan bahwa perusahaan tersebut afdeling Aengsono dengan etimasi produksinya mencapai 6 kg- 50 kg, dan realisasi produksi karet mencapai dari 51(Hi)-507 (Hi). Sedangkan afdeling Jamintoro mencapai total mencapai 7 kg-20 kg dan realisasi produksi karet mencapai 46 (Hi)- 390 (Hi). Afdeling Karang Anom mencapai 6 kg-20 kg dan realisasi produksi karet mencapai 35 (Hi)-203 (Hi). Dari total produksinya merupakan desa yang berbeda dalam konteks pengelolaan perkebunan karet, penerapan dari perbandingan objek tersebut peneliti tertarik karena penerapan target produksinya afdeling Aengsono karena etimasi produksinya lebih banyak mencapai 6 kg- 50 kg, dan realisasi produksi karet mencapai dari 51(Hi)-507 (Hi). masing-masing afdeling memiliki kebutuhan dan karakteristik yang unik dalam pengelolaan perkebunan karet tersebut.

Karet merupakan salah satu komoditas perkebunan yang perlu ditingkatkan produksi, produktivitas, dan mutunya, untuk meningkatkan daya saing dan pendapatan petani karet, perlu pedoman budidaya karet yang baik menurut UU Nomor 12 Tahun 1992 Pasal 3 tentang sistem budidaya tanaman

yang berbunyi untuk meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor serta meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, dan mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan pendapatan kerja.¹⁰ Karet salah satu komoditi ekspor Indonesia yang cukup besar sebagai penghasil devisa Negara selain minyak dan gas. Karet berfokus pada konsep bahwa penggunaan sumber daya alam harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan mempertimbangkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan melibatkan tata kelola yang baik.¹¹

Menurut Reza Widhar Pahlewi didalam buku tata kelola perusahaan perspektif Islam memiliki cakupan yang lebih luas dan tidak terdapat pemisah antara peran dan tanggung jawab dalam semua tindakan serta kewajiban yang berada dibawah naungan hukum Islam. Terdapat perbedaan konsep tata kelola perusahaan perspektif Islam dengan perspektif konvensional. Perbedaan mendasar bahwa perspektif Islam berpangkal kepada tauhid, syari'ah.¹²

Pedoman tata kelola perusahaan lebih menfokuskan pada peran pemangku kepentingan yang berhubungan dengan perusahaan, hal tersebut adanya perbedaan antara tata kelola perusahaan perspektif Islam dan tata kelola perusahaan konvensional terletak pada siapa pemangku kepentingan.

Sedangkan prinsip *Good Corporate Governance* dalam Islam meliputi siddiq,

¹⁰ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46604/uu-no-12-tahun-1992>

¹¹ Roby Darmawan, *Analisis Kinerja Perdagangan Karet* (Jakarta: Pusat Data Dan Sistem Informasi Pertanian, 2023), 3-4.

¹² Laksita Sela Srimaya Dan Elsa Amalia, "Penerapan Tata Kelola Islam dalam Perbankan Syariah di Indonesia: Sebuah Studi Kepustakaan", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1 (Juni, 2023),7-9.

amanah, tablig, fathonah.¹³ Siti Masrohatin menjelaskan dalam perspektif Islam bahwa pemimpin perlu memiliki kualitas kepemimpinan yang baik seperti kejujuran, kepercayaan, pengetahuan serta tabligh. Selain itu Siti Masrohatin menekankan bahwa untuk mencapai kinerja organisasi yang tinggi, kualitas kepemimpinan adalah penting seperti kemampuan untuk memahami dengan baik, kemampuan untuk menjawab pertanyaan, kemampuan untuk mendapatkan cinta dan kehangatan anggota, kecenderungan untuk membuat keputusan setelah berkonsultasi, mendorong kritik, persepsi dinamis, serius dan semangat.¹⁴ Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* perusahaan secara umum memiliki lima prinsip dasar yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), kewajaran dan kesetaraan (*Fairness*), Kemandirian (*independency*).¹⁵ Perusahaan dengan memerhatikan pemangku kepentingan sehingga perusahaan mampu bersaing dalam kancah persaingan dunia moderen dan perusahaan bisa menciptakan lingkungan yang sehat, terciptanya hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan sebagai penyelenggara produksi dan masyarakat sebagai pengguna hasil-hasil produksi lingkungan tempat usaha berdiri. Harmonisasi ini akan menciptakan tata kelola perusahaan yang baik serta menjadikan perusahaan mampu berdiri

¹³ Reza Widhar Pahlevi, *Tata Kelola Perusahaan Perspektif Islam* (Yogyakarta: Stelkonde Kreatif, 2020), 1-2.

¹⁴ Siti Masrohatin, *Manajemen Kinerja Sumberdaya Manusia Pendekatan Islamic Value* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), 76-79.

¹⁵ Novi Natalia Padang, "Peran Audit Internal Dalam Meningkatkan Tata Kelola Perusahaan", *Jurnal Ekonomi Dan Studi Akuntansi*, 1 (Oktober, 2023), 9-12.

dan berusaha secara berkelanjutan.¹⁶ Didukung dengan penelitian terdahulu dengan judul “Peningkatan Integritas Melalui Tata Kelola Kelembagaan Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember”. Hasil pembahasan jurnal tersebut para pendamping melakukan sosialisasi dengan melakukan pelatihan pada karyawan. Sedangkan prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh para karyawan yaitu keterbukaan (*transparency*) akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), kewajaran dan kesetaraan (*fairness*), kemandirian (*independency*).¹⁷

Tata kelola perusahaan memberikan definisi *Good Corporate Governance* adalah pihak yang berhubungan dengan korporasi dan menyeleraskan kepentingan berbagai pihak. Posisi *Good Corporate Governance* sebagai upaya menjaga hubungan antara pemilik, manajemen dan dewan komisaris penekanan atas hubungan dan interaksi antara pemilik, manajemen dalam proses *Corporate Governance*. Tata kelola adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan. Bahwa dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), bisa mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasionalnya perusahaan berjalan dengan sesuai harapan para *stakeholder*. *Good Corporate Governance* dapat dipahami sebagai perangkat peraturan perseroan terbatas yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus, perusahaan serta para pemangku kepentingan internal maupun eksternal

¹⁶ Rusdiyanto, *Good Corporate Governance* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2019), 39-49.

¹⁷ Nikmatul Masruroh, Samsul Arifin, Agus Ahmad Faizy Alfawwaz, Sofiatul Munawwaroh, “Peningkatan Integritas Melalui Tata Kelola Kelembagaan Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2 (September, 2023), 13-15.

lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban, dengan kata lain sebagai suatu sistem yang mengatur.¹⁸ Telah ditetapkan dalam keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 Tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan praktek *Good Corporate Governance* pada badan usaha milik Negara (BUMN).¹⁹

Menurut kementerian BUMN sesuai Pasal 1 Ayat 1, Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/M-MBU/2011 Tanggal 1 Agustus 2011 bahwa Tata kelola perusahaan yang baik merupakan prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan etika berbisnis serta memberikan nilai tambah bagi pemegang saham secara berkelanjutan dalam jangka panjang, dengan tetap menghormati kepentingan pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan hukum dan norma yang berlaku. Dengan demikian jelas bahwa tata kelola perusahaan terkait erat dengan nilai perusahaan dan tentunya, kinerja keuangan perusahaan.²⁰ Menurut penelitian terdahulu Edwin Triyuwono implikasi penelitian ini adalah jika untuk memperkaya literatur tentang pemangku kepentingan memberikan saran kepada perusahaan, investor dan pemerintah dengan menerapkan tata kelola perusahaan untuk mengelola resiko bagi berkelanjutan perusahaan yang akan memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan. Nilai perusahaan sebagai tanggapan pemilik modal

¹⁸ Rudi Hartono, "Pelaksanaan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN (Studi Kasus PT. Perkebunan Nusantara IV)", *Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1 (Juli, 2020), 21-23.

¹⁹ https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/dan/files/pdf/PER-01_MBU_2011 Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

²⁰ Effendi, *The Power of Good Corporate Governance* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 12.

terhadap kesuksesan perusahaan dalam pengelolaan sumberdaya dan bisa diamati pada harga saham terbentuk dari akumulasi representasi dari pemangku kepentingan terhadap perusahaan melalui kegiatan perusahaan untuk memperoleh dan mempertahankan kepercayaan publik dengan cara menerapkan tata kelola terintegritas dalam perusahaan.²¹ Penerapan *Good Corporate Governance* oleh perseroan mutlak diperlukan agar tercapai kesinambungan hubungan antar organisasi persero, yang mencakup dengan struktur kelembagaan dan mekanisme oprasional (kesinambungan internal), serta terpenuhinya tanggungjawab persero sebagai entitas bisnis dalam masyarakat dan seluruh *stakeholders*, yang mencangkup pengaturan hubungan antara perseroan dengan seluruh *stakeholders* (kesinambungan eksternal). Hubungan tersebut akan menentukan arah fungsi pengelolaan perusahaan secara efektif dan efesien. Penerapan GCG oleh perseroan bertujuan untuk memaksimalkan perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip lima pilar yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibiliti*), kewajaran dan kesetaraan (*fairness*), kemandirian (*independency*) dan mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, mendorong agar organisasi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral, dan meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional.²² Perusahaan adalah representasi dari kegiatan produksi, sehingga dalam melakukan kegiatannya tidak bisa hanya dikelola oleh

²¹ Edwin Triyuwono, Dan Suwandi, "Tata Kelola Perusahaan Sebagai Mekanisme Pengelolaan Risiko Untuk Meningkatkan Nilai Perusahaan", *Jurnal Akuntansi*, 2 (Agustus, 2020), 23-24.

²² Nurhidayat, *Pedoman Good Corporate Governance PT. Perkebunan Nusantara VII* (Lampung: Kolaboratif Kompeten, 2021), 1-2

produsen semata. Dalam melakukan kegiatan produksi tentu saja sebuah perusahaan tidak lepas dari beberapa faktor produksi didalamnya diantaranya lain faktor modal, tenaga kerja, sumber daya alam dan *skill*. Dari faktor- faktor tersebut, perusahaan harus bisa mengelola dan mengidentifikasi dengan baik input tersebut. Perusahaan dalam rangka memberikan manfaat untuk daerah sekitar perusahaan tersebut. Sehingga setiap perusahaan dalam rangka memberikan manfaat untuk daerah sekitarnya, membuat *Corporate Sosial Responsibility* (CSR).²³ *Corporate Sosial Responsibility* (CRS) perusahaan tidak hanya dalam bentuk uang, tapi juga bisa dalam bentuk pemberian kesempatan kerja atau menciptakan lapangan pekerja bagi lingkungan sekitarnya. Selain pembahasan diatas, bahwa tanggung jawab sosial merujuk pada komitmen organisasi dan memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Ini bisa mencakup peraktek seperti menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, mempromosikan keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi, menyediakan peluang pelatihan dan pengembangan.²⁴ Berdasarkan hasil pengamatan maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut terkait penerapan tata kelola Kebun Karet itu sendiri dan menuangkannya dalam bentuk proposal tesis yang berjudul **“Penerapan Tata Kelola Di Kebun Karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Aengsono Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Perspektif Ekonomi Islam”**

²³ Nikmatul Masruroh, Faikatul Ummah, “Upaya Pengembangan *Corporate Sosial Responsibility* Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Iqtisoduna*, 1 (6, Juni 2018), 46-47.

²⁴ Siti Mahmuda, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jawa Tengah: EUREKA MEDIA AKSARA, 2023), 166.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas maka peneliti menggambarkan dari permasalahan tersebut:

1. Bagaimana penerapan tata kelola secara keterbukaan (*transparency*) di Kebun Karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 desa Aengsono kecamatan Sumberbaru kabupaten Jember perspektif ekonomi Islam?
2. Bagaimana penerapan tata kelola secara akuntabilitas (*accountability*) di Kebun Karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 desa Aengsono kecamatan Sumberbaru kabupaten Jember perspektif ekonomi Islam?
3. Bagaimana penerapan tata kelola secara tanggung jawab (*responsibility*) di Kebun Karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 desa Aengsono kecamatan Sumberbaru kabupaten Jember perspektif ekonomi Islam?
4. Bagaimana penerapan tata kelola secara kewajaran (*fairness*) di kebun karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 desa Aengsono kecamatan Sumberbaru kabupaten Jember perspektif ekonomi Islam?
5. Bagaimana penerapan tata kelola secara kemandirian (*independency*) di kebun karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 desa aengsono kecamatan Sumberbaru kabupaten Jember perspektif ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian disesuaikan dengan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan penerapan tata kelola secara keterbukaan (*transparency*) di Kebun Karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 desa Aengsono kecamatan Sumberbaru kabupaten Jember perspektif ekonomi Islam
2. Untuk mendeskripsikan penerapan tata kelola secara akuntabilitas (*accountability*) di Kebun Karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 desa Aengsono kecamatan Sumberbaru kabupaten jember perspektif ekonomi Islam
3. Untuk mendeskripsikan penerapan tata kelola secara tanggung jawab (*responsibility*) di Kebun Karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 desa Aengsono kecamatan Sumberbaru kabupaten jember perspektif ekonomi Islam
4. Untuk mendeskripsikan penerapan tata kelola secara kewajaran (*fairness*) di kebun karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 desa Aengsono kecamatan Sumberbaru kabupaten Jember perspektif ekonomi Islam
5. Untuk mendeskripsikan penerapan tata kelola secara kemandirian (*independency*) di kebun karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 desa aengsono kecamatan Sumberbaru kabupaten Jember perspektif ekonomi Islam

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

- a. Secara teoritis, diharapkan agar dapat menambah wawasan dan juga ilmu pengetahuan tentang penerapan tata kelola di kebun karet Gunung Gambir PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Aengsono kecamatan Sumberbaru kabupaten Jember perspektif ekonomi Islam
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh akademisi sebagai referensi pada penelitian berikut khususnya tentang penerapan tata kelola di kebun karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 Aengsono kecamatan Sumberbaru kabupaten Jember perspektif ekonomi Islam

2. Secara praktis

- a. Bagi peneliti, dapat memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti serta sebagai aplikasi atas ilmu yang didapatkan selama perkuliahan.
- c. Bagi peneliti, dapat memberikan pengembangan dan memperdalam pengetahuan penulis dibangku perkuliahan prodi Ekonomi Syari'ah serta diharapkan memberikan pengetahuan baru tentang ekonomi Islam terutama mengenai penerapan tata kelola di kebun karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Aengsono kecamatan Sumberbaru kabupaten Jember perspektif ekonomi Islam

E. Ruang Lingkup Dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Objek penelitian ini adalah Kebun Karet Gunung Gambir PTPN Nusantara 1 regional 5 sebagai *shohibul mal* yang menyediakan modal berupa lahan kebun karet, fasilitas, benih, pupuk, dan sarana pendukung lainnya. Artinya, ruang lingkup penelitian ini adalah Kebun Karet Gunung Gambir PTPN Nusantara yang menjadi objek penelitian saja sampai penelitian ini dilaksanakan. Teori digunakan sebagai koridor dan pembatas masalah supaya lebih fokus dan terstruktur, dalam hal ini teori

yang digunakan adalah teori menurut Eko Sudarmanto dan Rusdiyanto, tata kelola adalah sebuah pedoman pokok bagi organisasi atau sebuah perusahaan dalam setiap pengembangan perusahaan penting pengembangan perusahaan karena untuk merancang dan mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Beberapa potensi keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Proses memulai wawancara dengan pemilik usaha PTPN Nusantara karena peneliti perlu memberi waktu khusus kepada pemilik usaha untuk berkesempatan di wawancarai.
- b. Munculnya nama baru yang direkomendasikan beberapa pihak yang telah diwawancara, padahal nama tersebut tidak termasuk dalam ceklis narasumber.
- c. Penggunaan bahasa ilmiah dalam proses wawancara dengan pihak yang tidak terbiasa dengan bahasa ilmiah sehingga peneliti perlu

menyesuaikan dengan kebiasaan narasumber, misalnya yang perlu diwawancarai adalah para petani yang berbeda-beda.

F. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuan definisi istilah untuk mempermudah pemahaman dan kesalahan persepsi dalam penelitian ini. Maka akan dikemukakan secara singkat pengertian istilah yang terkandung dalam judul sebagai berikut:

1. Tata Kelola

Tata kelola didefinisikan sebagai suatu bentuk atau proses penyelenggara kewenangan politik, ekonomi dan administrasi dalam mengelola problem yang dihadapi oleh masyarakat atau bangsa yang melibatkan semua sektor dan stakeholder. Tata kelola merupakan suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan struktur, prosedur, dan mekanisme yang dirancang untuk pengelolaan perusahaan dengan berlandaskan prinsip akuntabilitas yang dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang.²⁵ Tata kelola yang baik dapat memperbesar kesempatan untuk meningkatkan keuntungan dan nilai perusahaan. Tata kelola ini mencakup tata cara, mekanisme, dan prosedur yang baik dalam menyelenggarakan kekuasaan politik, ekonomi, administrasi sesuai prinsip dan ukuran akuntabilitas. Tata kelola kebun karet mengacu pada sistem pengelolaan yang struktur dan terorganisir untuk memastikan efisiensi, berkelanjutan,

²⁵ Rusdiyanto, *Good Corporate Governance* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2019), 105-106.



dan keadilan dalam pengelolaan kebun karet. Tata kelola (*Governance*) merujuk pada sistem atau proses pengelolaan dan pengaturan suatu entitas atau organisasi. Tata kelola merujuk pada sistem dan proses yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola organisasi atau lembaga. Tata kelola perusahaan GCG (*Good Corporate Governance*) adalah praktik yang mengatur hubungan antara manajemen, dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Prinsip-prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) meliputi keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran. Penerapan GCG (*Good Corporate Governance*) bertujuan untuk memastikan perusahaan beroperasi secara efisien dan bertanggung jawab terhadap semua pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan.

2. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam, di mana segala aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, investasi dan transaksi lainnya harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam disebut juga ekonomi syariah dan merupakan ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas, namun tetap dalam kerangka nilai-nilai Islam. Tujuan utama ekonomi syariah adalah mencapai kesejahteraan material dan spiritual. Sebagai perilaku ekonomi, manusia hanyalah berposisi sebagai pemegang amanah karena semua aturan yang telah dibuat

berdasarkan syariah harus menjadi pedoman bagi manusia termasuk dalam aktivitas ekonominya.²⁶ Dengan demikian, ekonomi Islam mengajarkan bahwa keberhasilan ekonomi seseorang atau masyarakat tidak hanya diukur dari besarnya kekayaan yang dimiliki, tetapi juga dari sejauh mana kekayaan tersebut bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat luas, serta sejauh mana aktivitas ekonomi tersebut mendapatkan diri kepada tuhan.

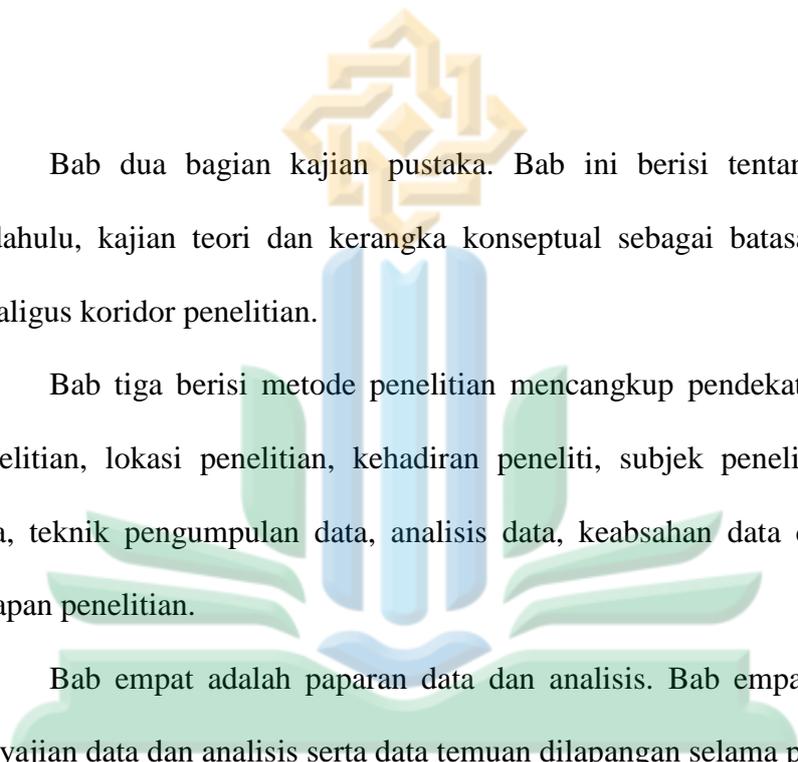
Menurut peneliti bahwa penerapan tata kelola di kebun karet Gunung Gambir PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Aengsono Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Perspektif Ekonomi Islam, sebagai nilai dasar syariah menuntut pengelolaan yang adil, transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Seluruh aktivitas ekonomi harus sesuai dengan nilai-nilai syariah, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi, sehingga tercipta kehidupan ekonomi yang harmonis, sejahtera, sehingga memberikan manfaat optimal bagi semua pihak dan sesuai dengan nilai-nilai syariah dan diridhoi Allah SWT.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disajikan kedalam enam bab sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

²⁶ Mustafa Kamal Rokan, *Bisnis Ala Nabi Teladan Rosulullah SAW Daam Berbisnis* (Yogyakarta:PT. Benteng Pustaka, 2013), 153.



Bab dua bagian kajian pustaka. Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu, kajian teori dan kerangka konseptual sebagai batasan penelitian sekaligus koridor penelitian.

Bab tiga berisi metode penelitian mencakup pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahapan-tahapan penelitian.

Bab empat adalah paparan data dan analisis. Bab empat merupakan penyajian data dan analisis serta data temuan dilapangan selama penelitian.

Bab lima merupakan pembahasan. Bagian ini berisi pembahasan yang bertujuan menjelaskan hasil penelitian dan menjawab fokus penelitian. Hasil interpretasi dan pembacaan terhadap data disesuaikan dengan teori dan dianalisis.

Bab enam adalah penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan untuk menjelaskan hasil penelitian dan menjawab fokus penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Saran di sini mengacu pada hasil temuan penelitian dan rekomendasi untuk pengembangan keilmuan maupun penelitian selanjutnya.



KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui originalitas dari penelitian ini, peneliti mulai dengan menelaah beberapa buku dan penelitian yang mempunyai kesamaan tema dengan penelitian ini yaitu tata kelola atau *Good Corporate Governance*. Diantara buku dan penelitian tersebut adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Khaidir Ali, dan Agung Saputra,²⁷ meneliti tentang tata kelola pemerintah desa terhadap peningkatan pelayanan publik di desa pematang johar. Hasil penelitian menyatakan pelayanan yang optimal dalam menyelenggarakan pemerintah merupakan wujud nyata dalam menciptakan pemerintah yang baik (*Good Corporate Governance*). Pemberian pelayanan kepada masyarakat juga hasil kerja yang nyata dalam pemerintahan khususnya pemerintah desa. Dengan demikian dibutuhkan tata kelola yang baik dan benar sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang berkualitas. Untuk meningkatkan pelayanan publik di pemerintah desa dapat dilakukan dengan tata kelola yang baik dan melaksanakan program-program yang dapat mendukung kinerja aparatur desa dalam melayani masyarakat. Tata kelola yang dilakukan oleh pemerintah kinerja pemerintah desa Johar tak lepas dari hasil kepemimpinan yang baik sehingga dapat mengelola dan mengatur sistem pemerintah desa yang baik. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa melalui program e-Desa tela terlaksana dngan baik walaupun belum maksimal

²⁷Khaidir Ali Dan Agung Saputra, "Tata Kelola Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Didesa Pematang Johar", *Jurnal Administrasi Public*, 4 (Oktober, 2020), 602-605.

karena keterbatasan kemampuan masyarakat dalam mengimplementasikan program e-Desa ini.

Penelitian Khaidir Ali, dan Agung Saputra berbeda dengan yang peneliti lakukan dimana penelitian ini membahas tentang mengetahui tingkat kemampuan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Desa Pematang Johar dan untuk mengetahui tata kelola pemerintahan desa terhadap pemerintahan desa terhadap peningkatan pelayanan publik di Desa Pematang Johar. Peneliti membahas tentang penerapan tata kelola secara akuntabilitas di kebun karet Gunung Gambir PTPN Nusantara Desa Kaliglagah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rudi Hartono, Marlina²⁸ meneliti tentang penerapan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN (Studi Kasus di PT. perkebunan nusantara IV). Hasil penelitian menyimpulkan hambatan implementasi pada tata kelola perusahaan yang baik *Good Corporate Governance* terdiri beberapa faktor antara lain hukum, budaya perusahaan dan SDM, namun pelaksanaannya PTPN Perkebunan Nusantara IV tetap berkomitmen sebagai bentuk komitenya dengan membentuk bagian, yang bertugas memantau dan mendorong implementasi penerapannya sesuai dengan ketentuan hukum.

Penelitian Rudi Hartono, Marlina berbeda dengan yang peneliti lakukan dimana penelitian ini membahas penerapan tata kelola yang baik (*good corporate governance*) pada BUMN (studi kasus di PTPN perkebunan

²⁸ Rudi Hartono, Dan Marlina, "Penerapan Tata Kelola Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN (Studi Kasus Di PT Perkebunan Nusantara IV)", *Jurnal Ilmiah Megister Hukum*, 1 (Oktober, 2020), 32.

Nusantara IV). Sedangkan peneliti membahas tentang penerapan tata kelola secara akuntabilitas di kebun karet Gunung Gambir PTPN Nusantara Desa Kaliglagah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Khomsiyah Dan Muttaqin,²⁹ meneliti tentang Pengaruh Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindar Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2014-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian menggunakan program SPSS versi 25 dan ROA, dewan komisaris independen, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dan diketahui memiliki arah negative. DER dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan kepemilikan institional berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak dan komite audit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penghindar pajak dan komite audit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian Nurul Khomsiyah, dan Muttaqin berbeda dengan yang peneliti lakukan dimana penelitian ini membahas tentang profitabilitas, tata kelola perusahaan dengan menggunakan program SPSS Versi 25 dan metode menggunakan *purposive sampling*. Sedangkan peneliti menjelaskan tentang penerapan tata kelola di kebun karet dan fokus masalahnya berbeda beserta obyek yang diteliti.

²⁹ Nurul Khomsiyah Dan Muttaqin, "Pengaruh Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindar Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2014-2018", *Jurnal Ecopreneur*, 1 (Juni, 2021), 3-4.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Anggun Pertiwi, Herman Dema, Ahmad Mustnasir.³⁰ meneliti tentang penerapan *e- government* dalam mewujudkan transparansi tata kelola pemerintahan desa (studi pada pemerintahan desa Bulu Timoreng). Berdasarkan hasil penelitian penerapan *E- GOVERNMENT* dalam mewujudkan transparansi tata kelola pemerintah Desa di Desa Bulu Timoreng menunjukkan bahwa transparansi menggunakan sistem penerapan. Adapun pelaksanaannya dengan berkoordinir dengan masyarakat untuk mengetahui permasalahan atau manfaat yang timbul dalam penerapan *E- GOVERNMENT* untuk mewujudkan transparansi tata kelola pemerintah *Desa* di Desa Bulu Timoreng. . Keduanya menggunakan pendekatan persamaan pada penelitian ini dengan peneliti, menggunakan metode penelitian kualitatif dan variabel juga membahas pelaksanaan tata kelola dalam sebuah perusahaan.

Penelitian Anggun Pertiwi, Herman Dema, Ahmad Mustnasir dengan peneliti dimana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *E- GOVERNMENT* dalam mewujudkan transparansi tata kelola pemerintahan desa (studi pada pemerintahan desa Bulu Timoreng). Sedangkan peneliti bertujuan untuk penerapan tata kelola di Kebun Karet Gunung Gambir PTPN Nusantara 1 Regional 5 yang menggunakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang terdiri dari keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kewajaran, serta kemandirian.

³⁰ Anggun Pertiwi, Herman Dema, Ahmad Mustnasir, "Penerapan *E- GOVERNMENT* Dalam Mewujudkan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan Desa (Studi Pada Pemerintahan Desa Bulu Timoreng)", *Jurnal PRAJA*, 3 (Oktober, 2021), 130-131.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Emilianus Eo Kutu, Euprasius Mario Sanda³¹ meneliti tentang analisis pelaksanaan tata kelola rencana strategis, akuntansi dan transparansi dana desa terhadap pengelolaan keuangan desa (studi kasus Magepanda Kecamatan Magepanda). Berdasarkan hasil penelitian bahwa tata kelola rencana strategis yang dilakukan oleh pemerintah desa Magepanda pada aspek akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa di desa Magepanda dilihat dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan sesuai penerapan peraturan secara maksimal. Sehingga dalam pelaporan dan pertanggungjawaban masih mengalami keterlambatan. Sedangkan dalam penyampaian informasi pengelolaan keuangan desa menggunakan media informasi baliho pemerintah desa Magepanda. Selain penyampaian informasi pengelolaan keuangan desa melalui rapat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Persamaan pada penelitian ini dengan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dan variabel juga membahas pelaksanaan tata kelola dalam sebuah perusahaan.

Penelitian Emilianus Eo berbeda dengan penelitian peneliti dimana penelitian ini membahas tentang analisis pelaksanaan tata kelola rencana strategis, akuntansi dan transparansi dana desa terhadap pengelolaan keuangan desa (studi kasus Magepanda kecamatan Magepanda), peneliti membahas penerapan tata kelola di kebun karet Gunung Gambir PTPN Nusantara desa Aengsono kecamatan Sumberbaru kabupaten Jember, fokus penelitian yang

³¹ Emilianus Eo Kutu, Euprasius Mario Sanda, "Analisis Pelaksanaan Tata Kelola Rencana Strategis, Akuntansi Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Magepanda Kecamatan Magepanda)", *Jurnal Auditing Unipa*, 4 (Juni, 2022), 20.

berbeda yang mana penelitian terdahulu membahas untuk mengetahui pelaksanaan tata kelola rencana strategis, akuntabilitas dan transparansi dana desa terhadap pengelolaan keuangan desa di desa Magapenda.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Ikbar Pratama³² meneliti tentang tata kelola perusahaan dan atribut perusahaan pada ketepatan pelaporan keuangan: bukti dari perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Berdasarkan dari hasil penelitian menyimpulkan efek tata kelola perusahaan (Ukuran Dewan Direktur dan Komite Audit) dan atribut perusahaan (Ukuran Perusahaan dan Sektor Perusahaan) yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) di Republik Indonesia. Persamaan pada penelitian ini dengan peneliti adalah penelitian sama-sama menganalisis tata kelola didalam perusahaan yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan untuk perusahaan.

Penelitian Ikbar Pratama, Marlina berbeda dengan yang peneliti lakukan dimana penelitian ini membahas Penelitian terdahulu membahas tentang tata kelola perusahaan dan atribut perusahaan pada ketepatan pelaporan keuangan, peneliti membahas penerapan tata kelola secara kemandirian di kebun karet Gunung Gambir PTPN Nusantara Desa Aengsono Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.

³² Ikbar Pratama, Dan Marlina, "Tata Kelola Perusahaan Dan Atribut Perusahaan Pada Ketepatan Pelaporan Keuangan: Bukti Dari Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia", *Jurnal Pendidikan dan Humaniora*, 3 (November, 2023), 12-13.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Inka Rahmawati, dan Falaah Abdussalam, Irda Sari³³ meneliti tentang tata kelola rekam medis berbasis elektronik dalam pengelolaan pelaporan instalasi rawat jalan inap dengan metode waterfall. Hasil penelitian menyatakan bahwa pencatatan dan pelaporan berkas medis merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh sarana pelayanan kesehatan. Hal tersebut mendorong untuk merancang tata kelola medis berbasis elektronik dalam pengelolaan pelaporan instalasi rawat inap jalan di rumah sakit AMC Bandung yang bertujuan untuk memudahkan petugas dalam membuat laporan. Pelaporan di rumah sakit AMC Bandung masih berupa penginputan manual dengan cara memasukkan data satu persatu ke *microsoft excel* dari rekaman medis pasien sehingga terjadi perekaman human eror. Perancangan struktural yang diterapkan pada aplikasi ini yaitu pembuatan *Flowmap*, *Conteks Diagram*, *Data Flow Diagram*, *Data Entity Relationship Diagram* yang mengimplementasikan *access*. Hasil pengembangan ini memudahkan petugas rekam medis dalam melakukan penginputan data dalam pembuatan laporan di instalasi rawat jalan, maka dari itu pelaporan berjalan efektif dan efisien.

Penelitian Inka berbeda dengan yang peneliti lakukan dimana penelitian ini membahas tentang tata kelola rekam medis berbasis elektronik dalam pelaporan instalasi rawat jalan di rumah sakit AMC Bandung, sedangkan peneliti membahas tentang bagaimana penerapan tata kelola secara transparansi di kebun karet Gunung Gambir PTPN Nusantara Desa Kaliglagah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.

³³ Inka Rahmawati, Dan Falaah Abdussalam, Irda Sari, "Tata Kelola Rekam Medis Berbasis Elektronik Dalam Pengelolaan Pelaporan Instalasi Rawat Jalan Inap Dengan Metode Waterfall", *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, 2 (September, 2023), 313.

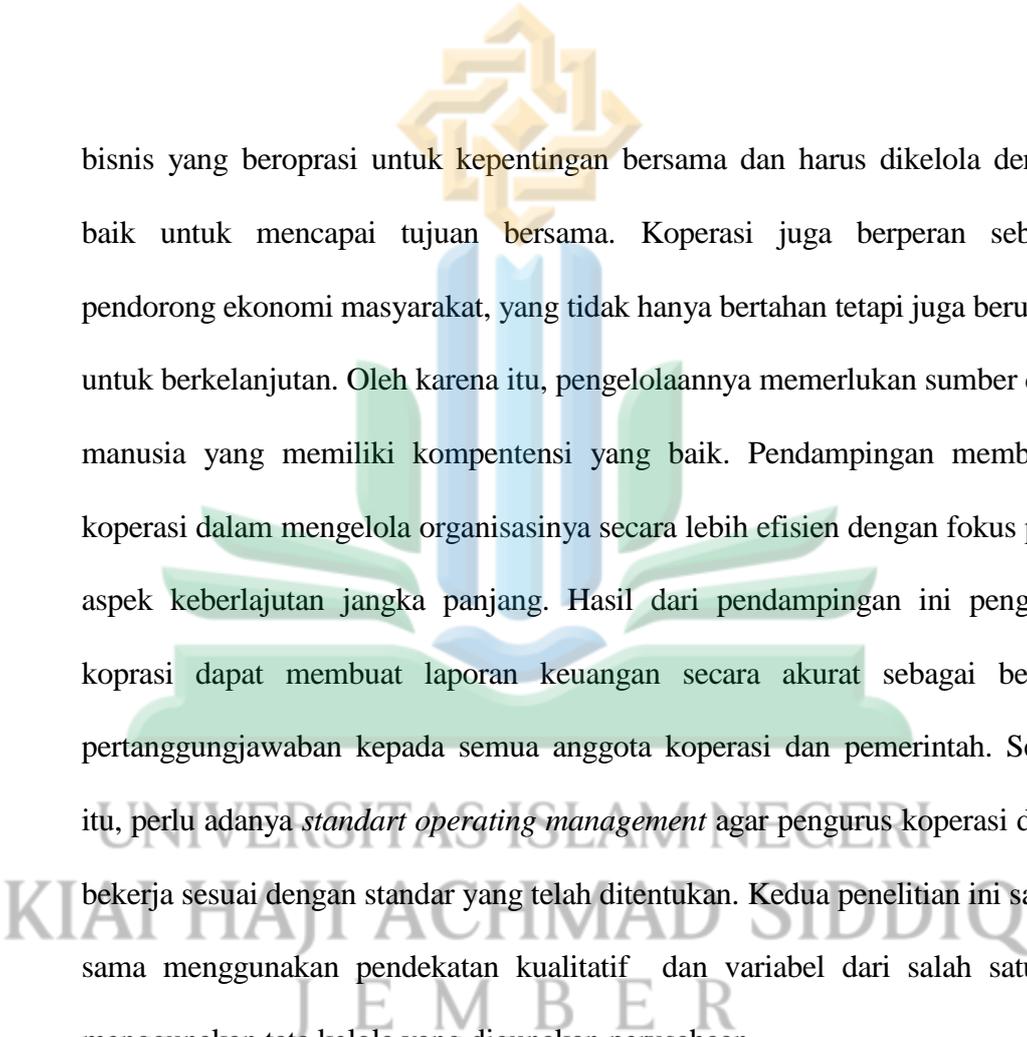
8. Penelitian dilakukan oleh Moh. Musleh,³⁴ meneliti tentang tata kelola wisata Gili Iyang: Perspektif *Community Based Tourism*. Hasil penelitian menyatakan bahwa wisata pulau Gili Iyang dikenal sebagai “Pulau Oksigen”, karena memiliki potensi wisata alam dan potensi kadar oksigen yang tinggi (diatas ambang normal 20%) dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. pengembangan wisata Gili Iyang membutuhkan partisipasi masyarakat dengan cara berperan aktif dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola wisata pulau Gili Iyang sudah berjalan dengan baik, dibuktikan dengan peran Gili Iyang. Melakukan konservasi lingkungan serta masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengelolaan wisata dengan menjadi bagian dari anggota pokdarwis. Teori *Community Based Tourism* digunakan dalam analisis data, dengan lima prinsip pendekatan yaitu: prinsip ekonomi, prinsip sosial, prinsip budaya, prinsip lingkungan dan prinsip politik.

Penelitian Moh. Musleh berbeda dengan yang peneliti lakukan dimana penelitian ini fokus pada tata kelola wisata pulau Gili Iyang perspektif *Community Based Tourism* dengan menganalisis tingkat partisipasi masyarakat lokal di pulau Gili Iyang dalam memanfaatkan dan mengembangkan potensi wisata di pulau Gili Iyang.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Hafidzah, Azmansyah dan Efi Susanti,³⁵ meneliti tentang pendampingan tata kelola menuju koperasi yang berkelanjutan di selat panjang. Hasil penelitian menunjukkan koperasi adalah sebuah entitas

³⁴ Moh. Musleh, “Tata Kelola Wisata Gili Iyang: Perspektif *Community Based Tourism*”, *Jurnal Of Contemporary Public Administration*, 1 (November, 2023), 42-50.

³⁵ Hafidzah, Azmansyah dan Efi Susanti, “Pendampingan Tata Kelola Menuju Koperasi Yang Berkelanjutan Di Selat Panjang”, *Jurnal Community Engegement*, 1 (Juni, 2024), 174-178.

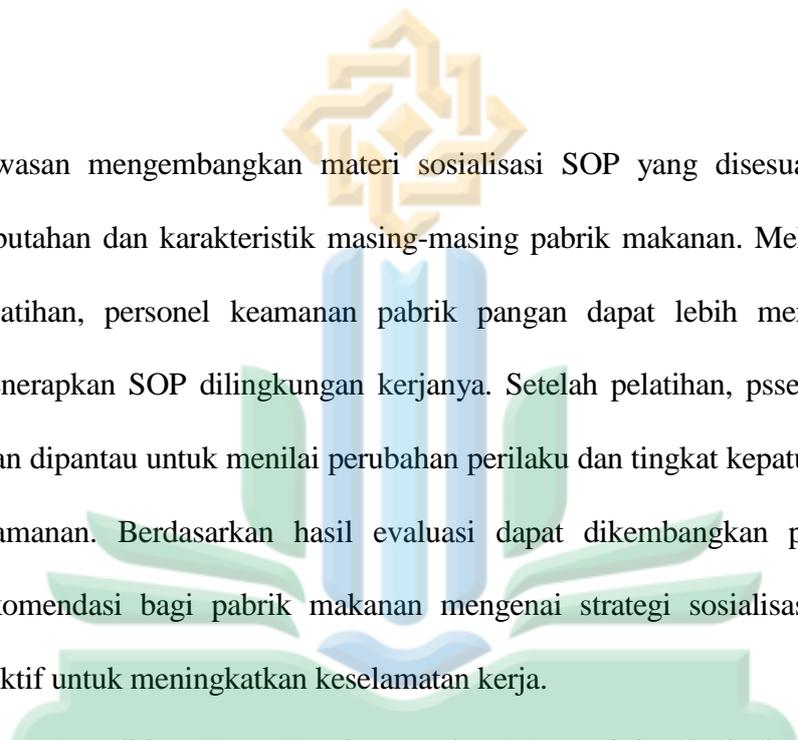


bisnis yang beroperasi untuk kepentingan bersama dan harus dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan bersama. Koperasi juga berperan sebagai pendorong ekonomi masyarakat, yang tidak hanya bertahan tetapi juga berusaha untuk berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaannya memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang baik. Pendampingan membantu koperasi dalam mengelola organisasinya secara lebih efisien dengan fokus pada aspek keberlanjutan jangka panjang. Hasil dari pendampingan ini pengurus koperasi dapat membuat laporan keuangan secara akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada semua anggota koperasi dan pemerintah. Selain itu, perlu adanya *standart operating management* agar pengurus koperasi dapat bekerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Kedua penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan variabel dari salah satunya menggunakan tata kelola yang digunakan perusahaan.

Penelitian Hafidzah berbeda dengan yang peneliti lakukan dimana penelitian ini fokus pada pendampingan tata kelola menuju koperasi yang berkelanjutan di selat panjang, peneliti membahas tentang penerapan tata kelola perspektif Islam di kebun karet.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Hery Kurniawan, dan Marco Orias,³⁶ meneliti tata kelola keamanan pabrik makanan: sosialisasi Standart Operasional Prosedur (SOP) kepada *security*. Hasil pembahasan ini tingkat pemahaman dan implementasi keamanan SOP melalui penelitian awal dilakukan berbagai pabrik makanan yang menjadi pusat kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini di

³⁶ Hery Kurniawan, dan Marco Orias, "Tata Kelola Keamanan Pabrik Makanan: Sosialisasi Standart Operasional Prosedur (SOP) Kepada Security", *Jurnal Community Development*, 1 (November 2024), 1598-1601.



kawasan mengembangkan materi sosialisasi SOP yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing pabrik makanan. Melalui kegiatan pelatihan, personel keamanan pabrik pangan dapat lebih memahami cara menerapkan SOP dilingkungan kerjanya. Setelah pelatihan, pssenerapan SOP akan dipantau untuk menilai perubahan perilaku dan tingkat kepatuhan personel keamanan. Berdasarkan hasil evaluasi dapat dikembangkan pedoman dan rekomendasi bagi pabrik makanan mengenai strategi sosialisasi SOP yang efektif untuk meningkatkan keselamatan kerja.

Penelitian Hery Kurniawan, dan Marco Orias berbeda dengan yang peneliti lakukan dimana penelitian ini fokus pada tata kelola keamanan pabrik makanan: sosialisasi standart operasional prosedur (SOP) kepada security. Peneliti membahas tentang penerapan penerapan tata kelola di kebun karet Gunung Gambir PTPN nusantara regional 5 desa Aengsono Kecamatan Sumberbaru kabupaten Jember perspektif ekonomi Islam.

Penelitian tentang penerapan tata kelola di Kebun Karet Gunung Gambir PTPN Nusantara regional 5 desa Aengsono Kecamatan Sumberbaru kabupaten Jember perspektif ekonomi Islam ini memiliki beberapa perbedaan mendasar dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Berikut adalah hal-hal yang paling berbeda atau baru dari penelitian ini:

- 1) Fokus pada perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam penerapan tata kelola, yang merupakan pendekatan baru jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang

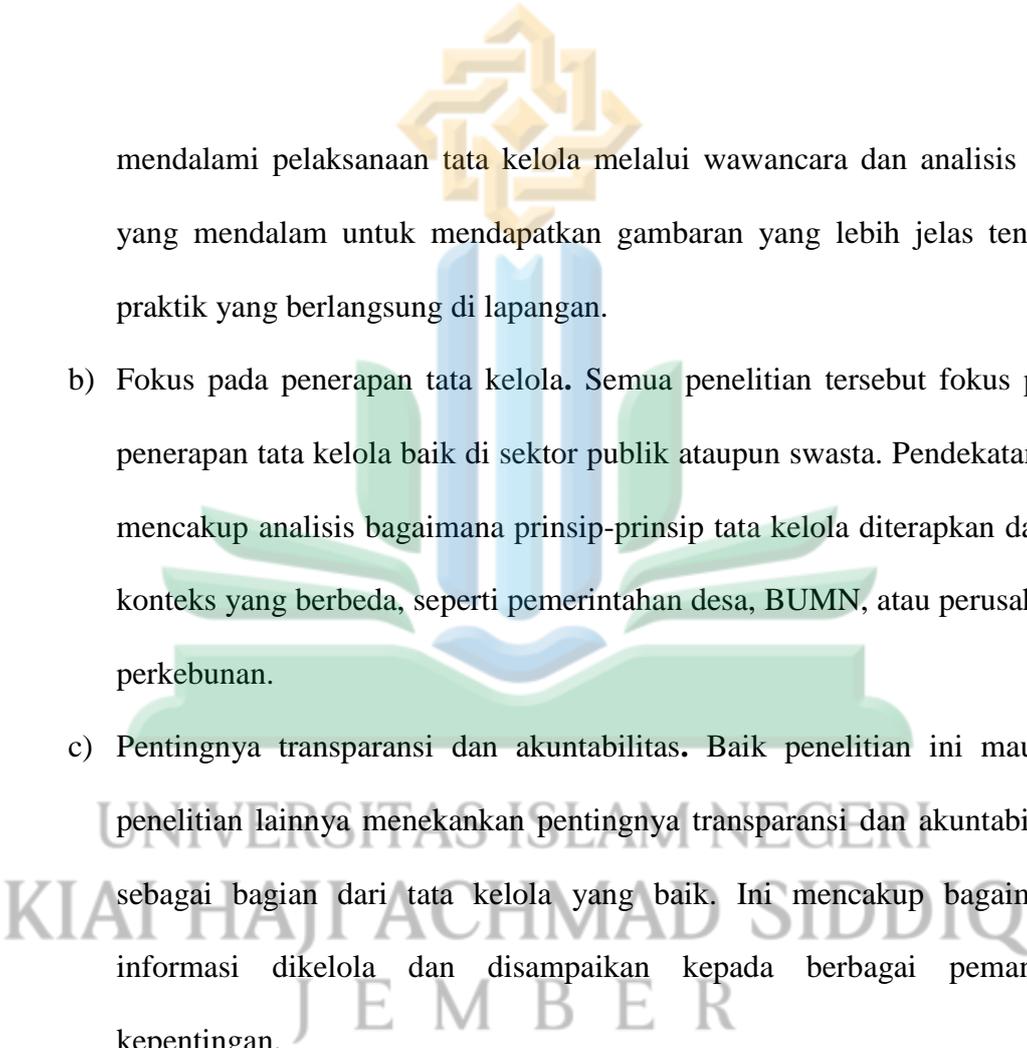
umumnya lebih fokus pada aspek *Good Corporate Governance* secara umum tanpa mengaitkan dengan perspektif Islam.

- 2) Penerapan prinsip tata kelola konvensional serta prinsip Islam. Penelitian ini mengintegrasikan prinsip-prinsip tata kelola konvensional seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kesetaraan, dan independensi dengan nilai-nilai Islam yang mencakup *siddiq*, amanah, *tabligh*, dan *fathonah*. Integrasi ini bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang lebih komprehensif dalam konteks pengelolaan kebun karet.
- 3) Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan. Meskipun beberapa penelitian lain juga membahas partisipasi masyarakat, penelitian ini secara spesifik memberikan penekanan pada peran masyarakat dalam implementasi prinsip tata kelola yang diintegrasikan dengan ekonomi Islam. Hal ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab bersama terhadap pengelolaan sumber daya alam.

Melalui perbedaan-perbedaan ini, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi baru terhadap kajian tata kelola, khususnya dalam konteks pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dari perspektif yang lebih holistik dan integratif.

Berikut adalah beberapa persamaan antara penelitian tentang penerapan tata kelola di Kebun Karet Gunung Gambir PTPN Nusantara dan penelitian-penelitian terdahulu yang telah disebutkan:

- a) Metode penelitian kualitatif. Baik penelitian ini maupun penelitian terdahulu umumnya menggunakan metode penelitian kualitatif. Peneliti



mendalami pelaksanaan tata kelola melalui wawancara dan analisis data yang mendalam untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang praktik yang berlangsung di lapangan.

- b) Fokus pada penerapan tata kelola. Semua penelitian tersebut fokus pada penerapan tata kelola baik di sektor publik ataupun swasta. Pendekatan ini mencakup analisis bagaimana prinsip-prinsip tata kelola diterapkan dalam konteks yang berbeda, seperti pemerintahan desa, BUMN, atau perusahaan perkebunan.
- c) Pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Baik penelitian ini maupun penelitian lainnya menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari tata kelola yang baik. Ini mencakup bagaimana informasi dikelola dan disampaikan kepada berbagai pemangku kepentingan.
- d) Keterlibatan stakeholders. Dalam penelitian terdahulu, ada penekanan pada keterlibatan berbagai pihak (*stakeholders*) dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Hal yang sama juga diharapkan terjadi dalam penelitian tentang Kebun Karet Gunung Gambir, di mana masyarakat lokal diharapkan dapat terlibat dalam pengelolaan kebun.

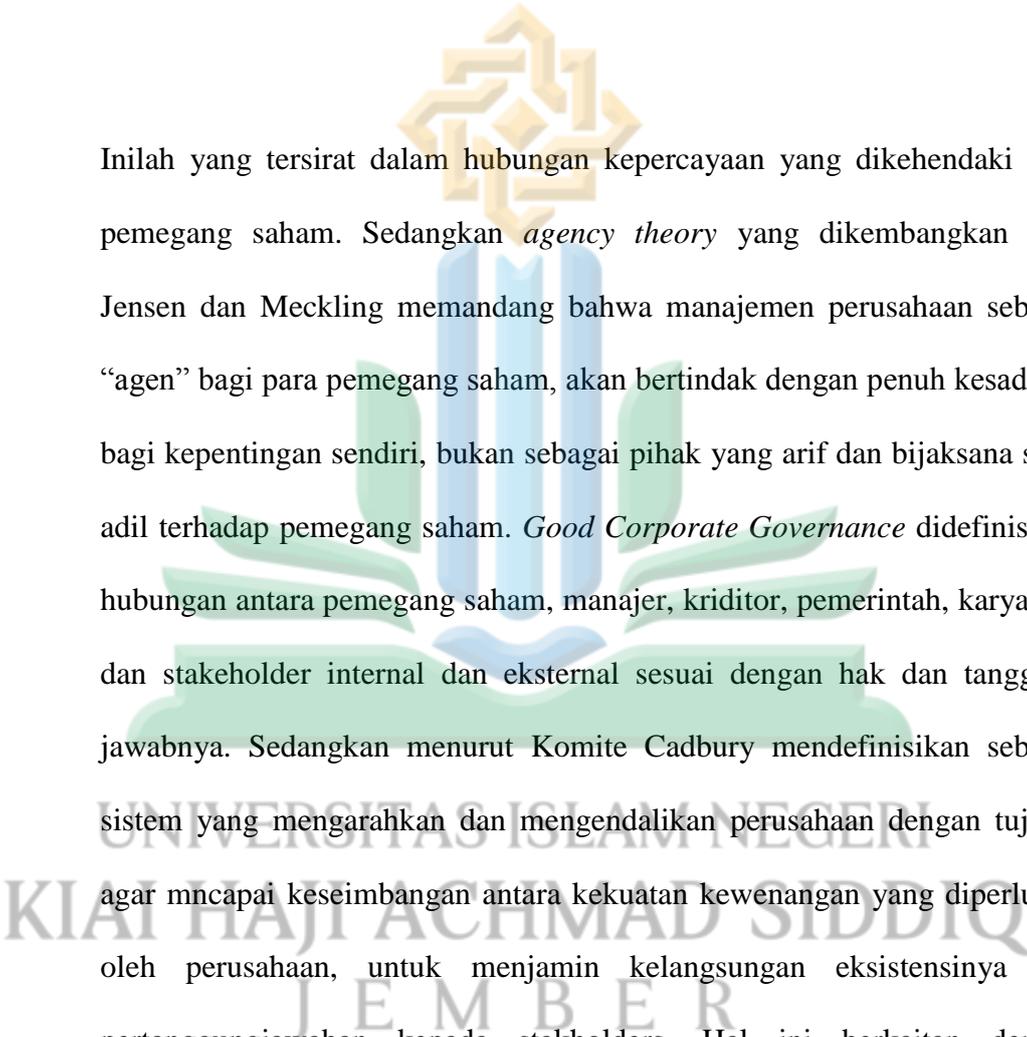
Persamaan-persamaan di atas, penelitian ini menunjukkan kesinambungan dengan upaya-upaya sebelumnya dalam memperbaiki praktik tata kelola di berbagai sektor, serta mengembangkan pemahaman yang lebih luas tentang tata kelola dapat diimplementasikan secara efektif.

B. Kajian Teori

Kajian teori berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai dasar pijakan dalam penelitian, pembahasan secara lebih luas dan mendalam semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

1. Konsep Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)

Istilah tata kelola (*Good Corporate Governance*) Cadbury Report. Isu pertama kali oleh komite Cadbury pada tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai sebagai Cadbury Report. *Good Corporate Governance* semakin berkembang ketika beberapa peristiwa ekomi penting terjadi. seperti krisis keuangan Asia pada tahun 1997, dilanjut dengan kejatuhan perusahaan besar seperti Enron Dan Worddoom tahun 2002, serta krisis subrrime mortgage di Amerika Serikat pada tahun 2008. Beberapa peristiwa tersebut menyadarkan dunia aan pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* didasarkan pada teori Agensi, yang menjelaskan hubungan antara manajemen dan pemilik. Manajemen sebagai agen bertanggung jawab mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*Principal*) sebagai imbalannya akan memperoleh konpensasi sesuai dengan kontrak. Terdapat dua teori utama terkait dengan *Good Corporate Governance* yaitu *stewardship theory* dan *agency theory*. *Stewardship theory* di bangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggungjawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain.



Inilah yang tersirat dalam hubungan kepercayaan yang dikehendaki para pemegang saham. Sedangkan *agency theory* yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai “agen” bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. *Good Corporate Governance* didefinisikan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan dan stakeholder internal dan eksternal sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya. Sedangkan menurut Komite Cadbury mendefinisikan sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholders. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham dan sebagainya.³⁷

Berdasarkan SK Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002, *Corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organisasi BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memerhatikan pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan peundangan dan nilai-nilai etika. Di samping itu juga dapat meningkatkan nilai dan kepercayaan sebuah perusahaan karena *Good*

³⁷ Jensen, Michael C. & William H. Meckling, “*Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure*”, *Journal Of Financial Economics*, 3 (1976), 305-360.

Corporate Governance dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan, dan profesional. Tata kelola perusahaan yang baik adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika.³⁸ Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan sistem, proses dan seperangkat peraturan yang menatur hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. *Good Corporate Governance* dimaksudkan untuk mengatur hubungan tersebut dan mencegah terjadinya kesalahan yang signifikan dalam strategi korporasi serta untuk memastikan bahwa kesalahan yang terjadi dapat segera diperbaiki.³⁹

2. Ruang Lingkup Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)

Menurut Kaen dan Shaw terdapat empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep *Good Corporate Governance* yaitu cakupan atau batasan yang menjelaskan sejauh mana prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik diterapkan dan dijalankan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Ruang lingkup *Good Corporate Governance* sangat luas karena mencakup berbagai aspek dan pihak yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan, termasuk hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, direksi, karyawan, Kreditor, pemerintah, serta pemangku kepentingan internal maupun eksternal lainnya. kreditor. *Good Corporate*

³⁸ Rusdiyanto, Susetyorini Dan Umi Elan, *Good Corporate Governance Teori Implementasi Di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2019), 105-106.

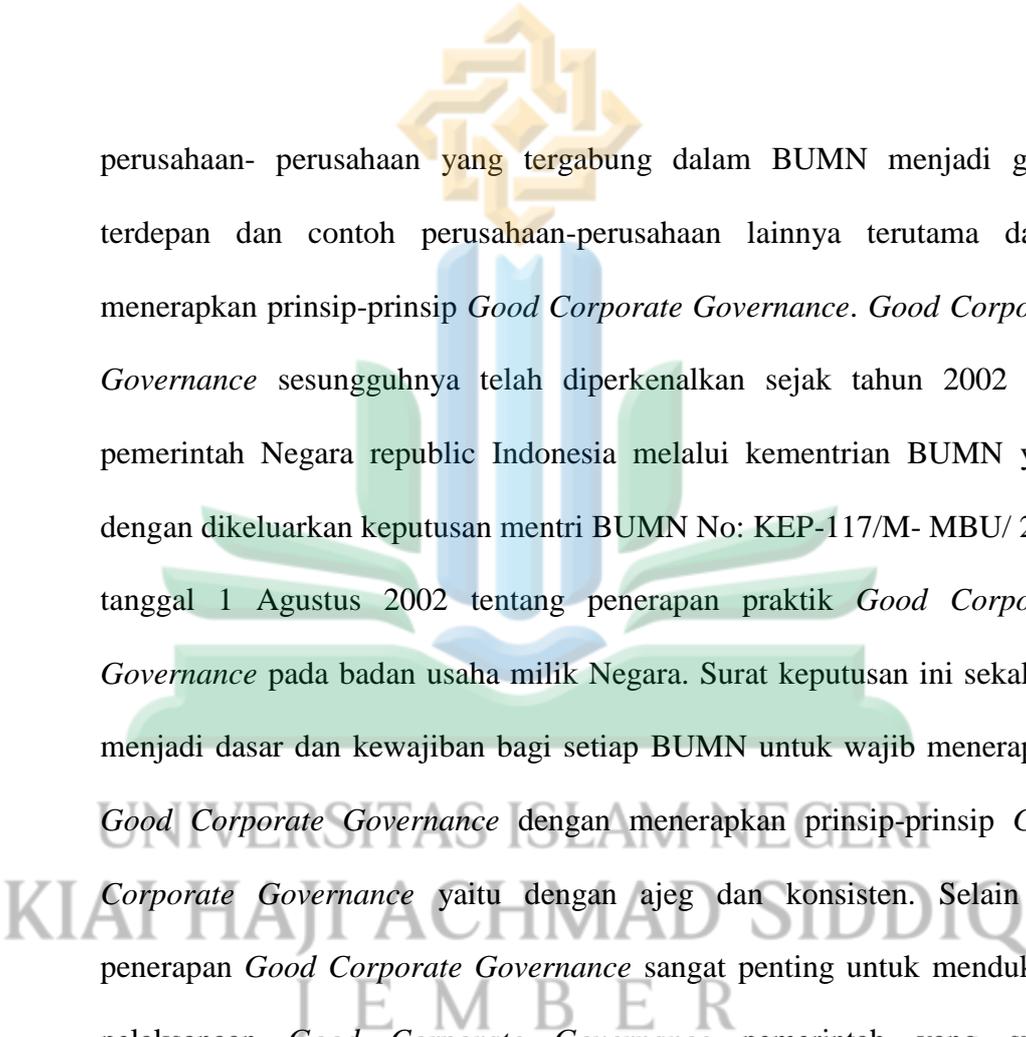
³⁹ Sutedi Adrian, *Good Corporate Governance* (Jakarta:Sinar, 2011) 1.

Governance secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan. Dalam penerapannya agar terlaksana dengan efektif dan efisien untuk mewujudkan konsep *Good Corporate Governance* setidaknya terdapat 5 pilar *Good Corporate Governance (GCG)* yang diterapkan oleh komite nasional kebijakan *Governance*, yang dibentuk berdasarkan keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIIN/08/1999 yang kemudian pedoman tersebut disempurnakan pada tahun 2006 yang kemudian dikenal dengan konsep TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness*). Dan konsep inilah yang nantinya akan banyak dibahas dalam penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* dalam suatu organisasi perusahaan.⁴⁰ Dengan demikian, ruang lingkup *Good Corporate Governance (GCG)* sangat penting untuk memastikan perusahaan dikelola secara profesional, etis, dan berkelanjutan, demi kepentingan semua pihak yang terkait.

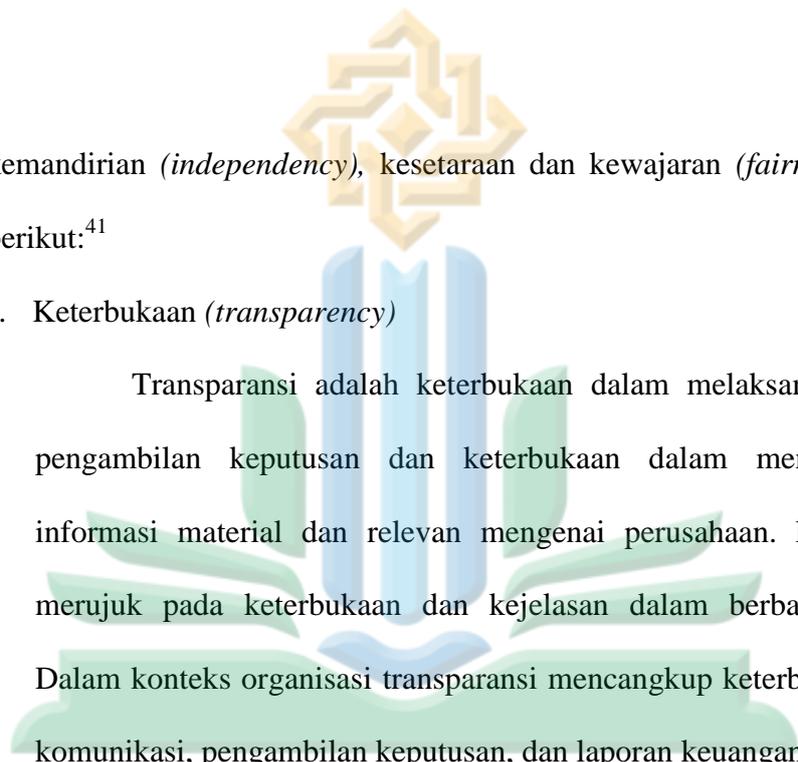
3. Prinsip-prinsip Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)

Perusahaan adalah salah satu genda terdepan dalam meningkatkan sektor perekonomian di Indonesia, baik ditingkat pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat. Kaihatu menyatakan bahwa perusahaan yang tergabung dalam badan usaha milik nasional (BUMN) merupakan pelaku utama dalam perekonomian Indonesia. Oleh karena itu sudah selayaknya

⁴⁰ Eko Sudarmanto, *Good Corporate Governance (GCG)* (Unair: Tim Kreatif Kita Menulis, 2021), 6-7.



perusahaan- perusahaan yang tergabung dalam BUMN menjadi garda terdepan dan contoh perusahaan-perusahaan lainnya terutama dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. *Good Corporate Governance* sesungguhnya telah diperkenalkan sejak tahun 2002 oleh pemerintah Negara republic Indonesia melalui kementerian BUMN yaitu dengan dikeluarkan keputusan menteri BUMN No: KEP-117/M- MBU/ 2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang penerapan praktik *Good Corporate Governance* pada badan usaha milik Negara. Surat keputusan ini sekaligus menjadi dasar dan kewajiban bagi setiap BUMN untuk wajib menerapkan *Good Corporate Governance* dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu dengan ajeg dan konsisten. Selain itu, penerapan *Good Corporate Governance* sangat penting untuk mendukung pelaksanaan *Good Corporate Governance* pemerintah yang sudah ditanamkan pasca krisis moneter tahun 1998 hingga kini sejak reformasi birokrasi tahun 1998, pemerintah Indonesia sesungguhnya telah secara konsisten dan berketetapan hati untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada seluruh sistem birokrasi yang ada di Indonesia. Dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, perusahaan telah menganut pedoman umum tata kelola perusahaan yang baik ditetapkan oleh komite nasional kebijakan *overnance* (KNKG) dengan penerapan tarif sebagai lima (5) pilar dasar dari GCG, yaitu: keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*),



kemandirian (*independency*), kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) sebagai berikut:⁴¹

a. Keterbukaan (*transparency*)

Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. konsep yang merujuk pada keterbukaan dan kejelasan dalam berbagai konteks. Dalam konteks organisasi transparansi mencakup keterbukaan dalam komunikasi, pengambilan keputusan, dan laporan keuangan.

b. Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas dapat diartikan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

c. Tanggung jawab (*responsibility*)

Responsibility adalah konsep yang mencakup kewajiban untuk melakukan tugas tertentu dan menjelaskan tindakan yang diambil. misalnya seorang manajer memiliki tanggung jawab untuk mengawasi timnya dan memastikan bahwa proyek selesai tepat waktu.

⁴¹ Rusdiyanto, Susetyorini Dan Umi Elan, *Good Corporate Governance Teori Implementasi Di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2019), 106-108.

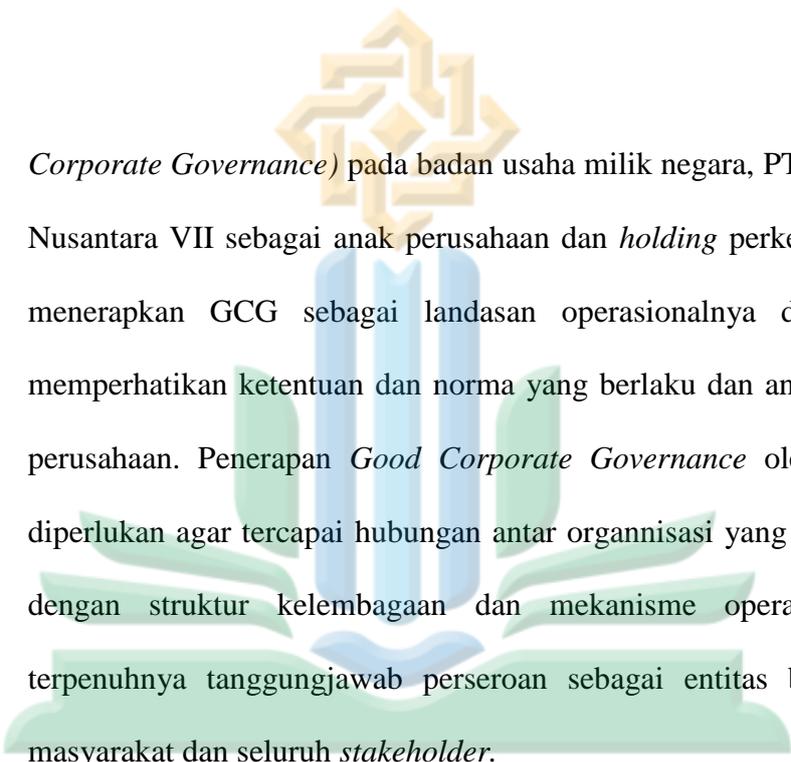
d. Kemandirian (*independency*)

Kemandirian yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prinsip korporasi yang sehat. Bahwa pengelolaan kebun karet dilakukan secara professional dan objektif tanpa adanya konflik kepentingan atau intervensi dari pihak lain seperti pemilik, manajemen, atau pihak ketiga. Misalnya, jika manajer percaya bahwa penggunaan pupuk organik lebih baik untuk kualitas karet, ia dapat memilih untuk menerapkan metode tersebut tanpa harus mendapatkan persetujuan dari pihak lain.

e. Kesetaraan dan kewajaran (*fairness*)

Fairness atau kesetaraan merujuk pada konsep keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan. Dalam suatu perusahaan, *fairness* berarti memberikan hak-hak yang sama kepada semua stakeholders, termasuk karyawan, investor, dan pengan. Contohnya, bonus karyawan berdasarkan prestasi kerja masing-masing bukan berdasarkan posisi atau setatus.

Sesuai surat keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan praktek *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMN. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomer PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good*



Corporate Governance) pada badan usaha milik negara, PT Perkebunan Nusantara VII sebagai anak perusahaan dan *holding* perkebunan wajib menerapkan GCG sebagai landasan operasionalnya dengan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku dan anggaran dasar perusahaan. Penerapan *Good Corporate Governance* oleh perseroan diperlukan agar tercapai hubungan antar organisasi yang mencakup dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional serta terpenuhinya tanggungjawab perseroan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat dan seluruh *stakeholder*.

4. Tujuan Prinsip-prinsip Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)

Tujuan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* berdasarkan peraturan menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: Per-01/MBU/20 adalah:

- a. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN
- b. Mendorong pengelolaan BUMN secara professional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ persero/ organ perum
- c. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional serta meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional

- d. Mendorong agar organ persero dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN

5. Manfaat Prinsip-prinsip Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)

Pada hakikatnya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* merupakan langkah yang penting dalam membangun kepercayaan pasar (*Market Confidence*) dan mendorong arus investasi internasional yang lebih stabil dan bersifat jangka panjang, adapun manfaat dari *Good Corporate*

Governance adalah sebagai berikut:⁴²

- a. Menciptakan nilai tambah (*Value Added*) bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
- b. Memastikan bahwa sasaran yang ditetapkan telah tercapai dan memastikan bahwa aktivitas perusahaan dijaga dengan baik memastikan perusahaan menjalankan praktik-praktik usaha yang sehat.
- c. Memastikan kegiatan-kegiatan perusahaan bersifat transparan.

Manfaat yang disarankan perusahaan dengan mewujudkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* adalah meningkatnya produktivitas dan efisiensi usaha. manfaat lain adalah meningkatnya kemampuan operasional perusahaan dan pertanggungjawaban kepada publik. Selain itu

⁴² Eko Sudarmanto, *Good Corporate Governance*,93.

juga memperkecil praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta konflik kepentingan. *Good Corporate Governance* yang baik dapat mendorong pengelolaan organisasi yang lebih demokrasi (praktisipasi banyak kepentingan), lebih *accountable* (adanya pertanggungjawaban dari setiap tindakan), dan lebih transparan serta akan meningkatkan keyakinan bahwa perusahaan dapat memberikan manfaat jangka panjang.

6. *Good Corporate Governance dalam perspektif Islam*

Islamic Corporate Governance adalah perkembangan lanjut dari konsep *Good Corporate Governance*. Yang disebut terakhir ini terkait dengan seperangkat atauran atau sistem yang memastikan perusahaan bekerja dengan prinsip-prinsip dan kebijakan yang benar. Langkah menuju terbentuknya *Islamic Corporate Governance* diawali dengan spiritual perusahaan, sebuah sistem tata kelola perusahaan yang dalam perspektif Islam berdasarkan paradigma tauhid. *Islamic Corporate Governance* merupakan konsep organisasi dan manajemen profetik yang serba melingkupi semua kegiatan, baik internal maupun eksternal, bisnis perusahaan. Didalamnya terkandung makna sistem, atruktur, proses atau mekanisme, perilaku dan budaya yang mengarahkan dan mengontrol perusahaan sehingga bekerja secara bertanggung jawab terhadap lingkungan dan para *stakeholder*.⁴³ Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* konvensional sebenarnya telah tercangkup prinsip-prinsip *Islamic Good Corporate Governance*. Berdasarkan perspektif syariah, yang dilaksanakan

⁴³ Sanerya Hendrawan, *Spiritual Management: From Personal Enlightenment Towards Islamic Corporate Governance* (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), 201.

oleh Rosulullah SAW. Berikut prinsip yang harus diterapkan dari perspektif syariah dalam mencontoh perilaku nabi, *Good Corporate Governance* nilai atau ajaran syariah ini diantaranya:⁴⁴

a. *Shiddiq*.

Shiddiq yang berarti benar atau jujur bisa diartikan sebagai konsistensi terhadap apa yang dikatakan atau dilakukan dengan tindakan mengacu kebenaran. Mempunyai sikap jujur ialah kunci utama kemajuan seseorang dalam bermasyarakat. Dengan menjunjung tinggi kebenaran, seseorang membangun dasar kemaslahatan dalam hubungan muamalah atau hubungan sosial dan ekonomi dengan orang lain.

Kejujuran merupakan pondasi penting dalam membangun kepercayaan dan keharmonisan dalam bermuamalah yang artinya:⁴⁵

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَۙ لِلّٰهِ شُهَدَآءَۙ بِالْقِسْطِۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍۭ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓاۗ اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۭۙۤ اَبْلَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Ma’idah: 8).

⁴⁴ Karima Indah Permatasari Dan Nabila, “Implemetasi *Good Corporate Governance* (GCG) Dilembaga Perbankan Syariah”, *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 2 (Desember 2022), 105-108.

⁴⁵ Al-Qur’an, 6:8

Ajaran yang memberikan jaminan bahwa sistem tata kelola diterapkan dengan mengutamakan moralitas berupa nilai kejujuran dan integritas yang tinggi. Artinya dalam melakukan tata kelola didalam perusahaan, para *stakeholder* akan berupaya untuk menghindari langkah-langkah yang belum jelas (*subhat*) apalagi yang sifatnya dilarang (*haram*)

b. *Tabligh*

Prinsip *tabligh* atau menyampaikan berarti berkomunikasi dengan baik dan bijak, serta menyampaikan informasi yang benar, mendalam, dan berbobot dalam setiap laporan. Dalam konteks bisnis, prinsip *tabligh* mencakup praktik penyampaian informasi secara jujur, transparan, serta akurat untuk seluruh pemangku kepentingan. Kondisi itu selaras pada ajaran Islam yang menekankan pentingnya menyampaikan pesan dengan benar dan tidak menambah atau mengurangi informasi. Firman Allah SWT menjelaskan bagaimana manusia harus berkata-kata sesuai dengan fakta tanpa menambah atau mengurangi informasi. Komunikasi yang benar dan bermanfaat merupakan bagian penting dari prinsip *tabligh*. dalam firmannya QS.

Al-Maidah ayat 67 yang artinya: ⁴⁶

﴿يَتَأْتِيهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾

⁴⁶ Al-Qur'an, 6:67

Artinya: Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika engkau tidak melakukan (apa yang diperintahkan itu), berarti engkau tidak menyampaikan risalah-Nya. Allah menjaga engkau dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir.” (QS. Al-Ma'idah: 67)”.

Ajaran yang menyampaikan bahwa keterbukaan informasi yang terwujud dalam kesinambungan ketika menerapkan interaksi dan edukasi masyarakat terkait kaidah-kaidah, dan dampak positifnya untuk penggunaan layanan didalam perusahaan.

c. *Amanah*

Al-Amanah yang berarti kesetiaan, ketulusan, dan kejujuran, merupakan kualitas pribadi dan sikap kesetiaan untuk melaksanakan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya, baik berbentuk benda, harta, rahasia, maupun tanggung jawab yang lain. Kondisi itu mencerminkan kepercayaan (*tsiqah*) yang diberikan oleh pihak lain kepada seseorang atau suatu lembaga. Al-Qaradhawi menekankan bahwa satu di antara nilai terpenting dalam bisnis yakni al-amanah atau kejujuran. Kejujuran ialah puncak moralitas iman serta atribut terpenting bagi orang beriman. Tanpa kejujuran, kehidupan beragama tidak akan bertahan serta kehidupan di dunia tidak akan berjalan dengan baik. Seseorang yang jujur secara alamiah ialah seseorang yang bisa dipercaya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Ahzab ayat 72 yang artinya:⁴⁷

⁴⁷ Al-Qur'an, 21:72

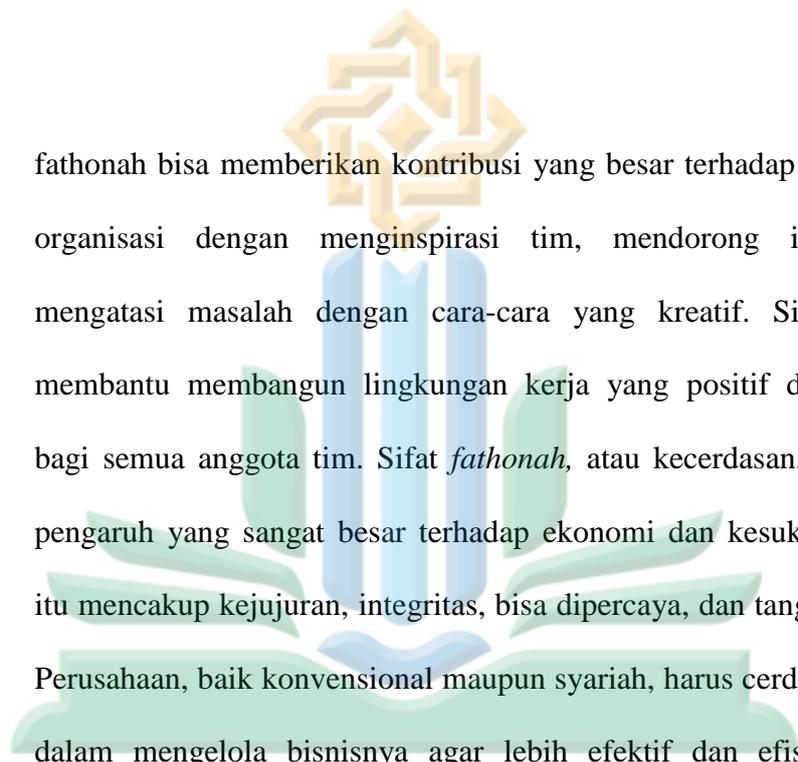
إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ تَحْمِلَهَا
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh*”. (QS. Al-Ahzab: 72).

Ajaran yang berupaya untuk mewujudkan penjagaan ketat atas prinsip kewaspadaan dan kejujuran ketika melakukan tata kelola sampai akhirnya kepercayaan diantara pemilik kebun karet dan pengelola kebun karet tersebut.

d. *Fathonah*

Fathonah yang berarti kecerdasan, kecerdikan, atau akal sehat, mencerminkan sifat seorang pemimpin yang mengerti, memahami, dan sangat menghargai tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan kepadanya. Pemimpin yang mempunyai sifat *fathonah* mampu berpikir kreatif dan mempunyai kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru yang bermanfaat. Kreativitas dan kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru muncul dari seseorang yang mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi dan terus mempelajari berbagai pengetahuan dan informasi, baik yang berkaitan dengan pekerjaan maupun lingkungan sekitarnya. Sifat *fathonah* memungkinkan seorang pemimpin untuk menghadapi tantangan dengan cara yang inovatif dan adaptif, serta mengambil keputusan yang bijak. Dalam konteks manajemen, pemimpin yang

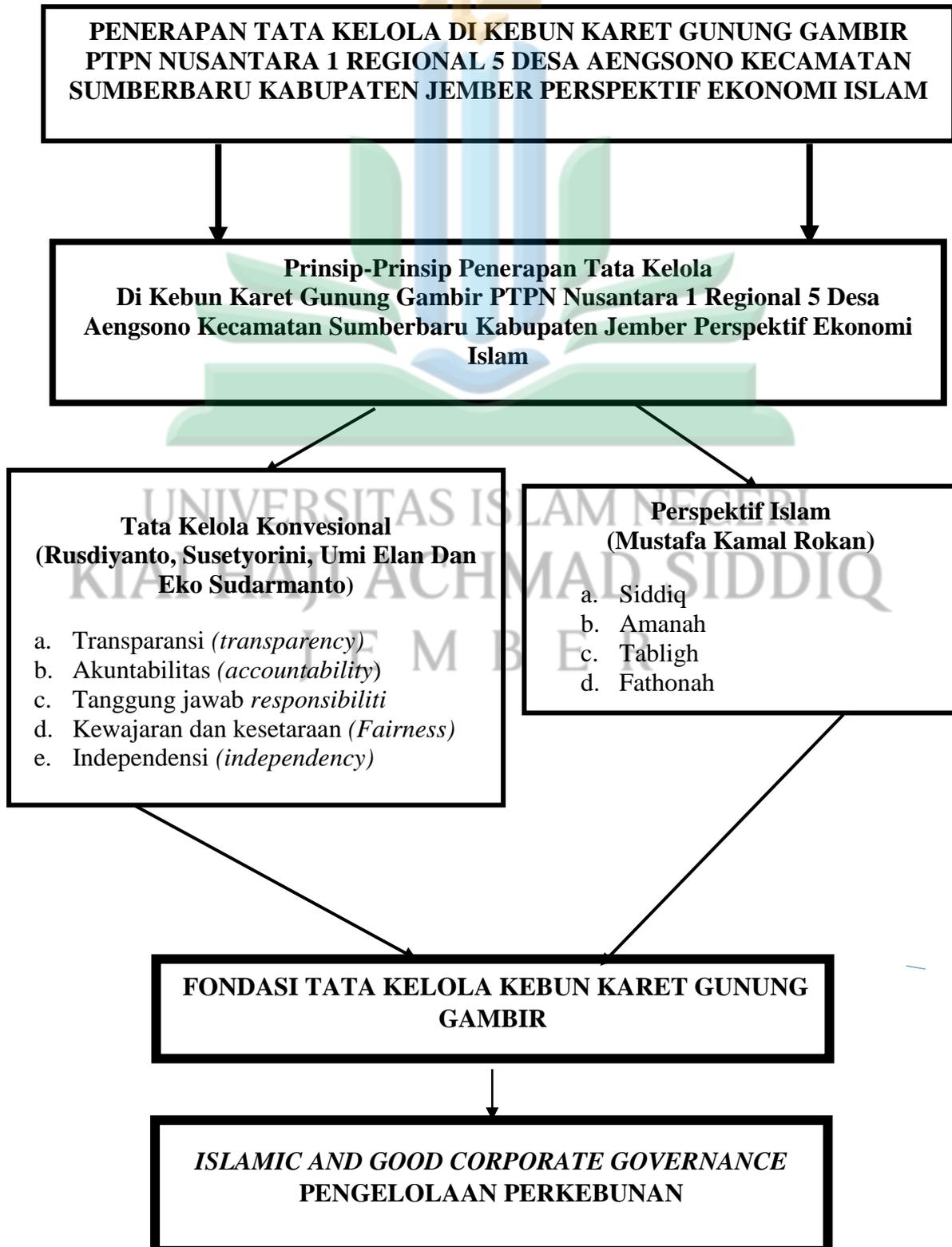


fathonah bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap keberhasilan organisasi dengan menginspirasi tim, mendorong inovasi, dan mengatasi masalah dengan cara-cara yang kreatif. Sifat ini juga membantu membangun lingkungan kerja yang positif dan produktif bagi semua anggota tim. Sifat *fathonah*, atau kecerdasan, mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap ekonomi dan kesuksesan bisnis. Itu mencakup kejujuran, integritas, bisa dipercaya, dan tanggung jawab. Perusahaan, baik konvensional maupun syariah, harus cerdas dan cerdik dalam mengelola bisnisnya agar lebih efektif dan efisien. Berikut

beberapa prinsip yang diterapkan oleh Ajaran yang memberikan jaminan bahwa praktik tata kelola yang diimplementasikan secara profesional.⁴⁸

⁴⁸ E. Safira, O. Supranto, "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemenuhan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2 (Juni, 2017),78.

C. Kerangka Konseptual





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metodologi penelitian kualitatif adalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena sosial, budaya, perilaku manusia secara mendalam. Dari pendekatan ini berfokus pada eksplorasi makna, pengalaman, perspektif individu atau kelompok dalam konteks tertentu. karena dalam penelitian ini nantinya akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif atau berupa kata-kata yang tertulis. Menurut Bogdan dan Taylor, kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati juga diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh).⁴⁹

Dengan penelitian kualitatif ini mencoba mengkonstruksi suatu realitas sosial yang ada dan memahami maknanya. Hal yang lazim dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah peneliti dilibatkan dalam interaksi dengan realitas yang diperiksa. Dengan demikian, teori yang dihasilkan mendapatkan pijakan yang kuat dalam kenyataan kontekstual dan historis. Desain penelitian kualitatif memilih fokus penelitian yang berisi deskripsi tentang dimensi apa yang menjadi pusat perhatian, dan itu akan dibahas secara mendalam dan

⁴⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek* (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), 82.

menyeluruh.⁵⁰ Sedangkan untuk jenis pendekatan dalam penelitian kualitatif menggunakan jenis studi kasus (*case study*) yang mana metode penelitian yang mendalam terhadap satu kasus tertentu, seperti individu, kelompok, organisasi atau peristiwa. Penelitian bertujuan untuk memahami fenomena secara menyeluruh dalam konteks spesifik tentang penerapan tata kelola kebun karet Gunung Gambir Pada PTPN nusantara di Desa Kaliglagah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember perspektif ekonomi Islam.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian dilakukan. Adapun lokasi penelitian di Jl. Perkebunan Gunung Gambir, Tampingan, Desa Aengsono, Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, Jawa Timur 68156. Peneliti memilih lokasi sebagaimana disebut karena beberapa alasan yang dapat dipertimbangkan diantaranya:

1. Potensi wisata alam lahan kebun teh alam sekitar dikenal dengan keindahan alamnya, termasuk lahan kebun teh yang menarik wisatawan. Hal ini dapat digunakan sebagai objek wisata pendukung seperti spot foto, jogging track, lapangan tenis, dan kolam renang.
2. Pengembangan ekonomi masyarakat penghasilan dari hasil perkebunan yang mana masyarakat di Gunung Gambir mendapatkan penghasilan utama dari hasil perkebunan seperti teh, karet, dan kopi. Perkembangan perkebunan ini telah membawa perubahan ekonomi dan sosial yang signifikan masyarakat setempat.

⁵⁰ Nurul Widyawati Islami Rahayu dkk , “*Good Service Governance Using Multiple Agency In The Management Of Zakat, International Journal of Management and Administrative Sciences (IJMAS)*”, 6 (2017), 20.

3. Pengaruh modal transformasi sarana transformasi penting dalam sektor perekonomian. Masyarakat dapat menjual hasil perkebunan
4. Potensi wisata lokal dan menjadi destinasi wisata kebun teh Gunung Gambir telah mengalami kemajuan pesat dalam bidang pariwisata.

C. Kehadiran Peneliti

Untuk mendapatkan data sebanyak mungkin di lapangan, maka peneliti serta dibantu orang lain menjadi alat pengumpul data utama. Dalam penelitian kualitatif, manusia menjadi instrumen utamanya yang berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan.⁵¹ Sedangkan instrumen selain manusia dapat pula digunakan, namun fungsinya hanya sebagai pendukung dan pembantu dalam penelitian.⁵²

Peneliti menjadi instrumen utama sehingga dapat menggali masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, peneliti dituntut aktif dalam memuat rencana penelitian, proses, dan pelaksanaan penelitian. Ini akan menjadi faktor kevalidan dari keseluruhan proses dan hasil penelitian. Peneliti memilih melakukan penelitian kualitatif berdasarkan pengalamannya sebab ia juga berperan sebagai instrumen kunci. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan sebagaimana salah satu ciri penelitian dalam pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti.

⁵¹ Robert K. Yin, *Qualitative Research : From Start to Finish* (New York : Guilford Press, 2011), 29.

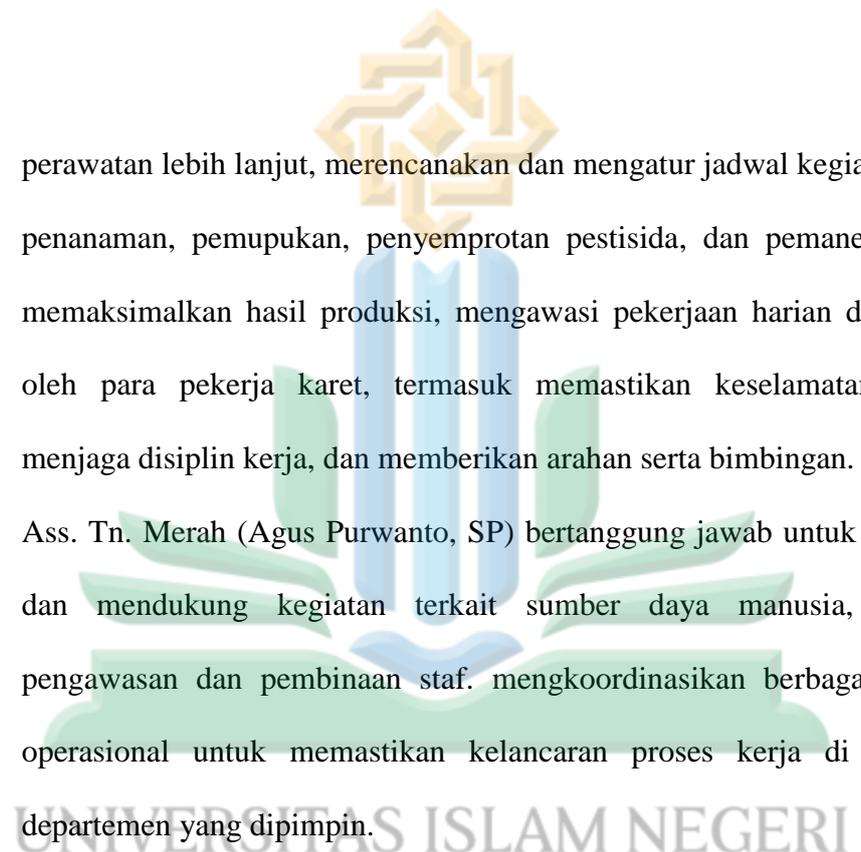
⁵² Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 121.

D. Subjek Penelitian

Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive*, yaitu: teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu.⁵³ Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling paham mengenai informasi terkait seputar sistem pelayanan instansi tersebut, serta pihak-pihak terkait secara struktural. Dalam penelitian ini, subjek penelitian atau informan yang terlibat dalam mengatasi permasalahan yang dikaji di antaranya:

1. Manajer (Dedi Irawanto, SP.) tugasnya merencanakan strategi jangka panjang dan pendek untuk mencapai tujuan perusahaan, mengatur sumber daya dan personel untuk melaksanakan rencana dengan efisien, memberikan arahan kepada tim atau departemen dalam pelaksanaan tugas mereka, memantau dan mengevaluasi kinerja untuk memastikan bahwa tujuan tercapai, mengelola dan mengembangkan tim kerja melalui rekrutmen, pelatihan, dan evaluasi kinerja.
2. Asisten Manajer (Hendro Setyo Wibowo, SP.) tugasnya sebagai pendukung utama bagi manajer utama atau kepala departemen dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk membantu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian operasional harian, memastikan koordinasi yang efektif di antara anggota tim atau departemen yang mereka pimpin.
3. Mandor Danton (Sugianto) tugasnya memastikan kondisi kebun karet tetap baik dan optimal untuk produksi. ini termasuk memantau pertumbuhan tanaman, kesehatan tanaman, dan mengidentifikasi area yang memerlukan

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 95.



perawatan lebih lanjut, merencanakan dan mengatur jadwal kegiatan seperti penanaman, pemupukan, penyemprotan pestisida, dan pemanenan untuk memaksimalkan hasil produksi, mengawasi pekerjaan harian di lapangan oleh para pekerja karet, termasuk memastikan keselamatan mereka, menjaga disiplin kerja, dan memberikan arahan serta bimbingan.

4. Ass. Tn. Merah (Agus Purwanto, SP) bertanggung jawab untuk mengelola dan mendukung kegiatan terkait sumber daya manusia, termasuk pengawasan dan pembinaan staf. mengkoordinasikan berbagai kegiatan operasional untuk memastikan kelancaran proses kerja di unit atau departemen yang dipimpin.

5. Admin 1 (Iram) admin bertanggung jawab untuk mengelola arsip dokumen penting, baik yang aktif maupun yang disimpan sebagai arsip, melakukan rekapitulasi data yang masuk dan menyusunnya dalam bentuk laporan kerja untuk digunakan oleh manajemen, mengatur jadwal kegiatan perusahaan, termasuk pertemuan dan perjalanan dinas, agar semua kegiatan berjalan dengan efisien

6. Manajer operasional (Imam) tugasnya bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan semua aspek operasional dalam suatu organisasi, berperan penting dalam memastikan bahwa proses produksi berjalan lancar, sumber daya digunakan secara optimal, dan kualitas produk atau layanan yang dihasilkan memenuhi standar ditetapkan.

E. Teknik Pengumpulan Data

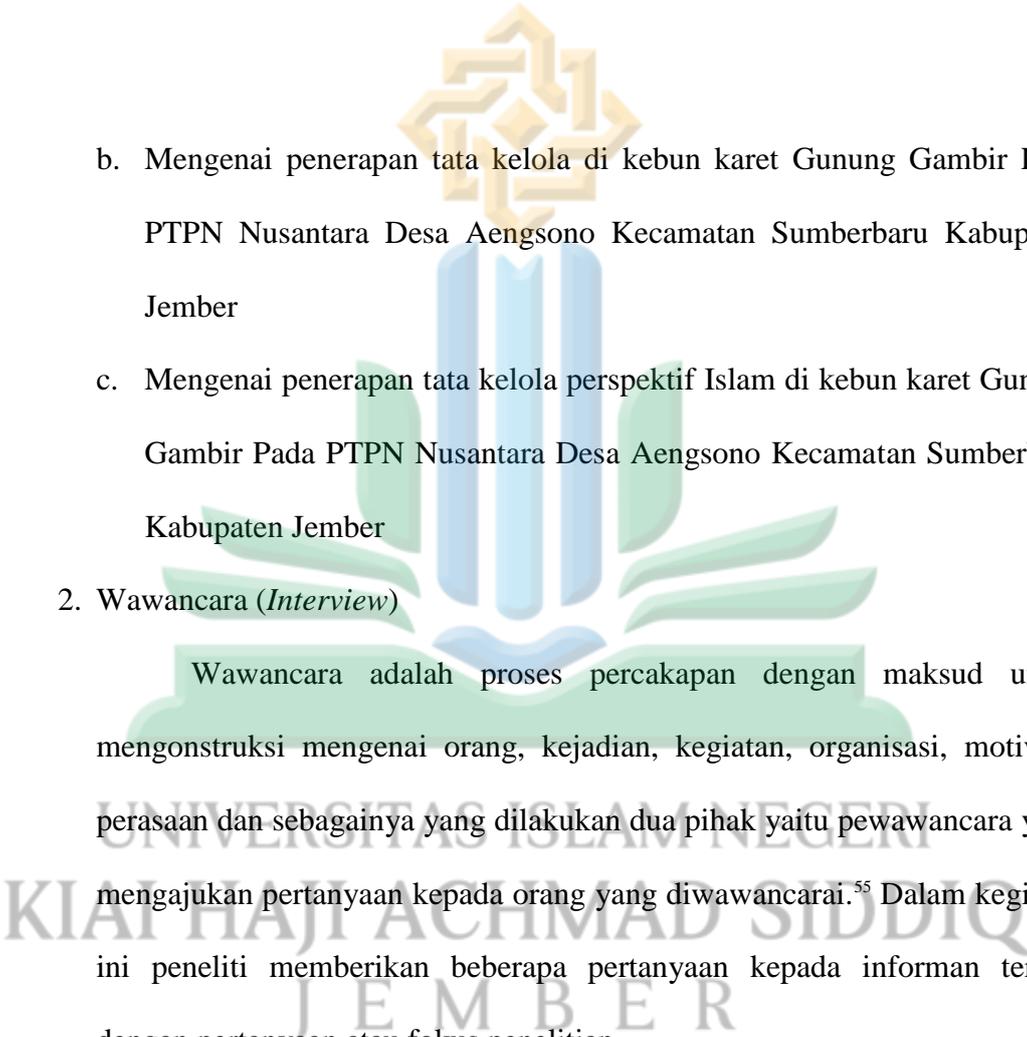
Pengumpulan data pada jenis penelitian kualitatif menggunakan peneliti sebagai instrumen utama untuk mencari data dengan berinteraksi secara simbolik dengan informan atau subjek yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis.⁵⁴ Dalam melakukan metode observasi ini, peneliti melakukan pengamatan di lokasi tempat peneliti untuk menggali informasi dan mencatat hal-hal yang menjadi fokus permasalahan peneliti terkait dengan gejala-gejala penelitian. Jenis observasi yang digunakan peneliti adalah menggunakan metode observasi partisipasi pasif. Peneliti menggunakan observasi partisipasi pasif karena dalam penelitiannya peneliti tidak ikut andil dalam segala kegiatan atau kehidupan yang dilakukan oleh subyek penelitian. Peneliti hanya berperan sebagai pengamat dari luar, sehingga data yang diperoleh berasal dari sudut pandang eksternal. Adapun data yang diperoleh dengan menggunakan teknik ini yaitu:

- a. Mengenai lokasi penelitian serta keadaan sekitar lokasi penelitian di kebun karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara Desa Aengsono Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember

⁵⁴ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Yogyakarta: Erlangga, 2009), 101.

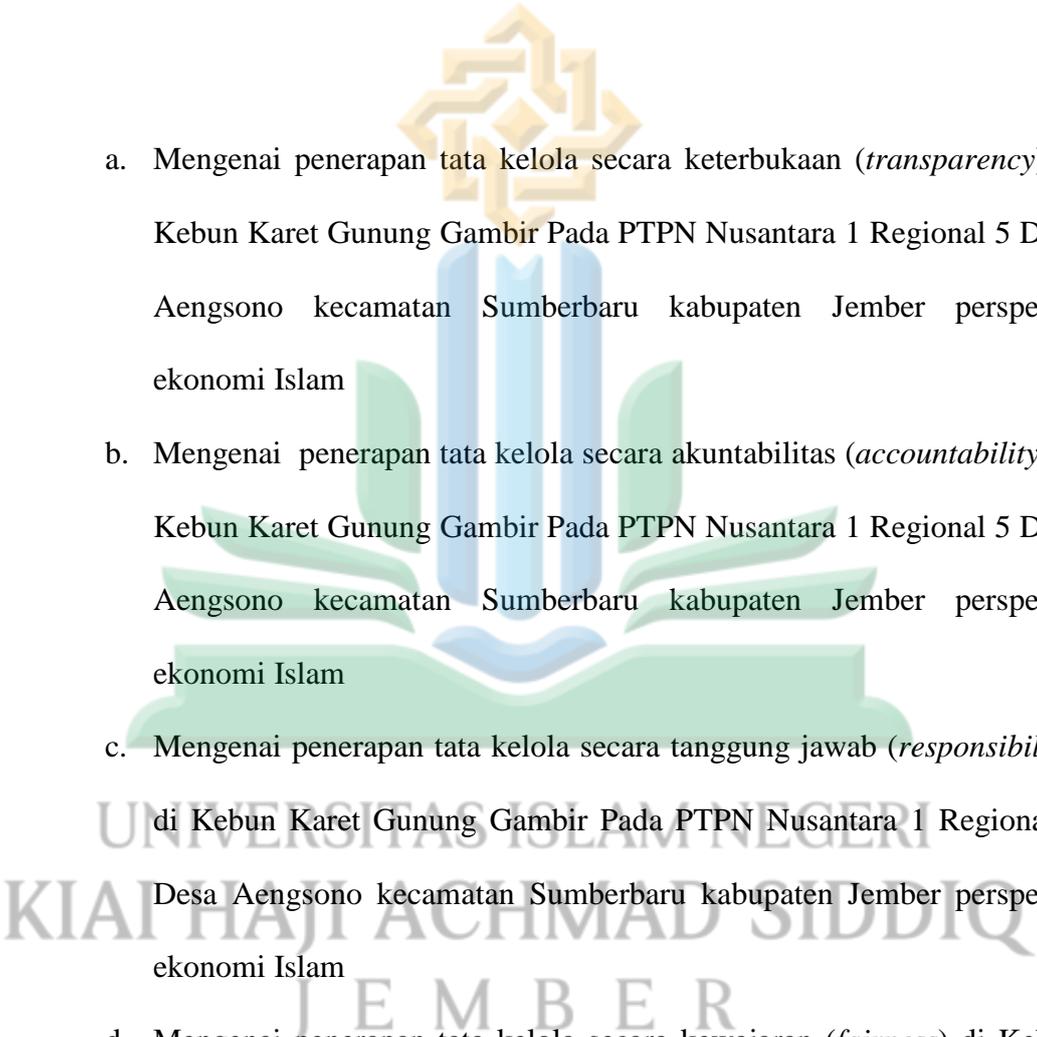
- 
- b. Mengenai penerapan tata kelola di kebun karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara Desa Aengsono Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
 - c. Mengenai penerapan tata kelola perspektif Islam di kebun karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara Desa Aengsono Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan kepada orang yang diwawancarai.⁵⁵ Dalam kegiatan ini peneliti memberikan beberapa pertanyaan kepada informan terkait dengan pertanyaan atau fokus penelitian.

Penelitian menggunakan jenis wawancara semi terstruktur yaitu peneliti telah membuat instrumen sebagai pedoman saat melakukan wawancara, tetapi pelaksanaan wawancara tidak terikat penuh oleh pedoman dan lebih bersifat terbuka. Pedoman wawancara digunakan untuk menghindari beberapa permasalahan yang terlupakan oleh peneliti dan digunakan sebagai bimbingan sehingga proses wawancara bisa lebih terarah dan terstruktur. Adapun teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

⁵⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 115.

- 
- a. Mengenai penerapan tata kelola secara keterbukaan (*transparency*) di Kebun Karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Aengsono kecamatan Sumberbaru kabupaten Jember perspektif ekonomi Islam
- b. Mengenai penerapan tata kelola secara akuntabilitas (*accountability*) di Kebun Karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Aengsono kecamatan Sumberbaru kabupaten Jember perspektif ekonomi Islam
- c. Mengenai penerapan tata kelola secara tanggung jawab (*responsibility*) di Kebun Karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Aengsono kecamatan Sumberbaru kabupaten Jember perspektif ekonomi Islam
- d. Mengenai penerapan tata kelola secara kewajaran (*fairness*) di Kebun Karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Aengsono kecamatan Sumberbaru kabupaten Jember perspektif ekonomi Islam
- e. Mengenai penerapan tata kelola secara kemandirian (*independency*) di Kebun Karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Aengsono kecamatan Sumberbaru kabupaten Jember perspektif ekonomi Islam

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari

seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan seperti catatan harian, biografi. Maka dari itu yang akan terjadi penelitian dari observasi dan wawancara akan menjadi lebih dapat dianggap apabila didukung oleh adanya dokumentasi.⁵⁶ Adapun data yang didokumentasikan oleh peneliti meliputi:

- a. Profil PTPN Kebut Karet Gunung Gambir Nusantara.
- b. Visi dan Misi PTPN Kebut Karet Gunung Gambir Nusantara.
- c. Struktur Organisasi PTPN Kebut Karet Gunung Gambir Nusantara.
- d. Proses Perizinan Penelitian

F. Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data dimulai dengan menyusun sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami diri sendiri maupun orang lain.⁵⁷

Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara naratif yang mana peneliti mengumpulkan data berupa cerita, narasi. misalnya dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi. Data ini kemudian diurai untuk mengidentifikasi tema utama, plot, struktur cerita, serta konteks sosial yang mempengaruhi narasi tersebut. Dengan

⁵⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 206.

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 244.

demikian, analisis naratif tidak hanya melihat apa yang dikatakan, tetapi juga bagaimana cerita itu disampaikan. Aktivitas dalam analisis data, yaitu:

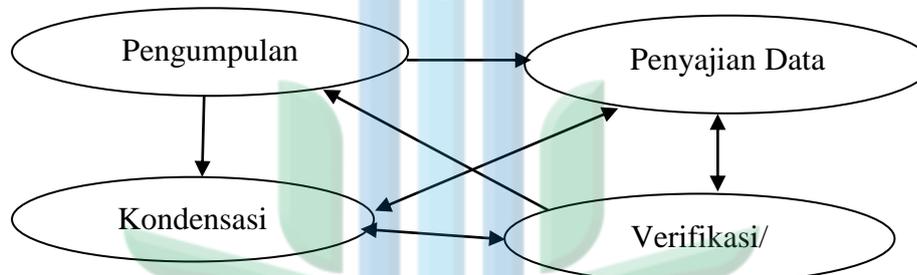


Diagram 1 Analisa Data Model Naratif Sumber: Miles, Huberman dan Saldana⁵⁸

1. Pengumpulan Data

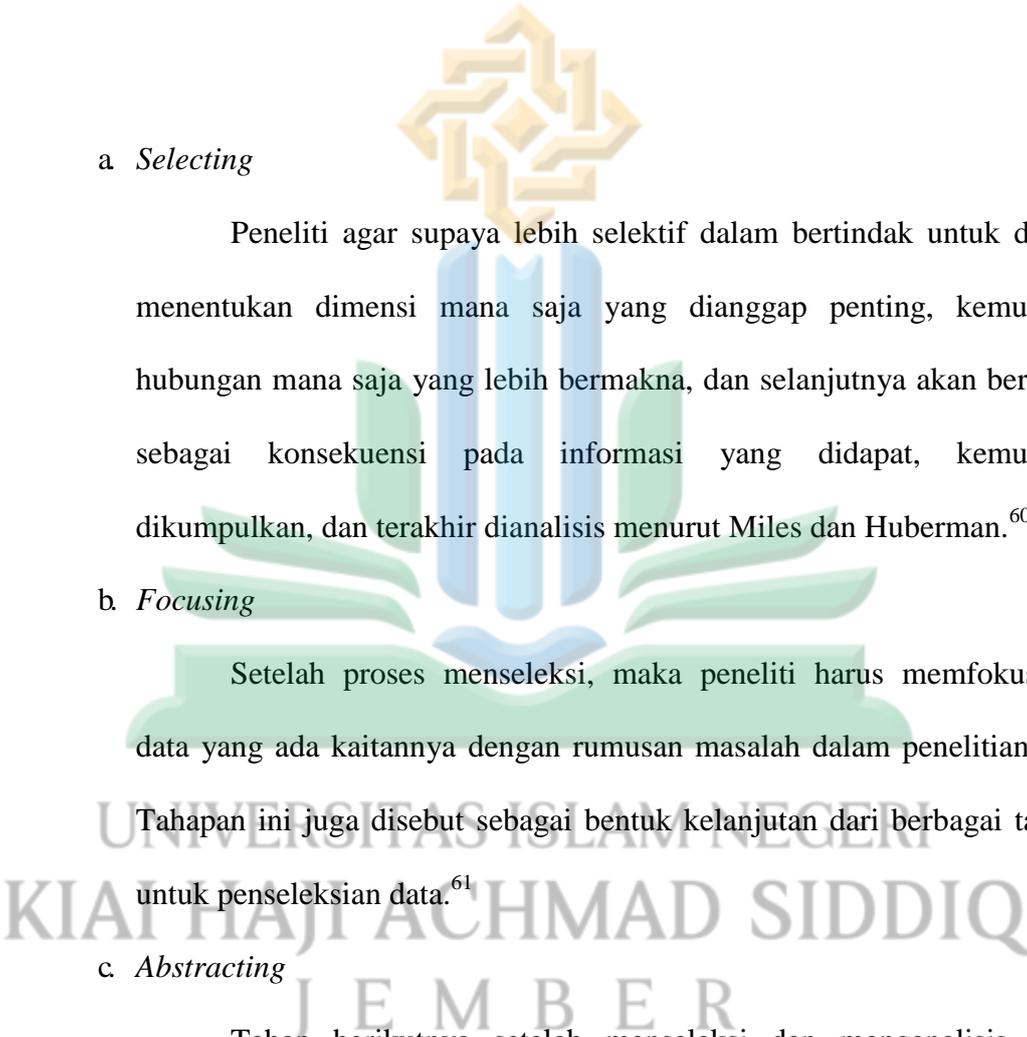
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, serta mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Reduksi data merupakan bentuk analisis data yang merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.⁵⁹

2. Kondensasi Data

Memasuki langkah selanjutnya yaitu tentang kondensasi data akan diuraikan sebagai berikut:

⁵⁸ Miles, Huberman dan Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Method Sourcebook* (California: SAGE Publication, 2014), 14.

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 246–47.



a. *Selecting*

Peneliti agar supaya lebih selektif dalam bertindak untuk dapat menentukan dimensi mana saja yang dianggap penting, kemudian hubungan mana saja yang lebih bermakna, dan selanjutnya akan berlaku sebagai konsekuensi pada informasi yang didapat, kemudian dikumpulkan, dan terakhir dianalisis menurut Miles dan Huberman.⁶⁰

b. *Focusing*

Setelah proses menseleksi, maka peneliti harus memfokuskan data yang ada kaitannya dengan rumusan masalah dalam penelitiannya.

Tahapan ini juga disebut sebagai bentuk kelanjutan dari berbagai tahap untuk penseleksian data.⁶¹

c. *Abstracting*

Tahap berikutnya setelah menseleksi dan menganalisis data adalah tahap abstraksi atau tahap untuk menyimpulkan rangkuman inti, membuat proses, dan berbagai macam pernyataan yang sekiranya perlu dijaga agar tetap berada pada jalurnya. Tahapan ini berfungsi untuk mengevaluasi data yang telah dikumpulkan, khususnya yang ada kaitannya dengan kecukupan dan kualitas data.

d. *Simplifying and Transforming*

Tahap ini berfungsi untuk menyederhanakan dan mentransformasikan hasil dari data penelitian dengan melalui seleksi

⁶⁰ Miles, Huberman dan Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Method Sourcebook*, 18.

⁶¹ Miles, Huberman dan Saldana, *Qualitative Data Analysis:*, 19.

yang ketat, diuraian dan diringkas secara singkat, kemudian data tersebut digolongkan dalam suatu pola yang lebih luas.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Peneliti menyampaikan dan menyajikan data hasil penelitiannya dalam bentuk uraian-uraian.

4. Verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Menurut Miles dan Huberman verifikasi adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Kesimpulan dalam hal ini merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Adapun kesimpulan yang dapat di tarik oleh peneliti adalah setelah diadakan *cross check* terhadap sumber lain baik melalui wawancara ataupun dokumentasi. Penyajian data merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menampilkan data yang diperoleh yang telah terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga menjadi suatu informasi yang mudah dipahami.

G. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep kesahihan (validitas) dan keterandalan (reliabilitas). Teknik keabsahan data yang diambil oleh peneliti yaitu menggunakan *triangulasi* sumber dan teknik pengumpulan data. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.⁶² Maksudnya adalah data yang diperoleh dengan wawancara kemudian dicek dengan observasi dan dokumentasi. Menurut Moleong yang dimaksud keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi mendemonstrasikan nilai yang benar, menyediakan dasar agar hal itu bisa diterapkan dan memperbolehkan keputusan yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya. Untuk menetapkan keabsahan data dapat diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada 4 kriteria yang digunakan yaitu: dapat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan dan kepastian. Teknik keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan triangulasi. Menurut Moleong triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu study sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Triangulasi dilakukan dengan cara triangulasi sumber data dan triangulasi metode data. Menurut Lexy J Moleong *Triangulasi* dalam

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 274.

pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara, dan berbagai waktu dengan penjelasan sebagai berikut:⁶³

1. Triangulasi sumber

Menurut Patton dikutip dari Moleong yaitu triangulasi dengan berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara yang sama dalam pertanyaan tapi dengan sumber berbeda. Dari hasil sumber data tersebut, peneliti kemudian mengategorikan dan mendeskripsikan,

mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan yang signifikan untuk dihasilkan kesimpulan. Sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh untuk menguji kredibilitas data tentang gaya kepemimpinan seseorang, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan ke bawah yang dipimpin, ke atas yang menugasi, dan ke teman kerja merupakan kelompok kerjasama.

2. Triangulasi teknik

Menurut Patton dikutip dari Moleong yaitu triangulasi dengan metode data adalah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi kemelencengan dalam pengumpulan data. Setelah dilakukan teknik keabsahan data

⁶³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 94-95.

menggunakan triangulasi, peneliti akan menggunakan *member check* untuk melakukan kredibilitas data. Jadi tujuan *member check* agar informasi yang diperoleh dan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data dan informan. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi.

Menurut Lexy J Moleong triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu. Triangulasi digunakan untuk mengetahui keabsahan data dari penelitian.

Menurut Lexy J Moleong penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi metode data yang berarti membandingkan, mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informan yang diperoleh melalui sumber yang berbeda.⁶⁴

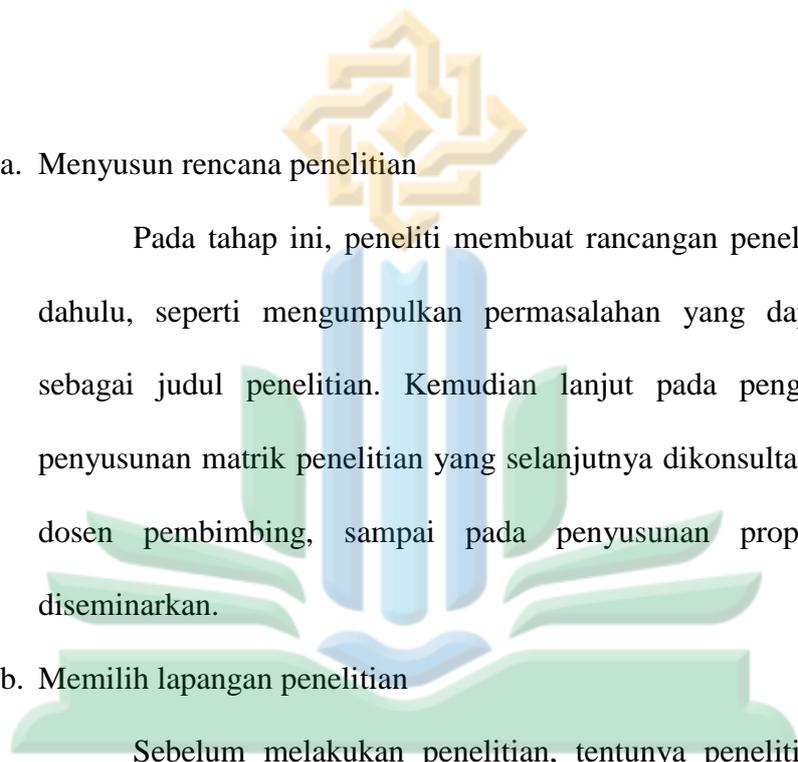
H. Tahap-Tahap Penelitian

Pada bagian ini, maka peneliti menguraikan proses pelaksanaan penelitian yang dilakukan peneliti. Proses penelitian yang dilakukan peneliti mulai awal hingga akhir maka perlu diuraikan dalam tahap-tahap penelitian. Adapun tahap-tahap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pra Lapangan

Dalam penelitian pra-lapangan terdapat lima tahapan yang dilalui peneliti, diantaranya:

⁶⁴Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 330



a. Menyusun rencana penelitian

Pada tahap ini, peneliti membuat rancangan penelitian terlebih dahulu, seperti mengumpulkan permasalahan yang dapat diangkat sebagai judul penelitian. Kemudian lanjut pada pengajuan judul, penyusunan matrik penelitian yang selanjutnya dikonsultasikan dengan dosen pembimbing, sampai pada penyusunan proposal hingga diseminarkan.

b. Memilih lapangan penelitian

Sebelum melakukan penelitian, tentunya peneliti harus telah memutuskan dimana letak lokasi penelitiannya akan dilaksanakan.

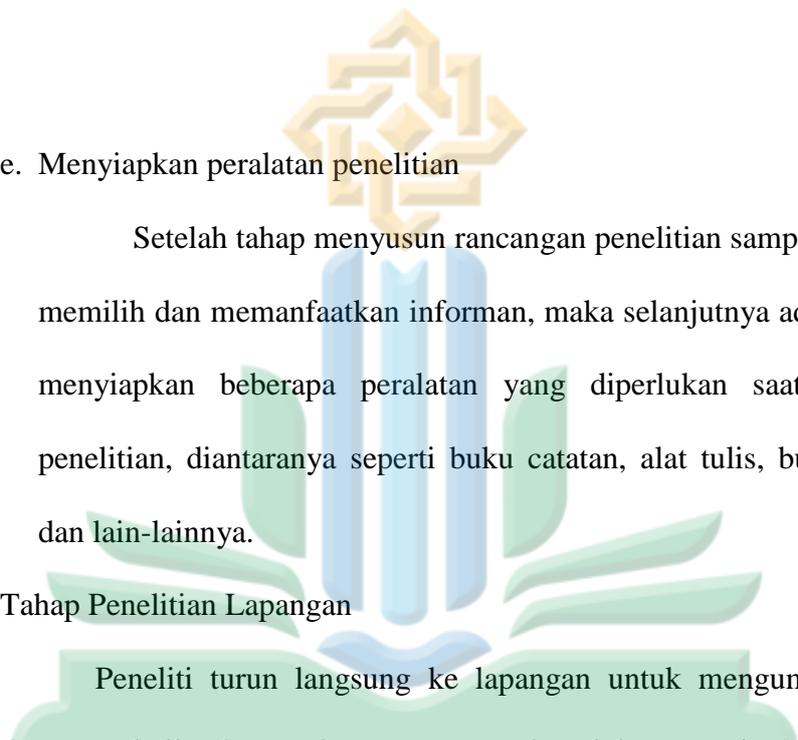
Peneliti memilih lokasi di Jl. Perkebunan Gunung Gambir, Tampingan, Desa Kaliglagah, Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, Jawa Timur 68156.

c. Menilai lapangan

Peneliti melakukan penelitian lapangan untuk lebih latar belakang objek penelitian, lingkungan penelitian dan lingkungan informan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam menggali data.

d. Memilih dan memanfaatkan informan

Pada tahap ini, peneliti memilih beberapa informan yang dianggap memberikan informasi yang layak dari penelitian peneliti.



e. Menyiapkan peralatan penelitian

Setelah tahap menyusun rancangan penelitian sampai pada tahap memilih dan memanfaatkan informan, maka selanjutnya adalah peneliti menyiapkan beberapa peralatan yang diperlukan saat melakukan penelitian, diantaranya seperti buku catatan, alat tulis, buku referensi dan lain-lainnya.

2. Tahap Penelitian Lapangan

Peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Aktivitas pada tahap penelitian yaitu:

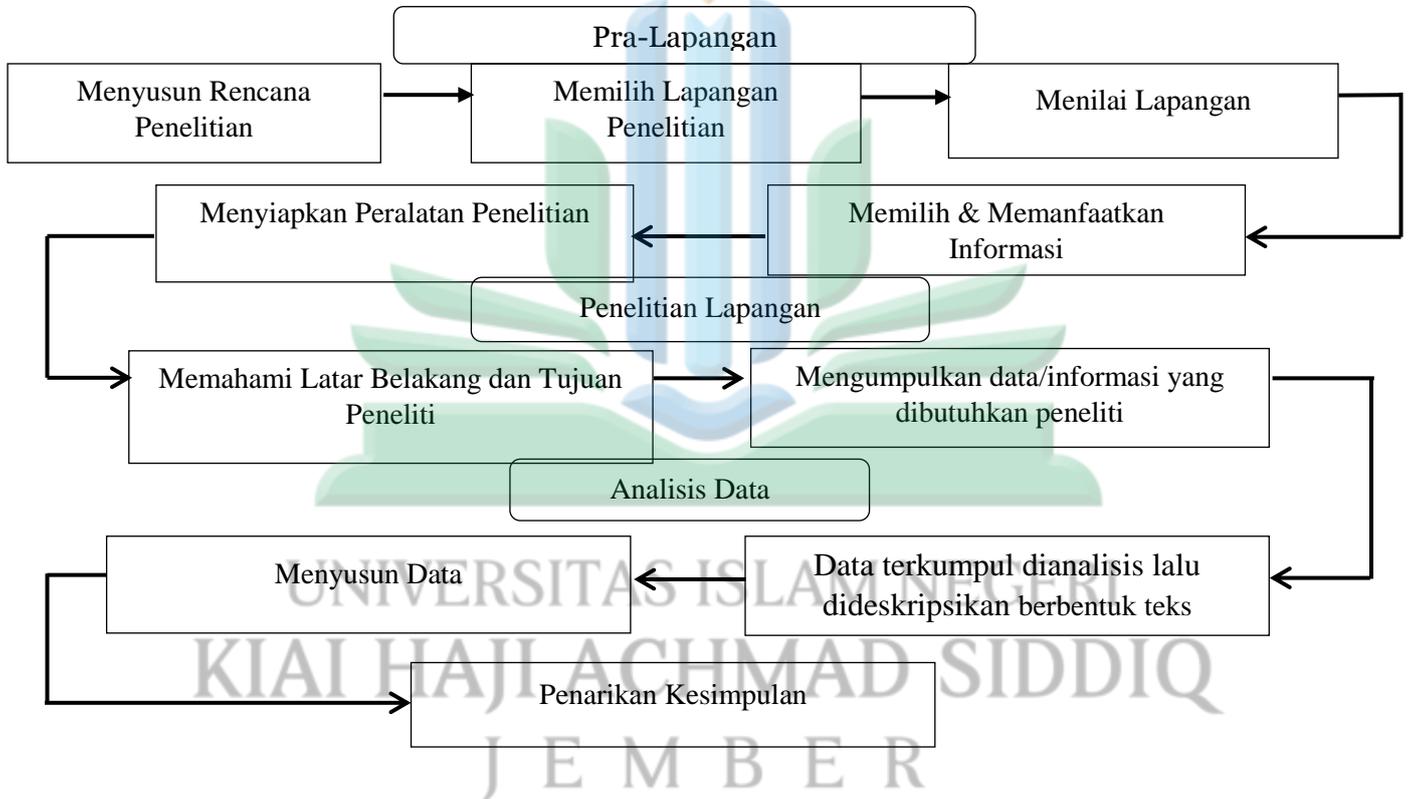
- a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian
- b. Mengumpulkan data atau informan yang dibutuhkan peneliti.

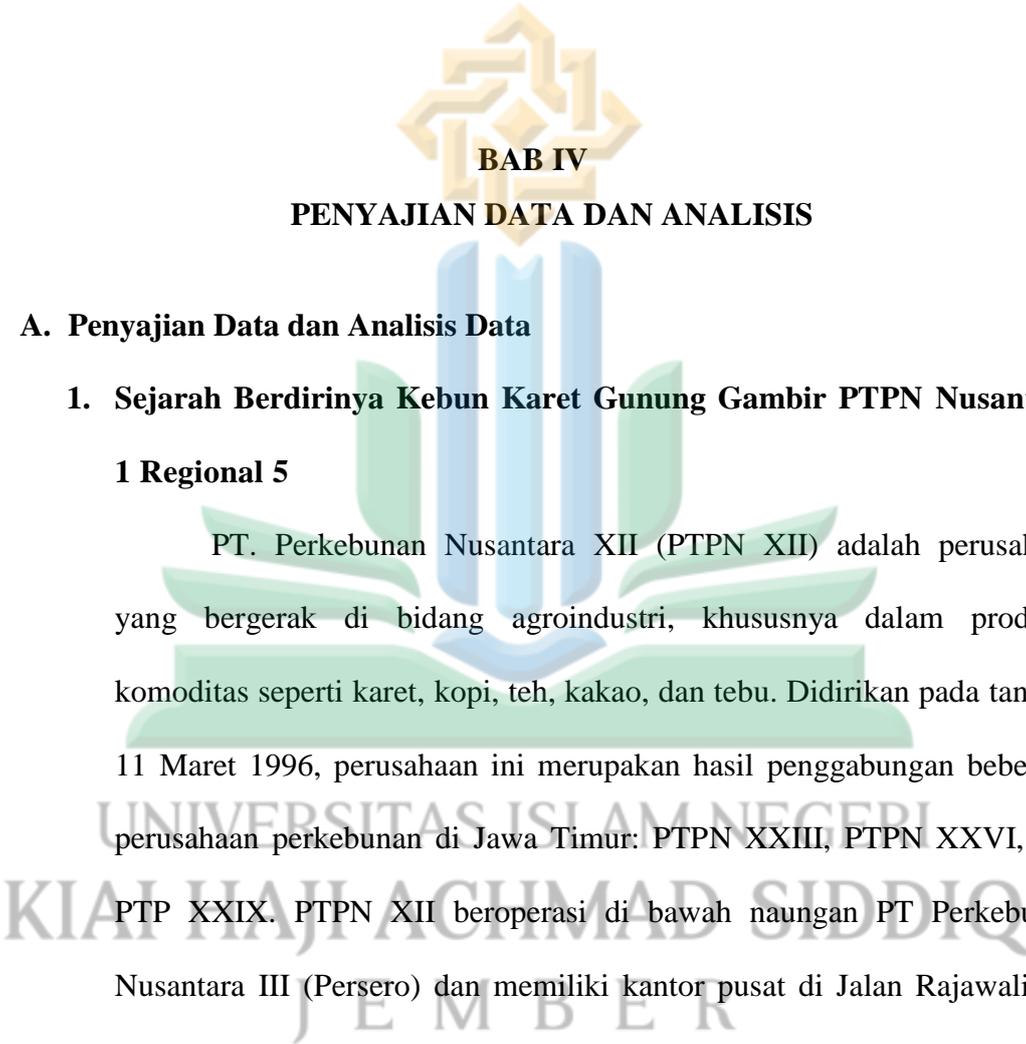
3. Tahap Analisis Data

Setelah data di lapangan terkumpul maka langkah selanjutnya adalah tahap analisis data, pada tahap ini aktifitas yang akan dilakukan yaitu:

- a. Data sudah terkumpul dianalisis secara keseluruhan dan dideskripsikan dalam bentuk teks.
- b. Menyusun data
- c. Penarikan kesimpulan, memberikan kesimpulan data-data yang sudah terkumpul

Gambar 3.1
Skema Tahapan-tahapan Peneliti





BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data dan Analisis Data

1. Sejarah Berdirinya Kebun Karet Gunung Gambir PTPN Nusantara

1 Regional 5

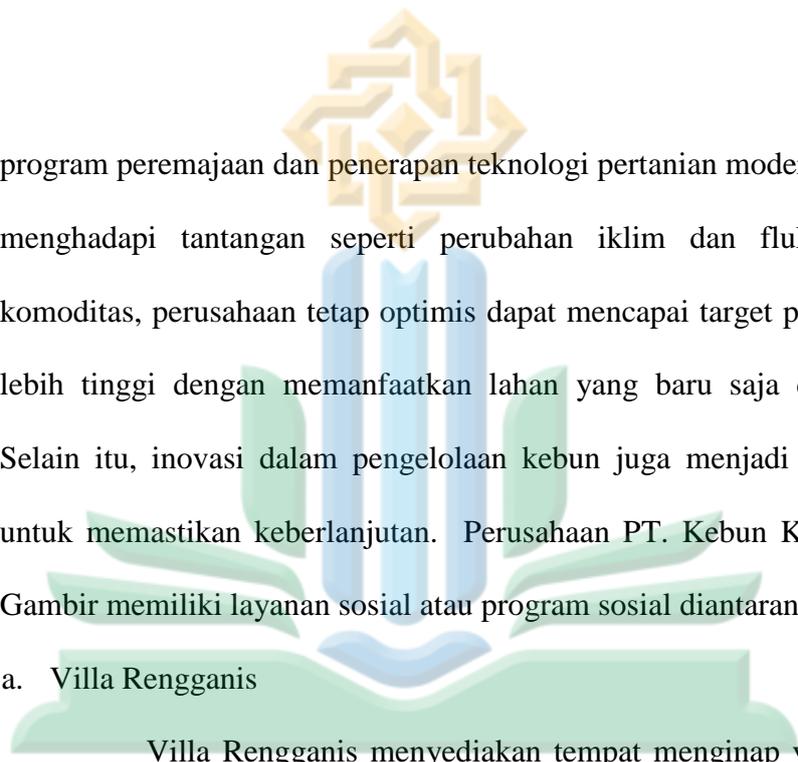
PT. Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII) adalah perusahaan yang bergerak di bidang agroindustri, khususnya dalam produksi komoditas seperti karet, kopi, teh, kakao, dan tebu. Didirikan pada tanggal 11 Maret 1996, perusahaan ini merupakan hasil penggabungan beberapa perusahaan perkebunan di Jawa Timur: PTPN XXIII, PTPN XXVI, dan PTP XXIX. PTPN XII beroperasi di bawah naungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan memiliki kantor pusat di Jalan Rajawali 44. Pengembangan Kebun Karet di Gunung Gambir merupakan salah satu aset penting dari PTPN XII. Kebun ini terletak di wilayah yang memiliki kondisi tanah dan iklim yang ideal untuk pertumbuhan tanaman karet. Sejak awal berdirinya, kebun karet ini telah berkontribusi signifikan terhadap produksi karet nasional. Pada tahun 2007, PTPN XII mempekerjakan sekitar 7.112 karyawan untuk mengelola berbagai unit usaha, termasuk kebun karet.⁶⁵

Perubahan dan restrukturisasi seiring dengan perkembangan industri perkebunan di Indonesia, PTPN XII mengalami berbagai perubahan struktural. Pada tahun 2014, pemerintah Indonesia

⁶⁵ PTPN Perkebunan Nusantara XII, "Sejarah PTPN Kebun Karet Gunung Gambir Aengsono," 16 Maret 2025.

menyerahkan mayoritas saham perusahaan ini kepada PTPN III sebagai bagian dari upaya untuk membentuk holding BUMN dalam sektor perkebunan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan-perusahaan perkebunan di Indonesia. Pada tahun 2020, PTPN XII juga melakukan restrukturisasi dengan menyerahkan mayoritas saham anak usaha yang bergerak di bidang medis kepada PT Pertamina Bina Medika. Ini menunjukkan langkah diversifikasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperkuat posisi keuangan dan operasionalnya. Penutupan dan penggabungan Pada akhir tahun 2023, PTPN XII resmi digabung ke dalam PTPN I sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk membentuk *subholding* yang lebih efisien dalam pengelolaan bisnis perkebunan karet Gunung Gambir. Penggabungan ini menandai akhir dari perjalanan PTPN XII sebagai entitas independen dalam industri perkebunan. Terkini Saat ini, kebun karet Gunung Gambir tetap menjadi bagian dari warisan industri perkebunan Indonesia meskipun manajemennya telah berubah.⁶⁶ Kebun ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber produksi karet tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem agrowisata yang menarik minat pengunjung untuk menikmati pemandangan alam dan belajar tentang proses produksi karet yang berada di Jl. PTPN XII Gn. Gambir, Darungan, Jatiroto, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Produksi dan Inovasi hingga tahun 2024, PTPN XII terus berupaya meningkatkan produktivitas kebun karet melalui

⁶⁶ PTPN XII, "Laporan Tahunan 2025", 85.



program peremajaan dan penerapan teknologi pertanian modern. Meskipun menghadapi tantangan seperti perubahan iklim dan fluktuasi harga komoditas, perusahaan tetap optimis dapat mencapai target produksi yang lebih tinggi dengan memanfaatkan lahan yang baru saja diambil alih. Selain itu, inovasi dalam pengelolaan kebun juga menjadi fokus utama untuk memastikan keberlanjutan. Perusahaan PT. Kebun Karet Gunung Gambir memiliki layanan sosial atau program sosial diantaranya.⁶⁷

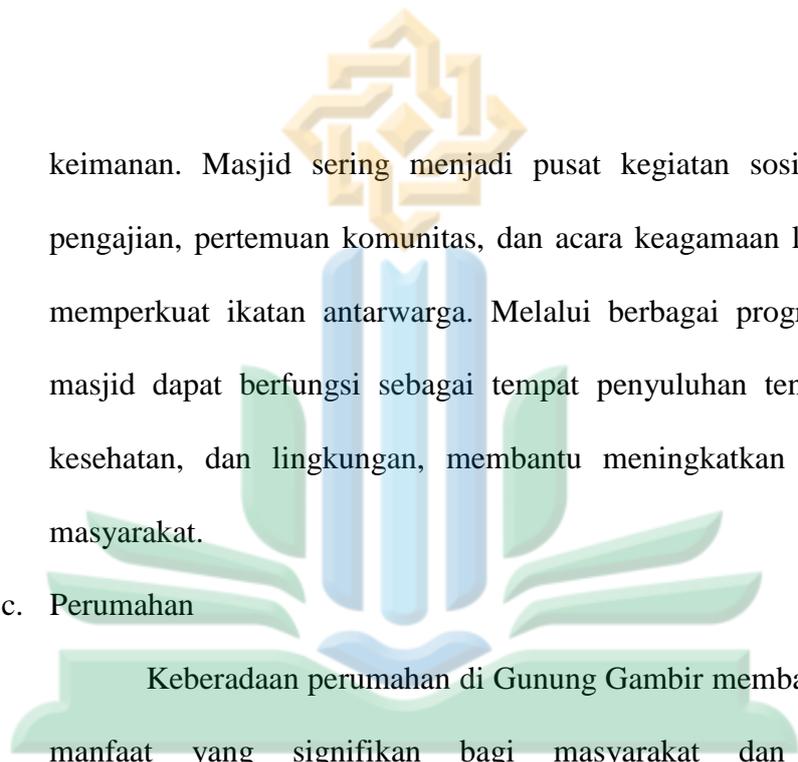
a. Villa Rengganis

Villa Rengganis menyediakan tempat menginap yang nyaman bagi wisatawan, memungkinkan mereka untuk menikmati keindahan kebun teh dan suasana pegunungan secara lebih mendalam. Keberadaan villa ini menambah daya tarik wisata Kebun Teh Gunung Gambir. Dengan menawarkan pengalaman menginap di tengah alam, villa ini menarik lebih banyak pengunjung, Villa ini mendukung konsep wisata healing dengan menyediakan suasana tenang dan alami, ideal untuk relaksasi dan penyegaran mental. Pengunjung dapat menikmati pemandangan indah.

b. Masjid

Masjid di Kebun Karet Gunung Gambir memiliki berbagai manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan pengunjung. Masjid menyediakan tempat bagi umat Muslim untuk melaksanakan ibadah, seperti shalat lima waktu, yang penting untuk menjaga spiritualitas dan

⁶⁷ Iram, wawancara, Jember 5 Januari 2025.



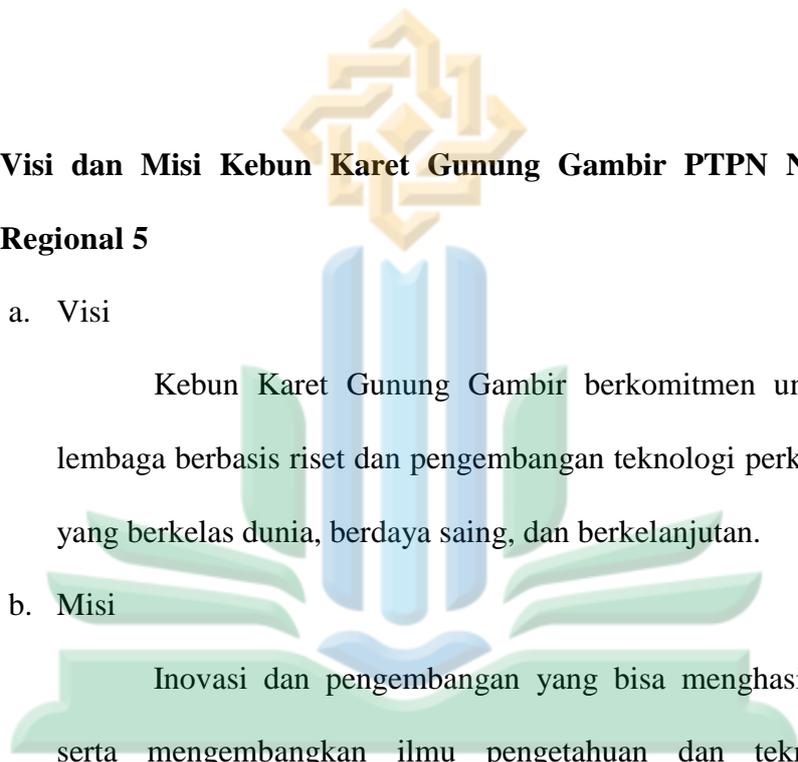
keimanan. Masjid sering menjadi pusat kegiatan sosial, termasuk pengajian, pertemuan komunitas, dan acara keagamaan lainnya, yang memperkuat ikatan antarwarga. Melalui berbagai program edukasi, masjid dapat berfungsi sebagai tempat penyuluhan tentang agama, kesehatan, dan lingkungan, membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat.

c. Perumahan

Keberadaan perumahan di Gunung Gambir membawa sejumlah manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Perumahan menyediakan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat, meningkatkan kualitas hidup mereka dengan akses ke fasilitas dasar seperti air bersih, listrik. Pembangunan perumahan sering kali disertai dengan peningkatan infrastruktur, seperti jalan raya dan transportasi umum, yang memudahkan mobilitas masyarakat dan memperlancar aktivitas ekonomi

d. Agrowisata

Agrowisata yang menggabungkan aktivitas pertanian dengan pariwisata, menawarkan berbagai manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan lingkungan. Pengembangan agrowisata menciptakan lapangan kerja baru di sektor pariwisata dan pertanian. Dengan mengedepankan praktik pertanian berkelanjutan, agrowisata berkontribusi pada konservasi lingkungan.



2. Visi dan Misi Kebun Karet Gunung Gambir PTPN Nusantara 1 Regional 5

a. Visi

Kebun Karet Gunung Gambir berkomitmen untuk menjadi lembaga berbasis riset dan pengembangan teknologi perkebunan karet yang berkelas dunia, berdaya saing, dan berkelanjutan.

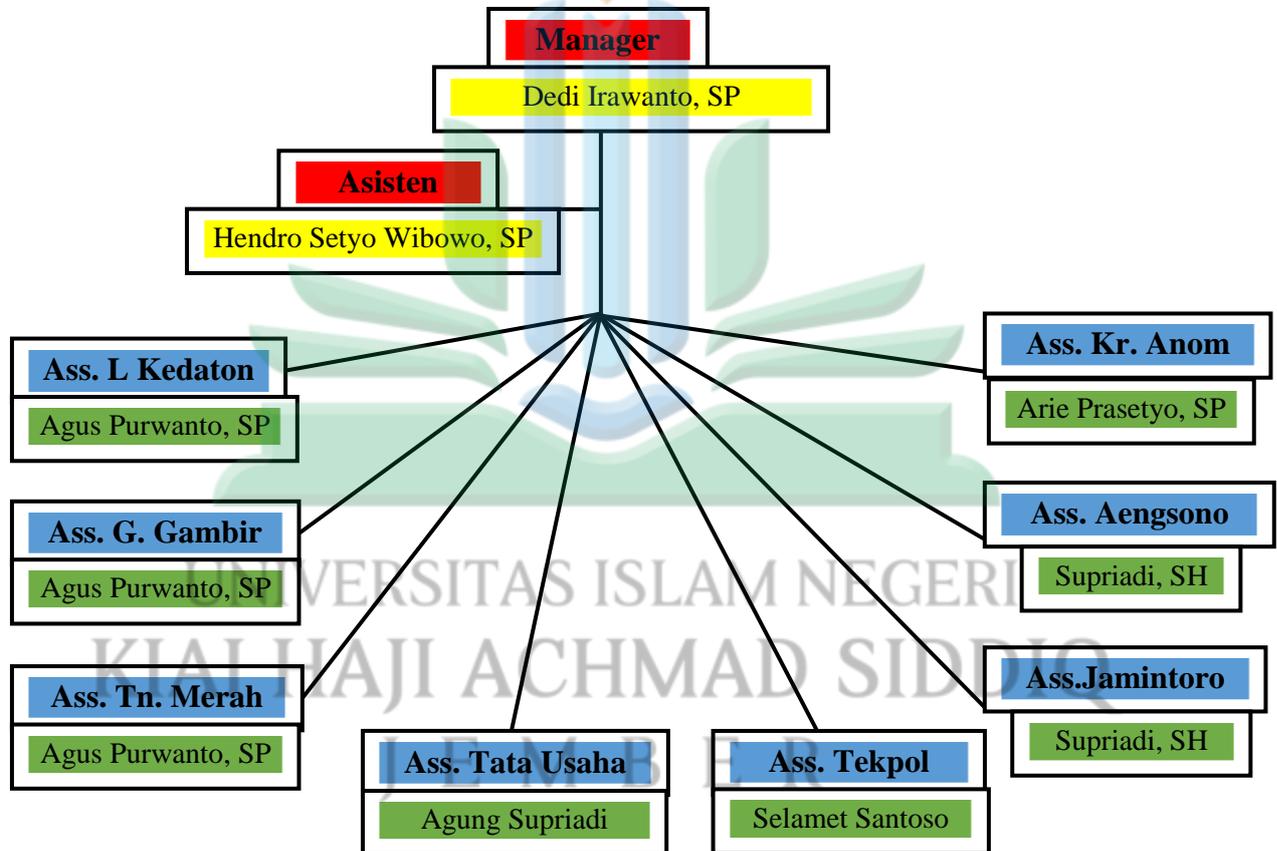
b. Misi

Inovasi dan pengembangan yang bisa menghasilkan inovasi serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlakukan oleh pelaku bisnis perkebunan dan industri karet, serta industry ramah lingkungan yang bisa mendukung terciptanya industry berbasis karet yang ramah lingkungan untuk mempertahankan kelestarian agroindustri.

3. Struktur Organisasi Kebun Karet Gunung Gambir PTPN Nusantara 1 Regional 5

Struktur organisasi merupakan rangkaian susunan dari kumpulan komponen atau bagian kerja dalam sebuah organisasi. Dengan adanya struktur organisasi ini, kita dapat melihat bagaimana tugas-tugas terbagi dan terkoordinasi dengan baik sehingga kegiatan dapat dilakukan dengan baik. Stuktur ini terdiri dari beberapa bagian utama yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas.

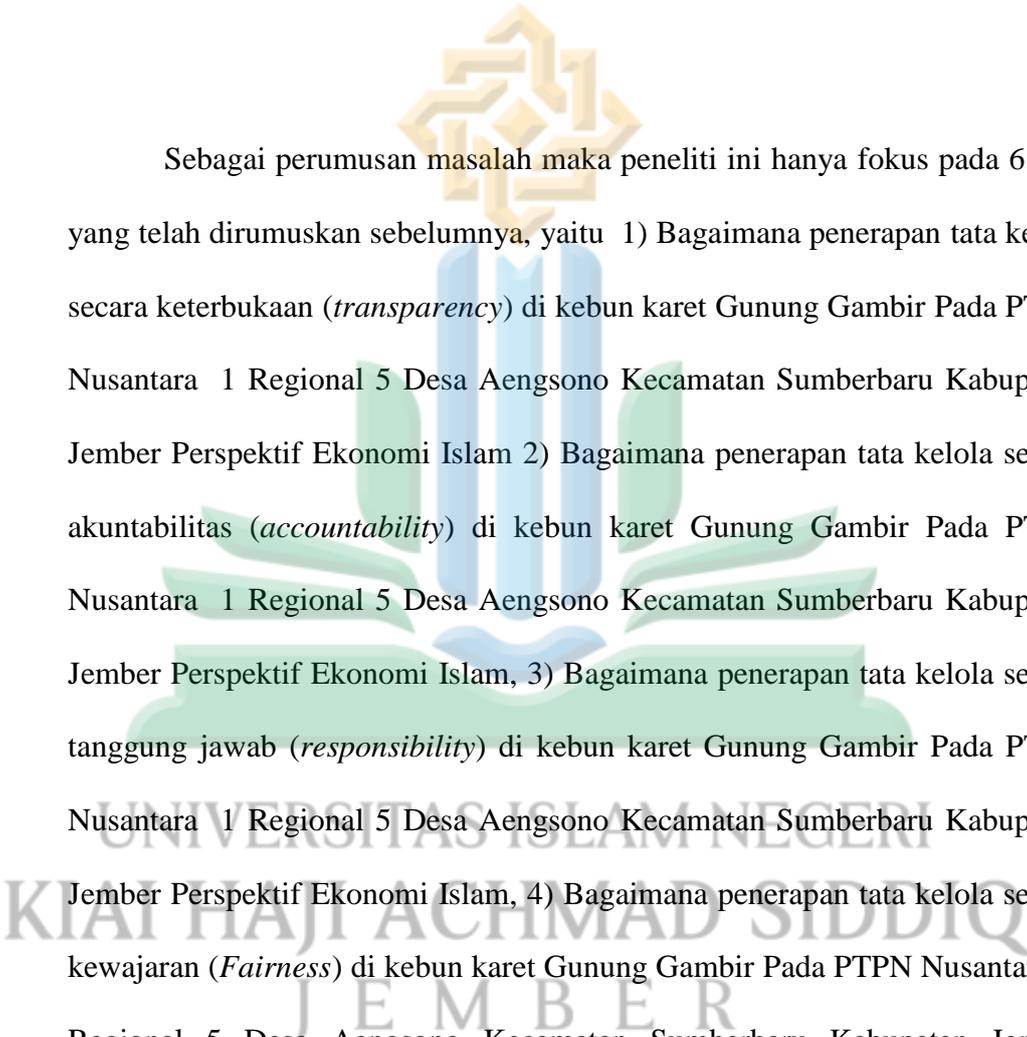
Gambar 4.1
Struktur PT. Kebun Karet Gunung Gambir



**Sumber: Dokumentasi PT. Perkebunan Karet Nusantara 1 Regional 5.
Tahun 2024- 2025**

B. Pemaparan Data

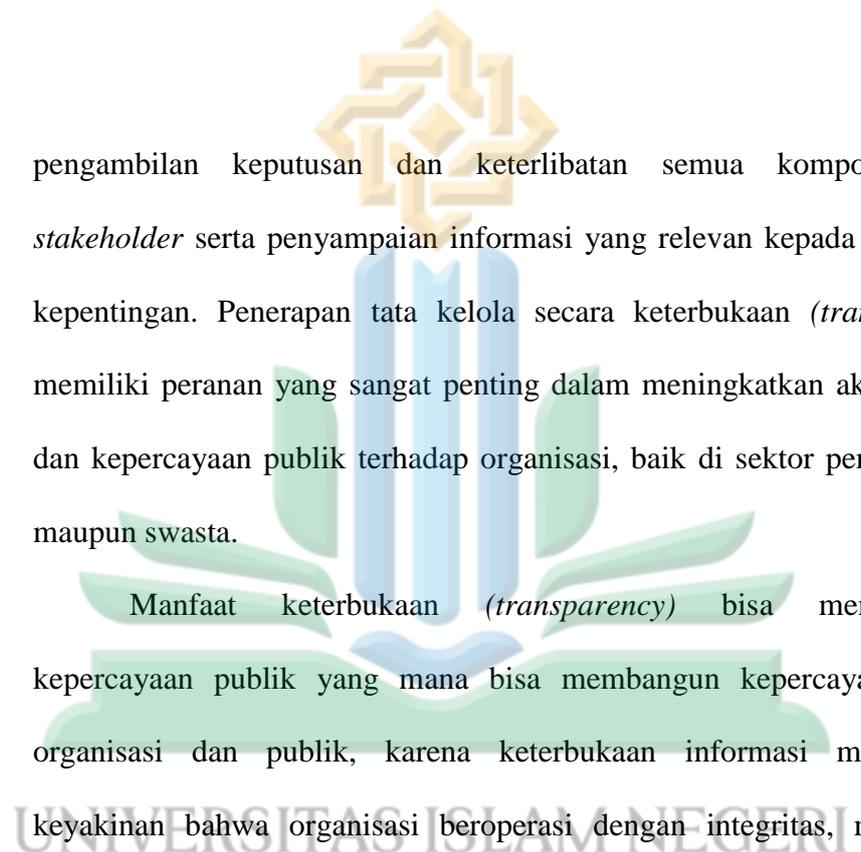
Sesuai dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti akan menyajikan tiga macam pengumpulan data yaitu hasil observasi yang dilakukan peneliti kemudian diperkuat dengan data hasil wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, maka akan diuraikan data tentang penerapan tata kelola di kebun karet Gunung Gambir pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 desa Aengsono kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember perspektif ekonomi Islam.



Sebagai perumusan masalah maka peneliti ini hanya fokus pada 6 hal yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu 1) Bagaimana penerapan tata kelola secara keterbukaan (*transparency*) di kebun karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Aengsono Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Perspektif Ekonomi Islam 2) Bagaimana penerapan tata kelola secara akuntabilitas (*accountability*) di kebun karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Aengsono Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Perspektif Ekonomi Islam, 3) Bagaimana penerapan tata kelola secara tanggung jawab (*responsibility*) di kebun karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Aengsono Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Perspektif Ekonomi Islam, 4) Bagaimana penerapan tata kelola secara kewajaran (*Fairness*) di kebun karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Aengsono Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Perspektif Ekonomi Islam, 5) Bagaimana penerapan tata kelola secara kemandirian (*Independency*) di kebun karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Aengsono Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Perspektif Ekonomi Islam.

1. Penerapan Tata Kelola Secara Keterbukaan (*Transparency*) di kebun karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Aengsono Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Perspektif Ekonomi Islam.

Penerapan tata kelola secara keterbukaan (*transparency*) didasarkan pada prinsip kejujuran, keterbukaan dalam proses



pengambilan keputusan dan keterlibatan semua komponen atau *stakeholder* serta penyampaian informasi yang relevan kepada pemangku kepentingan. Penerapan tata kelola secara keterbukaan (*transparency*) memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap organisasi, baik di sektor pemerintahan maupun swasta.

Manfaat keterbukaan (*transparency*) bisa meningkatkan kepercayaan publik yang mana bisa membangun kepercayaan antara organisasi dan publik, karena keterbukaan informasi menciptakan keyakinan bahwa organisasi beroperasi dengan integritas, mendorong partisipasi masyarakat yang mana nanti masyarakat terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga meningkatkan partisipasi dan dukungan terhadap kebijakan yang diambil. Keterbukaan (*transparency*) dalam tata kelola kebun karet di Gunung Gambir sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan sumber daya alam. Keterbukaan (*transparency*) memungkinkan pengelolaan keuangan yang lebih baik dengan menyediakan informasi yang jelas tentang pendapatan dan pengeluaran. Dalam konteks kebun karet, laporan keuangan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Untuk memastikan bahwa semua transaksi dicatat dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Pentingnya keterbukaan (*transparency*) yang mana nanti keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Melalui forum

musyawarah atau pertemuan rutin, pihak-pihak terkait dapat menyampaikan aspirasi dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan kebun karet. Ini menciptakan rasa memiliki dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, tentang penerapan tata kelola secara keterbukaan (*transparency*) persepektif Islam di kebun karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Aengsono Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember kepada Manajer yaitu bapak Dedi Irawanto:⁶⁸

Saya sebagai manajer, keterbukaan dalam pengambilan keputusan berarti bahwa semua proses dan alasan dibalik keputusan yang diambil harus jelas dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Kami berusaha untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam proses pengambilan keputusan transparan. Kami mengadakan rapat rutin dimana semua anggota tim dapat memberikan masukan. Selain itu kami menggunakan platform komunikasi internal untuk membagikan notulen rapat dan keputusan yang diambil. Dan disitu juga melibatkan semua komponen sangat penting yang mana ketelibatan *stakeholders* membantu kami mendapatkan perspektif yang lebih luas dan mengurangi resiko kesalahan. Kami percaya bahwa setiap suara memiliki nilai. Dan kami melakukan survey dan forum diskusi untuk mengumpulkan pendapat dari berbagai pihak. Selain itu kami juga mengundang perwakilan dari berbagai dapertemen untuk parpartisipasi dalam tim pengambilan keputusan. Beserta kami memiliki sistem komunikasi yang struktur, termasuk kami memanfaatkan media sosial internal untuk menyebarkan informasi dengan cepat dan kami menyampaikan informasi agar lebih menarik dan mudah dicerna.

Senada dengan yang disampaikan Bapak Iram Admin 1 mengenai penerapan tata kelola secara keterbukaan (*transparency*) perspektif ekonomi Islam di kebun karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1

⁶⁸ Dedi Irawanto, *wawancara*, Jember, 3 November 2024.

Regional 5 Desa Aengsosno Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember menyampaikan hal serupa:⁶⁹

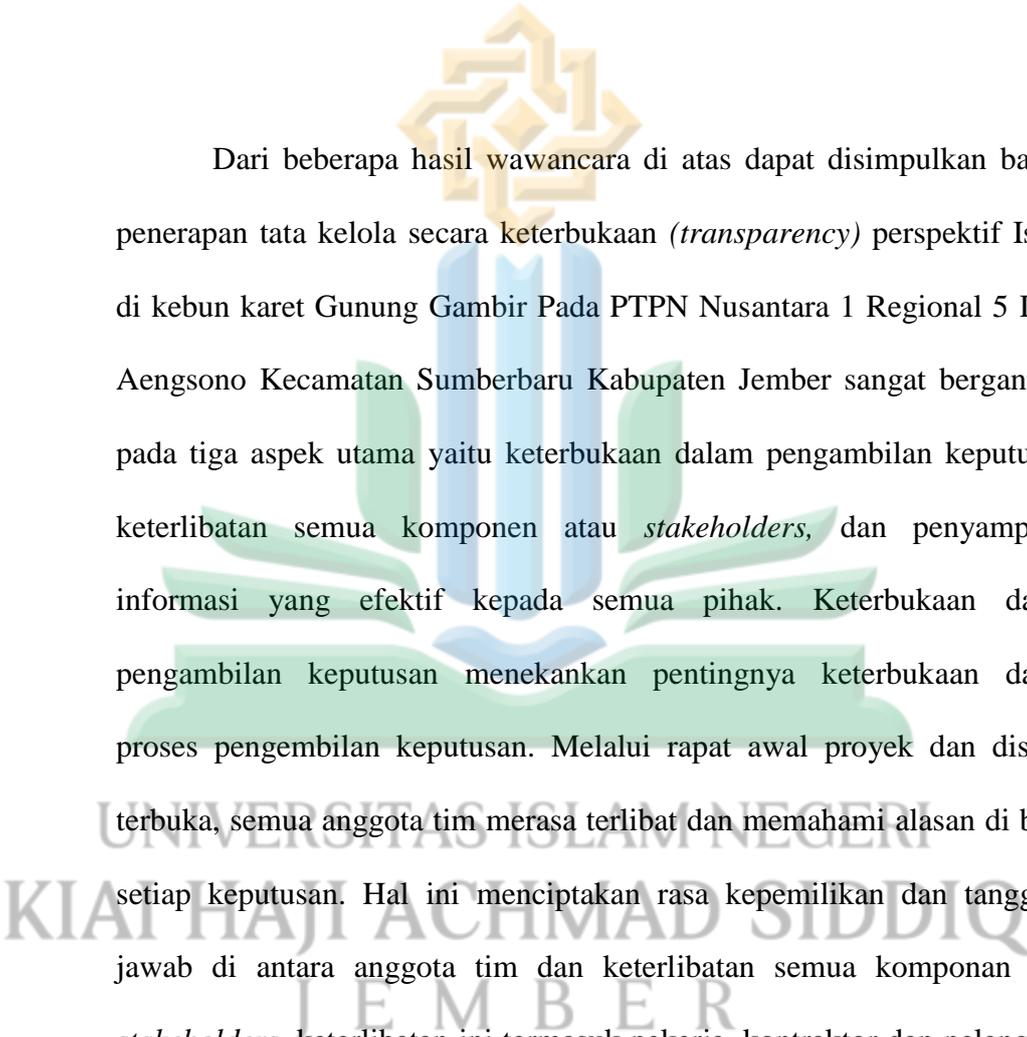
Kami sebagai Admin 1 melihat keterbukaan dalam pengambilan keputusan di organisasi ini sangat penting karena membantu menciptakan kepercayaan di antara anggota tim. Ketika keputusan dibuat secara transparan, semua orang merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk memberikan masukan. Selain itu kami juga menggunakan dokumen dan laporan yang dapat diakses oleh seluruh karyawan untuk menjelaskan alasan di balik keputusan yang diambil. Kenapa seluruh komponen sangat penting dalam keterlibatan ini karena ingin memastikan bahwa berbagai perspektif dan kebutuhan dipertimbangkan, sehingga keputusan yang diambil lebih komprehensif dan efektif sekiranya bisa melakukan penyampaian kepada semua pihak kami memiliki sistem komunikasi yang terstruktur, termasuk penggunaan email dan platform kolaborasi seperti internet yang mana nanti informasi penting selalu disampaikan melalui beberapa saluran agar semua orang dapat mengakses dengan mudah.

Dalam kesempatan lain peneliti mewawancarai salah satu mandor Danton dibawah naungan Koordinator kebun karet Gunung Gambir yaitu bapak Sugianto beliau menyampaikan bahwa:⁷⁰

Saya sebagai Mandor Danton bahwa keterbukaan sangat penting. Kami selalu mengadakan rapat sebelum memulai proyek untuk membahas rencana dan mendapatkan masukan dari semua anggota tim. Ini membantu semua orang merasa terlibat dan memahami alasan dibalik setiap keputusan yang diambil. Yang mana nanti adanya keterlibatan semua pihak, termasuk pekerja, kontraktor, dan pelanggan. Kami sering melakukan diskusi kelompok untuk mendengarkan masukan dari semua pihak. dengan cara ini, kami dapat mengidentifikasi masalah lebih awal dan mencari solusi bersama. Ketika kami melakukan penyampaian semua informasi kepada semua pihak, kami menggunakan papan informasi dan grup chat untuk berbagi update secara berkala. Informasi mengenai jadwal kerja, perubahan rencana, dan hasil evaluasi selalu kami sampaikan dengan jelas agar semua orang bisa mengikuti perkembangan proyek karena tata kelola yang baik adalah kunci sukses proyek dengan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan komunikasi yang efektif menurut kami.

⁶⁹ Iram, wawancara, Jember, 5 November 2024.

⁷⁰ Sugianto, wawancara, Jember, 7 November 2024.

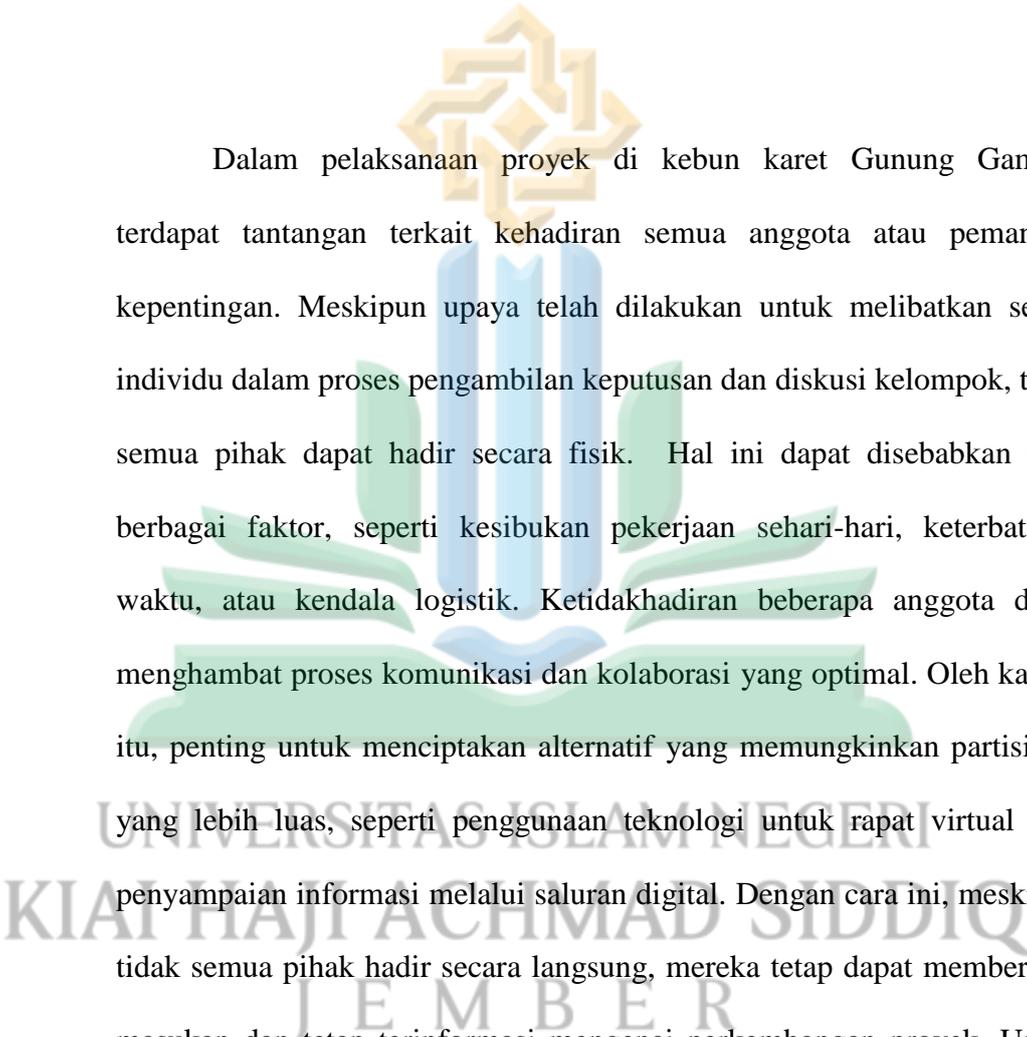


Dari beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan tata kelola secara keterbukaan (*transparency*) perspektif Islam di kebun karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Aengsono Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember sangat bergantung pada tiga aspek utama yaitu keterbukaan dalam pengambilan keputusan, keterlibatan semua komponen atau *stakeholders*, dan penyampaian informasi yang efektif kepada semua pihak. Keterbukaan dalam pengambilan keputusan menekankan pentingnya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Melalui rapat awal proyek dan diskusi terbuka, semua anggota tim merasa terlibat dan memahami alasan di balik setiap keputusan. Hal ini menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab di antara anggota tim dan keterlibatan semua komponen atau *stakeholders*, keterlibatan ini termasuk pekerja, kontraktor dan pelanggan, dianggap krusial untuk keberhasilan proyek. Melibatkan berbagai perspektif membantu mengidentifikasi masalah lebih awal dan mencari solusi secara kolaboratif. Dengan penyampaian informasi kepada semua pihak merupakan salah satu strategi komunikasi yang efektif, seperti penggunaan papan informasi dan grup chat, memastikan bahwa semua pihak mendapatkan terkini mengenai proyek. dan penyampaian informasi yang jelas dan dapat tepat waktu membantu menjaga transparansi dan kolaborasi diantara semua anggota. Secara keseluruhan bahwa tata kelola yang baik adalah kunci untuk mencapai hasil yang sukses. dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, keterlibatan, dan komunikasi

yang efektif, organisasi dapat meningkatkan kinerja serta menjaga hubungan baik diantara semua *stakeholders*.

Berdasarkan hasil observasi peneliti menemukan bahwa penerapan tata kelola secara transparansi (*transparency*) perspektif ekonomi Islam di kebun karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Aengsono Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember dilapangan melalui tiga komponen penting. *Pertama*, keterbukaan dalam pengambilan keputusan terlihat dari pelaksanaan rapat awal proyek yang melibatkan seluruh anggota tim, dimana semua orang diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan masukan, sehingga setiap keputusan diambil berdasarkan pertimbangan yang matang. *Kedua*, keterlibatan semua *stakeholders* sangat diperhatikan, dengan diadakannya diskusi kelompok yang melibatkan pekerja, kontraktor. Hal ini memungkinkan identifikasi masalah lebih awal dan pengembangan solusi yang lebih efektif. *Ketiga*, penyampaian informasi kepada semua pihak dilakukan melalui berbagai saluran, seperti papan informasi di lokasi kerja dan grup chat untuk update berkala mengenai jadwal kerja, perubahan rencana, dan hasil evaluasi proyek. Informasi disampaikan dengan jelas dan stuktur, memastikan setiap anggota tim dapat mengakses dan memahami perkembangan proyek dengan mudah. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas kerja di lapangan tetapi juga membangun kepercayaan dan kolaborasi yang kuat diantara semua pihak yang terlibat, menjadikan trasparansi dalam setiap proyek yang dikelola.⁷¹

⁷¹ Observasi, Jember 7 November 2024.



Dalam pelaksanaan proyek di kebun karet Gunung Gambir, terdapat tantangan terkait kehadiran semua anggota atau pemangku kepentingan. Meskipun upaya telah dilakukan untuk melibatkan setiap individu dalam proses pengambilan keputusan dan diskusi kelompok, tidak semua pihak dapat hadir secara fisik. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kesibukan pekerjaan sehari-hari, keterbatasan waktu, atau kendala logistik. Ketidakhadiran beberapa anggota dapat menghambat proses komunikasi dan kolaborasi yang optimal. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan alternatif yang memungkinkan partisipasi yang lebih luas, seperti penggunaan teknologi untuk rapat virtual atau penyampaian informasi melalui saluran digital. Dengan cara ini, meskipun tidak semua pihak hadir secara langsung, mereka tetap dapat memberikan masukan dan tetap terinformasi mengenai perkembangan proyek. Upaya ini akan membantu memastikan bahwa setiap suara didengar dan keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan semua pihak yang terlibat.⁷²

Dari hasil wawancara dan observasi tentang penerapan tata kelola secara keterbukaan (*transparency*) perspektif ekonomi Islam di kebun karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Aengsono Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember didukung oleh data dokumentasi yang diperoleh di lapangan.

⁷² Observasi, Jember 7 November 2024.



**Gambar 4.2 Penerapan
Tata Kelola Secara Keterbukaan (*Transparency*)**



Sumber: Dokumentasi Tata Kelola Secara Keterbukaan (*Transparency*)

Dari hasil dokumentasi di atas bahwa penerapan tata kelola secara keterbukaan (*transparency*) tata kelola yang baik merupakan fondasi utama dalam menciptakan organisasi yang mana dalam rapat tersebut melaksanakan keterbukaan informasi yang yang jelas, akurat dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. ini tidak hanya meningkatkan efektivitas kerja tetapi juga membangun kepercayaan dan kolaborasi yang kuat di antara semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, transparansi dalam setiap proyek yang dikelola menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis.

2. Penerapan Tata Kelola Secara Akuntabilitas (*Accountability*) Di Kebun Karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Aengsono Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Perspektif Ekonomi Islam

Tata kelola secara akuntabilitas (*accountability*) dalam perspektif ekonomi Islam merupakan pertanggungjawaban dalam seluruh aktifitas



ekonomi seperti dalam dalam pengelolaan sumber daya dari hasil produksi, pelaporan sumber daya dari hasil produksi. Akuntabilitas dalam ekonomi Islam tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. dan kepada masyarakat sebagai tanggungjawab sosial. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban individu atau entitas untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan yang diambil dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. Setiap anggota dewan direksi dan manajemen bertanggung jawab atas keputusan yang diambil dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang diberikan kepada mereka. Perusahaan harus terbuka di dalam informasi yang mana organisasi harus memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada pemangku kepentingan, sehingga mereka dapat memahami proses pengambilan keputusan dan kinerja perusahaan, Terdapat sistem yang memungkinkan pemangku kepentingan untuk meminta penjelasan terkait tindakan organisasi, sehingga menciptakan transparansi dan kepercayaan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan tentang penerapan tata kelola secara akuntabilitas (*accountability*) perspektif ekonomi Islam di kebun karet Gunung Gambir pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Aengsono Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember kepada bapak Selamet Santoso selaku asisten (Ass) Tekpol Usaha:⁷³

⁷³ Selamet Santoso, *wawancara*, Jember, 21 November 2024.

Kami ketika melakukan proses pelaporan hasil produksi secara sistematis dan terstruktur. Setiap bulan, kami mengumpulkan data dari seluruh unit produksi, termasuk jumlah getah karet yang dipanen, kualitas produk, dan masalah yang dihadapi selama proses. Data ini kemudian dianalisis dan disusun dalam laporan bulanan yang disampaikan kepada pihak manajemen dan pemangku kepentingan. Kami memastikan bahwa semua laporan akurat dan transparan untuk menjaga kepercayaan semua pihak. Sedangkan di dalam pengelolaan sumber daya manusia sangat penting bagi kami. Kami menerapkan prinsip akuntabilitas dengan memastikan setiap karyawan memiliki tanggung jawab yang jelas dalam tugas mereka. Selain itu, kami juga melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk memberikan umpan balik yang konstruktif. Kami berusaha menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pengembangan keterampilan dan kesejahteraan karyawan. Kami menerapkan sistem pelaporan kinerja individu yang transparan dan terukur. Setiap karyawan diminta untuk melaporkan pencapaian mereka secara berkala, yang kemudian dibahas dalam rapat tim. Selain itu, kami juga mendorong komunikasi terbuka antara manajemen dan staf agar setiap masalah dapat diidentifikasi dan ditangani dengan cepat. Salah satu tantangan utama adalah memastikan semua data yang dikumpulkan adalah valid dan tepat waktu. Terkadang, ada keterlambatan dalam pengumpulan data dari beberapa unit, yang dapat mempengaruhi ketepatan laporan. Namun, kami terus berupaya untuk meningkatkan sistem pengumpulan data dengan pelatihan bagi staf dan penggunaan teknologi untuk mempermudah proses ini.

Senada dengan yang disampaikan tentang penerapan tata kelola secara akuntabilitas (*accountability*) perspektif ekonomi Islam di kebun karet Gunung Gambir pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Aengsono Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember kepada Bapak Agung Supriyadi sebagai asisten (Ass) Tata usaha:⁷⁴

Saya sebagai asisten Tata Usaha di PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Kaliglagah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, menurut saya proses pengelolaan sumber daya dilakukan di organisasi kita prosesnya meliputi beberapa langkah: perencanaan untuk menetapkan tujuan, pelaksanaan untuk memanfaatkan sumber daya, monitoring untuk memantau penggunaan, dan evaluasi untuk

⁷⁴ Agung Supriyadi, *wawancara*, Jember, 20 November 2024.

menilai hasil. Semua langkah ini harus dilakukan dengan akuntabilitas yang tinggi. Akuntabilitas memastikan bahwa setiap individu atau tim bertanggung jawab atas tugas dan keputusan mereka. Ini penting agar semua pihak mengetahui tanggung jawab mereka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan. Sedangkan didalam sistem pelaporan hasil sumber daya produksi yang kita gunakan Kami menggunakan sistem pelaporan bulanan dan tahunan yang mencakup informasi seperti volume produksi dan penggunaan sumber daya. Laporan ini disampaikan kepada manajemen dan pemangku kepentingan untuk memastikan transparansi.

Dalam kesempatan lain peneliti mewawancarai salah satu anggota kelompok di bawah naungan Koordinator kebun karet Gunung Gambir yaitu Mandor Sugianto beliau menyampaikan bahwa:⁷⁵

Kami sebagai mandor ketika mengelola sumber daya dari hasil produksi prosesnya dimulai dengan perencanaan yang matang, di mana kita menetapkan target dan strategi. Setelah itu, kita melaksanakan rencana tersebut dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Monitoring dilakukan secara berkala untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Setelah perencanaan, langkah berikutnya adalah melaksanakan rencana tersebut dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Kami memastikan bahwa setiap anggota tim memahami peran mereka dan memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk mencapai target. Monitoring dilakukan secara berkala untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Kami melakukan evaluasi rutin untuk mengecek apakah ada penyimpangan dari target yang telah ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Sedangkan dalam sistem pelaporan hasil produksi Kami menggunakan laporan bulanan dan tahunan yang mencakup informasi seperti volume produksi, penggunaan sumber daya, serta analisis biaya. Laporan ini disusun secara rinci dan disampaikan kepada manajemen serta pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan transparansi. Dengan sistem pelaporan yang jelas, semua pihak dapat melihat kinerja dan perkembangan organisasi secara objektif.

Dari beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tentang penerapan tata kelola secara akuntabilitas (*accountability*)

⁷⁵ Sugianto, wawancara, Jember, 16 November, 2024.



perspektif ekonomi Islam di kebun karet Gunung Gambir pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Aengsono Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember dalam pengelolaan sumber daya produksi sangat penting untuk mencapai efisiensi dan transparansi. Proses pengelolaan dimulai dengan perencanaan yang matang, di mana target dan strategi ditetapkan dengan melibatkan semua pihak terkait. Setelah itu, pelaksanaan rencana dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, diikuti dengan monitoring berkala untuk memastikan bahwa semua langkah berjalan sesuai rencana. Akuntabilitas menjadi elemen kunci dalam proses ini, di mana setiap anggota tim memiliki tanggung jawab yang jelas dan siap mempertanggungjawabkan hasil kerja mereka. Sistem pelaporan yang digunakan mencakup laporan bulanan dan tahunan yang menyajikan informasi penting tentang volume produksi, penggunaan sumber daya, dan analisis biaya. Laporan ini disusun secara rinci untuk memastikan transparansi kepada manajemen dan pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa penerapan tata kelola secara akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya produksi di organisasi dimulai dengan perencanaan yang matang, di mana target dan strategi ditetapkan melalui analisis mendalam dan diskusi dengan berbagai pihak terkait. Pelaksanaan rencana dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, didukung oleh koordinasi yang baik antaranggota tim. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan rencana, sementara akuntabilitas

menjadi aspek penting yang tertanam dalam budaya kerja tim. Sistem pelaporan yang terstruktur menyajikan informasi penting mengenai volume produksi dan penggunaan sumber daya, memastikan transparansi kepada manajemen dan pemangku kepentingan.⁷⁶

Meskipun tantangan seperti kurangnya pemahaman di kalangan staf masih ada, terdapat contoh konkret keberhasilan, seperti proyek pengurangan limbah yang berhasil mengurangi limbah hingga 25%. Teknologi berperan signifikan dalam mendukung pengelolaan ini, memungkinkan pemantauan real-time dan pelaporan otomatis. Harapan ke depan adalah peningkatan integrasi teknologi dan kesadaran akan pentingnya tata kelola di semua level organisasi, serta pengembangan sistem pelaporan yang lebih interaktif.⁷⁷

Dari hasil wawancara dan observasi tentang penerapan tata kelola secara akuntabilitas (*accountability*) perspektif ekonomi Islam di kebun karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Aengsono Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember didukung oleh data dokumentasi yang diperoleh di lapangan.

⁷⁶ Observasi, Jember 25 November 2024.

⁷⁷ Observasi, Jember 25 November 2024.

**Gambar 4.3 Penerapan
Tata Kelola Secara Akuntabilitas (*accountability*)**



**Sumber: Dokumentasi Tata Kelola Secara Akuntabilitas
(*accountability*)**

Hasil dokumentasi menunjukkan bahwa catatan atas laporan hasil produksi menunjukkan bahwa kebun ini telah melakukan langkah-langkah yang tepat dalam menyusun laporan hasil produksi yang akurat dan transparan. Setelah itu, mengatur struktur laporan dengan jelas, seperti mencakup pendahuluan, metodologi, temuan, dan kesimpulan, akan membantu dalam menyampaikan informasi secara sistematis. Selain itu, penting untuk menghitung total hasil produksi dan membandingkannya dengan target yang telah ditetapkan untuk mengevaluasi kinerja. Analisis terhadap data yang telah dikumpulkan juga perlu dilakukan untuk mengidentifikasi tren atau pola yang dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang efisiensi produksi.

3. Penerapan Tata Kelola Secara Tanggung Jawab (*Responsibility*) Di Kebun Karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Kaliglagah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Perspektif Ekonomi Islam

Tata kelola secara tanggung jawab (*responsibility*) dalam perspektif ekonomi Islam merupakan konsep yang mencakup kewajiban individu untuk melakukan tindakan tertentu dan siap menanggung akibat dari tindakan tersebut. *Responsibility* dalam ekonomi Islam berarti menjalankan amanah dengan penuh kesadaran akan perbuatan dan kewajiban yang harus dilaksanakan, serta kesanggupan untuk memikul risiko yang mungkin timbul dari keputusan yang diambil. Tanggung jawab merupakan keadaan di mana seseorang wajib menanggung segala sesuatunya, termasuk konsekuensi dari perbuatannya. Ini berarti bahwa setiap individu harus bersikap sadar terhadap tindakan yang diambil dan siap menerima akibatnya. Tanggung jawab juga berkaitan dengan kemampuan untuk membedakan antara benar dan salah, serta bertindak sesuai dengan norma sosial dan etika yang berlaku. Ini mencakup kesadaran moral dan kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat. Dalam konteks sosial, tanggung jawab mencakup kewajiban terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Setiap individu diharapkan untuk berkontribusi positif dan mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka terhadap orang lain. Berdasarkan wawancara yang dilakukan tentang penerapan tata kelola secara tanggung jawab (*responsibility*)

perspektif ekonomi Islam di kebun karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Aengsono Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember kepada bapak Dedi Irawanto selaku manajer beliau berkata:⁷⁸

Saya sebagai manajer kesadaran akan perbuatan diterapkan di kalangan pekerja dan manajemen kami melakukan pelatihan rutin untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya tindakan yang bertanggung jawab. Dalam pelatihan ini, setiap anggota tim diajarkan untuk memahami bagaimana keputusan mereka dapat mempengaruhi lingkungan dan masyarakat sekitar. Kami juga mengadakan sesi diskusi kelompok untuk mendorong pertukaran ide dan pengalaman. Selain itu, kami mendorong komunikasi terbuka agar semua orang merasa nyaman untuk berbagi pandangan mereka. Pelatihan ini mencakup berbagai topik, seperti praktik pertanian berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam, dan etika kerja. Kami juga mengadakan sesi diskusi kelompok yang dirancang untuk mendorong pertukaran ide dan pengalaman. Dalam sesi ini, anggota tim dapat berbagi cerita sukses maupun tantangan yang mereka hadapi di lapangan, sehingga menciptakan suasana belajar yang kolaboratif. Ada contoh konkret dari keputusan yang diambil yang menunjukkan tanggung jawab dalam pengelolaan kebun karet ketika kami memutuskan untuk menerapkan praktik pertanian berkelanjutan dengan menggunakan pupuk organik daripada pupuk kimia. Keputusan ini tidak hanya meningkatkan kualitas tanah tetapi juga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Hasilnya, kami melihat peningkatan produktivitas serta kepuasan dari komunitas sekitar karena mereka merasakan manfaat dari praktik pertanian yang lebih ramah lingkungan.

Senada yang disampaikan oleh mas Imam staf administrasi penerapan tata kelola secara tanggung jawab (*responsibility*) perspektif ekonomi Islam di kebun karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Aengsono Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember beliau mengatakan:⁷⁹

⁷⁸ Dedi Irawanto, *wawancara*, Jember, 19 November 2024.

⁷⁹ Imam, *wawancara*, Jember, 20 November 2024.

Kami sebagai staf administrasi kesadaran akan perbuatan diterapkan di kalangan pekerja dan manajemen Kami telah melaksanakan pelatihan rutin yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran semua anggota tim tentang pentingnya tindakan yang bertanggung jawab. Dalam setiap sesi, kami berfokus pada bagaimana keputusan yang diambil dapat mempengaruhi lingkungan dan masyarakat sekitar. Dalam setiap sesi, kami berfokus pada bagaimana keputusan yang diambil dapat mempengaruhi lingkungan dan masyarakat sekitar. Kami mengawali setiap sesi dengan menjelaskan konsep dasar tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta mengapa hal ini sangat penting dalam konteks pengelolaan kebun karet. Selain itu kami memahami risiko sangat penting. Apa saja risiko utama yang kita hadapi dalam pengelolaan kebun karet ini, Beberapa risiko utama yang perlu kita pertimbangkan termasuk perubahan iklim, fluktuasi harga karet, serta potensi serangan hama dan penyakit tanaman. Setiap risiko ini dapat berdampak signifikan pada hasil produksi dan keberlanjutan kebun kita. Kami selalu menyiapkan rencana kontinjensi untuk menghadapi situasi darurat. Misalnya, jika terjadi serangan hama, kami memiliki strategi untuk mengendalikan populasi hama tersebut tanpa merusak ekosistem kebun. Selain itu, kami juga melakukan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas strategi yang diterapkan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

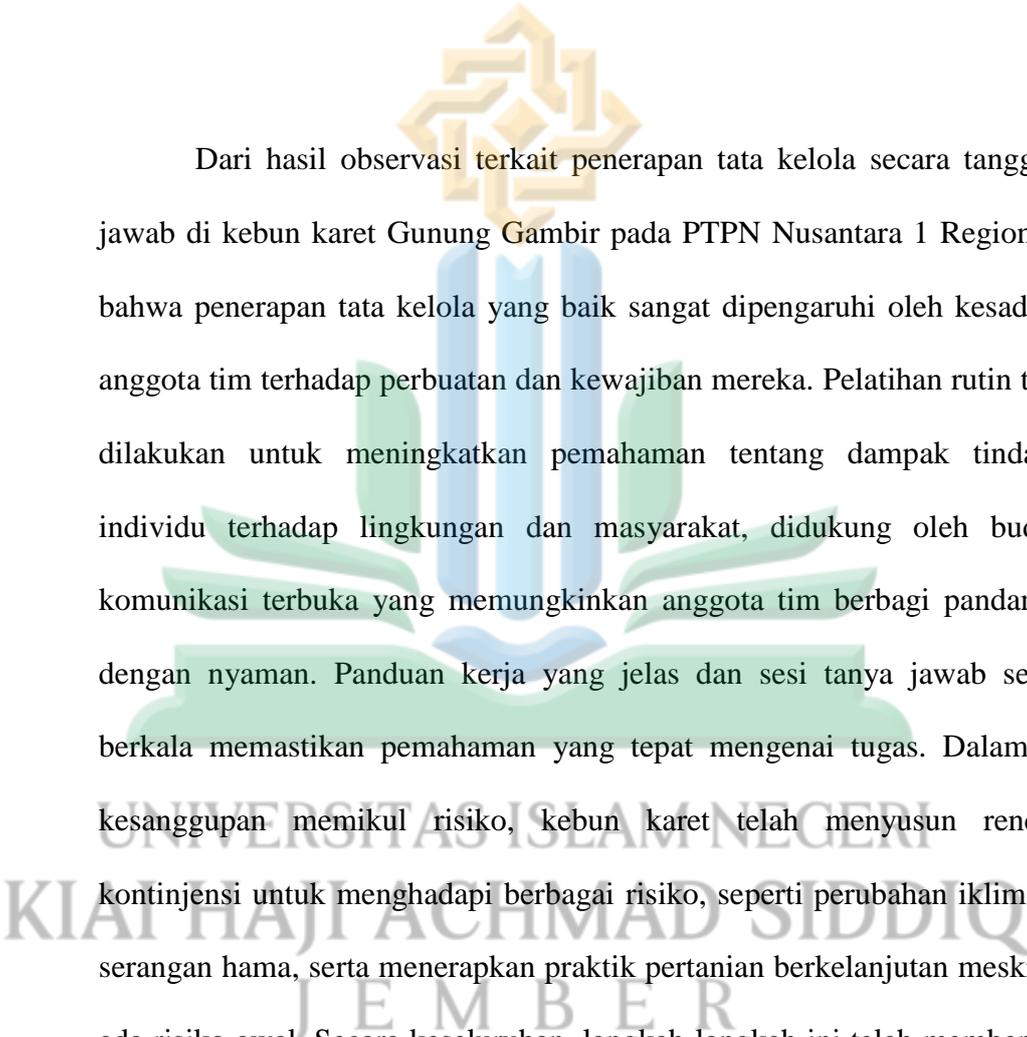
Selanjutnya diwawancarai oleh bapak Agung Supriyadi selaku asisten (Ass) Tata Usaha beliau mengatakan bahwa:⁸⁰

Kami sebagai asisten (Ass) tata usaha bagaimana kita dapat meningkatkan kesadaran anggota tim tentang tanggung jawab mereka di kebun karet. Bahwa Kesadaran akan perbuatan sangat penting dalam pengelolaan kebun karet. Kami telah melaksanakan pelatihan rutin yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman semua anggota tim tentang dampak tindakan mereka terhadap lingkungan dan masyarakat. Dalam pelatihan ini, kami menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang. Setelah itu kami menyusun panduan kerja yang jelas dan terperinci untuk setiap posisi di kebun karet. Panduan ini mencakup deskripsi tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota tim. Selain itu, kami mengadakan sesi tanya jawab secara berkala untuk memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan mendapatkan klarifikasi tentang kewajiban mereka. Bagaimana dengan kesanggupan kita untuk memikul risiko

⁸⁰ Agung Supriyadi, *wawancara*, Jember, 22 November 2024.

Kesanggupan untuk memikul risiko adalah bagian integral dari tata kelola yang baik. Kami telah mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin dihadapi, seperti perubahan iklim dan serangan hama. Untuk setiap risiko, kami menyusun rencana kontinjensi yang mencakup langkah-langkah mitigasi dan respons. Ini memastikan bahwa kami siap menghadapi situasi darurat jika diperlukan.

Dari beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan penerapan tata kelola secara tanggung jawab (*responsibility*) perspektif ekonomi Islam di kebun karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Aengsono Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember bahwa penerapan tata kelola yang baik dalam pengelolaan kebun karet sangat bergantung pada kesadaran akan perbuatan dan kewajiban yang dilaksanakan oleh semua anggota tim. Pelatihan rutin telah dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak tindakan mereka terhadap lingkungan dan masyarakat, dengan dukungan budaya komunikasi terbuka yang memungkinkan anggota tim berbagi pandangan dan kekhawatiran. Panduan kerja yang jelas dan sesi tanya jawab secara berkala membantu memastikan pemahaman yang tepat mengenai kewajiban masing-masing. Selain itu, rencana kontinjensi telah disusun untuk menghadapi berbagai risiko, dengan contoh konkret berupa implementasi praktik pertanian berkelanjutan menggunakan pupuk organik, meskipun ada risiko awal yang dihadapi. Dengan langkah-langkah ini, kebun karet tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga mendukung keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, menunjukkan bahwa kesadaran, kewajiban, dan kesanggupan dalam memikul risiko dapat berkontribusi pada pengelolaan yang lebih efektif dan bertanggung jawab.



Dari hasil observasi terkait penerapan tata kelola secara tanggung jawab di kebun karet Gunung Gambir pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 bahwa penerapan tata kelola yang baik sangat dipengaruhi oleh kesadaran anggota tim terhadap perbuatan dan kewajiban mereka. Pelatihan rutin telah dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang dampak tindakan individu terhadap lingkungan dan masyarakat, didukung oleh budaya komunikasi terbuka yang memungkinkan anggota tim berbagi pandangan dengan nyaman. Panduan kerja yang jelas dan sesi tanya jawab secara berkala memastikan pemahaman yang tepat mengenai tugas. Dalam hal kesanggupan memikul risiko, kebun karet telah menyusun rencana kontinjensi untuk menghadapi berbagai risiko, seperti perubahan iklim dan serangan hama, serta menerapkan praktik pertanian berkelanjutan meskipun ada risiko awal. Secara keseluruhan, langkah-langkah ini telah memberikan dampak positif pada pengelolaan kebun karet, meningkatkan efisiensi operasional sambil mendukung keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.⁸¹

Dari hasil wawancara dan observasi tentang penerapan tata kelola secara tanggung jawab (*responsibility*) perspektif ekonomi Islam di kebun karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Aengsono Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember didukung oleh data dokumentasi yang diperoleh di lapangan.

⁸¹ Observasi, Jember 22 November 2024.

**Gambar 4.4 Penerapan Tata Kelola Secara Tanggung Jawab
(Responsibility)**



**Sumber: Dokumentasi Penerapan Tata Kelola Secara Tanggung Jawab
(Responsibility)**

Dari hasil dokumentasi di atas bahwa kesadaran tim, pelatihan rutin, budaya komunikasi terbuka, dan panduan kerja yang jelas, langkah-langkah ini memberikan dampak positif pada pengelolaan kebun karet, meningkatkan efisiensi operasional sambil mendukung tanggung jawab sosial. Dokumentasi ini mencerminkan komitmen kebun karet Gunung Gambir terhadap prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam industri perkebunan, dalam industri perkebunan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Dengan demikian, penerapan tata kelola yang baik di kebun ini menjadi contoh positif bagi industri perkebunan lainnya dalam menerapkan praktik yang transparan dan bertanggung jawab.

4. Penerapan Tata Kelola Secara Kewajaran (*Fairness*) Di Kebun Karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Aengsono Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Perspektif Ekonomi Islam

Tata kelola secara *fairness* atau kewajaran dalam perspektif ekonomi Islam adalah prinsip yang menekankan perlakuan adil terhadap semua pemangku kepentingan dalam suatu organisasi bekerja sesuai tupoksi masing-masing, hasil sesuai kesepakatan dan hak beserta keadilan, dan memberikan saran yang professional. *Fairness* dalam ekonomi Islam merupakan bagian dari nilai moral dan etika yang sangat ditekankan di dalam Islam. Prinsip *fairness* mengharuskan adanya perlakuan yang setara bagi semua pihak, terutama dalam konteks hubungan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Hal ini penting untuk mencegah konflik kepentingan dan memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memiliki kesempatan yang sama untuk bersuara dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Pentingnya *fairness* dalam tata kelola dengan menerapkan prinsip *fairness*, organisasi dapat membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan reputasi dan daya saing perusahaan. Perlakuan adil membantu mengurangi potensi konflik antara berbagai pihak, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif. Secara keseluruhan, tata kelola yang menerapkan prinsip *fairness* berkontribusi pada keberlanjutan dan efektivitas suatu organisasi dengan memastikan bahwa semua pihak diperlakukan dengan

adil dan setara. Sebagaimana wawancara yang dilakukan peneliti terhadap bapak Dedi Irawanto, mengenai penerapan tata kelola secara kewajaran (*Fairness*) perspektif ekonomi Islam di kebun karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Aengsono Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember beliau mengatakan:⁸²

Saya sebagai manajer bahwa penerapan prinsip *fairness* sangat penting dalam pengelolaan kebun karet. Setiap pemangku kepentingan, termasuk karyawan dan petani mitra, diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi. Mereka harus bekerja sesuai tupoksi, setiap orang perlu memahami tugas dan tanggung jawab mereka agar produksi berjalan lancar. Jika semua orang tahu apa yang harus dilakukan, kita bisa meminimalkan kesalahan. Menurut kami dengan memahami tupoksi, kita bisa mengoptimalkan hasil panen dan pengolahan karet. Salah satu adanya hasil kesepakatan yg mana dengan mengadakan pertemuan rutin setiap bulan untuk mengevaluasi kinerja dan membahas tantangan yang dihadapi di lapangan. Sesuai kesepakatan, kita sepakat untuk memberikan perlindungan yang sama terhadap hak-hak semua stakeholder, termasuk pemegang saham minoritas. Ini penting agar tidak ada pihak yang merasa diabaikan. Pertama, kita perlu membangun komunikasi yang transparan. Ini penting untuk membangun kepercayaan. Kita harus selalu memberikan informasi yang jelas dan terbuka tentang perkembangan dan tantangan yang kita hadapi. Kedua, kita harus memahami kebutuhan dan harapan setiap stakeholder. Dengan mengetahui apa yang mereka inginkan, kita dapat menyesuaikan pendekatan kita dan lebih responsif terhadap kebutuhan mereka. Ketiga, mari kita libatkan semua pihak dalam pengambilan keputusan. Dengan mendengarkan masukan dari semua stakeholder, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan pasar.

Senada dengan yang disampaikan bapak Iram mengenai penerapan tata kelola secara kewajaran (*fairness*) perspektif ekonomi Islam di kebun karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Aengsono

⁸² Dedi Irawanto, *wawancara*, Jember, 19 November 2024.

Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember. Selaku Admin 1 menyampaikan hal serupa.⁸³

Kami selaku admin 1 bekerja sesuai tupoksi, penting bagi kita untuk bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing. Setiap individu harus memahami tugas dan tanggung jawab mereka agar proses operasional berjalan lancar. Dengan cara ini, kita dapat mengoptimalkan hasil dan meminimalkan kesalahan. Misalnya, jika semua orang tahu perannya dalam proses panen, kita bisa meningkatkan efisiensi dan hasil produksi. Jika setiap orang tahu apa yang harus dilakukan, hasilnya pasti akan lebih baik dan lebih terukur. Selanjutnya, kita perlu memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Ini berarti kita harus secara rutin mengevaluasi kinerja dan memastikan bahwa semua pihak memenuhi komitmen mereka. Dengan melakukan evaluasi berkala, kita bisa mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan merayakan pencapaian yang telah diraih. Kesepakatan yang Sama Sesuai Hak dan Keadilan. Pastikan bahwa kesepakatan yang dibuat mencerminkan hak dan keadilan bagi semua stakeholder. Kita harus berkomitmen untuk melindungi hak-hak setiap individu, termasuk pemegang saham minoritas, agar tidak ada pihak yang merasa diabaikan atau dirugikan dalam proses pengambilan keputusan. Terakhir saya memberi saran secara profesional. Beberapa saran profesional ini untuk meningkatkan kolaborasi kita. Kita tingkatkan komunikasi antar tim agar informasi dapat disampaikan dengan cepat dan jelas. Ini termasuk penggunaan alat komunikasi yang efektif untuk memastikan semua orang mendapatkan informasi terbaru.

Selanjutnya diwawancarai oleh bapak Selamat Santoso selaku asisten (Ass) Tekpol beliau mengatakan bahwa:⁸⁴

Kami disini memahami betul tentang bekerja sesuai tupoksi. penting bagi kita untuk bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing. Setiap individu harus memahami tugas dan tanggungjawab mereka agar oprasional berjalan dengan lancar. Dengan cara ini, kita dapat mengoptimalkan hasil dan mminimalkan kesalahan. Selanjutnya kita perlu memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Ini berarti kita harus secara rutin mengevaluasi kinerja dan memastikan bahwa semua pihak memenuhi komitmen mereka. Selanjutnya pastikan bahwa

⁸³ Iram, wawancara, Jember, 22 November 2024.

⁸⁴ Selamat Santoso, wawancara, Jember, 21 November 2024.

keepakatan yang dibuat mencerminkan hak keadilan bagi semua stakeholder. Kita harus melindungi hak-hak setiap individu agar tidak ada pihak yang merasa diabaikan. Terakhir menurut kami memberikan saran profesional tujuannya untuk meningkatkan kolaborasi kita.

Dari beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan, bahwa penerapan tata kelola secara kewajaran di Kebun Karet Gunung Gambir, penerapan prinsip *fairness* dalam pengelolaan kebun karet sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pemangku kepentingan, termasuk karyawan dan petani mitra, diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi. Dengan memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing individu sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan, kita dapat mengoptimalkan hasil panen serta meminimalkan kesalahan yang mungkin terjadi. Pertemuan rutin bulanan untuk evaluasi kinerja dan pembahasan tantangan di lapangan menjadi langkah strategis yang efektif dalam menjaga transparansi dan membangun kepercayaan di antara semua pihak yang terlibat. Selain itu, memahami kebutuhan dan harapan setiap stakeholder serta melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan sangatlah penting. Hal ini akan memastikan bahwa hasil yang dicapai mencerminkan hak dan keadilan bagi semua pihak, sehingga tidak ada yang merasa diabaikan atau dirugikan. Dengan komunikasi yang efektif dan evaluasi berkala, kita dapat memastikan bahwa semua pihak memenuhi komitmen mereka, serta melindungi hak-hak individu, termasuk pemegang saham minoritas.

Berdasarkan hasil observasi terkait penerapan tata kelola secara kewajaran (*fairness*) perspektif ekonomi Islam di kebun karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Aengsono Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember di lapangan melalui transparansi dalam pengelolaan, penerapan tata kelola secara kewajaran (*fairness*) di Kebun Karet Gunung Gambir berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor penghambat yang signifikan. Semua pemangku kepentingan, termasuk manajemen dan karyawan, memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), yang mendukung implementasi *fairness*. Budaya perusahaan yang kuat dan nilai-nilai etika yang tinggi menjadi landasan bagi semua praktik yang adil dan transparan. Selain itu, keterbukaan informasi dan komunikasi yang efektif memastikan bahwa setiap pihak merasa dihargai dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Dengan dukungan penuh dari semua elemen organisasi, penerapan prinsip *fairness* tidak hanya berjalan dengan baik, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kinerja perusahaan dan kepercayaan masyarakat. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa komitmen terhadap tata kelola yang baik dapat tercapai tanpa kendala yang berarti.⁸⁵

Dari hasil wawancara dan observasi tentang penerapan tata kelola secara kewajaran (*fairness*) perspektif ekonomi Islam di kebun karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Aengsono Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember didukung oleh data dokumentasi yang diperoleh di lapangan.

⁸⁵ Observasi, Jember, 22 November 2024.

Gambar 4.5 Penerapan Tata Kelola Secara Kewajaran (*Fairness*)



Sumber: Dokumentasi Penerapan Tata Kelola Secara Kewajaran (*Fairness*)

Penerapan tata kelola secara kewajaran (*fairness*) perspektif ekonomi Islam di kebun karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Aengsono Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember dari hasil dokumentasi disimpulkan berjalan lancar tanpa adanya faktor penghambat yang signifikan. Semua pemangku kepentingan, termasuk manajemen dan karyawan, memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), yang mendukung implementasi *fairness*. Budaya perusahaan yang kuat dan nilai-nilai etika yang tinggi menjadi landasan bagi praktik yang adil dan transparan. Selain itu, keterbukaan informasi dan komunikasi yang efektif memastikan bahwa setiap pihak merasa dihargai dan terlibat dalam pengambilan keputusan.

5. Penerapan Tata Kelola Secara Kemandirian (*Independency*) Perspektif Ekonomi Islam Di Kebun Karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Aengsono Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Perspektif Ekonomi Islam

Tata kelola secara kemandirian (*Independency*) dalam perspektif Ekonomi Islam menekankan pentingnya pengelola, pengawas yang bebas dari pengaruh dan intervensi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam pengambilan keputusan. Perusahaan senantiasa memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan secara kemandirian (*Independency*), tidak saling mendominasi serta bebas dari benturan kepentingan. Hal ini diwujudkan dengan menunjuk pihak independen dalam Dewan Komisaris dan Direksi, serta memaksimalkan peran Komite Audit dalam pengawasan kegiatan usaha. Dengan menerapkan tata kelola secara independensi, perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek tetapi juga berusaha menciptakan nilai jangka panjang yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Sebagaimana wawancara yang peneliti lakukan terhadap bapak Dedi Irawanto, selaku manajer beliau berkata:⁸⁶

Menurut kami bahwa independensi sebagai kemampuan untuk membuat keputusan berdasarkan fakta dan kepentingan terbaik perusahaan, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak lain. independensi sangat penting untuk menjaga kredibilitas perusahaan dan kepercayaan dari investor serta pemangku kepentingan lainnya. Selain itu kami juga mengungkapkan adanya tidak saling mendominasi Perusahaan memiliki aturan yang membatasi pengaruh pemegang saham mayoritas dalam keputusan operasional sehari-hari. Setiap departemen memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas, sehingga tidak ada satu pihak yang

⁸⁶ Dedi Irawanto, *wawancara*, Jember, 25 November 2024.

terlalu mendominasi serta Perusahaan memiliki prosedur untuk mengevaluasi dan menangani benturan kepentingan secara adil dan transparan. Keputusan yang melibatkan potensi benturan kepentingan harus disetujui oleh pihak independen.

Senada dengan disampaikan oleh bapak Agus Purwanto, selaku asisten Gunung Gambir beliau mengatakan bahwa:⁸⁷

Kami ingin menjelaskan bahwa tata kelola yg dilakukan secara independensi diartikan sebagai kemampuan untuk membuat keputusan berdasarkan fakta dan kepentingan terbaik perusahaan, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak lain. Hal ini sangat penting untuk menjaga kredibilitas perusahaan dan kepercayaan dari investor serta pemangku kepentingan lainnya. Serta perusahaan kami memiliki aturan yang membatasi pengaruh pemegang saham mayoritas dalam keputusan operasional sehari-hari. Setiap departemen memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas, sehingga tidak ada satu pihak yang terlalu mendominasi. Dan kami bebas dari benturan kepentingan perusahaan menerapkan prosedur untuk mengevaluasi dan menangani benturan kepentingan secara adil dan transparan. Keputusan yang melibatkan potensi benturan kepentingan harus disetujui oleh pihak independen.

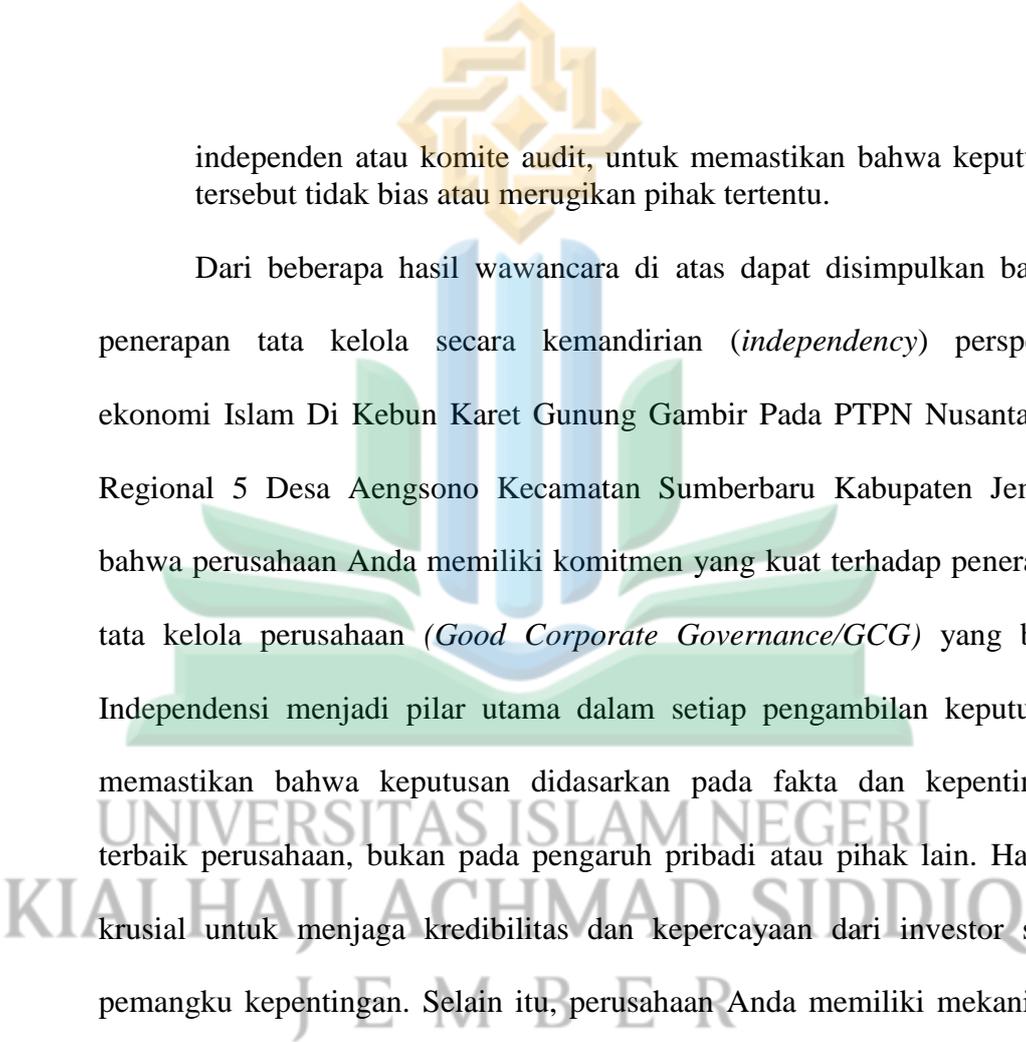
Selanjutnya disampaikan oleh Asisten kepala bapak Hendro Setyo

Wibowo, beliau mengatakan bahwa:⁸⁸

Menurut kami bahwa tata kelola yang dilakukan secara independensi diartikan sebagai kemampuan untuk membuat keputusan berdasarkan fakta dan kepentingan terbaik perusahaan. Keputusan ini diambil tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak lain, sehingga memastikan objektivitas dalam setiap langkah strategis perusahaan. Dan perusahaan kami Perusahaan memiliki aturan yang jelas untuk membatasi pengaruh pemegang saham mayoritas dalam keputusan operasional sehari-hari. Dengan demikian, semua pihak memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pendapat tanpa ada dominasi dari satu pihak tertentu. Perusahaan kami telah menerapkan prosedur khusus untuk mengevaluasi dan menangani potensi benturan kepentingan secara adil dan transparan. Serta perusahaan kami memiliki Keputusan yang melibatkan potensi benturan kepentingan harus melalui persetujuan pihak independen, seperti anggota dewan komisaris

⁸⁷ Agus Purwanto, *wawancara*, Jember, 25 November 2024.

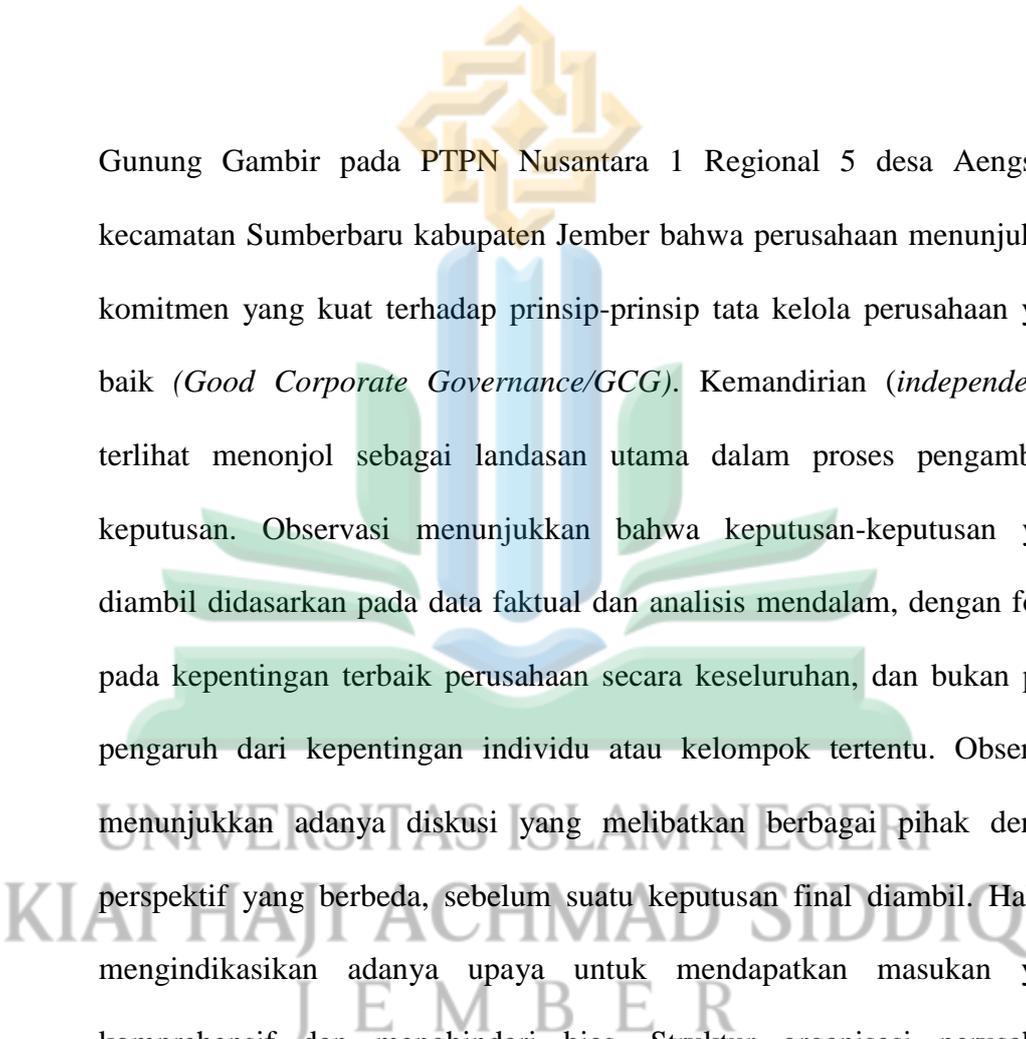
⁸⁸ Hendro, *wawancara*, Jember, 28 November 2024.



independen atau komite audit, untuk memastikan bahwa keputusan tersebut tidak bias atau merugikan pihak tertentu.

Dari beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan tata kelola secara kemandirian (*independency*) perspektif ekonomi Islam Di Kebun Karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Aengsono Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember bahwa perusahaan Anda memiliki komitmen yang kuat terhadap penerapan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance/GCG*) yang baik. Independensi menjadi pilar utama dalam setiap pengambilan keputusan, memastikan bahwa keputusan didasarkan pada fakta dan kepentingan terbaik perusahaan, bukan pada pengaruh pribadi atau pihak lain. Hal ini krusial untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan dari investor serta pemangku kepentingan. Selain itu, perusahaan Anda memiliki mekanisme untuk mencegah dominasi oleh pemegang saham mayoritas, memberikan ruang bagi semua pihak untuk menyampaikan pendapat secara setara. Benturan kepentingan juga dikelola dengan serius melalui prosedur evaluasi dan penanganan yang adil dan transparan, serta melibatkan pihak independen dalam pengambilan keputusan terkait. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, tetapi juga pada keberlanjutan bisnis dengan memperhatikan hak dan kepentingan seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan nilai jangka panjang yang bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi penerapan tata kelola secara kemandirian (*independency*) perspektif ekonomi Islam Di Kebun Karet



Gunung Gambir pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 desa Aengsono kecamatan Sumberbaru kabupaten Jember bahwa perusahaan menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*). Kemandirian (*independency*) terlihat menonjol sebagai landasan utama dalam proses pengambilan keputusan. Observasi menunjukkan bahwa keputusan-keputusan yang diambil didasarkan pada data faktual dan analisis mendalam, dengan fokus pada kepentingan terbaik perusahaan secara keseluruhan, dan bukan pada pengaruh dari kepentingan individu atau kelompok tertentu. Observasi menunjukkan adanya diskusi yang melibatkan berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda, sebelum suatu keputusan final diambil. Hal ini mengindikasikan adanya upaya untuk mendapatkan masukan yang komprehensif dan menghindari bias, Struktur organisasi perusahaan menunjukkan pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas antar departemen. Hal ini mendukung pencegahan dominasi oleh satu pihak saja. Observasi menunjukkan adanya mekanisme pengawasan internal yang berfungsi untuk memastikan bahwa semua tindakan perusahaan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku.⁸⁹

Dari hasil wawancara dan observasi tentang penerapan tata kelola secara kemandirian (*independency*) perspektif ekonomi Islam Di Kebun Karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Aengsono

⁸⁹ Observasi, Jember 25 November 2024.

Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember didukung oleh data dokumentasi yang diperoleh di lapangan.

**Gambar 4.6 Penerapan Tata Kelola Secara kemandirian
(*independency*)**



**Sumber: Dokumentasi Penerapan Tata Kelola Secara kemandirian
(*independency*)**

Berdasarkan dokumentasi yang ada, dapat disimpulkan bahwa penerapan tata kelola secara kemandirian (*independency*) merupakan pilar krusial dalam *Good Corporate Governance* (GCG), diwujudkan melalui keberadaan Komisaris kemandirian (*independency*), kemandirian (*independency*) yang menjamin pengelolaan perusahaan yang objektif dan bebas dari benturan kepentingan, transparansi informasi, serta akuntabilitas yang jelas pada seluruh organ perusahaan. Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), yang mengacu pada pedoman KNKG, memastikan pengambilan keputusan rasional, menjamin akuntabilitas, transaksi wajar, serta menjaga objektivitas, kredibilitas, dan reputasi perusahaan, yang secara keseluruhan berkontribusi pada keberlanjutan bisnis yang bertanggung jawab.



BAB V

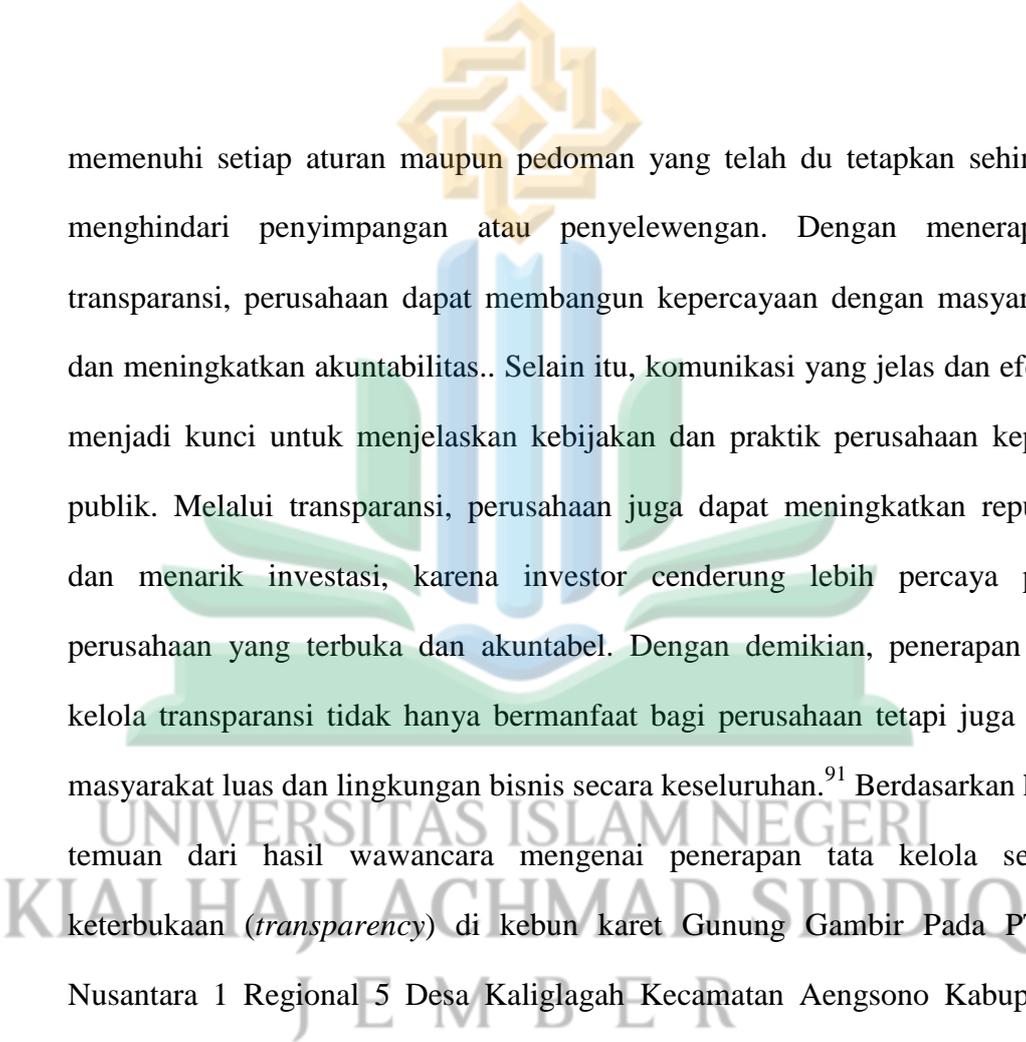
PEMBAHASAN

Pada bagian ini peneliti akan menyampaikan reduksi dari berbagai teori yang dijadikan sebagai pijakan dalam melakukan penelitian. Selain itu peneliti akan mengkombinasikannya dengan hasil temuan dari tempat penelitian yaitu penerapan tata kelola di kebun karet Gunung Gambir pada PTPN nusantara 1 regional 5 desa Aengsono kecamatan Sumberbaru kabupaten Jember perspektif ekonomi Islam. Untuk memudahkan dalam penyajian pembahasan ini, peneliti membagi 5 pembahasan sesuai dengan fokus penelitian yaitu:

A. Penerapan Tata Kelola Secara Keterbukaan (*Transparency*) Di Kebun Karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Kaliglagah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Perspektif Ekonomi Islam

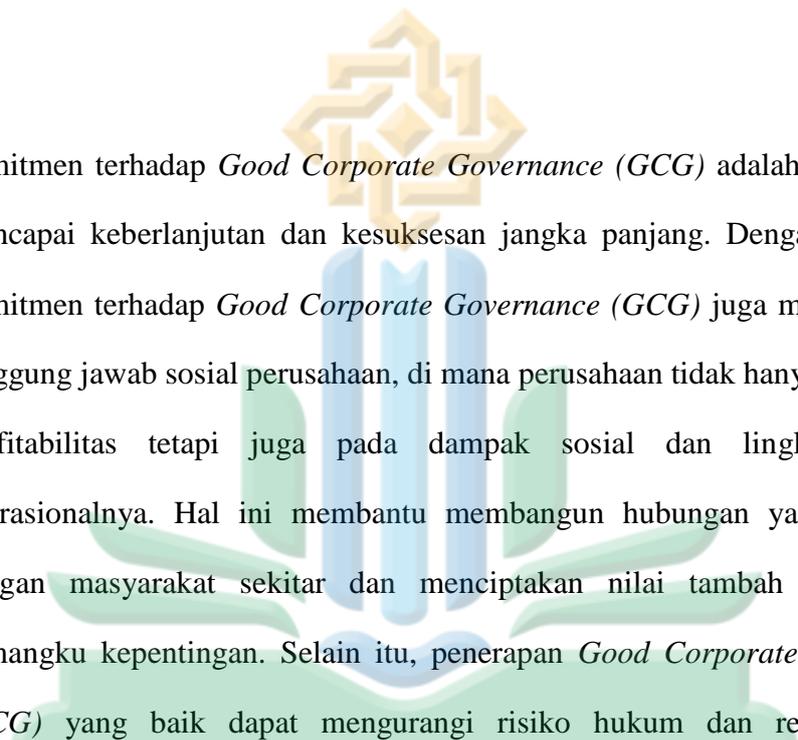
Penerapan tata kelola secara keterbukaan (*transparency*) adalah prinsip yang menekankan keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan penyampaian informasi yang relevan kepada pemangku kepentingan. Transparansi memastikan bahwa semua informasi disampaikan secara akurat dan tepat waktu, sehingga dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan.⁹⁰ Hal ini mencakup keterbukaan terhadap informasi data, proses, maupun kegiatan perusahaan. setiap orang baik pemilik lahan maupun stakeholder serta masyarakat dapat mengaksesnya sehingga tidak ada data informasi kegiatan yang ditutup-tutupi. penerapan prinsip transparansi cenderung akan

⁹⁰ Rusdiyanto, *Good Corporate Governance Teori Dan Implementasi Di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2019), 107.



memenuhi setiap aturan maupun pedoman yang telah ditetapkan sehingga menghindari penyimpangan atau penyelewengan. Dengan menerapkan transparansi, perusahaan dapat membangun kepercayaan dengan masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas.. Selain itu, komunikasi yang jelas dan efektif menjadi kunci untuk menjelaskan kebijakan dan praktik perusahaan kepada publik. Melalui transparansi, perusahaan juga dapat meningkatkan reputasi dan menarik investasi, karena investor cenderung lebih percaya pada perusahaan yang terbuka dan akuntabel. Dengan demikian, penerapan tata kelola transparansi tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan tetapi juga bagi masyarakat luas dan lingkungan bisnis secara keseluruhan.⁹¹ Berdasarkan hasil temuan dari hasil wawancara mengenai penerapan tata kelola secara keterbukaan (*transparency*) di kebun karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Kaliglagah Kecamatan Aengsono Kabupaten Jember, peneliti dapat menganalisis bahwa Prinsip keterbukaan (*transparency*) yang diterapkan oleh kebun karet Gunung Gambir diwujudkan dalam bentuk penyampaian informasi secara terbuka kepada semua pihak seperti penggunaan papan informasi dan group chat. Hal ini bisa meningkatkan efektivitas kerja juga membangun kolaborasi yang kuat di antara semua pihak yang terlibat menjadikan keterbukaan dalam setiap proyek yang dikelola. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* secara konsisten, perusahaan tidak hanya meningkatkan kepercayaan pasar tetapi juga mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui semua langkah ini, perusahaan menunjukkan bahwa

⁹¹ Eko Sudarmanto, *Good Corporate Governance (GCG)* (Surabaya: Yayasan Kita Menulis, 2021), 28.



komitmen terhadap *Good Corporate Governance (GCG)* adalah kunci untuk mencapai keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang. Dengan demikian, komitmen terhadap *Good Corporate Governance (GCG)* juga mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan, di mana perusahaan tidak hanya fokus pada profitabilitas tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan dari operasionalnya. Hal ini membantu membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar dan menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan. Selain itu, penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* yang baik dapat mengurangi risiko hukum dan reputasi, serta meningkatkan daya saing perusahaan dalam industri yang semakin kompetitif.

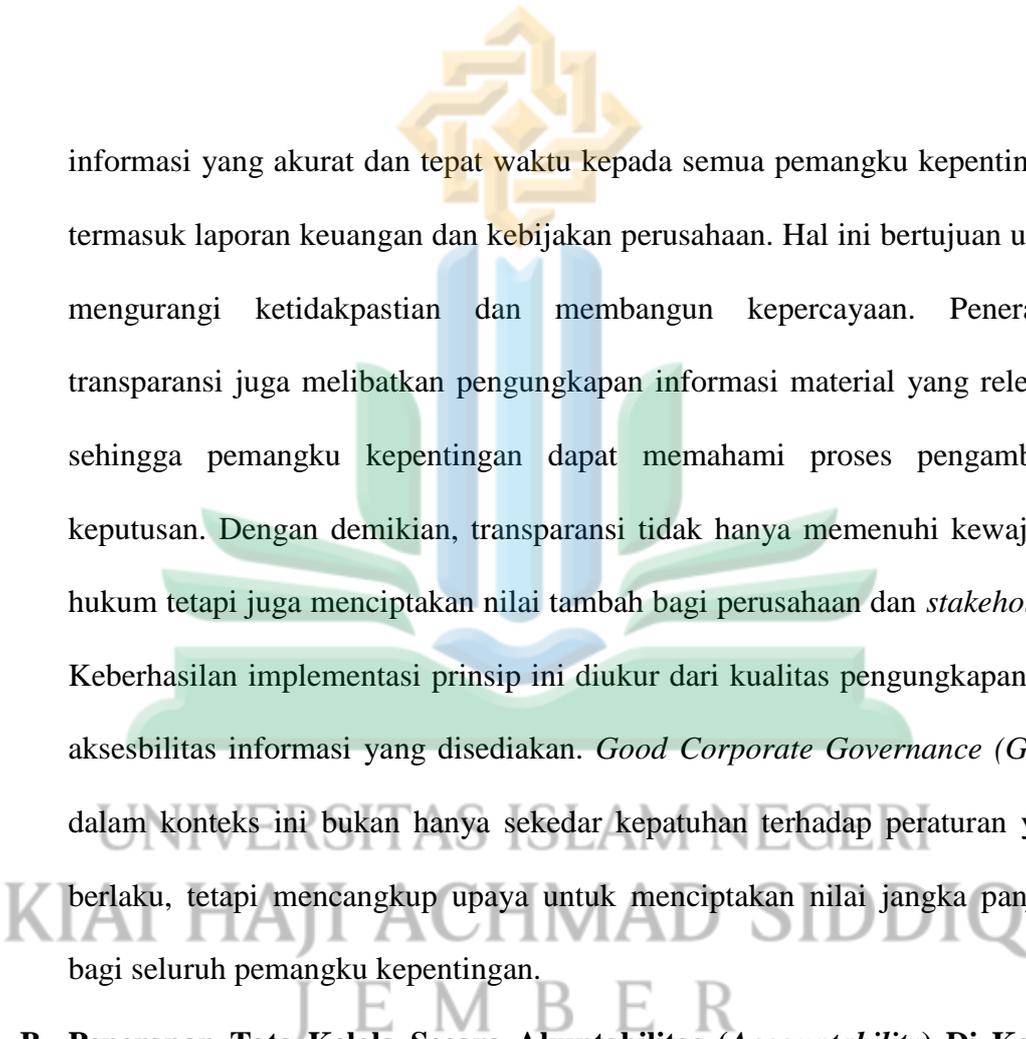
Didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hery Kurniawan, dan Marco Orias yang berjudul “Tata Kelola Keamanan Pabrik Makanan: Sosialisasi Standart Operasional Prosedur (SOP) Kepada Security”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* yang efektif tingkat pemahaman dan implementasi keamanan SOP melalui penelitian awal dilakukan berbagai pabrik makanan yang menjadi pusat kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini di kawasan mengembangkan materi sosialisasi SOP yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing pabrik makanan. Melalui kegiatan pelatihan, personel keamanan pabrik pangan dapat lebih memahami cara menerapkan SOP dilingkungan kerjanya. Setelah pelatihan, penerapan SOP akan dipantau untuk menilai perubahan perilaku dan tingkat kepatuhan personel keamanan.⁹²

⁹² Hery Kurniawan, dan Marco Orias, “Tata Kelola Keamanan Pabrik Makanan: Sosialisasi Standart Operasional Prosedur (SOP) Kepada Security”, *Jurnal Community Development*, 1 (November 2024), 1598-1601.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ubaidillah yang berjudul “*Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Firm Value, dan Financial Performance* sebagai Variabel Pemoderasi.” Hasil temuan dari jurnal ini bahwa Temuan menunjukkan bahwa GCG memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini berarti bahwa penerapan GCG dapat berdampak positif, pengaruhnya tidak cukup kuat untuk menunjukkan perubahan nilai perusahaan secara signifikan, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *Corporate Social Responsibility (CSR)* memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Ini menunjukkan bahwa perusahaan yang berfokus pada kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* tertentu mungkin melihat penurunan dalam penilaian di pasar, yang mungkin disebabkan oleh ketidakpuasan investor atau kurangnya pemahaman tentang manfaat jangka panjang dari kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* tersebut. Sedangkan kinerja keuangan sebagai variabel moderasi berperan penting dalam memperkuat hubungan antara GCG dan CSR terhadap nilai perusahaan. Dengan kinerja keuangan yang baik, efek positif dari GCG dan dampak negatif dari *Corporate Social Responsibility (CSR)* dapat diminimalkan, sehingga membantu dalam meningkatkan nilai perusahaan.⁹³

Berdasarkan fakta dan teori terkait komitmen terhadap prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dalam penerapan tata kelola secara keterbukaan (*transparency*), mengharuskan perusahaan untuk menyediakan

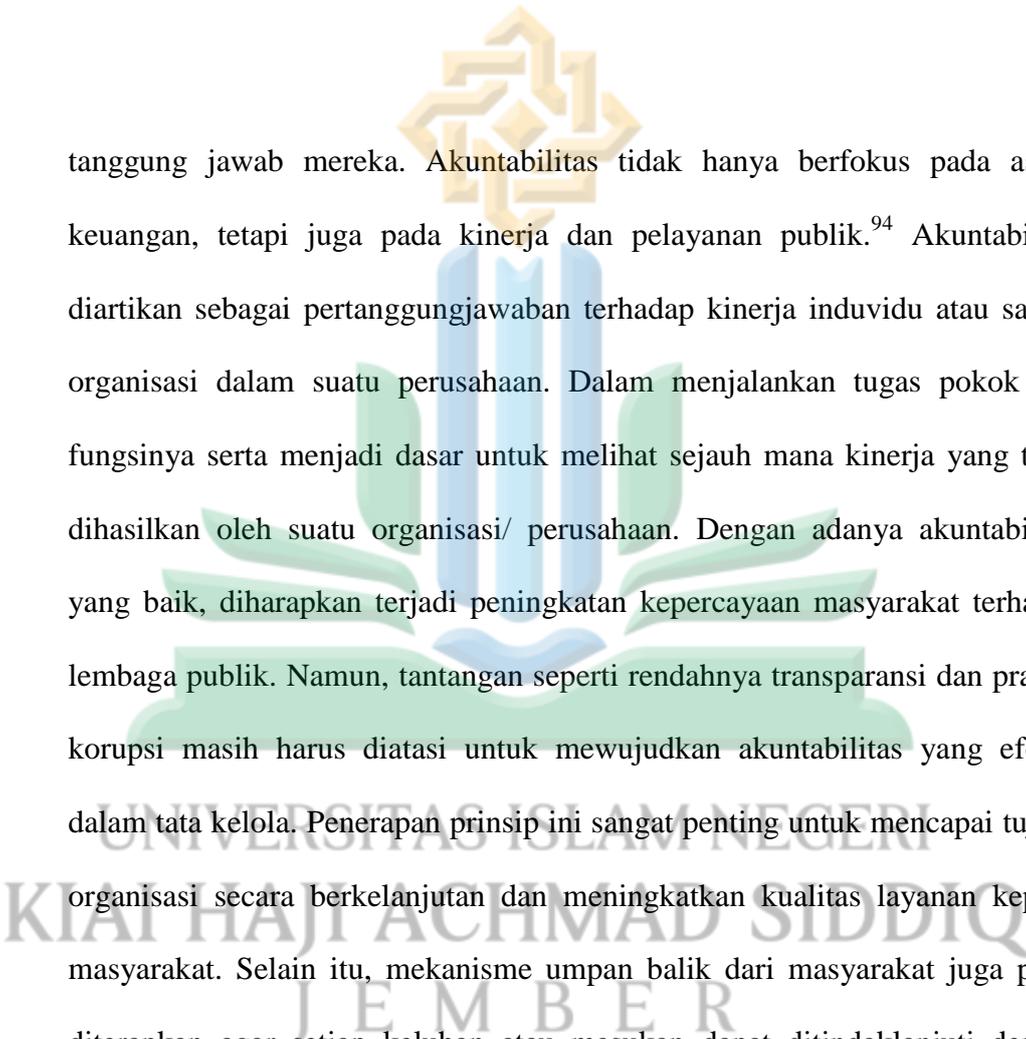
⁹³ Mukhtaruddin, Ubaidillah, Kencana Dewi, “*Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Firm Value, and Financial Performance as Moderating Variable*”, *Journal of Sustainability Accounting and Management*, 1 (Desember 2018), 55-54.



informasi yang akurat dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan, termasuk laporan keuangan dan kebijakan perusahaan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian dan membangun kepercayaan. Penerapan transparansi juga melibatkan pengungkapan informasi material yang relevan, sehingga pemangku kepentingan dapat memahami proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, transparansi tidak hanya memenuhi kewajiban hukum tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dan *stakeholder*. Keberhasilan implementasi prinsip ini diukur dari kualitas pengungkapan dan aksesibilitas informasi yang disediakan. *Good Corporate Governance (GCG)* dalam konteks ini bukan hanya sekedar kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, tetapi mencakup upaya untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

B. Penerapan Tata Kelola Secara Akuntabilitas (*Accountability*) Di Kebun Karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Kaliglagah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Perspektif Ekonomi Islam

Penerapan tata kelola secara akuntabilitas adalah prinsip yang menekankan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan tugas oleh organisasi atau lembaga. Akuntabilitas memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh manajemen dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan pemegang saham. Ini mencakup kejelasan fungsi dan peran masing-masing individu atau unit dalam organisasi, sehingga semua pihak memahami

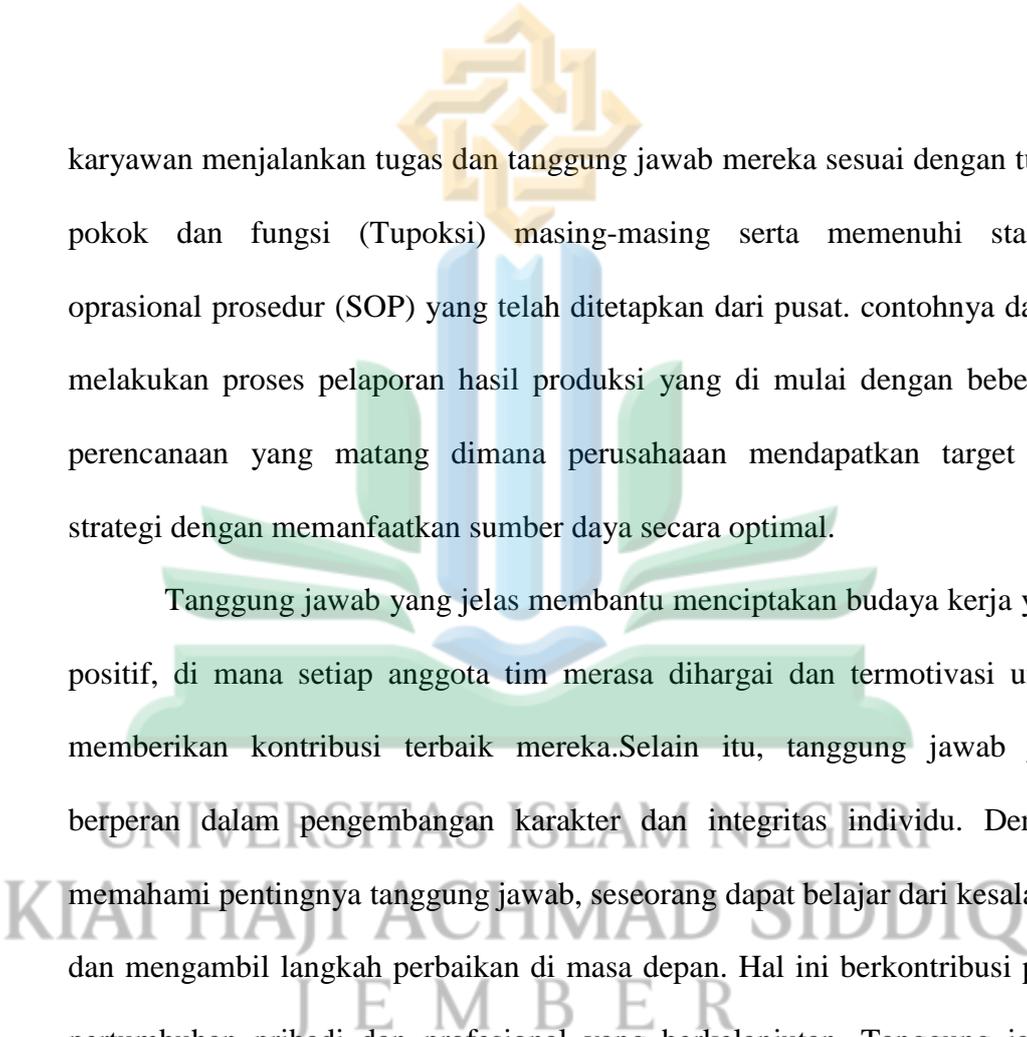


tanggung jawab mereka. Akuntabilitas tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga pada kinerja dan pelayanan publik.⁹⁴ Akuntabilitas diartikan sebagai pertanggungjawaban terhadap kinerja individu atau satuan organisasi dalam suatu perusahaan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta menjadi dasar untuk melihat sejauh mana kinerja yang telah dihasilkan oleh suatu organisasi/ perusahaan. Dengan adanya akuntabilitas yang baik, diharapkan terjadi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik. Namun, tantangan seperti rendahnya transparansi dan praktik korupsi masih harus diatasi untuk mewujudkan akuntabilitas yang efektif dalam tata kelola. Penerapan prinsip ini sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi secara berkelanjutan dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Selain itu, mekanisme umpan balik dari masyarakat juga perlu diterapkan agar setiap keluhan atau masukan dapat ditindaklanjuti dengan baik. Penggunaan teknologi informasi untuk pelaporan dan pengawasan juga dapat meningkatkan akuntabilitas dengan mempermudah akses informasi bagi publik. Dengan demikian, penerapan akuntabilitas yang kuat akan mendorong budaya integritas dan profesionalisme dalam organisasi, serta menciptakan lingkungan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.⁹⁵

Berdasarkan hasil temuan dari hasil wawancara mengenai penerapan tata kelola secara akuntabilitas (*accountability*) di kebun karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Aengsono Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember diwujudkan dalam setiap pimpinan dan

⁹⁴ Rusdiyanto, *Good Corporate Governance Teori Dan Implementasi Di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2019), 108.

⁹⁵ Eko Sudarmanto, *Good Corporate Governance (GCG)*,29-30.



karyawan menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing serta memenuhi standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dari pusat. contohnya dalam melakukan proses pelaporan hasil produksi yang di mulai dengan beberapa perencanaan yang matang dimana perusahaan mendapatkan target dan strategi dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal.

Tanggung jawab yang jelas membantu menciptakan budaya kerja yang positif, di mana setiap anggota tim merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan kontribusi terbaik mereka. Selain itu, tanggung jawab juga berperan dalam pengembangan karakter dan integritas individu. Dengan memahami pentingnya tanggung jawab, seseorang dapat belajar dari kesalahan dan mengambil langkah perbaikan di masa depan. Hal ini berkontribusi pada pertumbuhan pribadi dan profesional yang berkelanjutan. Tanggung jawab yang kuat juga dapat meningkatkan reputasi individu dalam komunitas atau organisasi, karena mereka dikenal sebagai orang yang dapat diandalkan dan dipercaya. Dengan demikian, tanggung jawab bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi merupakan fondasi untuk hubungan yang sehat dan produktif dalam berbagai aspek kehidupan.

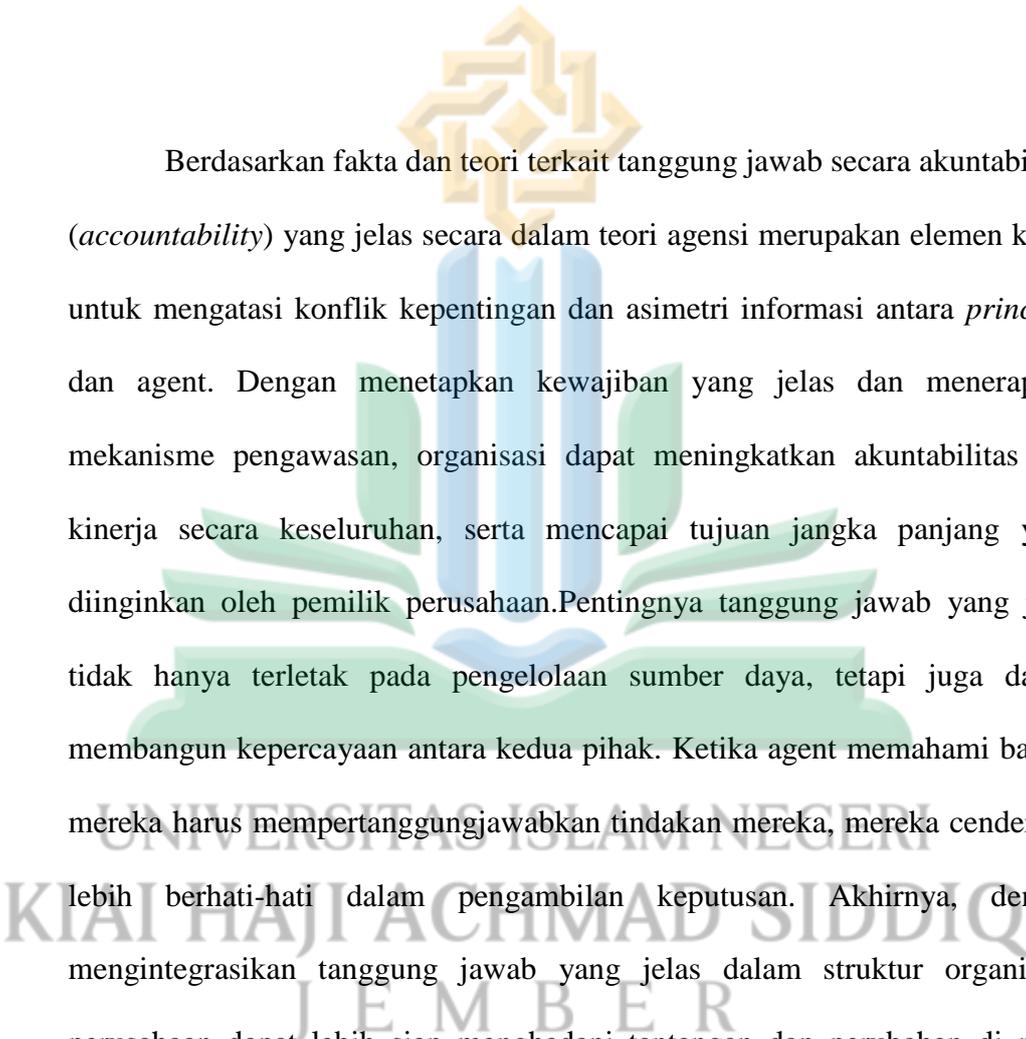
Terkait dengan penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu oleh Rudi Hartono, Marlina yang berjudul “Penerapan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN (studi kasus di PT. perkebunan nusantara IV)” Hasil penelitian menyimpulkan hambatan implementasi pada tata kelola perusahaan yang baik *Good Corporate Governance* terdiri

beberapa faktor antara lain hukum, budaya perusahaan dan SDM, namun pelaksanaannya PT. Perkebunan Nusantara IV tetap berkomitmen sebagai bentuk komitenya dengan membentuk bagian, yang bertugas memantau dan mendorong implementasi penerapannya sesuai dengan ketentuan hukum.⁹⁶

Selanjutnya didukung oleh penelitian sebelumnya tentang “Penerapan sistem akuntabilitas publik dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* di Indonesia” peneliti menemukan hasil dari penelitian terdahulu bahwa sistem akuntabilitas public dan *Good Corporate Governance* menjadi isu penting sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola yang baik. Dimana sistem akuntabilitas salah satu aspek utama dalam mencapai *Good Corporate Governance*, dan lebih mudah mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusannya kepada masyarakat yang aktif, sehingga sistem akuntabilitas dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Meski demikian, tantangan dalam meningkatkan sistem akuntabilitas dan *Good Corporate Governance* di Indonesia masih cukup besar, seperti masih rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas di beberapa lembaga, korupsi serta masih rendahnya keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, upaya dalam meningkatkan sistem akuntabilitas dan *Good Corporate Governance* harus terus dilakukan.⁹⁷

⁹⁶ Rudi Hartono, Dan Marlina, “Penerapan Tata Kelola Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN (Studi Kasus Di PT Perkebunan Nusantara IV)”, *Jurnal Ilmiah Megister Hukum*, 1 (Oktober, 2020), 32.

⁹⁷ Dedeng Yusuf Dan Ajeng, “Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Sosial*, 2 (November, 2023), 5-6.



Berdasarkan fakta dan teori terkait tanggung jawab secara akuntabilitas (*accountability*) yang jelas secara dalam teori agensi merupakan elemen kunci untuk mengatasi konflik kepentingan dan asimetri informasi antara *principal* dan *agent*. Dengan menetapkan kewajiban yang jelas dan menerapkan mekanisme pengawasan, organisasi dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja secara keseluruhan, serta mencapai tujuan jangka panjang yang diinginkan oleh pemilik perusahaan. Pentingnya tanggung jawab yang jelas tidak hanya terletak pada pengelolaan sumber daya, tetapi juga dalam membangun kepercayaan antara kedua pihak. Ketika *agent* memahami bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka, mereka cenderung lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Akhirnya, dengan mengintegrasikan tanggung jawab yang jelas dalam struktur organisasi, perusahaan dapat lebih siap menghadapi tantangan dan perubahan di masa depan. Selain itu, tanggung jawab yang jelas juga membantu dalam pengembangan budaya organisasi yang kuat, di mana setiap anggota tim merasa dihargai dan terlibat. Dengan adanya struktur yang mendukung akuntabilitas, perusahaan dapat lebih mudah mengidentifikasi masalah dan mengambil tindakan korektif dengan cepat. Implementasi sistem pelaporan yang transparan juga memungkinkan pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja manajemen. Ini semua berkontribusi pada keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang.

C. Penerapan Tata Kelola Secara Tanggung Jawab (*Responsibility*) Di Kebun Karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Kaliglagah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Perspektif Ekonomi Islam

Penerapan tata kelola secara tanggung jawab (*responsibility*) dalam konteks perusahaan mencakup kewajiban untuk bertindak dengan integritas dan tanggung jawab serta mematuhi peraturan yang berlaku. Prinsip ini menekankan pentingnya akuntabilitas terhadap semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan lingkungan sekitar. Dalam praktiknya, perusahaan harus mendokumentasikan dan melaporkan setiap tindakan serta keputusan yang diambil, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Hal ini juga mencakup penghindaran dari transaksi yang dapat merugikan pihak ketiga dan memastikan bahwa semua kegiatan perusahaan sejalan dengan etika bisnis yang baik.⁹⁸

Tanggung jawab (*responsibility*) menurut Sudarmanto merupakan prinsip tanggung jawab perusahaan dalam mengemban dan melaksanakan tugas dan wewenang yang telah di berikan kepada perusahaan untuk dikelola secara professional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan prinsip tanggung jawab ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan dan reputasi positif perusahaan. Selain itu, tata kelola yang baik membantu perusahaan dalam mengelola risiko secara efektif dan efisien. Dengan

⁹⁸ Rusdiyanto, *Good Corporate Governance Teori Dan Implementasi Di Indonesia*,101.



demikian, penerapan tanggung jawab dalam tata kelola perusahaan menjadi kunci untuk mencapai tujuan jangka panjang dan keberhasilan usaha yang berkelanjutan. Penerapan tata kelola yang bertanggung jawab juga mencakup pelibatan karyawan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga menciptakan budaya organisasi yang inklusif. Hal ini mendorong inovasi dan meningkatkan motivasi kerja, karena karyawan merasa dihargai dan memiliki peran dalam mencapai visi perusahaan. Selain itu, perusahaan yang menerapkan tata kelola secara tanggung jawab cenderung lebih mampu menarik investasi, karena investor semakin memperhatikan aspek keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dalam keputusan investasi mereka.

Dengan demikian, tata kelola yang bertanggung jawab tidak hanya memberikan manfaat internal bagi perusahaan tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat luas dan lingkungan.⁹⁹

Berdasarkan hasil temuan dari hasil wawancara mengenai penerapan tata kelola secara tanggung jawab (*responsibility*) di kebun karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Aengsono Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember diwujudkan dengan bertanggung jawab mencakup pelibatan karyawan dalam bentuk memastikan bahwa semua kegiatan operasional memenuhi peraturan yang berlaku baik dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan demikian, tata kelola yang bertanggung jawab tidak hanya memberikan manfaat internal bagi perusahaan tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat luas dan lingkungan. dengan

⁹⁹ Eko Sudarmanto, *Good Corporate Governance (GCG)*,31-32.

mengintegritaskan prinsip-prinsip tanggung jawab. perusahaan tidak hanya dapat memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan tetapi juga memperkuat posisi kompetitif di pasar.

Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang berjudul tata kelola perusahaan dan atribut perusahaan pada ketepatan pelaporan keuangan: bukti dari perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Berdasarkan dari hasil penelitian menyimpulkan efek tata kelola perusahaan (Ukuran Dewan Direktur dan Komite Audit) dan atribut perusahaan (Ukuran Perusahaan dan Sektor Perusahaan) yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) di Republik Indonesia. Mekanisme tata kelola perusahaan seperti kekuatan dewan direksi dan komite audit berkorelasi signifikan dengan kualitas laporan keuangan, yang berpotensi memengaruhi perkiraan risiko audito. tata kelola perusahaan yang efektif meningkatkan pengendalian internal dan mengurangi risiko bisnis, sehingga berdampak pada penundaan audit yang lebih singkat.¹⁰⁰

Berdasarkan fakta dan teori bahwa Penerapan tata kelola secara tanggung jawab (*responsibility*) di Kebun Karet Gunung Gambir PTPN Nusantara 1 Regional 5 terwujud melalui pertanggungjawaban kepada manajer wilayah, pengendalian dan pelaporan capaian produksi, serta penyusunan rencana kerja, selaras dengan teori dan didukung oleh penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan seperti dewan direksi dan komite audit berkorelasi dengan kualitas laporan

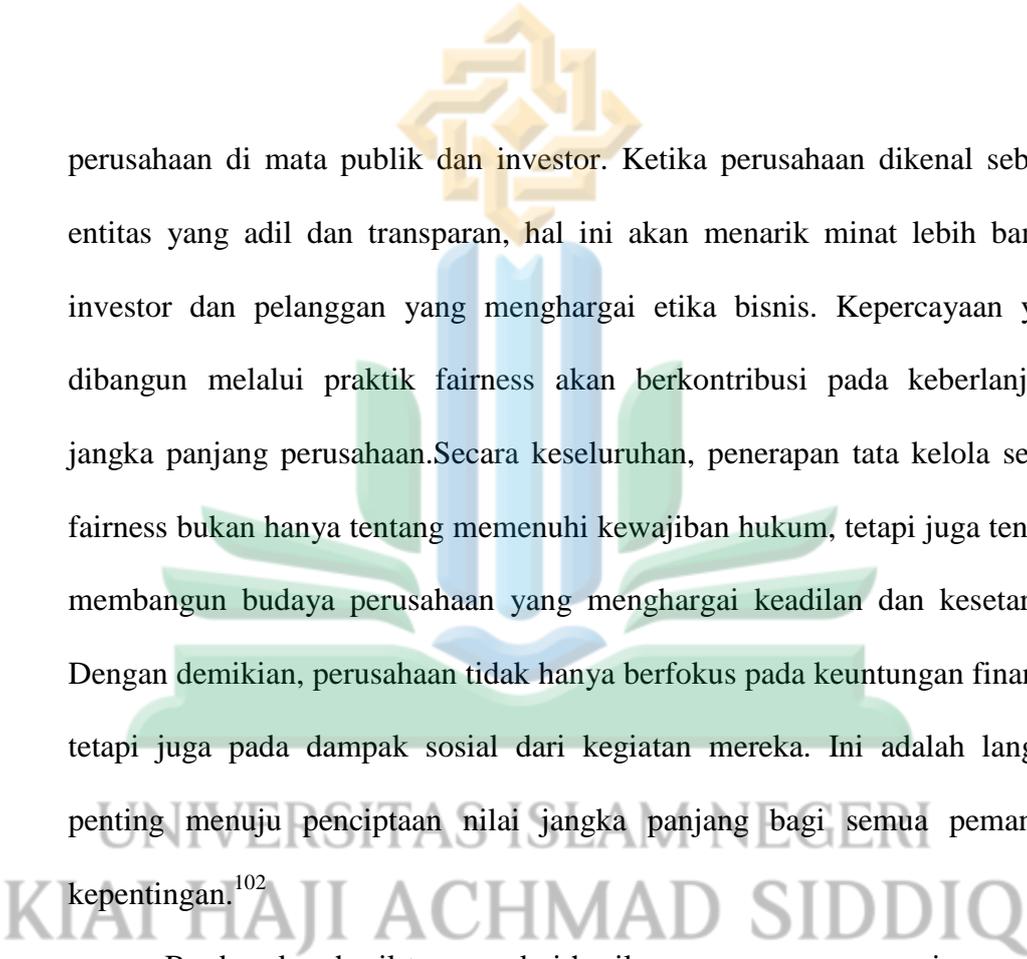
¹⁰⁰ Ikbar Pratama, Dan Marlina, "Tata Kelola Perusahaan dan Atribut Perusahaan pada Ketepatan Pelaporan Keuangan: Bukti dari Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia" *Jurnal Pendidikan dan Humaniora*, 3, (November, 2023), 12-13.

keuangan dan pengendalian internal, dengan memenuhi peraturan berlaku sehingga penerapan tanggung jawab di kebun karet Gunung Gambir sejalan dengan prinsi-prinsip tata kelola secara tanggung jawab (*responsibility*).

D. Penerapan Tata Kelola Secara Kewajaran (*Fairness*) Di Kebun Karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Kaliglagah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Perspektif Ekonomi Islam

Penerapan tata kelola secara kewajaran (*fairness*) dalam konteks *Good Corporate Governance* (GCG) mengacu pada prinsip keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan yang berlaku. Prinsip ini memastikan bahwa setiap pihak, baik pemegang saham, karyawan, maupun masyarakat, diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi. Dalam praktiknya, penerapan kewajaran (*fairness*) melibatkan transparansi dalam pengambilan keputusan, akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan, serta perlindungan terhadap hak-hak stakeholder, sehingga dapat mencegah konflik kepentingan dan membangun kepercayaan di antara semua pihak yang terlibat. Dalam konteks *Good Corporate Governace* (GCG), kewajaran (*fairness*) berperan penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.¹⁰¹ Selain itu, penerapan kewajaran (*fairness*) mendorong perusahaan untuk lebih bertanggung jawab dalam tindakan mereka, karena setiap keputusan yang diambil akan berdampak langsung pada berbagai pemangku kepentingan. Penerapan prinsip kewajaran (*fairness*) dapat meningkatkan reputasi

¹⁰¹ Rusdiyanto, *Good Corporate Governance Teori Dan Implementasi Di Indonesia*,102-103.



perusahaan di mata publik dan investor. Ketika perusahaan dikenal sebagai entitas yang adil dan transparan, hal ini akan menarik minat lebih banyak investor dan pelanggan yang menghargai etika bisnis. Kepercayaan yang dibangun melalui praktik fairness akan berkontribusi pada keberlanjutan jangka panjang perusahaan. Secara keseluruhan, penerapan tata kelola secara fairness bukan hanya tentang memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga tentang membangun budaya perusahaan yang menghargai keadilan dan kesetaraan. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial tetapi juga pada dampak sosial dari kegiatan mereka. Ini adalah langkah penting menuju penciptaan nilai jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan.¹⁰²

Berdasarkan hasil temuan dari hasil wawancara, mengenai penerapan tata kelola secara kewajaran (*Fairness*) di kebun karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Kaliglagah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember di wujudkan dengan mengacu pada prinsip keadilan dan kesetaraan. Dengan menerapkan prinsip ini, perusahaan dapat memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memiliki akses yang sama terhadap informasi dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini tidak hanya meningkatkan rasa keadilan tetapi juga memperkuat hubungan antara perusahaan dan para stakeholder. Prinsip kewajaran (*fairness*) juga membantu mengurangi potensi konflik antara pemegang saham mayoritas dan minoritas dengan memberikan perlakuan

¹⁰² Andra Triyudiana, "Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila", *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1 (Juni, 2023), 1-25.

yang setara dalam hal hak suara dan akses informasi. Dengan adanya regulasi yang jelas mengenai hak-hak pemegang saham, perusahaan dapat menciptakan suasana yang lebih harmonis di mana semua pihak merasa dihargai.

Berdasarkan penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang berjudul “Prinsip *Fairness* Dan Transparansi Dalam Komunikasi Pemasaran Sebagai Upaya Penguatan Pembangunan Ekonomi” dari hasil penelitian ini penerapan *fairness* perusahaan dapat di lihat pada prinsip lingkungan yang diterapkan oleh perusahaan tersebut. berkomitmen untuk mengurangi dampak lingkungan dan oprasinya. Kewajaran (*fairness*) adalah kesetaraan dimana lembaga atau perusahaan memberikan keadilan dan kesetaraan bagi pemangku kepentingan.¹⁰³

Berdasarkan fakta dan teori penerapan tata kelola secara kewajaran (*fairness*), prinsip *fairness* dalam tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance* menekankan perlakuan yang adil dan setara terhadap semua pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, dan masyarakat. penerapan prinsip ini tidak hanya melibatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung hak-hak setiap *stakeholder*. Kewajaran (*fairness*), tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tetapi juga menciptakan harmoni yang lebih baik dalam organisasi dan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip kewajaran (*fairness*), berfungsi sebagai landasan etika dalam pengambilan keputusan, memastikan bahwasemua suara didengar dan dihargai. hal ini juga

¹⁰³ Aditiya Eka Putra Dan Yohannes, “Prinsip *Fairness* Dan Transparansi Dalam Komunikasi Pemasaran Sebagai Upaya Penguatan Pembangunan Ekonomi”, *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 2 (Mei, 2022), 7-8.

mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik yang berkelanjutan dan bertanggung jawab sosial. Dalam konteks globalisasi penerapan prinsip ini membantu perusahaan untuk membangun reputasi yang baik di mata publik dan investor. Selain itu, dengan menerapkan kewajaran (*fairness*), organisasi dapat mengurangi risiko konflik internal dan eksternal yang dapat merugikan operasionalnya. Akhirnya komitmen prinsip kewajaran (*fairness*) dapat meningkatkan loyalitas karyawan dan mendukung pertumbuhan jangka panjang perusahaan.

E. Penerapan Tata Kelola Secara Kemandirian (*Independency*) Di Kebun Karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Kaliglagah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Perspektif Ekonomi Islam

Penerapan tata kelola secara kemandirian (*independency*) perusahaan senantiasa memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan secara independensi, tidak saling mendominasi, serta bebas dari benturan kepentingan. Penerapan tata kelola secara kemandirian (*independency*) prinsip yang berdasarkan pada sikap profesional dan tidak tergantung pada orang lain serta tidak dapat diintervensi oleh orang lain. Sehingga setiap bagian dalam aktivitasnya tidak saling mendominasi dan tidak diintervensi oleh pihak lain. Kemandirian (*independency*) berarti mengelola peran dan fungsi yang dimiliki secara mandiri tanpa adanya tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku serta prinsip dan tata nilai

perusahaan.¹⁰⁴ Dalam konteks perusahaan, kemandirian (*independency*) berarti bahwa para pemegang saham, Dewan Komisaris, dan Direksi sepenuhnya terlepas dari berbagai pengaruh atau tekanan pihak lain yang dapat merugikan, mengganggu, dan mengurangi objektivitas pengambilan keputusan atau menurunkan efektivitas pengelolaan kinerja perusahaan. Prinsip kemandirian (*independency*) wajib diterapkan oleh seluruh pengurus perusahaan saat menjalankan tugas sesuai dengan anggaran dasar perusahaan atau pedoman yang telah dibuat. Pengurus perusahaan tidak diperkenankan membuat suatu kebijakan jika berada dalam pengaruh pihak lain karena adanya hubungan afiliasi, keluarga, kepengurusan, kepemilikan saham, atau hubungan dengan pejabat pemerintahan. Prinsip ini ditetapkan melalui komitmen dan pernyataan dari pengurus perseroan bahwa yang bersangkutan telah menjalankan tugas sesuai dengan prinsip kemandirian (*independency*).¹⁰⁵

Berdasarkan hasil temuan dari hasil wawancara mengenai penerapan tata kelola secara kemandirian (*independency*) di kebun karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Aengsono Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember di lakukan secara kemandirian (*independency*), tidak saling mendominasi, serta bebas dari benturan kepentingan. Independensi berarti perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan maupun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Contohnya dalam proses rekrutmen

¹⁰⁴ Rusdiyanto, *Good Corporate Governance Teori Dan Implementasi Di Indonesia*,102-103.

¹⁰⁵ Safiratul Ummah, "Keberadaan Komisaris Independensi Dalam Menerapkan *Good Corporate Governance* Pada Perseroan Terbatas", *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 1 (Januari,2024), 167-168.

tenaga kerja dilakukan secara terbuka dan transparan dengan kriteria yang jelas dan publikasikan. Hal ini memastikan bahwa kandidat yang terpilih memiliki kompetensi yang sesuai, tanpa memandang latar belakang keluarga atau koneksi pribadi. Independensi memastikan bahwa tiap organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Berdasarkan penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang berjudul "Pengaruh Independensi Auditor, profesionalisme, Dan Pemahaman *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Auditor Pada Kantor Akuntan Publik Dibalai" dari hasil penelitian, peneliti menemukan hasil bahwa seorang auditor yang bersikap professional dapat diandalkan dan dipercaya dalam melakukan pekerjaannya sehingga berjalan dengan lancar, dan memberikan hasil yang baik. Menurut penelitian terdahulu ini bahwa menerapkan kemandirian (*Independency*) berpengaruh positif terhadap kinerja auditor dan didukung oleh profesionalisme.¹⁰⁶ Selanjutnya didukung oleh penelitian terdahulu tentang "pendampingan tata kelola menuju koperasi yang berkelanjutan di selat panjang". Hasil penelitian menunjukkan koperasi adalah sebuah entitas bisnis yang beroperasi untuk kepentingan bersama dan harus dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan bersama. Koperasi juga berperan sebagai pendorong ekonomi masyarakat, yang tidak hanya bertahan tetapi juga berusaha untuk berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaannya memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang mumpuni. Pendampingan tata kelola di Selat Panjang bertujuan agar koperasi dikelola

¹⁰⁶ Adi Sunarya," Pengaruh Independensi Auditor, profesionalisme, Dan Pemahaman *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Auditor Pada Kantor Akuntan Publik Di Bali", *Journal Researc Of Accounting*, 2 (Februari, 2024), 333-342.

lebih efisien dengan fokus keberlanjutan jangka panjang melalui pendidikan, pelatihan, penerapan praktik keberlanjutan, penguatan struktur organisasi, pengembangan bisnis, konsultasi, dan mentoring. Hasilnya, pengurus koperasi dapat membuat laporan keuangan akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada anggota dan pemerintah, serta menerapkan Standar Operating Management (SOM).¹⁰⁷

Berdasarkan fakta dan teori penerapan tata kelola secara kemandirian (*independency*) di kebun karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Aengsono Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember menunjukkan bahwa Penerapan tata kelola independen di Kebun Karet Gunung Gambir PTPN I Regional 5 merupakan implementasi nyata dari komitmen terhadap prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Selaras dengan teori GCG, perusahaan memastikan pengelolaan yang profesional, bebas dari benturan kepentingan, dominasi, atau intervensi dari pihak manapun. Independensi diwujudkan melalui mekanisme penunjukan pihak berreputasi dan independen dalam dewan komisaris dan direksi, serta optimalisasi peran krusial komite audit. Upaya ini menjamin pengambilan keputusan yang objektif, transparan, dan senantiasa selaras dengan kepentingan seluruh *stakeholders* terkait. Hal ini diperkuat oleh dukungan penelitian yang secara konsisten membuktikan bahwa kemandirian (*independency*) auditor, yang didukung oleh profesionalisme yang tinggi, meningkatkan kinerja perusahaan.

¹⁰⁷ Hery Kurniawan, dan Marco Orias, "Tata Kelola Keamanan Pabrik Makanan: Sosialisasi Standart Operasional Prosedur (SOP) Kepada Security", *Jurnal Community Development*, 1 (November 2024), 1598-1601.

Good Corporate Governance dalam perspektif ekonomi Islam pada dasarnya adalah seperangkat sistem, proses, dan struktur pengelolaan perusahaan dengan baik yang didasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah. prinsip *Good Corporate Governance* dalam perspektif Islam pada dasarnya sama dengan prinsip *Good Corporate Governance* secara umum sebagaimana tentang dalam peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* terdiri dari keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran. Pada penelitian ini penerapan kelima prinsip *Good Corporate Governance* tersebut akan dilihat keselarasannya dengan nilai-nilai ekonomi Islam seperti *siddiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fathanah*. Penerapan *Good Corporate Governance* dalam perspektif ekonomi Islam di Kebun Karet Gunung Gambir adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Keterbukaan-*Shiddiq* (Jujur)

Prinsip keterbukaan memiliki keterkaitan yang erat dengan nilai *siddiq* atau kejujuran dalam Islam. Kebun Karet Gunung Gambir PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Aengsono Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember mengimplementasikan prinsip ini dengan menunjukkan sikap jujur dalam setiap kegiatan oprasionalnya. Hal ini diwujudkan melalui penyedia informasi yang terbuka dan jelas, baik dalam bentuk pelaporan atau pimpinan pusat yang terbuka kepada para pemangku kepentingan. Sifat *shiddiq* ini menjadi landasan penting bagi organisasi atau lembaga perusahaan sehingga mencerminkan kejujuran dan

keterbukaan. Tetapi juga memperkuat dengan para anggota. Berikut tabel yang menghubungkan konsep keterbukaan dengan nilai *shiddiq* secara jelas dan sistematis:

Tabel 5.1
Hubungan Keterbukaan-Shiddiq

Keterbukaan (<i>Transparency</i>)	Nilai <i>Shiddiq</i> (Kejujuran)	Hubungan Keduanya
Definisi: Keterbukaan dalam penyampaian informasi yang akurat dan dapat diakses publik.	Kejujuran dan ketulusan dalam menyampaikan dan menjalankan amanah.	Trasparansi adalah bentuk nyata dari sikap <i>shiddiq</i> dalam memberikan informasi yang jujur dan terbuka.
Tujuan: Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelola perusahaan.	Menjaga integritas dan kepercayaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.	Membentuk karakter pribadi dan organisasi yang dapat dipercaya.
Contoh : Rapat Bulanan tentang publikasi laporan keuangan dan penggunaan dana.	Penyampaiannya hasil laporannya sesuai fakta tanpa menutupi kesalahan.	Keterbukaan tanpa <i>shiddiq</i> bisa jadi manipulasi; <i>shiddiq</i> memastikan transparansi berjalan dengan lancar.

Sumber: Data Diolah Tahun 2025

2. Prinsip Akuntabilitas-*Amanah* (Dapat Dipercaya)

Prinsip akuntabilitas yang selaras dengan nilai *amanah* atau dapat dipercaya, merupakan tanggung jawab utama yang diemban oleh setiap pimpinan dan karyawan di PT. Kebun Karet Gunung Gambir PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Aengsono Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi mereka, setiap individu di organisasi ini mematuhi *standar operasional prosedur* (SOP) yang telah ditetapkan. Akuntabilitas yang baik ditunjukkan melalui kemampuan mereka untuk dipertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan yang diambil kepada para stakeholders. Pelaksanaan amanah ini

mencerminkan komitmen tinggi terhadap kepercayaan yang diberikan oleh pihak-pihak terkait, sehingga organisasi mampu integritas dalam setiap aspek kegiatan. Tabel ini merangkum bahwa akuntabilitas adalah wujud nyata dan mekanisme operasional dari *amanah*, di mana *amanah* menjadi landasan moral dan etis, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban teknis dan administratif untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan *amanah* tersebut. Berikut tabel konsep akuntabilitas dengan nilai *amanah* berdasarkan perspektif ekonomi Islam dan hasil kajian dari sumber yang relevan:

Tabel 5.2
Hubungan Akuntabilitas-Amanah

Aspek	Amanah	Akuntabilitas	Hubungan Antara Amanah Dan Akuntabilitas
Definisi	<i>Amanah</i> adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk digunakan sesuai kehendak pemberi <i>amanah</i> tanpa hak milik mutlak.	Akuntabilitas adalah kewajiban pihak yang menerima <i>amanah</i> untuk mempertanggungjawabkan, melaporkan, dan menjelaskan penggunaan <i>amanah</i> tersebut.	Akuntabilitas manifestasi dari <i>amanah</i> yaitu tanggung jawab menjaga dan menggunakan <i>amanah</i> sesuai ketentuan.
Filosofi	<i>Amanah</i> menuntut kejujuran dan tanggungjawab dalam memelihara dan menggunakan yang diamanahkan.	Akuntabilitas menuntut transparan, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas tindakan dan hasil pengelolaan <i>amanah</i> .	Akuntabilitas merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan <i>amanah</i> dalam bentuk laporan pertanggungjawaban.
Hubungan dalam konteks organisasi	Individu/ kelompok sebagai pemegang <i>amanah</i> yang bertugas menjalankan fungsi sesuai <i>amanah</i> .	Individu/ kelompok harus melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsi tersebut kepada pemberi <i>amanah</i> .	Akuntabilitas adalah sarana untuk memastikan <i>amanah</i> dijalankan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara formal.

Sumber: Data Diolah Tahun 2025

3. Prinsip *Responsibility- Fathonah* (Cerdas)

Prinsip *responsibility* dikaitkan dengan nilai *fathonah* atau kecerdasan yang mencerminkan kemampuan organisasi dalam memahami, mematuhi, dan menerapkan regulasi serta tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kebun Karet Gunung Gambir PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Aengsono Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember secara konsisten mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Kecerdasan ini terlihat dari langkah-langkah strategis yang diambil oleh pimpinan dan karyawan untuk memastikan kelangsungan organisasi. Termasuk dalam menjaga keberlanjutan usaha dan hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar dengan demikian, nilai *fathanah* menjadi landasan bagi organisasi untuk tetap relevan dan adaptif dalam berbagai kondisi. Berikut tabel yang menghubungkan konsep *Responsibility* dengan nilai *fathanah* (Cerdas) secara jelas dan sistematis:

Tabel 5.3
Hubungan *Responsibility* – *Fathanah*

Aspek	<i>Fathanah</i>	<i>Responsibility</i> (Tanggung jawab)	Hubungan Antara <i>Fathanah</i> Dan <i>Responsibility</i>
Definisi	<i>Fathanah</i> adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan jujur	<i>Responsibility</i> adalah kewajiban untuk menanggung segala sesuatu yang menjadi tugas dan memberikan jawaban atasnya.	<i>Responsibility</i> adalah bagian esensial dari <i>fathanah</i> seseorang harus bertanggung jawab atas amanah yang diterimanya.
Karakteristik	Meliputi kejujuran, menjaga kepercayaan, dan melaksanakan tugas dengan baik sesuai tanggung jawab yang diberikan.	Melibatkan sikap menerima konsekuensi dan menanggung akibat dari tindakan atau keputusan yang diambil.	<i>Fathanah</i> menuntut adanya <i>Responsibility</i> sebagai wujud nyata menjaga kepercayaan dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.
Dimensi	Terkait hubungannya dengan Allah, sesama manusia, dan diri sendiri sebagai kewajiban moral dan etika	Bertanggungjawab secara sosial dan moral terhadap tugas yang diberikan dan konsekuensi yang muncul.	<i>Fathanah</i> mencakup dimensi moral dan spiritual, sedangkan <i>Responsibility</i> menegaskan kewajiban sosial.
Implementasi Dalam Organisasi	Tanggung Jawab sosial dan tata kelola yang baik (Transparan, akuntabilitas)	Bertanggungjawab sebagai prinsip dalam tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial	<i>Fathanah</i> menjadi prinsip penting dalam <i>Islamic Corporate Governance</i> yang menuntut tanggung jawab dan kepercayaan.

Sumber: Data Diolah Tahun 2025

4. Prinsip Kemandirian - *Amanah* dan *Fathanah*

Prinsip kemandirian mencerminkan perpaduan nilai *amanah* dan *fathanah*, di mana pengelolaan organisasi atau lembaga dilakukan secara mandiri dan bijaksana tanpa terpengaruh oleh pengaruh eksternal yang tidak relevan. Kebun Karet Gunung Gambir PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Aengsono Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember menjaga

kebebasan dalam pengambilan keputusan, sehingga setiap tindakan yang dilakukan berorientasi pada kepentingan organisasi dan para anggotanya. Dengan memadukan *amanah*, yaitu kepercayaan dalam menjalankan tugas, dan *fathanah* yaitu kecerdasan dalam menyikapi situasi. Berikut tabel yang menghubungkan konsep kemandirian dengan nilai *amanah* dan *fathanah* secara jelas dan sistematis:

Tabel 5.4
Hubungan Kemandirian – Amanah Dan Fathanah

Aspek	Kemandirian	Amanah	Fathanah	Hubungan/ Keterkaitan
Definisi	Kemampuan berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain dalam mengambil keputusan	Kepercayaan yang diberikan untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab	Kecerdasan, kemahiran dan keahlian dalam menjalankan	Kemandirian memungkinkan seseorang menjalankan amanah dengan penuh tanggungjawab dan menggunakan fathanah secara optimal dalam mengelolahkan tugas.
Karakteristik	Percaya diri mampu mengambil keputusan sendiri bertanggung jawab kreatif dan mampu menyelesaikan masalah.	Jujur dapat dipercaya, bertanggung jawab menjaga kepercayaan.	Cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual.	Amanah membutuhkan kemandirian agar kepercayaan tidak disalah gunakan dan fathanah mendukung dan kemandirian dengan kecerdasan dalam bertindak.
Peran dalam pelaksanaan tugas	Mengelola tugas tanpa ketergantungan mampu menyelesaikan masalah secara mandiri.	Menjalankan tugas yang dipercayakan dengan integritas dan tanggung jawab.	Menerapkan strategi, inovasi dan kecerdasan untuk hasil terbaik	Kemandirian memperkuat melaksanakan amanah dengan dukungan fathanah agar tugas di kelola secara efektif dan professional.

Sumber: Data Diolah Tahun 2025

5. Prinsip Kewajaran -*Tabligh* (Menyampaikan Kebenaran)

Prinsip kewajaran menyampaikan kebenaran prinsip kewajaran erat kaitannya dengan sifat *tabligh* yaitu menyampaikan kebenaran dan bertindak adil dalam setiap intraksi. Kebun Karet Gunung Gambir PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Aengsono Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember menerapkan asas keadilan dengan memperlakukan seluruh karyawan dan *stakholders* secara setara tanpa adanya deskriminasi. Sikap ini mencerminkan nilai *tabligh* dimana kebenaran dan keadilan selalu ditegakkan dalam setiap aspek oprasional organisasi. Dengan menjaga kewajaran ini organisasi menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan harmonis yang pada akhirnya memperkuat hubungan internal dan eksternal. Prinsip kewajaran ini menjadi bukti nyata bahwa organisasi tidak hanya berkomitmen pada etika kerja tetapi juga pada nilai-nilai keadilan yang sesuai dengan ajaran Islam. Kebun karet Gunung Gambir PTPN Nusantara 1 Regional 5 desa Aengsono kecamatan Sumberbaru kabupaten Jember telah mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam praktik organisasi mereka. Berikut tabel yang menghubungkan konsep kemandirian dengan nilai *tabligh* secara jelas dan sistematis:



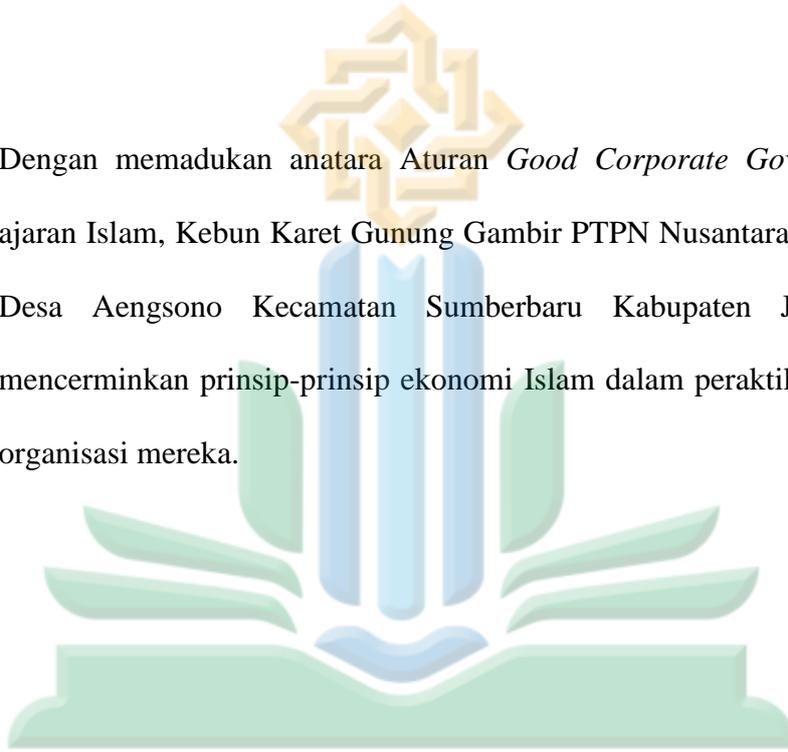
Tabel 5.5
Hubungan Kewajaran – *Tabligh*

Aspek	<i>Kemandrian</i> (independency)	<i>Tabligh</i>	Hubungan/ Keterkaitan
Definisi	Menegapkan keadilan secara objektif tanpa memihak, memberikan hak kepada yang berhak tanpa mengurangi atau menyelewengkan.	Penyebaran ajaran Islam yang menekankan nilai-nilai kebaikan, termasuk keadilan.	<i>Tabligh</i> menyampaikan pesan keadilan sebagai bagian dari dakwah untuk membentuk masyarakat yang adil dan harmonis.
Prinsip Utama	Keadilan adalah pilar utama ketaqwaan, melibatkan sikap jujur dan tidak memihak.	<i>Tabligh</i> sebagai dakwah yang menyebarkan nilai keadilan dan kebaikan.	Menegakkan <i>tabligh</i> adalah bagian penting dari pesan yang disampaikan dalam <i>tabligh</i> untuk meningkatkan ketaqwaan.
Aspek peran dalam masyarakat	Keadilan menjadi fondasi kehidupan masyarakat yang harmonis dan toleran.	<i>Tabligh</i> memperkuat solidaritas dan kebersamaan dalam komunitas muslim.	Melalui <i>tabligh</i> , ditegakkan agar tercipta masyarakat yang adil dan saling menghormati

Sumber: Data Diolah 2025

Dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang sejalan dengan nilai-nilai fundamental dalam ekonomi Islam seperti *siddiq, amanah, tabligh, fathanah* Kebun Karet Gunung Gambir PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Aengsono Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember tidak hanya mematuhi standar tata kelola yang baik, tetapi juga mencerminkan komitmen mereka terhadap etika dan moralitas Islam. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa setiap aspek pengelolaan organisasi dijalankan dengan keterbukaan (*tranparency*), Akuntabilitas, dan tanggung jawab yang tinggi, sejalan dengan perintah agama untuk selalu jujur, bertanggungjawab, dan adil dalam menjalankan amanah.

Dengan memadukan antara Aturan *Good Corporate Governance* dan ajaran Islam, Kebun Karet Gunung Gambir PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Aengsono Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember telah mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam praktik pengelolaan organisasi mereka.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB IV

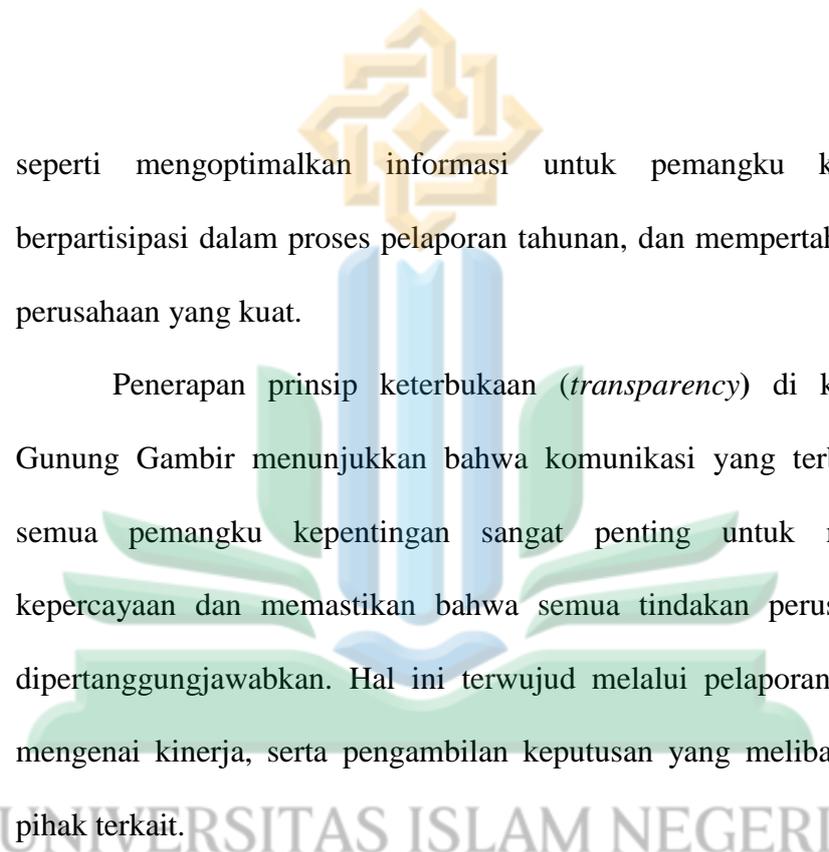
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan fokus penelitian, analisa data dan temuan penelitian dan pembahasan maka hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Tata Kelola Secara Keterbukaan (*Transparency*) Di Kebun Karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Aengsosno Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Perspektif Ekonomi Islam

Penerapan tata kelola secara keterbukaan (*transparency*) perspektif ekonomi Islam dalam tata kelola perusahaan adalah prinsip yang memastikan keterbukaan (*transparency*) dalam pengambilan keputusan dan berbagi informasi dengan pemangku kepentingan. Prinsip keterbukaan memiliki keterkaitan yang erat dengan nilai *siddiq* atau kejujuran dalam Islam. Ini melibatkan menjaga semua informasi akurat dan tepat waktu, memungkinkan pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam keputusan strategis. Keterbukaan (*transparency*) juga mencakup penyediaan komunikasi yang jelas dan efektif, meningkatkan persepsi publik dan praktik perusahaan. Keterbukaan (*transparency*) dalam tata kelola perusahaan sangat penting bagi perusahaan dan para pemangku kepentingannya. Ini melibatkan mengoptimalkan informasi untuk pemangku kepentingan sambil menjaga kepentingan mereka. Ini juga melibatkan promosi transparansi melalui berbagai tindakan dan aksi,



seperti mengoptimalkan informasi untuk pemangku kepentingan, berpartisipasi dalam proses pelaporan tahunan, dan mempertahankan citra perusahaan yang kuat.

Penerapan prinsip keterbukaan (*transparency*) di kebun karet Gunung Gambir menunjukkan bahwa komunikasi yang terbuka antara semua pemangku kepentingan sangat penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan bahwa semua tindakan perusahaan bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini terwujud melalui pelaporan yang jelas mengenai kinerja, serta pengambilan keputusan yang melibatkan semua pihak terkait.

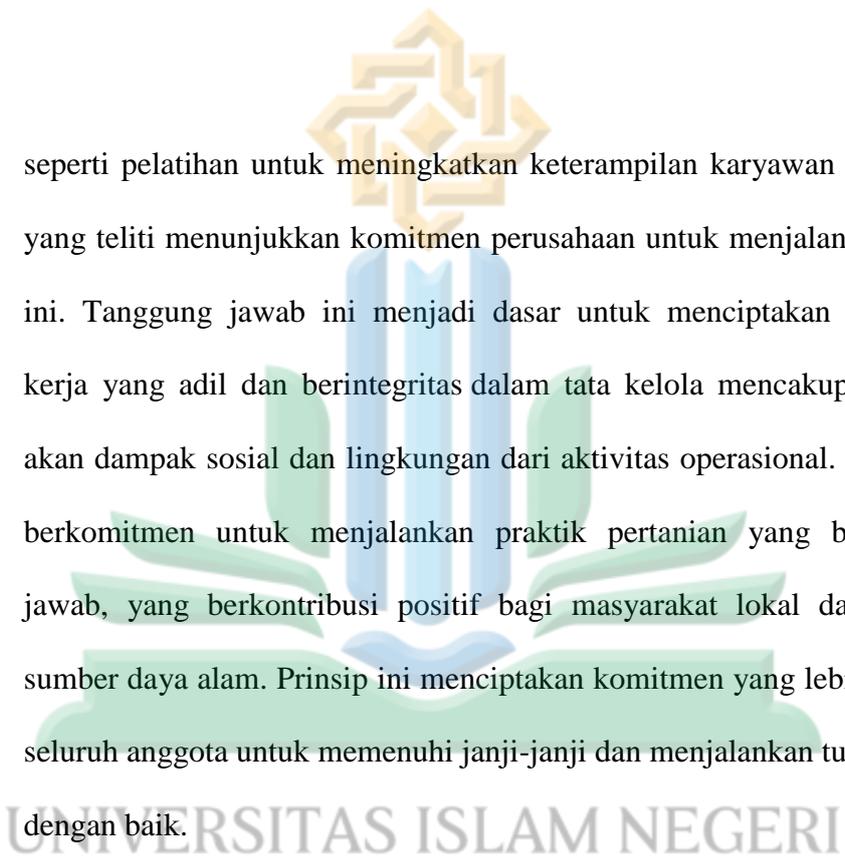
2. Penerapan Tata Kelola Secara Akuntabilitas (*Accountability*) Di Kebun Karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Aengsono Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Perspektif Ekonomi Islam

Prinsip akuntabilitas diimplementasikan dengan memastikan manajemen bertanggung jawab atas keputusan dan hasil yang dicapai. Melalui sistem pengawasan internal yang ketat dan evaluasi rutin, perusahaan berusaha untuk mempertanggungjawabkan setiap langkah yang diambil kepada pemegang saham dan karyawan. Prinsip akuntabilitas yang selaras dengan nilai *amanah* atau dapat dipercaya, merupakan tanggung jawab utama yang diemban oleh setiap pimpinan dan karyawan di PT. Kebun Karet Gunung Gambir PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Aengsono Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember dalam menjalankan

tugas pokok dan fungsi mereka, setiap individu di organisasi ini mematuhi standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Ini meningkatkan efektivitas dan keterandalan laporan yang disampaikan. Tanggung jawab yang jelas adalah keadaan di mana seseorang wajib menanggung segala sesuatu termasuk konsekuensi dari tindakan yang diambil. ini berarti bahwa individu harus mempertimbangkan langkah-langkah yang diambil dan bagaimana keputusan mereka dapat mempengaruhi orang lain.

3. Penerapan Tata Kelola Secara Tanggung Jawab (*Responsibility*) Di Kebun Karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Aengsono Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Perspektif Ekonomi Islam

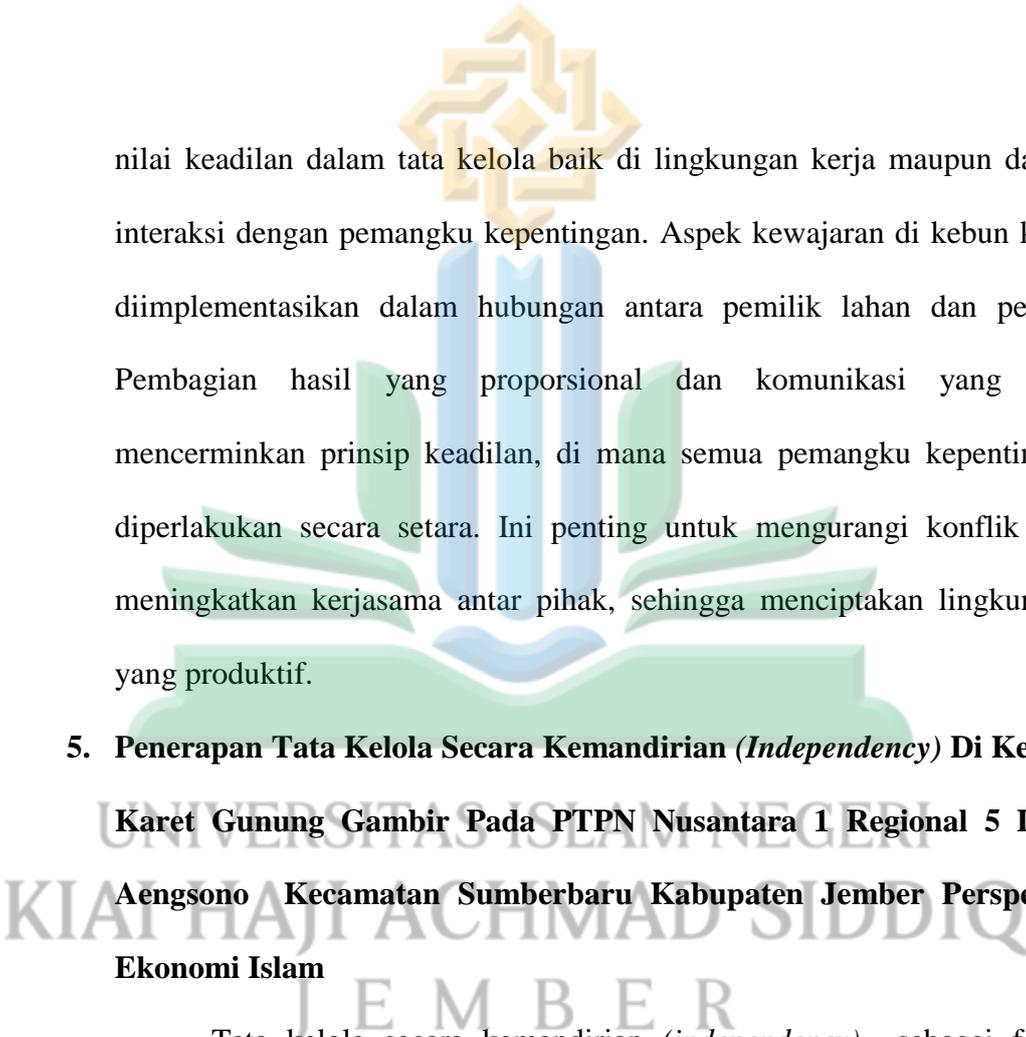
Prinsip tanggung jawab (*responsibility*) dikaitkan dengan nilai *fathonah* atau kecerdasan yang mencerminkan kemampuan organisasi dalam memahami, mematuhi, dan menerapkan regulasi serta tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kebun Karet Gunung Gambir PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Aengsono Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember secara konsisten mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan otoritas jasa keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Kecerdasan ini terlihat dari langkah-langkah strategis yang diambil oleh pimpinan dan karyawan untuk memastikan kelangsungan organisasi. Manajemen di kebun karet Gunung Gambir menunjukkan tanggung jawab yang kuat dalam pengelolaan operasional dan keuangan. Langkah-langkah



seperti pelatihan untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan seleksi yang teliti menunjukkan komitmen perusahaan untuk menjalankan prinsip ini. Tanggung jawab ini menjadi dasar untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan berintegritas dalam tata kelola mencakup kesadaran akan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas operasional. Perusahaan berkomitmen untuk menjalankan praktik pertanian yang bertanggung jawab, yang berkontribusi positif bagi masyarakat lokal dan menjaga sumber daya alam. Prinsip ini menciptakan komitmen yang lebih kuat dari seluruh anggota untuk memenuhi janji-janji dan menjalankan tugas mereka dengan baik.

4. Penerapan Tata Kelola Secara Kewajaran (*Fairness*) Di Kebun Karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Perspektif Ekonomi Islam

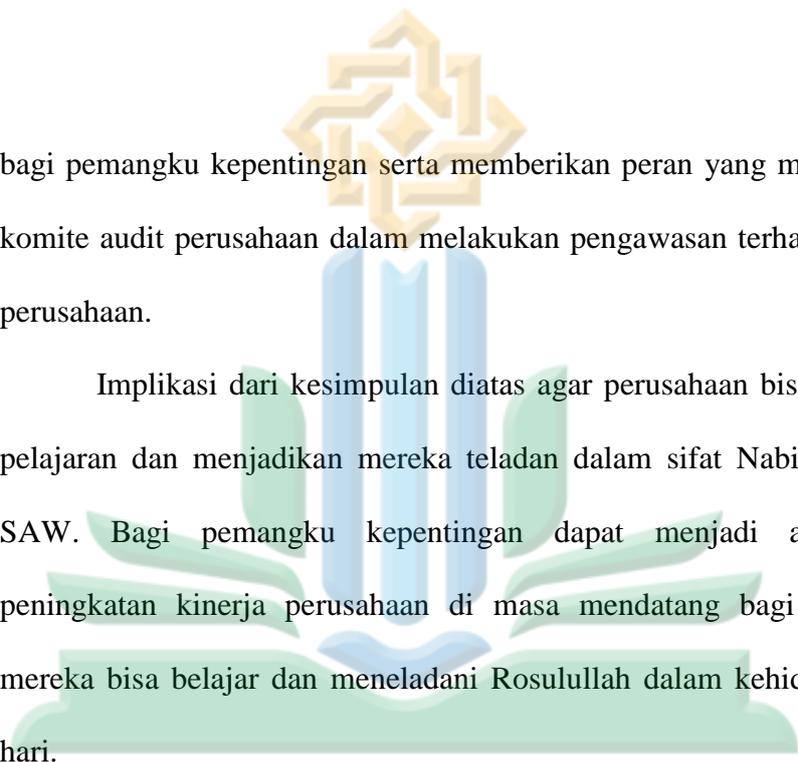
Penerapan prinsip *fairness* memastikan perlakuan yang adil kepada semua karyawan dan pemangku kepentingan. Prinsip kemandirian mencerminkan perpaduan nilai *amanah* dan *fathanah*, dimana pengelolaan organisasi atau lembaga dilakukan secara mandiri dan bijaksana tanpa terpengaruh oleh pengaruh eksternal yang tidak relevan. Kebun Karet Gunung Gambir PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Aengsono Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Langkah-langkah yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan suasana kerja yang inklusif dan perlakuan yang adil terhadap setiap individu merupakan esensi dari nilai-



nilai keadilan dalam tata kelola baik di lingkungan kerja maupun dalam interaksi dengan pemangku kepentingan. Aspek kewajaran di kebun karet diimplementasikan dalam hubungan antara pemilik lahan dan petani. Pembagian hasil yang proporsional dan komunikasi yang adil mencerminkan prinsip keadilan, di mana semua pemangku kepentingan diperlakukan secara setara. Ini penting untuk mengurangi konflik dan meningkatkan kerjasama antar pihak, sehingga menciptakan lingkungan yang produktif.

5. Penerapan Tata Kelola Secara Kemandirian (*Independency*) Di Kebun Karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Aengsono Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Perspektif Ekonomi Islam

Tata kelola secara kemandirian (*independency*) sebagai fokus utama di Kebun Karet Gunung Gambir mencakup perusahaan dilakukan secara kemandirian (*independency*), tidak saling mendominasi, serta bebas dari benturan. Prinsip kewajaran menyampaikan kebenaran prinsip kewajaran erat kaitannya dengan sifat *tabligh* yaitu menyampaikan kebenaran dan bertindak adil dalam setiap intraksi. Kebun Karet Gunung Gambir PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Aengsono kecamatan Sumberbaru kabupaten Jember menerapkan asas keadilan dengan memperlakukan seluruh karyawan dan *stakeholders* secara setara tanpa adanya deskriminasi. Dengan demikian pengambilan keputusan akan senantiasa objektif dan diharapkan dapat memberikan output yang optimal



bagi pemangku kepentingan serta memberikan peran yang maksimal bagi komite audit perusahaan dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan.

Implikasi dari kesimpulan diatas agar perusahaan bisa mengambil pelajaran dan menjadikan mereka teladan dalam sifat Nabi Muhammad SAW. Bagi pemangku kepentingan dapat menjadi acuan untuk peningkatan kinerja perusahaan di masa mendatang bagi masyarakat, mereka bisa belajar dan meneladani Rosulullah dalam kehidupan sehari-hari.

B. Saran

Sebagai tahap akhir dari penyusunan tesis ini, maka peneliti perlu kiranya untuk menyampaikan beberapa saran yang bisa dijadikan sebuah kontribusi pemikiran dan dijadikan sebuah motivasi yang memiliki peran besar dalam upaya menjadikan penerapan tata kelola di kebun karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Aengsono Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember perspektif ekonomi Islam. Saran-saran yang perlu diungkapkan yakni sebagai berikut:

Diharapkan dalam penerapan tata kelola secara keterbukaan (*transparency*), bagi perusahaan melakukan penguatan sistem pengungkapan informasi dan peningkatan mekanisme komunikasi menjadi krusial dan didukung oleh pelatihan karyawan dan evaluasi berkala. Sementara itu, akademisi dan peneliti selanjutnya didorong untuk melakukan

mengembangkan model penerapan tata kelola secara transparansi dan menyertakan materi tata kelola dalam kurikulum pendidikan.

Perusahaan harus menciptakan iklim yang kondusif bagi auditor internal, dengan memastikan struktur pertanggungjawaban sesuai dengan standar yang berlaku serta auditor internal perlu mengembangkan kompetensi terutama kompetensi terkait teknologi seperti data analisis dan diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain serta bisa mengembangkan teori yang telah digunakan karena penelitian dilakukan peneliti belum sempurna. Sehingga disarankan bagi penelitian selanjutnya memberikan kontribusi yang lebih baik.

Dengan mengimplementasikan saran ini, diharapkan kebun karet Gunung Gambir dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai etika serta perspektif Islam demi mencapai keberhasilan jangka panjang. Dengan penerapan saran-saran ini, diharapkan perusahaan tidak hanya memperhatikan aspek profitabilitas, tetapi juga mengedepankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga dapat berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar dan kelestarian ekosistem.



DAFTAR RUJUKAN

- Adrian, Sutedi. 2011. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar.
- Satosa, Agus. 2018. Permasalahan Pengembangan Karet Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Dan Budaya*, 5(5): 5-6.
- Pertiwi, Anggun, Herman, dan Dema Mustnasir, Ahmad. 2021. Penerapan *E-GOVERNMENT* Dalam Mewujudkan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan Desa (Studi Pada Pemerintahan Desa Bulu Timoreng). *Jurnal PRAJA*, 3(10): 130-131.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Asininggar, Amalia. 2023. *Statistik Karet Indonesia*. Jakarta: BPS-Statistik Indonesia.
- Bungin, Burhan. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Darmawan, Roby. 2023. *Analisis Kinerja Perdagangan Karet*. Jakarta: Pusat Data Dan Sistem Informasi Pertanian.
- Dedeng, Yusuf, dan Ajeng. 2023. Penerapan sistem akuntabilitas publik dalam mewujudkan *good corporate governance* di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial*, 2(11):5-6.
- Dedi, Arma, 2023. Perkebunan Karet Dan Kebangkitan Ekonomi Di Afdeling Indragiri Tahun 1920. *Jurnal Ilmu Dan Budaya*, 1(6): 33-34.
- E. Safira, O. Supranto. 2017. Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemenuhan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(6): 78.
- Triyuwono, Edwin, dan Suwandi. 2020. Tata Kelola Perusahaan Sebagai Mekanisme Pengelolaan Resiko Untuk Meningkatkan Nilai Perusahaan. *Jurnal akuntansi*, 2(1): 23-24.
- Effendi. 2009. *The Power Of Good Corporate Governance*. Jakarta: Salemba Empat.
- Emilianus, Kutu, dan Euprasius, Mario Sanda. 2022. Analisis Pelaksanaan Tata Kelola Rencana Strategis, Akuntansi Dan Trasparansi Dana Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Magepanda Kecamatan Magepanda). *Jurnal Auditing Unipa*, 4(6):20.

- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hafidzah, Azmansya, dan Efi Susanti. 2024. Pendampingan Tata Kelola Menuju Koperasi Yang Berkelanjutan Di Selat Panjang”, *Jurnal Community Engegement*,1(6):174-178.
- Hendrawan, Sanerya. 2009. *Spiritual Management: From Personal Enlightenment Towards Islamic Corporate Governance*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Kurniawan, Hery, dan Marco, Orias. 2024. Tata Kelola Keamanan Pabrik Makanan: Sosialisasi Standart Operasional Prosedur (SOP) Kepada Security. *Jurnal Communnity Development*, 1(9):1598-1601.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga.
- Pratama, Ikbar, dan Marlina. 2023. Tata Kelola Perusahaan Dan Atribut Perusahaan Pada Ketepatan Pelaporan Keuangan: Bukti Dari Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Humaniora*, 3(11): 12-13.
- Rahmawati, Inka, dan Falaah Abdussalam, Irda Sari. 2023. Tata Kelola Rekam Medis Berbasis Elektronik Dalam Pengelolaan Pelaporan Instlasi Rawat Jalan Inap Dengan Metode Waterfall. *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, 2(9):313.
- Jensen, Michael C. & William H. Mecckling. 1976. *Theory Of The Frim: Managerial Behafior, Agency Cost, and Ownership Structure*. *Journal Of Financial Economics*, 3(3):305-360.
- K. Yin, Robert. 2011. *Qualitative Research*. New York : Guidford Press.
- Karima, Indah, dan Nabila. 2022. Implemetasi *Good Corporate Governance* (GCG) Dilembaga Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 2(12): 105-108.
- Kasim, Abu. 1415. *Al-Mu'jam Al Wusta*. Kairo: Darharmin.
- Khaidir, Ali, 2020. Tata Kelola Pemerintah Desa Terhadap Peninkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar. *Jurnal Administrasi Public*, 4(10):602-603.
- Srimaya, Laksita, dan Sela, Elsa Amalia. 2023. Penerapan Tata Kelola Islam Dalam Perbankan Syariah Di Indonesi: Sebuah Studi Kepustakaan. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(6): 7-9.
- Mahmuda, Siti. 2023. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jawa Tengah: EUREKA MEDIA AKSARA.

- Masrohatin, Siti. 2022. *Manajemen Kinerja Sumberdaya Manusia Pendekatan Islamic Value*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Musleh, Moch. 2023. Tata Kelola Wisata Gili Iyang: Perspektif Community Based Tourism. *Jurnal Of Contemporary Public Administration*, 1(6): 174-178.
- Moleong, Lexy, J. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Masruroh, Nikmatul dan Ummah, Faikatul. 2018. Upaya Pengembangan Corporate Sosial Responsibility Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Iqtisoduna*, 6(6):46-47.
- Masruroh, Nikmatul, dan Arifin, Samsul, Alfawwaz, Faiz, Agus, Munawwaroh, Sofiatul, 2023. Peningkatan Integritas Melalui Tata Kelola Kelembagaan Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(8): 13-15.
- Natalia, Novi. 2023. Peran Andil Dalam Meningkatkan Tata Kelola Perusahaan. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Akuntansi*, 1(6): 9-12.
- Nurhidayat. 2021. *Pedoman Good Corporate Governance PT. Perkebunan Nusantara VII*. Lampung: Kolaboratif Kompeten.
- Khomsiyah, Nurul, dan Muttaqin. 2021. Pengaruh Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindar Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2014-2018. *Jurnal Ecopreneur*, 1(6): 3-4.
- Widyawati, Nurul, Rahayu, Islami. 2017. Good Service Governance Using Multiple Agency In The Management Of Zakat. *International Journal of Management and Administrative Sciences (IJMAS)*, 4(6): 20.
- Pahlevi, Reza, Widhar. *Tata Kelola Perusahaan Perspektif Islam*. Yogyakarta: Stelkonde Kreatif.
- Pratama, Raditya. 2023. Efektivitas Herbisida Parakuat Diklorida Dalam Mengendalikan Gulma Perkebunan Karet. *Jurnal Tanaman Pangan Holtikultura*, 1(10): 3-4.
- Hartono, Rudi, dan Marlina. 2020. Penerapan Tata Kelola Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada BUMN (Studi Kasus Di PT. Perkebunan Nusantara IV). *Jurnal Ilmiah Megister*, 1(10):32.
- Rusdiyanto, Susetyorini Dan Umi Elan. 2019. *Good Corporate Governance Teori Implementasi Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

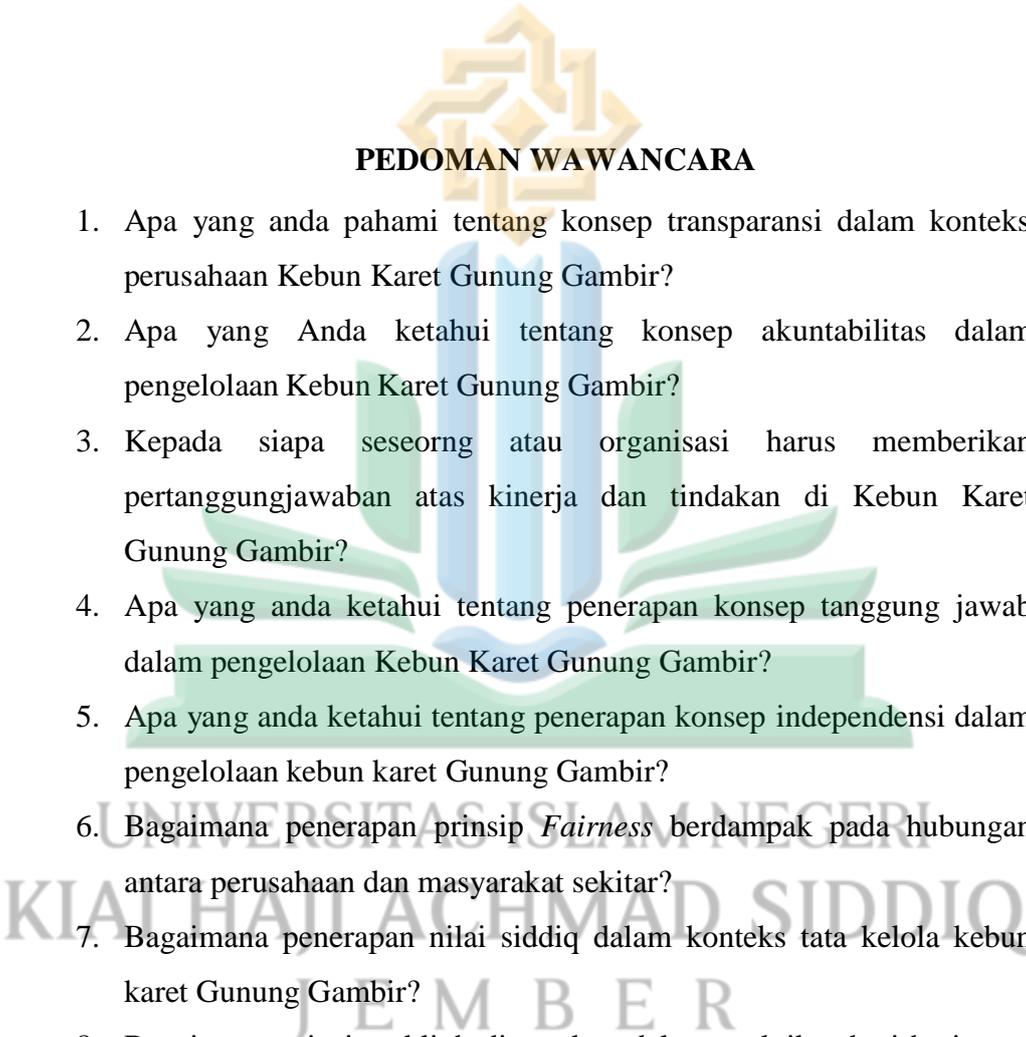
Saldana, Miles Huberman. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Method Sourcebook*. California: SAGE Publication.

Sudarmanto, Eko. 2021. *Good Corporate Governance (GCG)*. Unair: Tim Kreatif Kita Menulis.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

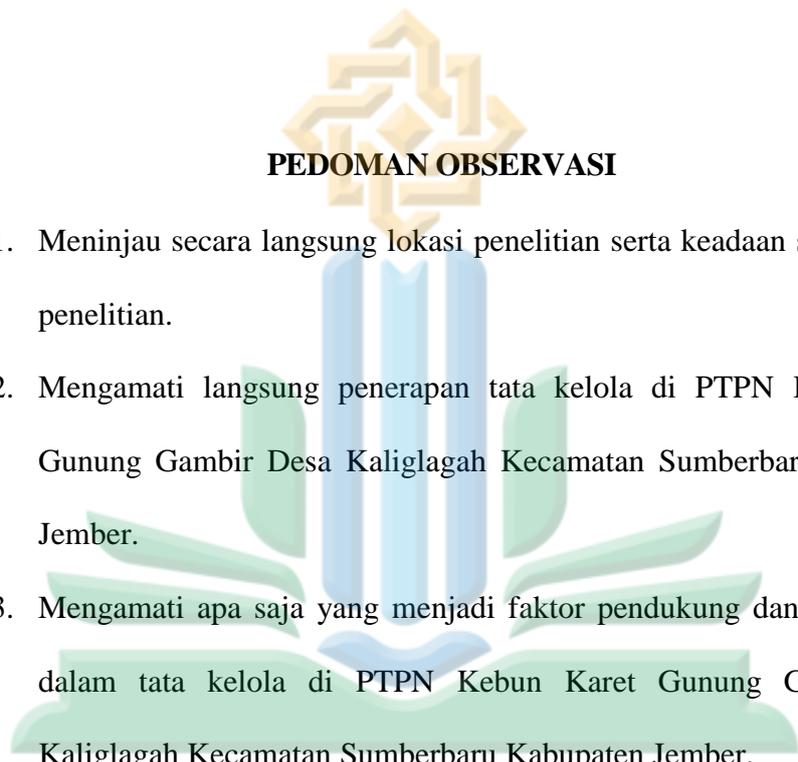


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



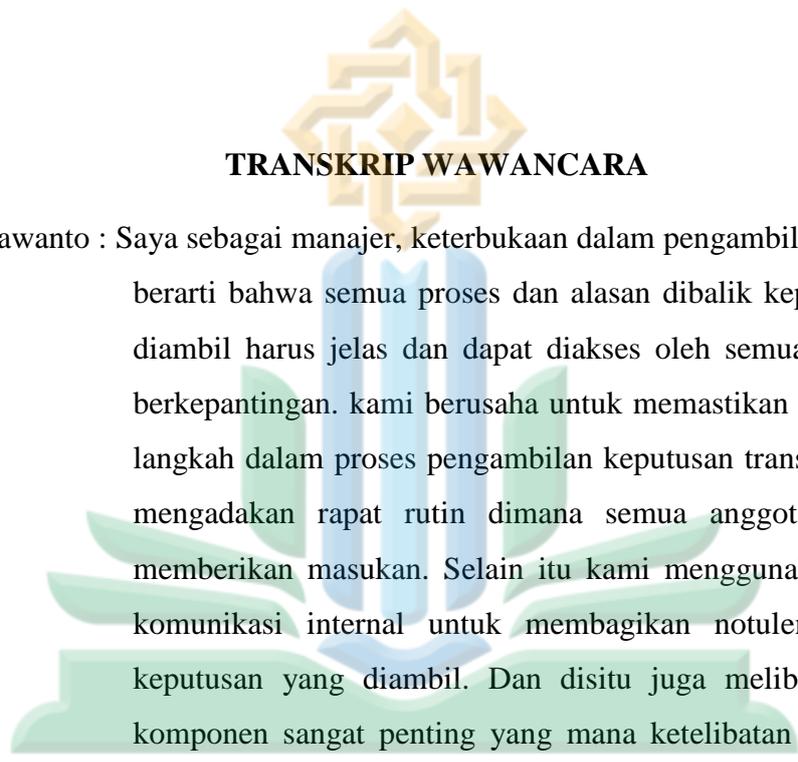
PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang anda pahami tentang konsep transparansi dalam konteks perusahaan Kebun Karet Gunung Gambir?
2. Apa yang Anda ketahui tentang konsep akuntabilitas dalam pengelolaan Kebun Karet Gunung Gambir?
3. Kepada siapa seseorang atau organisasi harus memberikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan di Kebun Karet Gunung Gambir?
4. Apa yang anda ketahui tentang penerapan konsep tanggung jawab dalam pengelolaan Kebun Karet Gunung Gambir?
5. Apa yang anda ketahui tentang penerapan konsep independensi dalam pengelolaan kebun karet Gunung Gambir?
6. Bagaimana penerapan prinsip *Fairness* berdampak pada hubungan antara perusahaan dan masyarakat sekitar?
7. Bagaimana penerapan nilai *siddiq* dalam konteks tata kelola kebun karet Gunung Gambir?
8. Bagaimana prinsip *tabligh* diterapkan dalam praktik sehari-hari serta tantangan yang dihadapi oleh para pengelola kebun karet Gunung Gambir?
9. Bagaimana penerapan nilai amanah dalam tata kelola kebun karet Gunung Gambir?
10. Bagaimana penerapan nilai *fathonah* dalam tata kelola kebun karet Gunung Gambir?



PEDOMAN OBSERVASI

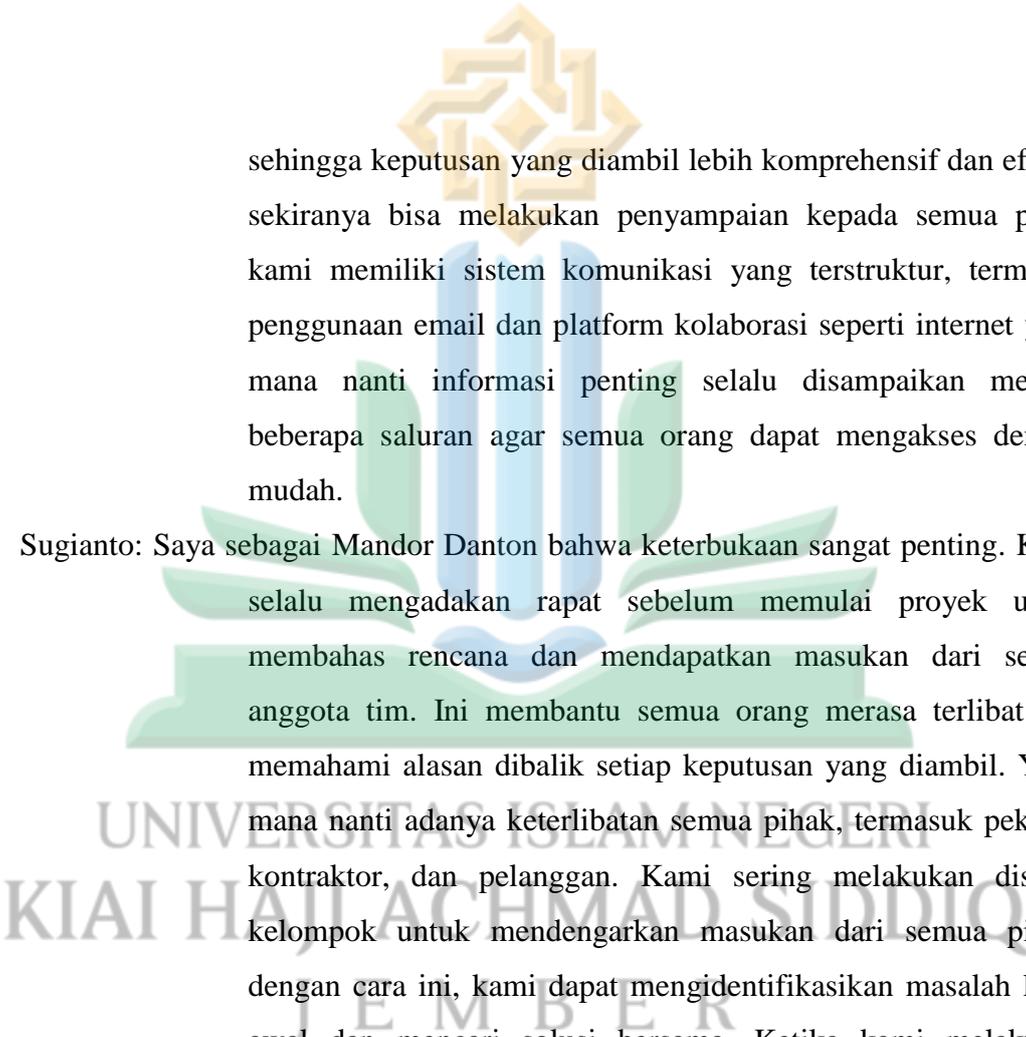
1. Meninjau secara langsung lokasi penelitian serta keadaan sekitar lokasi penelitian.
2. Mengamati langsung penerapan tata kelola di PTPN Kebun Karet Gunung Gambir Desa Kaliglagah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.
3. Mengamati apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam tata kelola di PTPN Kebun Karet Gunung Gambir Desa Kaliglagah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.
4. Memahami penerapan tata kelola perspektif Islam di PTPN Kebun Karet Gunung Gambir Desa Kaliglagah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.
5. Menganalisis penerapan tata kelola perspektif Islam dalam pengembangan perusahaan PTPN Kebun Karet Gunung Gambir Desa Kaliglagah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.



TRANSKRIP WAWANCARA

Dedi Irawanto : Saya sebagai manajer, keterbukaan dalam pengambilan keputusan berarti bahwa semua proses dan alasan dibalik keputusan yang diambil harus jelas dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Kami berusaha untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam proses pengambilan keputusan transparan. Kami mengadakan rapat rutin dimana semua anggota tim dapat memberikan masukan. Selain itu kami menggunakan platform komunikasi internal untuk membagikan notulen rapat dan keputusan yang diambil. Dan disitu juga melibatkan semua komponen sangat penting yang mana ketelibatan *stakeholders* membantu kami mendapatkan perspektif yang lebih luas dan mengurangi resiko kesalahan. Kami percaya bahwa setiap suara memiliki nilai. Dan kami melakukan survey dan forum diskusi untuk mengumpulkan pendapat dari berbagai pihak. Selain itu kami juga mengundang perwakilan dari berbagai dapertemen untuk parpatisipasi dalam tim pengambilan keputusan. Beserta kami memiliki sistem komunikasi yang struktur, termasuk kami memanfaatkan media sosial internal untuk menyebarkan informasi dengan cepat dan kami menyampaikan informasi agar lebih menarik dan mudah dicerna.

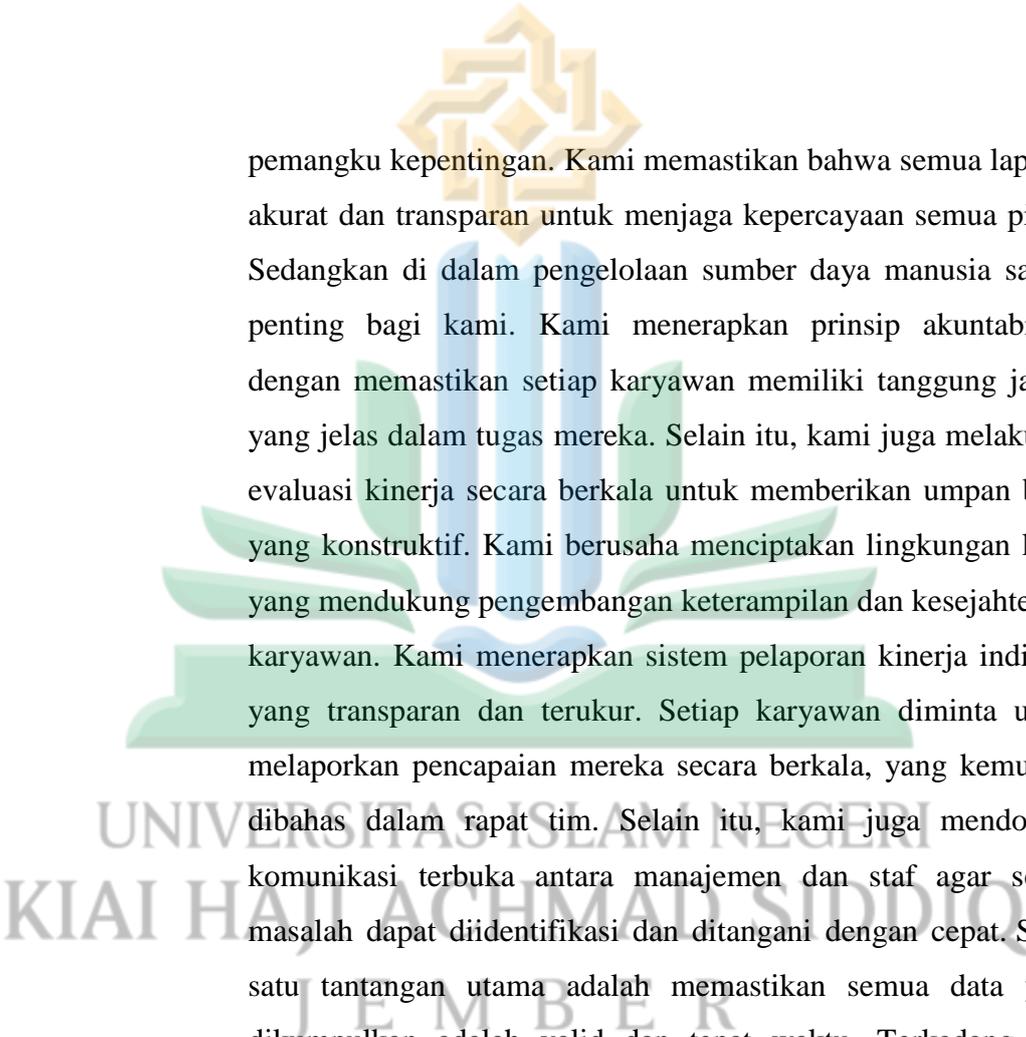
Iram : Kami sebagai Admin 1 melihat keterbukaan dalam pengambilan keputusan di organisasi ini sangat penting karena membantu menciptakan kepercayaan di antara anggota tim. Ketika keputusan dibuat secara transparan, semua orang merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk memberikan masukan. Selain itu kami juga menggunakan dokumen dan laporan yang dapat diakses oleh seluruh karyawan untuk menjelaskan alasan di balik keputusan yang diambil. Kenapa seluruh komponen sangat penting dalam keterlibatan ini karena ingin memastikan bahwa berbagai perspektif dan kebutuhan dipertimbangkan,



sehingga keputusan yang diambil lebih komprehensif dan efektif sekiranya bisa melakukan penyampaian kepada semua pihak kami memiliki sistem komunikasi yang terstruktur, termasuk penggunaan email dan platform kolaborasi seperti internet yang mana nanti informasi penting selalu disampaikan melalui beberapa saluran agar semua orang dapat mengakses dengan mudah.

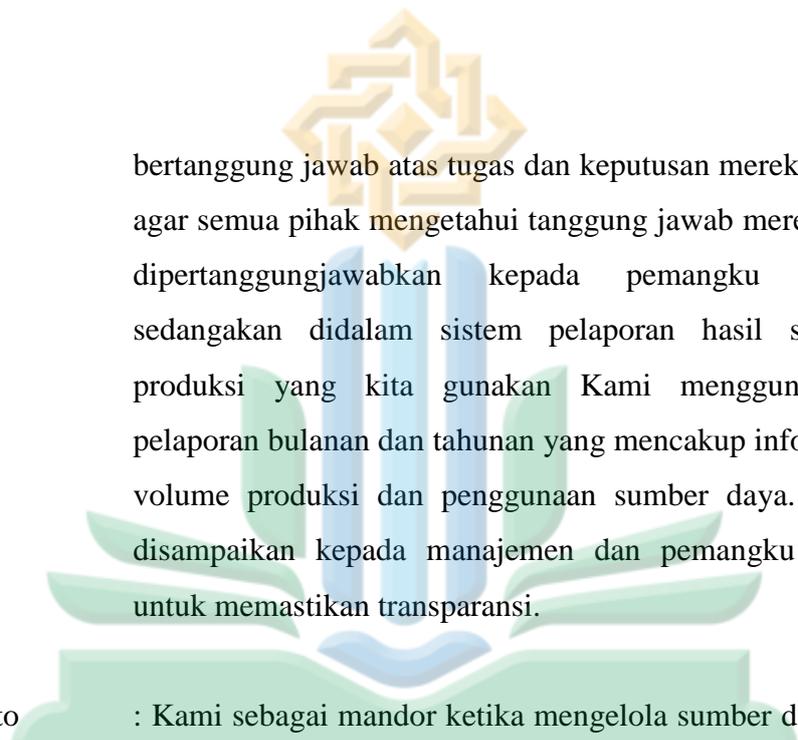
Sugianto: Saya sebagai Mandor Danton bahwa keterbukaan sangat penting. Kami selalu mengadakan rapat sebelum memulai proyek untuk membahas rencana dan mendapatkan masukan dari semua anggota tim. Ini membantu semua orang merasa terlibat dan memahami alasan dibalik setiap keputusan yang diambil. Yang mana nanti adanya keterlibatan semua pihak, termasuk pekerja, kontraktor, dan pelanggan. Kami sering melakukan diskusi kelompok untuk mendengarkan masukan dari semua pihak. dengan cara ini, kami dapat mengidentifikasi masalah lebih awal dan mencari solusi bersama. Ketika kami melakukan penyampaian semua informasi kepada semua pihak, kami menggunakan papan informasi dan grup chat untuk berbagi update secara berkala. Informasi mengenai jadwal kerja, perubahan rencana, dan hasil evaluasi selalu kami sampaikan dengan jelas agar semua orang bisa mengikuti perkembangan proyek karena tata kelola yang baik adalah kunci sukses proyek dengan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan komunikasi yang efektif menurut kami.

Selamat Santoso: Kami ketika melakukan proses pelaporan hasil produksi secara sistematis dan terstruktur. Setiap bulan, kami mengumpulkan data dari seluruh unit produksi, termasuk jumlah getah karet yang dipanen, kualitas produk, dan masalah yang dihadapi selama proses. Data ini kemudian dianalisis dan disusun dalam laporan bulanan yang disampaikan kepada pihak manajemen dan



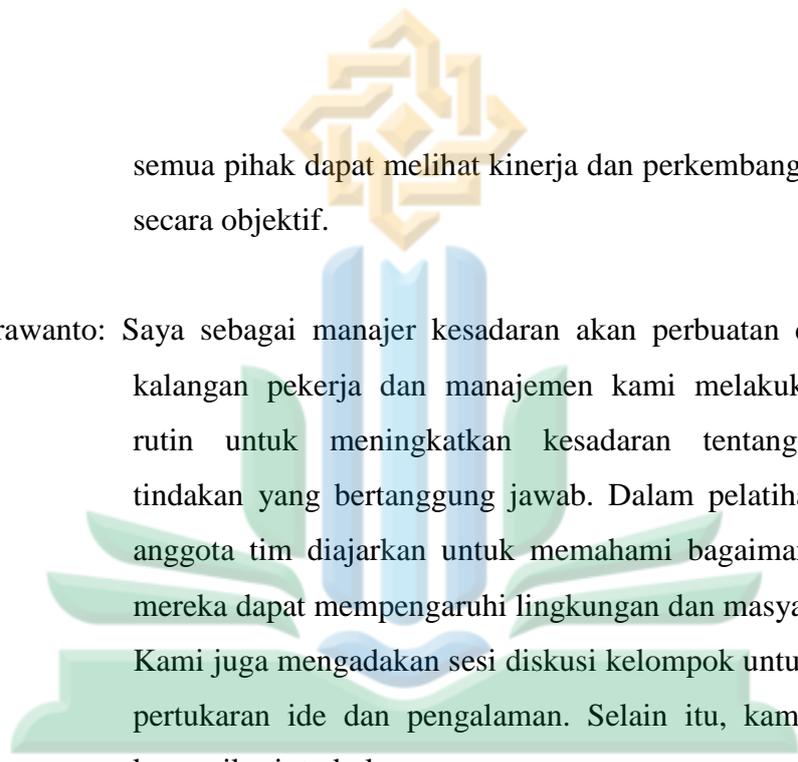
pemangku kepentingan. Kami memastikan bahwa semua laporan akurat dan transparan untuk menjaga kepercayaan semua pihak. Sedangkan di dalam pengelolaan sumber daya manusia sangat penting bagi kami. Kami menerapkan prinsip akuntabilitas dengan memastikan setiap karyawan memiliki tanggung jawab yang jelas dalam tugas mereka. Selain itu, kami juga melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk memberikan umpan balik yang konstruktif. Kami berusaha menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pengembangan keterampilan dan kesejahteraan karyawan. Kami menerapkan sistem pelaporan kinerja individu yang transparan dan terukur. Setiap karyawan diminta untuk melaporkan pencapaian mereka secara berkala, yang kemudian dibahas dalam rapat tim. Selain itu, kami juga mendorong komunikasi terbuka antara manajemen dan staf agar setiap masalah dapat diidentifikasi dan ditangani dengan cepat. Salah satu tantangan utama adalah memastikan semua data yang dikumpulkan adalah valid dan tepat waktu. Terkadang, ada keterlambatan dalam pengumpulan data dari beberapa unit, yang dapat mempengaruhi ketepatan laporan. Namun, kami terus berupaya untuk meningkatkan sistem pengumpulan data dengan pelatihan bagi staf dan penggunaan teknologi untuk mempermudah proses ini.

Agung Supriyadi : Saya sebagai asisten Tata Usaha di PTPN Nusantara 1 Regional 5 Desa Kaliglagah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, menurut saya proses pengelolaan sumber daya dilakukan di organisasi kita prosesnya meliputi beberapa langkah: perencanaan untuk menetapkan tujuan, pelaksanaan untuk memanfaatkan sumber daya, monitoring untuk memantau penggunaan, dan evaluasi untuk menilai hasil. Semua langkah ini harus dilakukan dengan akuntabilitas yang tinggi. Akuntabilitas memastikan bahwa setiap individu atau tim



bertanggung jawab atas tugas dan keputusan mereka. Ini penting agar semua pihak mengetahui tanggung jawab mereka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan. Sedangkan didalam sistem pelaporan hasil sumber daya produksi yang kita gunakan Kami menggunakan sistem pelaporan bulanan dan tahunan yang mencakup informasi seperti volume produksi dan penggunaan sumber daya. Laporan ini disampaikan kepada manajemen dan pemangku kepentingan untuk memastikan transparansi.

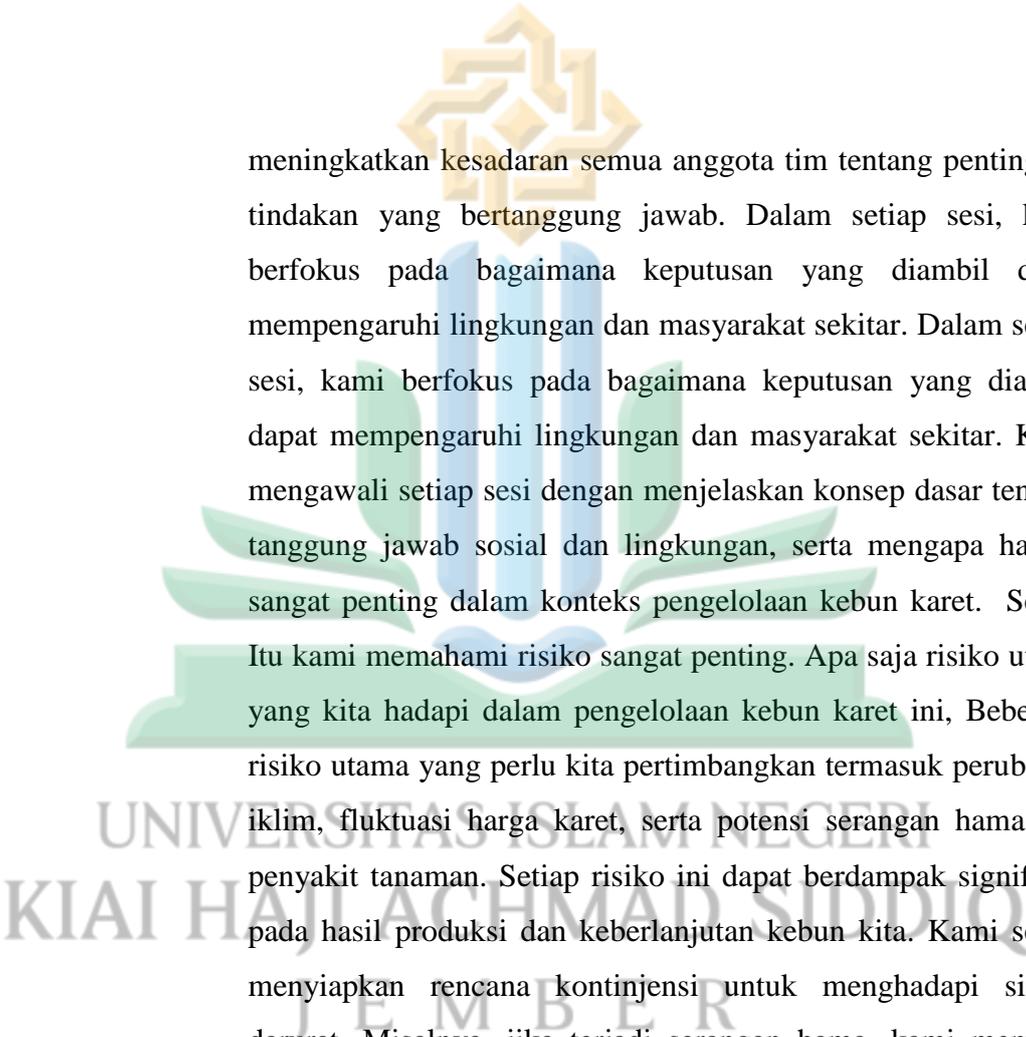
Sugianto : Kami sebagai mandor ketika mengelola sumber daya dari hasil produksi prosesnya dimulai dengan perencanaan yang matang, di mana kita menetapkan target dan strategi. Setelah itu, kita melaksanakan rencana tersebut dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Monitoring dilakukan secara berkala untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Setelah perencanaan, langkah berikutnya adalah melaksanakan rencana tersebut dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Kami memastikan bahwa setiap anggota tim memahami peran mereka dan memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk mencapai target. Monitoring dilakukan secara berkala untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Kami melakukan evaluasi rutin untuk mengecek apakah ada penyimpangan dari target yang telah ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Sedangkan dalam sistem pelaporan hasil produksi Kami menggunakan laporan bulanan dan tahunan yang mencakup informasi seperti volume produksi, penggunaan sumber daya, serta analisis biaya. Laporan ini disusun secara rinci dan disampaikan kepada manajemen serta pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan transparansi. Dengan sistem pelaporan yang jelas,



semua pihak dapat melihat kinerja dan perkembangan organisasi secara objektif.

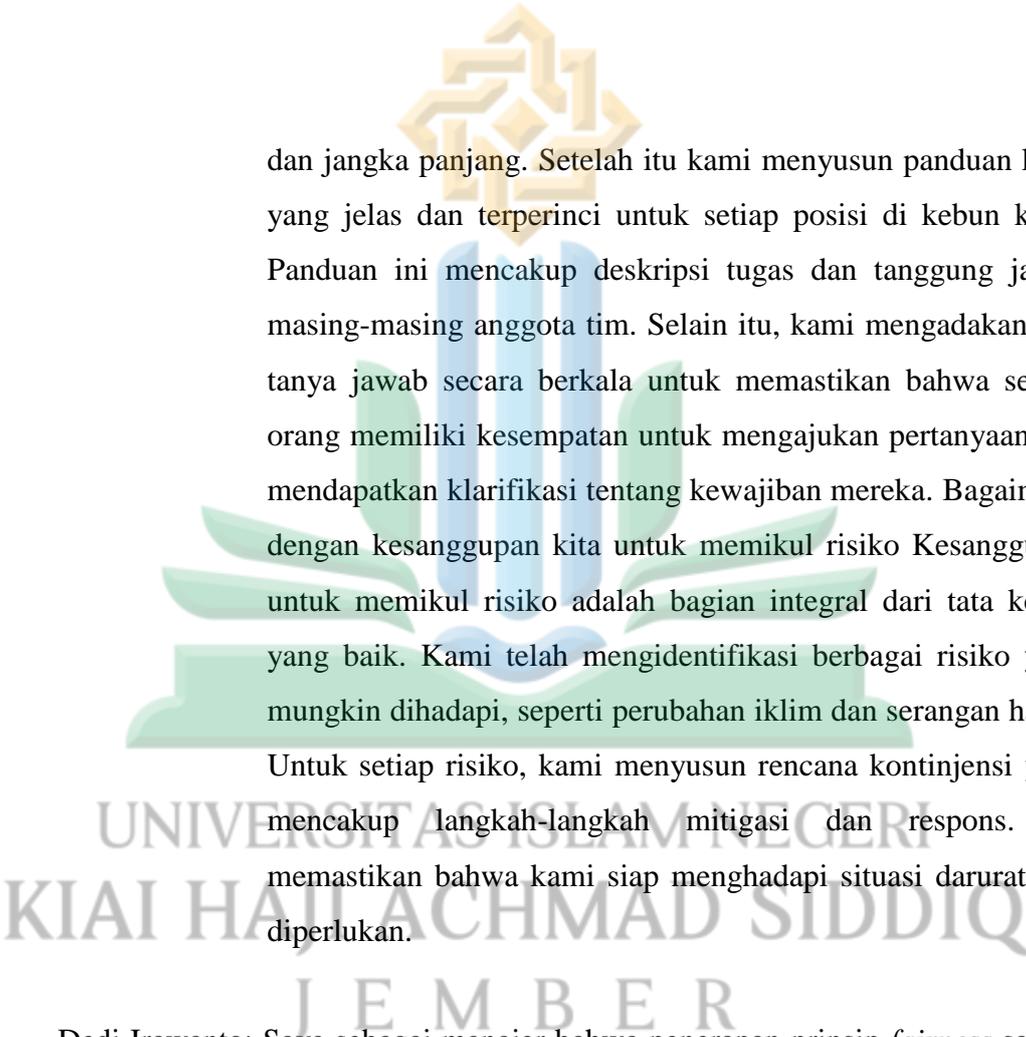
Dedi Irawanto: Saya sebagai manajer kesadaran akan perbuatan diterapkan di kalangan pekerja dan manajemen kami melakukan pelatihan rutin untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya tindakan yang bertanggung jawab. Dalam pelatihan ini, setiap anggota tim diajarkan untuk memahami bagaimana keputusan mereka dapat mempengaruhi lingkungan dan masyarakat sekitar. Kami juga mengadakan sesi diskusi kelompok untuk mendorong pertukaran ide dan pengalaman. Selain itu, kami mendorong komunikasi terbuka agar semua orang merasa nyaman untuk berbagi pandangan mereka. Pelatihan ini mencakup berbagai topik, seperti praktik pertanian berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam, dan etika kerja. Kami juga mengadakan sesi diskusi kelompok yang dirancang untuk mendorong pertukaran ide dan pengalaman. Dalam sesi ini, anggota tim dapat berbagi cerita sukses maupun tantangan yang mereka hadapi di lapangan, sehingga menciptakan suasana belajar yang kolaboratif. ada contoh konkret dari keputusan yang diambil yang menunjukkan tanggung jawab dalam pengelolaan kebun karet ketika kami memutuskan untuk menerapkan praktik pertanian berkelanjutan dengan menggunakan pupuk organik daripada pupuk kimia. Keputusan ini tidak hanya meningkatkan kualitas tanah tetapi juga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Hasilnya, kami melihat peningkatan produktivitas serta kepuasan dari komunitas sekitar karena mereka merasakan manfaat dari praktik pertanian yang lebih ramah lingkungan.

Imam : Kami sebagai staf administrasi kesadaran akan perbuatan diterapkan di kalangan pekerja dan manajemen Kami telah melaksanakan pelatihan rutin yang dirancang untuk



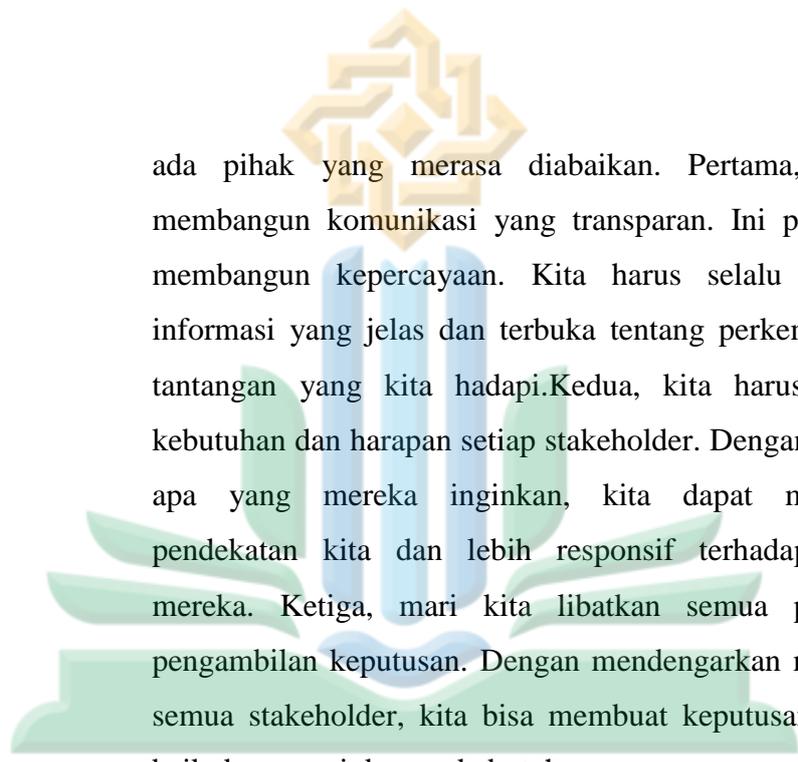
meningkatkan kesadaran semua anggota tim tentang pentingnya tindakan yang bertanggung jawab. Dalam setiap sesi, kami berfokus pada bagaimana keputusan yang diambil dapat mempengaruhi lingkungan dan masyarakat sekitar. Dalam setiap sesi, kami berfokus pada bagaimana keputusan yang diambil dapat mempengaruhi lingkungan dan masyarakat sekitar. Kami mengawali setiap sesi dengan menjelaskan konsep dasar tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta mengapa hal ini sangat penting dalam konteks pengelolaan kebun karet. Selain itu kami memahami risiko sangat penting. Apa saja risiko utama yang kita hadapi dalam pengelolaan kebun karet ini, Beberapa risiko utama yang perlu kita pertimbangkan termasuk perubahan iklim, fluktuasi harga karet, serta potensi serangan hama dan penyakit tanaman. Setiap risiko ini dapat berdampak signifikan pada hasil produksi dan keberlanjutan kebun kita. Kami selalu menyiapkan rencana kontinjensi untuk menghadapi situasi darurat. Misalnya, jika terjadi serangan hama, kami memiliki strategi untuk mengendalikan populasi hama tersebut tanpa merusak ekosistem kebun. Selain itu, kami juga melakukan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas strategi yang diterapkan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Agung Supriyadi: Kami sebagai asisten (Ass) tata usaha bagaimana kita dapat meningkatkan kesadaran anggota tim tentang tanggung jawab mereka di kebun karet. Bahwa Kesadaran akan perbuatan sangat penting dalam pengelolaan kebun karet. Kami telah melaksanakan pelatihan rutin yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman semua anggota tim tentang dampak tindakan mereka terhadap lingkungan dan masyarakat. Dalam pelatihan ini, kami menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan konsekuensi jangka pendek



dan jangka panjang. Setelah itu kami menyusun panduan kerja yang jelas dan terperinci untuk setiap posisi di kebun karet. Panduan ini mencakup deskripsi tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota tim. Selain itu, kami mengadakan sesi tanya jawab secara berkala untuk memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan mendapatkan klarifikasi tentang kewajiban mereka. Bagaimana dengan kesanggupan kita untuk memikul risiko Kesanggupan untuk memikul risiko adalah bagian integral dari tata kelola yang baik. Kami telah mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin dihadapi, seperti perubahan iklim dan serangan hama. Untuk setiap risiko, kami menyusun rencana kontinjensi yang mencakup langkah-langkah mitigasi dan respons. Ini memastikan bahwa kami siap menghadapi situasi darurat jika diperlukan.

Dedi Irawanto: Saya sebagai manajer bahwa penerapan prinsip *fairness* sangat penting dalam pengelolaan kebun karet. Setiap pemangku kepentingan, termasuk karyawan dan petani mitra, diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi. mereka harus bekerja sesuai tupoksi, setiap orang perlu memahami tugas dan tanggung jawab mereka agar produksi berjalan lancar. Jika semua orang tahu apa yang harus dilakukan, kita bisa meminimalkan kesalahan. Menurut kami Dengan memahami tupoksi, kita bisa mengoptimalkan hasil panen dan pengolahan karet. Salah satu adanya hasil kesepakatan yg mana dengan mengadakan pertemuan rutin setiap bulan untuk mengevaluasi kinerja dan membahas tantangan yang dihadapi di lapangan. Sesuai kesepakatan, kita sepakat untuk memberikan perlindungan yang sama terhadap hak-hak semua stakeholder, termasuk pemegang saham minoritas. Ini penting agar tidak

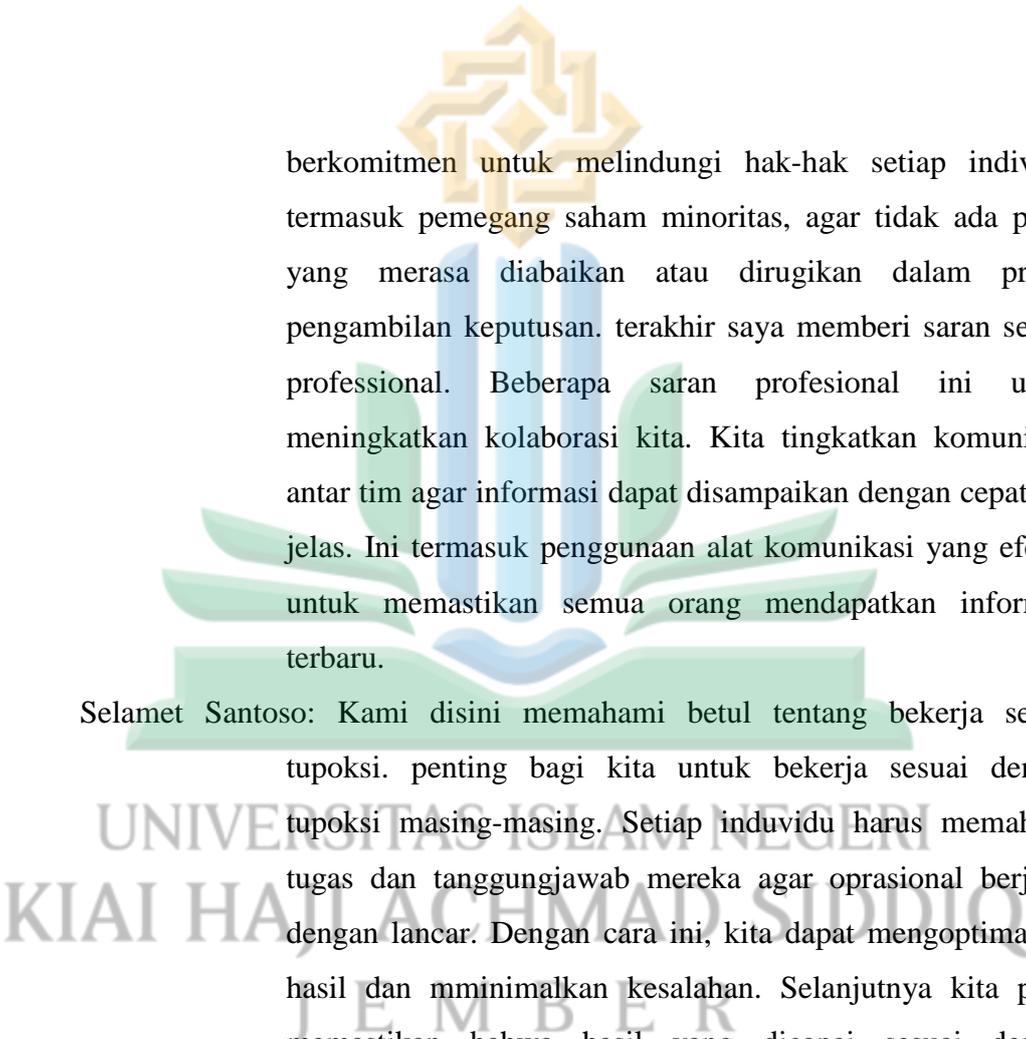


ada pihak yang merasa diabaikan. Pertama, kita perlu membangun komunikasi yang transparan. Ini penting untuk membangun kepercayaan. Kita harus selalu memberikan informasi yang jelas dan terbuka tentang perkembangan dan tantangan yang kita hadapi. Kedua, kita harus memahami kebutuhan dan harapan setiap stakeholder. Dengan mengetahui apa yang mereka inginkan, kita dapat menyesuaikan pendekatan kita dan lebih responsif terhadap kebutuhan mereka. Ketiga, mari kita libatkan semua pihak dalam pengambilan keputusan. Dengan mendengarkan masukan dari semua stakeholder, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan pasar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

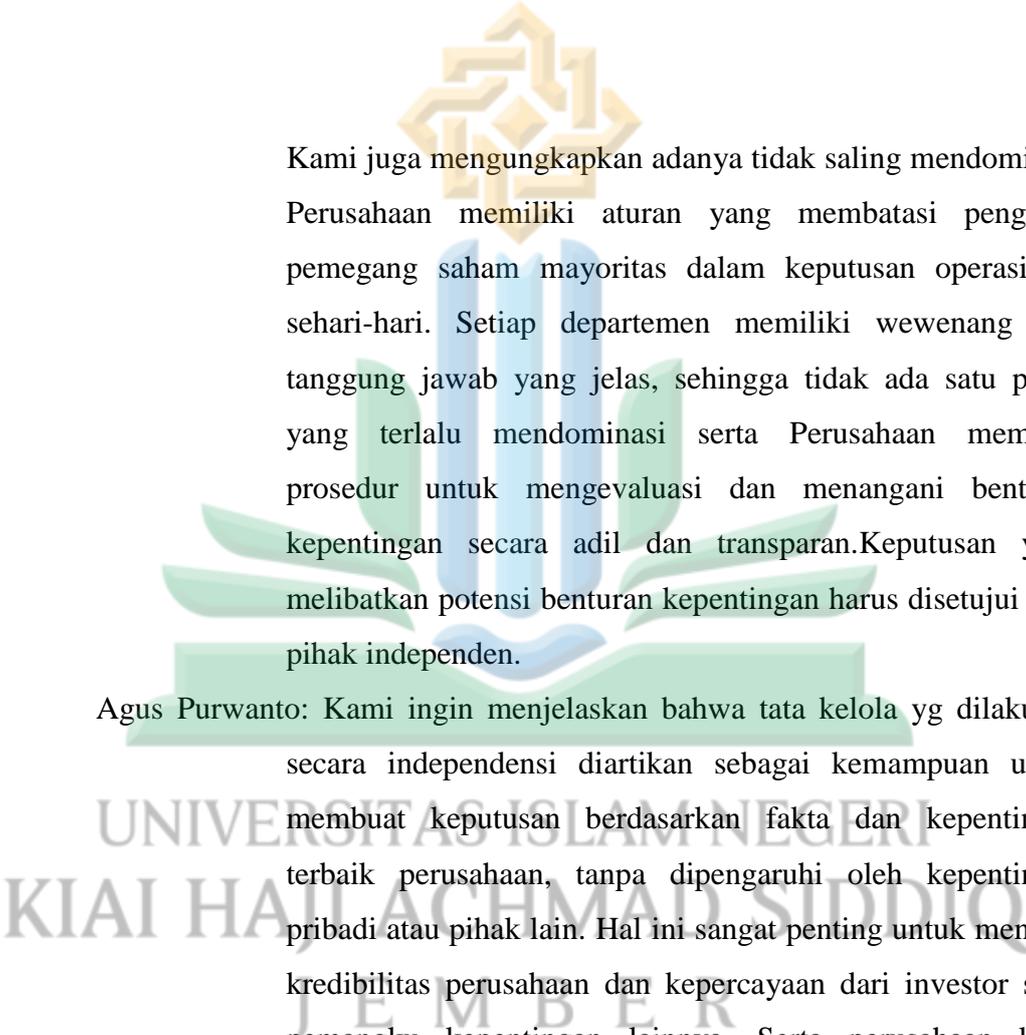
Iram: Kami selaku admin 1 bekerja sesuai tupoksi, penting bagi kita untuk bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing. Setiap individu harus memahami tugas dan tanggung jawab mereka agar proses operasional berjalan lancar. Dengan cara ini, kita dapat mengoptimalkan hasil dan meminimalkan kesalahan. Misalnya, jika semua orang tahu perannya dalam proses panen, kita bisa meningkatkan efisiensi dan hasil produksi. Jika setiap orang tahu apa yang harus dilakukan, hasilnya pasti akan lebih baik dan lebih terukur. Selanjutnya, kita perlu memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Ini berarti kita harus secara rutin mengevaluasi kinerja dan memastikan bahwa semua pihak memenuhi komitmen mereka. Dengan melakukan evaluasi berkala, kita bisa mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan merayakan pencapaian yang telah diraih. Kesepakatan yang Sama Sesuai Hak dan Keadilan. Pastikan bahwa kesepakatan yang dibuat mencerminkan hak dan keadilan bagi semua stakeholder. Kita harus



berkomitmen untuk melindungi hak-hak setiap individu, termasuk pemegang saham minoritas, agar tidak ada pihak yang merasa diabaikan atau dirugikan dalam proses pengambilan keputusan. terakhir saya memberi saran secara profesional. Beberapa saran profesional ini untuk meningkatkan kolaborasi kita. Kita tingkatkan komunikasi antar tim agar informasi dapat disampaikan dengan cepat dan jelas. Ini termasuk penggunaan alat komunikasi yang efektif untuk memastikan semua orang mendapatkan informasi terbaru.

Selamet Santoso: Kami disini memahami betul tentang bekerja sesuai tupoksi. penting bagi kita untuk bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing. Setiap induvidu harus memahami tugas dan tanggungjawab mereka agar oprasional berjalan dengan lancar. Dengan cara ini, kita dapat mengoptimalkan hasil dan mminimalkan kesalahan. Selanjutnya kita perlu memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Ini berarti kita harus secara rutin mengevaluasi kinerja dan memastikan bahwa semua pihak memenuhi komitmen mereka. Selanjutnya pastikan bahwa kesepakatan yang dibuat mencerminkan hak keadilan bagi semua stakeholder. kita harus melindungi hak-hak setiap induvidu agar tidak ada pihak yang merasa diabaikan. terakhir menurut kami memberikan saran profesional tujuannya untuk meningkatkan kolaborasi kita.

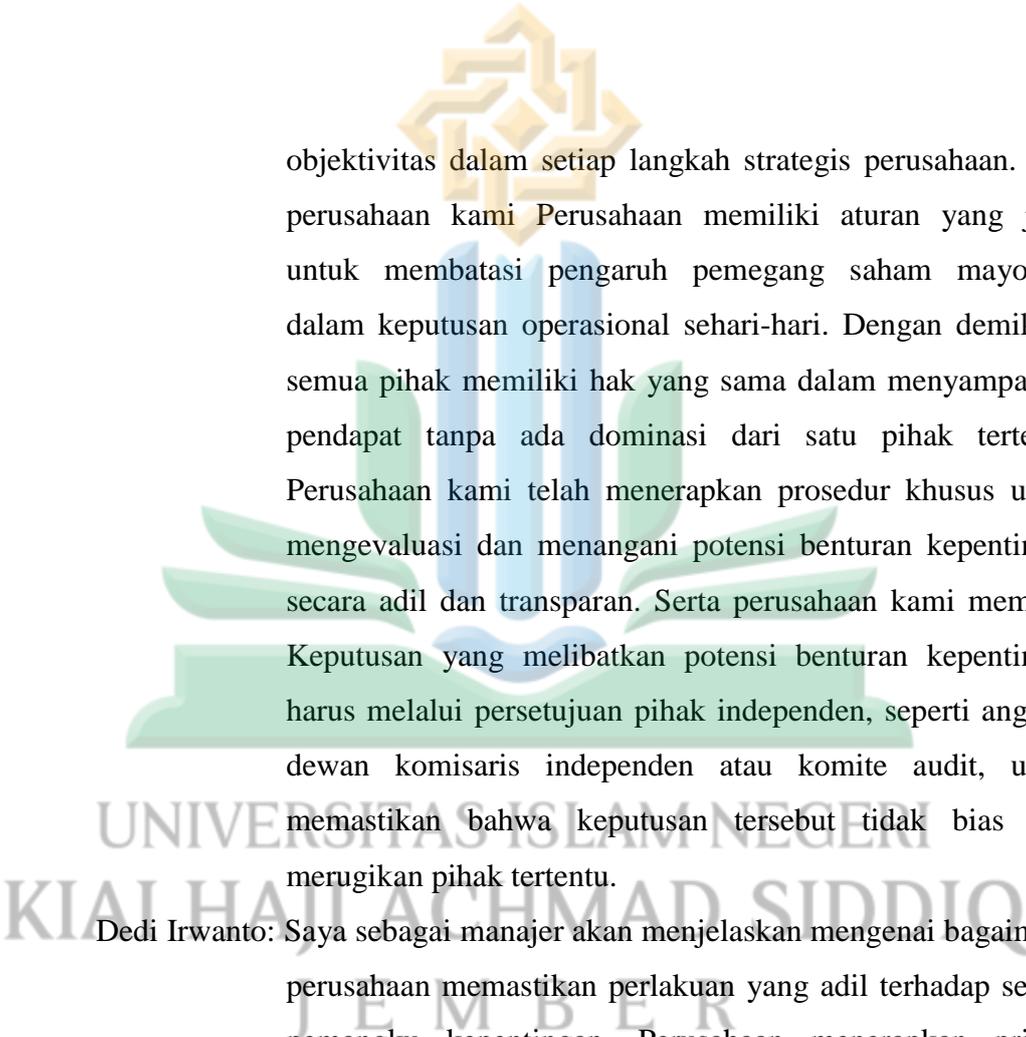
Dedi Irawanto: Menurut kami bahwa independensi sebagai kemampuan untuk membuat keputusan berdasarkan fakta dan kepentingan terbaik perusahaan, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak lain. independensi sangat penting untuk menjaga kredibilitas perusahaan dan kepercayaan dari investor serta pemangku kepentingan lainnya. Selain itu



Kami juga mengungkapkan adanya tidak saling mendominasi Perusahaan memiliki aturan yang membatasi pengaruh pemegang saham mayoritas dalam keputusan operasional sehari-hari. Setiap departemen memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas, sehingga tidak ada satu pihak yang terlalu mendominasi serta Perusahaan memiliki prosedur untuk mengevaluasi dan menangani benturan kepentingan secara adil dan transparan. Keputusan yang melibatkan potensi benturan kepentingan harus disetujui oleh pihak independen.

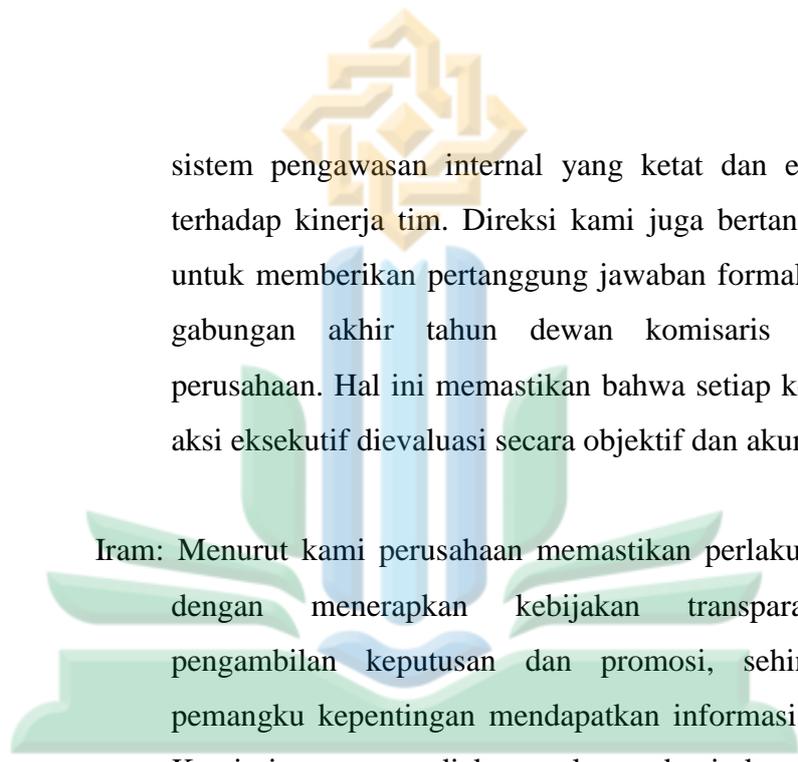
Agus Purwanto: Kami ingin menjelaskan bahwa tata kelola yg dilakukan secara independensi diartikan sebagai kemampuan untuk membuat keputusan berdasarkan fakta dan kepentingan terbaik perusahaan, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak lain. Hal ini sangat penting untuk menjaga kredibilitas perusahaan dan kepercayaan dari investor serta pemangku kepentingan lainnya. Serta perusahaan kami memiliki aturan yang membatasi pengaruh pemegang saham mayoritas dalam keputusan operasional sehari-hari. Setiap departemen memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas, sehingga tidak ada satu pihak yang terlalu mendominasi. Dan kami bebas dari benturan kepentingan perusahaan menerapkan prosedur untuk mengevaluasi dan menangani benturan kepentingan secara adil dan transparan. Keputusan yang melibatkan potensi benturan kepentingan harus disetujui oleh pihak independen.

Hendro Setyo Wibowo: Menurut kami bahwa tata kelola yang dilakukan secara independensi diartikan sebagai kemampuan untuk membuat keputusan berdasarkan fakta dan kepentingan terbaik perusahaan. Keputusan ini diambil tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak lain, sehingga memastikan



objektivitas dalam setiap langkah strategis perusahaan. Dan perusahaan kami Perusahaan memiliki aturan yang jelas untuk membatasi pengaruh pemegang saham mayoritas dalam keputusan operasional sehari-hari. Dengan demikian, semua pihak memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pendapat tanpa ada dominasi dari satu pihak tertentu. Perusahaan kami telah menerapkan prosedur khusus untuk mengevaluasi dan menangani potensi benturan kepentingan secara adil dan transparan. Serta perusahaan kami memiliki Keputusan yang melibatkan potensi benturan kepentingan harus melalui persetujuan pihak independen, seperti anggota dewan komisaris independen atau komite audit, untuk memastikan bahwa keputusan tersebut tidak bias atau merugikan pihak tertentu.

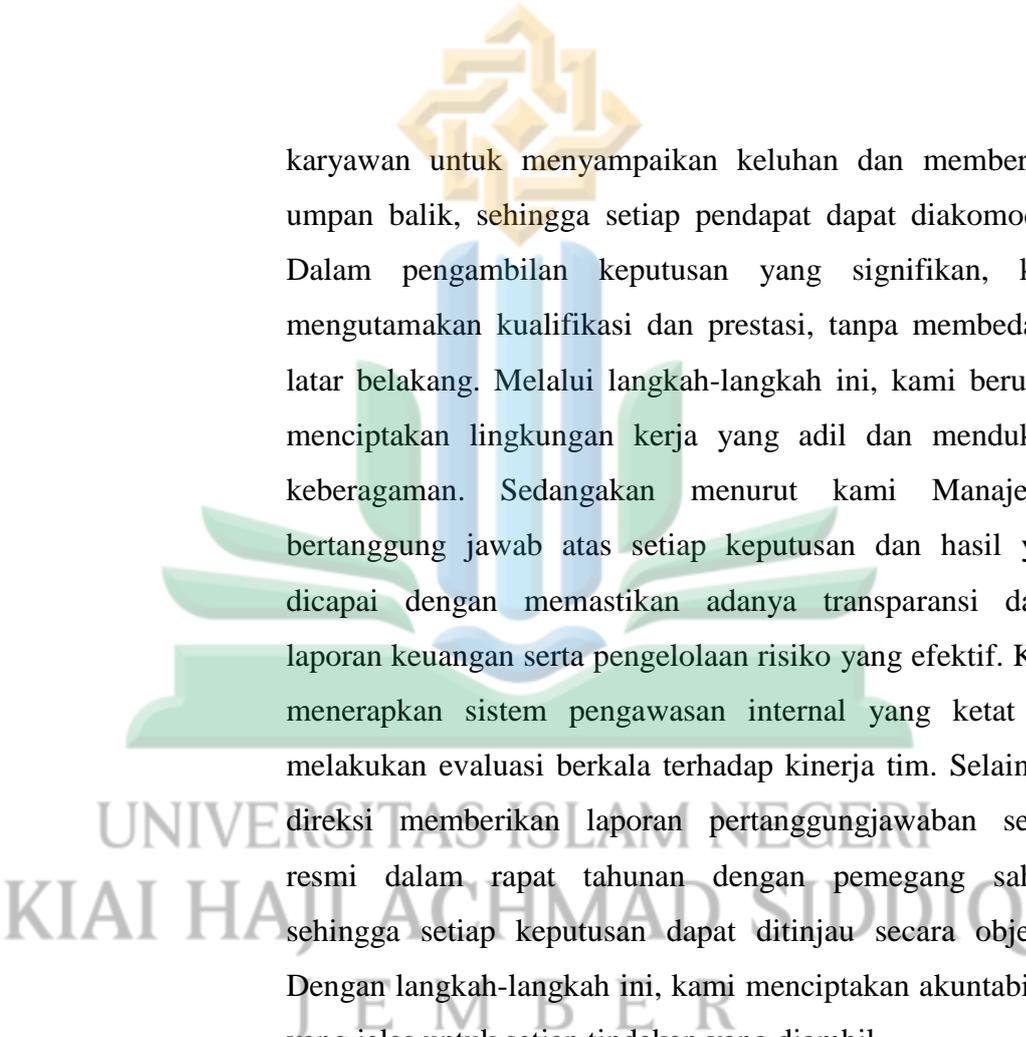
Dedi Irwanto: Saya sebagai manajer akan menjelaskan mengenai bagaimana perusahaan memastikan perlakuan yang adil terhadap semua pemangku kepentingan. Perusahaan menerapkan prinsip fairness dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua karyawan dalam proses rekrutmen dan promosi, tanpa membedakan suku, agama, ras, atau gender. Selain itu, perusahaan juga menyediakan saluran bagi pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan dan keluhan, memastikan setiap suara didengar. Dalam rapat umum pemegang saham (RUPS), semua pemegang saham memiliki hak untuk memberikan pendapat dan suara mereka, meskipun pemegang saham mayoritas memiliki hak suara lebih. Dengan cara ini, perusahaan berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap keputusan yang diambil. Sedangkan manajemen kami bertanggung jawab atas keputusan dan hasil dengan memastikan transparansi dalam laporan keuangan dan pengelolaan risiko. Kami memiliki



sistem pengawasan internal yang ketat dan evaluasi rutin terhadap kinerja tim. Direksi kami juga bertanggung jawab untuk memberikan pertanggung jawaban formal dalam rapat gabungan akhir tahun dewan komisaris dan direksi perusahaan. Hal ini memastikan bahwa setiap keputusan dan aksi eksekutif dievaluasi secara objektif dan akurat.

Iram: Menurut kami perusahaan memastikan perlakuan yang adil dengan menerapkan kebijakan transparansi dalam pengambilan keputusan dan promosi, sehingga semua pemangku kepentingan mendapatkan informasi yang setara. Kami juga menyediakan saluran bagi karyawan untuk menyampaikan keluhan dan masukan, memastikan setiap suara didengar. Selain itu, keputusan penting diambil berdasarkan kualifikasi dan prestasi, tanpa diskriminasi. Dengan cara ini, kami berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan berkeadilan. Di Dalam manajemen bertanggung jawab atas keputusan dan hasil yang dicapai dengan memastikan transparansi dalam laporan keuangan serta pengelolaan risiko yang efektif. Kami menerapkan sistem pengawasan internal yang ketat dan melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja tim. Selain itu, direksi memberikan pertanggungjawaban formal dalam rapat tahunan kepada pemegang saham, memastikan semua keputusan dievaluasi secara objektif. Hal ini menciptakan akuntabilitas yang jelas bagi setiap tindakan yang diambil.

Agus Purwanto: Perusahaan berkomitmen untuk memberikan perlakuan yang adil kepada semua pemangku kepentingan dengan menerapkan prinsip transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan promosi. Kami menyediakan mekanisme bagi



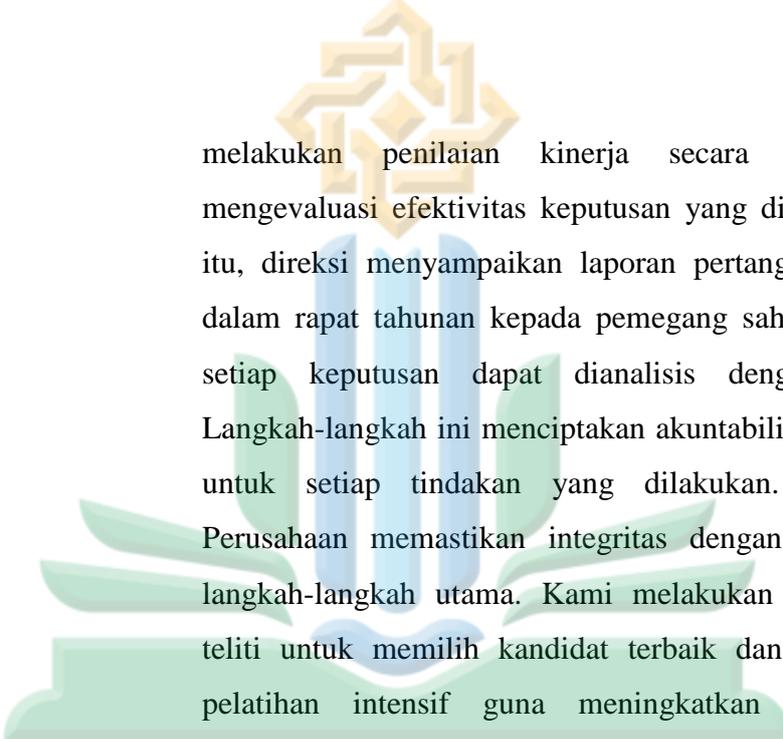
karyawan untuk menyampaikan keluhan dan memberikan umpan balik, sehingga setiap pendapat dapat diakomodasi. Dalam pengambilan keputusan yang signifikan, kami mengutamakan kualifikasi dan prestasi, tanpa membedakan latar belakang. Melalui langkah-langkah ini, kami berusaha menciptakan lingkungan kerja yang adil dan mendukung keberagaman. Sedangkan menurut kami Manajemen bertanggung jawab atas setiap keputusan dan hasil yang dicapai dengan memastikan adanya transparansi dalam laporan keuangan serta pengelolaan risiko yang efektif. Kami menerapkan sistem pengawasan internal yang ketat dan melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja tim. Selain itu, direksi memberikan laporan pertanggungjawaban secara resmi dalam rapat tahunan dengan pemegang saham, sehingga setiap keputusan dapat ditinjau secara objektif. Dengan langkah-langkah ini, kami menciptakan akuntabilitas yang jelas untuk setiap tindakan yang diambil.

Dedi Irwanto: Menurut kami bahwa perusahaan memastikan tanggung jawab manajemen dengan menerapkan sistem pengawasan internal yang ketat dan transparansi dalam laporan keuangan. Kami melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk menilai efektivitas keputusan yang diambil. Selain itu, direksi menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam rapat tahunan kepada pemegang saham, sehingga setiap keputusan dapat ditinjau secara objektif. Langkah-langkah ini menciptakan akuntabilitas yang jelas untuk setiap tindakan yang dilakukan. Setelah itu kami melakukan perusahaan menjaga integritas dengan menerapkan beberapa langkah penting. Pertama, kita fokus

pada Seleksi dan Penempatan yang teliti untuk memilih kandidat yang memiliki integritas tinggi.

Iram: Menurut kami bahwa pelatihan dan Pengembangan yang intensif dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan karyawan. Penilaian Kinerja yang rutin dilakukan untuk memastikan setiap karyawan bertanggung jawab atas tugasnya. Insentif dan Kompensasi yang adil diberikan untuk memotivasi karyawan dalam menjaga integritas. Hubungan Kerja yang harmonis juga diperhatikan untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung integritas. Keselamatan Kerja yang pasti juga menjadi prioritas untuk memastikan karyawan bekerja dengan aman dan nyaman. Dengan cara ini, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap karyawan memiliki integritas yang tinggi dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan prinsip keadilan dengan memberikan perlakuan yang setara kepada semua pemangku kepentingan. Kami menyediakan saluran komunikasi yang efektif untuk mendengarkan masukan dan keluhan dari karyawan dan stakeholder lainnya. Keputusan yang diambil selalu berdasarkan pada kualifikasi dan prestasi, tanpa diskriminasi. Dengan langkah-langkah ini, kami menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung keberagaman.

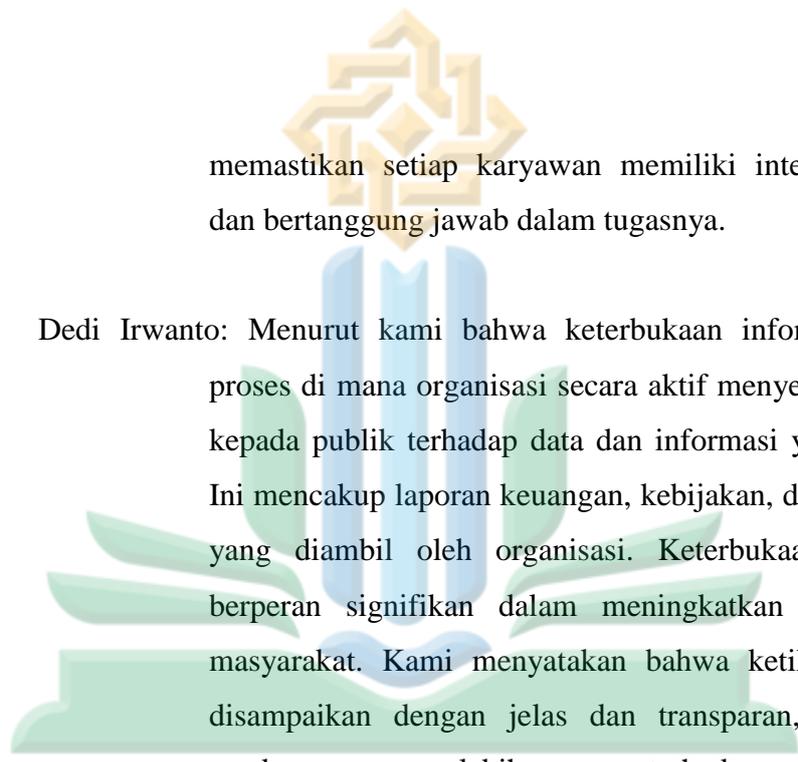
Hendro Setyo Wibowo: Kami sebagai asisten (Ass) tanah merah bahwa perusahaan memastikan tanggung jawab manajemen dengan menerapkan sistem pengawasan internal yang ketat serta menjaga transparansi dalam laporan keuangan. Kami



melakukan penilaian kinerja secara rutin untuk mengevaluasi efektivitas keputusan yang diambil. Selain itu, direksi menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam rapat tahunan kepada pemegang saham, sehingga setiap keputusan dapat dianalisis dengan objektif. Langkah-langkah ini menciptakan akuntabilitas yang jelas untuk setiap tindakan yang dilakukan. Selanjutnya Perusahaan memastikan integritas dengan menerapkan langkah-langkah utama. Kami melakukan seleksi yang teliti untuk memilih kandidat terbaik dan memberikan pelatihan intensif guna meningkatkan keterampilan karyawan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

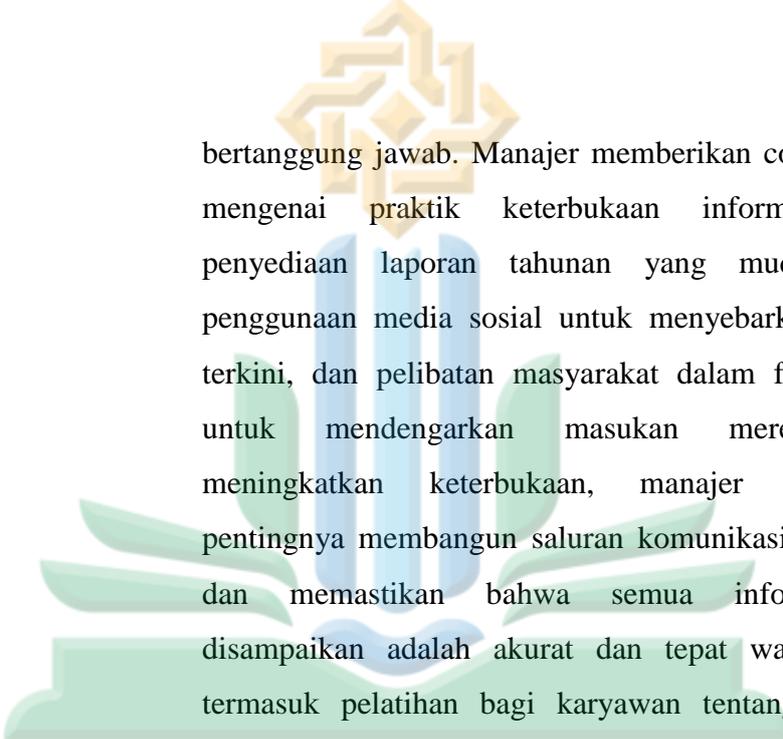
Sugianto: Menurut kami Evaluasi kinerja secara berkala menjamin tanggung jawab, sementara insentif yang adil mendorong motivasi. Kami juga mengutamakan hubungan kerja yang baik dan keselamatan kerja agar karyawan merasa nyaman. Dengan pendekatan ini, perusahaan memastikan setiap karyawan memiliki integritas tinggi dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Setelah itu kami menjaga integritas melalui beberapa langkah penting. Pertama, kami melakukan seleksi dan penempatan yang teliti untuk memilih kandidat berkualitas. Selanjutnya, pelatihan intensif diberikan untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Penilaian kinerja rutin memastikan tanggung jawab, dan insentif yang adil memotivasi karyawan dalam menjaga integritas. Hubungan kerja yang harmonis dan keselamatan kerja juga menjadi prioritas untuk menciptakan lingkungan yang mendukung. Dengan langkah-langkah ini, perusahaan



memastikan setiap karyawan memiliki integritas tinggi dan bertanggung jawab dalam tugasnya.

Dedi Irwanto: Menurut kami bahwa keterbukaan informasi adalah proses di mana organisasi secara aktif menyediakan akses kepada publik terhadap data dan informasi yang relevan. Ini mencakup laporan keuangan, kebijakan, dan keputusan yang diambil oleh organisasi. Keterbukaan informasi berperan signifikan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kami menyatakan bahwa ketika informasi disampaikan dengan jelas dan transparan, masyarakat cenderung merasa lebih percaya terhadap organisasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa transparansi tinggi berhubungan dengan tingkat kepercayaan yang lebih baik dari publik. Kami menekankan bahwa akurasi informasi sangat penting dalam membangun kepercayaan. Informasi yang tidak akurat atau menyesatkan dapat merusak reputasi organisasi dan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat dan keterbukaan informasi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

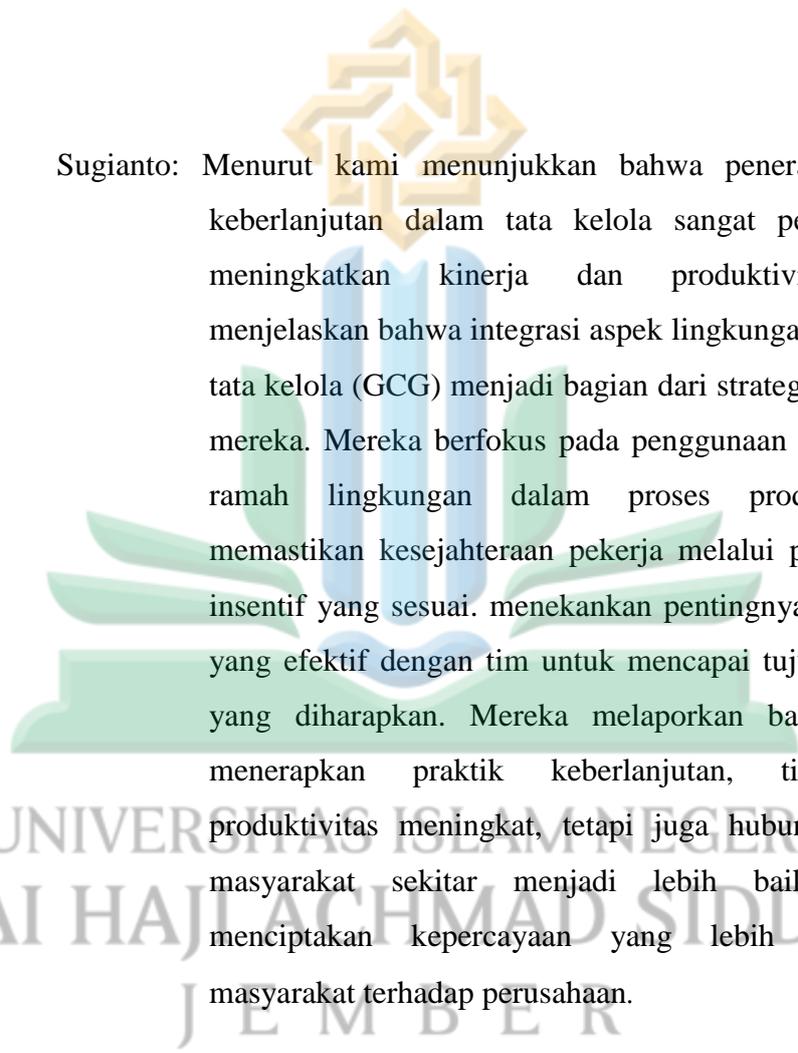
Iram: Manajer menjelaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan komitmen organisasi untuk menyediakan data dan informasi yang relevan dan akurat kepada publik. Ini mencakup laporan keuangan, kebijakan, dan keputusan yang diambil oleh organisasi. Keterbukaan informasi berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Menurut manajer, ketika organisasi secara aktif berbagi informasi, masyarakat merasa lebih terlibat dan percaya bahwa organisasi tersebut transparan dan



bertanggung jawab. Manajer memberikan contoh konkret mengenai praktik keterbukaan informasi, seperti penyediaan laporan tahunan yang mudah diakses, penggunaan media sosial untuk menyebarkan informasi terkini, dan pelibatan masyarakat dalam forum diskusi untuk mendengarkan masukan mereka. Untuk meningkatkan keterbukaan, manajer menyebutkan pentingnya membangun saluran komunikasi yang efektif dan memastikan bahwa semua informasi yang disampaikan adalah akurat dan tepat waktu. Hal ini termasuk pelatihan bagi karyawan tentang pentingnya transparansi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dedi Irwanto: Menurut kami bahwa integrasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (GCG) sangat penting dalam strategi perusahaan kita karena memastikan bahwa keputusan bisnis tidak hanya menguntungkan singkat tapi juga berkelanjutan. Dengan demikian, kita dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memproteksi lingkungan hidup. Pertimbangan (GCG) tidak hanya tentang memenuhi standar legal saja, tapi juga tentang membangun reputasi yang kuat dan memastikan bahwa kegiatan bisnis kita tidak merusak lingkungan. Misalnya, kita telah menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan seperti penggunaan energi hijau, reduksi limbah, dan perlindungan hak-hak pekerja. Integrasi ini juga membuat kita lebih responsif terhadap perubahan sosial dan lingkungan, sehingga bisa adaptasi dengan dinamika pasar global.



Sugianto: Menurut kami menunjukkan bahwa penerapan prinsip keberlanjutan dalam tata kelola sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas. Kami menjelaskan bahwa integrasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (GCG) menjadi bagian dari strategi operasional mereka. Mereka berfokus pada penggunaan metode yang ramah lingkungan dalam proses produksi, serta memastikan kesejahteraan pekerja melalui pelatihan dan insentif yang sesuai. Menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dengan tim untuk mencapai tujuan produksi yang diharapkan. Mereka melaporkan bahwa dengan menerapkan praktik keberlanjutan, tidak hanya produktivitas meningkat, tetapi juga hubungan dengan masyarakat sekitar menjadi lebih baik. Hal ini menciptakan kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat terhadap perusahaan.

Iram: Kami sebagai admin 1 memberikan wawasan penting mengenai penerapan prinsip keberlanjutan dalam organisasi. Bahwa integrasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (GCG) telah menjadi fokus utama dalam setiap kebijakan dan prosedur yang diterapkan di perusahaan. Perusahaan secara aktif menyediakan laporan berkala tentang inisiatif keberlanjutan, termasuk penggunaan energi terbarukan dan pengurangan limbah. Mereka juga menekankan pentingnya pelibatan karyawan dalam proses pengambilan keputusan terkait keberlanjutan, yang membantu menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab di antara seluruh anggota tim.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: pascasarjana@uinkhas.ac.id, Website: <http://pasca.uinkhas.ac.id>



No : B.2926/Un.22/DPS.WD/PP.00.9/10/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian untuk Penyusunan Tugas Akhir Studi

Yth.
Pimpinan PTPN Nusantara 1 Regional 5 Kebun Karet Gunung Gambir
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan tugas akhir studi mahasiswa berikut ini:

Nama : Siti Nur Fadilah
NIM : 233206060010
Program Studi : Ekonomi Syariah
Jenjang : Magister (S2)
Waktu Penelitian : 3 Bulan (terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat)
Judul : Penerapan Tata Kelola Di Kebun Karet Gunung Gambir PTPN Nusantara 1 Regional 5 Perspektif Ekonomi Islam Desa Kaliglagah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Jember, 3 Oktober 2024
An. Direktur,
Wakil Direktur

Saihan

Tembusan :
Direktur Pascasarjana



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : WPXQK0





JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NO	TANGGAL	KETERANGAN	PARAF
1	18 Oktober 2024	Mengantarkan Surat Izin Penelitian Kepada Manajer PTPN. Kebun Karet unung Gambir	
2	03 November 2024	Wawancara Dengan Bapak Dedi Irawanto Selaku Manajer	
3	04 November 2024	Wawancara Dengan Bapak Iram Selaku Admin 1	
4	07 November 2024	Wawancara Dengan Bapak Sugianto Selaku Mandor Danton	
5	21 November 2024	Wawancara Dengan Bapak Selamat Santoso Selaku Asisten Tekspol	
6	20 November 2024	Wawancara Dengan Bapak Agung Supriyadi Selaku Asisten Tata Usaha	
7	19 November 2024	Wawancara Dengan Bapak Dedi Irawanto Selaku Manajer	
8	20 November 2024	Wawancara Dengan Bapak Imam Selaku Oprasional	
9	22 November 2024	Wawancara Dengan Bapak Agung Supriyadi Selaku Asisten Tata Usaha	
10	28 November 2024	Wawancara Dengan Bapak Hendro Selaku Kepala Asisten	
11	17 Februari 2025	Meminta Surat Selesai Penelitian Pada Bapak Manajer PTPN Kebun Karet Gunung Gambir	

Jember, 17 Februari 2025

Manajer PTPN. Kebun Karet



DEDI IRAWANTO.SP

REGIONAL 5

Alamat : Jalan Rajawali No. 44, Surabaya, 60175
Telp : (031) 3524893 Email : skrh_reg5@ptpn1.co.id



Nomor : RK5B/X/2024.11.07-7
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Izin Penelitian Dengan Catatan

Surabaya, 7 November 2024

Kepada
Yth. Wakil Direktur
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Jl. Mataram No. 1 Mangli
Jember, 68136 Telp (0331) 487550

Menunjuk Surat Wakil Direktur Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor B.2926/Un.22/DPS.WD/PP.00.9/10/2024 Tanggal 3 Oktober 2024 Perihal Permohonan Izin Penelitian Untuk Penyusunan Tugas Akhir Studi, bahwa sehubungan dengan penyusunan tugas akhir/skripsi mahasiswa Program Studi Pasca Sarjana Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas nama Siti Nur Fadilah dengan NIM 233206060010 dengan judul penelitian "Penerapan Tata Kelola Di Kebun Gunung Gambir PTPN 1 Regional 5 Perspektif Ekonomi Islam Desa Kaliglagah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember".

Memperhatikan permohonan tersebut di atas dengan ini disampaikan bahwa dalam hal Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember mengajukan permohonan izin penelitian sebagaimana tersebut di atas, **dapat dilaksanakan** dengan metode penelitian lapang di PT Perkebunan Nusantara I Regional 5 Kebun Gunung Gambir pada bulan November 2024 s.d. Februari 2025, **dengan catatan dan memenuhi ketentuan** sebagai berikut:

1. Sdri. Siti Nur Fadilah **tidak diizinkan** mengambil data yang merupakan rahasia perusahaan;
2. Bahwa segala dokumen tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan komersil maupun kepentingan lainnya yang merugikan atau berpotensi merugikan perusahaan baik materiil maupun imateriil;
3. Bahwa Sdri. Siti Nur Fadilah dan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember menjamin hasil penelitian lapang tidak digunakan untuk kepentingan komersil maupun kepentingan lainnya yang merugikan atau berpotensi merugikan perusahaan baik materiil maupun imateriil;
4. Bahwa Sdri. Siti Nur Fadilah dan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember wajib menyerahkan 1 (satu) buah laporan hasil penelitian lapang kepada Board of Regional Management PT Perkebunan Nusantara I Regional 5 u.p. Kebun Gunung Gambir serta mengirimkan *soft file* laporan hasil penelitian lapang berupa dokumen *PDF* melalui *email*: sdm_reg5@ptpn1.co.id;
5. Segala biaya yang ditimbulkan dari kegiatan ini menjadi tanggungan Sdri. Siti Nur Fadilah dan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember; dan

PT PERKEBUNAN NUSANTARA I

Gedung Agro Plaza Lantai 14
Jl. H. R. Rasuna Said Kav X2 – 1, Jakarta 12950
Phone: 08113333214 Email: corcom@ptpn1.co.id

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

PTPN XII KEBUN KARET GUNUNG GAMBIR DUSUN GELANG,
KECAMATAN SUMBERBARU, KABUPATEN JEMBER JL. PTPN XII GUNUNG
GAMBIR GELANG JAWA TIMUR 68156

Nomer : Jember, 3 Februari 2025

Lampiran :

Perihal : Keterangan Selesai Penelitian

Kepada Yth
Pascasarjana Ekonomi Syariah
UIN KH. ACMAD SIDDIQ JEMBER

Sehubungan Dengan Telah Selesaiya Penelitian Di Kebun Karet Gunung Gambir
PTPN Nusantara 1 Regional 5, Maka Dengan Ini Kami Menerangkan Bahwa:

Nama/ NIM : Siti Nur Fadilah/ 233206060010
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana/ Ekonomi Syari'ah (S2)
Judul Penelitian : "PENERAPAN TATA KELOLA KEBUN KARET GUNUNG
GAMBIR PADA PTPN NUSANTARA 1 REGIONAL 5
PERSPEKTIF ISLAM DESA KALIGLAGAH
KECAMATAN SUMBERBARU KABUPATEN JEMBER"
Lokasi : Kebun Karet Gunung Gambir Pada PTPN
Nusantara 1 Regional 5
Lama Penelitian : 3 Bulan

Bahwasanya Yang Bersangkutan Telah Melaksanakan Penelitian Di Perusahaan Kami
Dengan Baik.

Demikian Surat Keterangan Ini Kami Buat Untuk Dapat Dipergunakan Sebagaimana
Mestinya Dan Atas Perhatiannya Disampaikan Terimakasih.

KEBUN KARET GUNUNG GAMBIR
PTPN NUSANTARA 1 REGIONAL 5



DEDI RAWANTO, SP
Manager



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia KodePos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail :uinkhas@gmail.com Website : http://www.uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN
BEBAS TANGGUNGAN PLAGIASI

Nomor: 1082/Un.22/DPS.WD/PP.00.9/05/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas* terhadap naskah tesis

Nama	:	Siti Nur Fadilah
NIM	:	233206060010
Prodi	:	Ekonomi Syariah (S2)
Jenjang	:	Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	27 %	30 %
Bab II (Kajian Pustaka)	21 %	30 %
Bab III (Metode Penelitian)	17 %	30 %
Bab IV (Paparan Data)	1 %	15 %
Bab V (Pembahasan)	19 %	20 %
Bab VI (Penutup)	7 %	10 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

Jember, 08 Mei 2025

an. Direktur,
Wakil Direktur



Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197202172005011001

*Menggunakan Aplikasi DrillBit



FOTO DOKUMENTASI



Tata Kelola Secara Keterbukaan (*Transparency*)



Tata Kelola Secara Akuntabilitas (*accountability*)



Penerapan Tata Kelola Secara Tanggung Jawab (*Responsibility*)



Penerapan Tata Kelola Secara kewajaran (*Fairness*)



Penerapan Tata Kelola Secara kemandirian (*independency*)



Foto bersama Bapak Dedi Irawanto Selaku Manager Kebun Karet



BIODATA PENULIS



Siti Nur Fadilah lahir di Jember Jawa Timur pada tanggal 15 Mei 1999, anak dari 4 bersaudara yang lahir dari pasangan Mat Sahar dan Sumiati. Penulis beralamat Dusun Krajan Kaliglagah, RT/RW 002/004, Desa Kaliglagah, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember. Penulis dapat dihubungi melalui via surel sinurfadila99@gmail.com. Pada tahun 2005 penulis memulai Pendidikan formal dan Menyelesaikan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum pada tahun 2011 di desa Kaliglagah, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember. Pada tahun 2011 melanjutkan pendidikan di SMP ASY-SYUJA'I Desa Curah mluwo, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember lulus tahun 2014, pada tahun 2014 melanjutkan kejenjang SMA ASY-SYUJA'I Desa Curah mluwo, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember lulus tahun 2018, pada tahun 2018, melanjutkan pendidikan tinggi strata S1 Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Jember, mulai tahun (2018-2022) dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar, berusaha dan berdoa untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1), penulis berhasil Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah dengan meraih gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 2022 dengan judul *“Strategi Promosi Pada Produk Tabungan Britama Dalam Meningkatkan Minat Nasabah Membuka Tabungan Di-PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jember”*, saat IAIN Jember bertransformasi menjadi UIN Kyai Haji Achmad Siddiq. Kemudian penulis mencoba berkecamuk di dunia pendidikan mengajar di SMA ASY-SYUJA'I dari tahun 2018- 2025. Saat ini, Penulis sedang menempuh Program Magister Strata 2 (S2) Ekonomi Syariah di Pascasarjana UIN Kyai Haji Achmad Siddiq Jember dan proses menyelesaikan tugas akhir penelitian Tesis yang berjudul *“Penerapan tata kelola di kebun karet Gunung Gambir Pada PTPN Nusantara 1 Regional 5 Perspektif Islam Desa Kaliglagah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember”*. Semoga dengan penulisan tugas akhir Tesis ini mampu memeberikan kontribusi positif bagi dunia perekonomian dan menambah khazanah ilmu pengetahuan serta manfaat dan berguna bagi semua.